LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT BIO FARMA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
31 DESEMBER 2025

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
PT BIO FARMA (PERSERO) AND IT'S SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2025



Biofarma
GROUP

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT BIO FARMA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING TO THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT BIO FARMA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES AS OF DECEMBER 31, 2025, AND 2024 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025, AND 2024

Atas nama Direksi, Kami yang bertanda tangan dibawah ini

On behalf of the Board of Directors, We the undersigned

1.	Nama	:	Shadiq Akasya	:	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. Pasteur No. 28 Bandung 40161, Jawa Barat	:	*Office Address*
	Nomor Telepon	:	(022) 2033755	:	*Phone Number*
	Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Rajawali VII BP. 17/2 RT 010/RW 015 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat	:	*Domicile as Stated in ID card*
	Posisi	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
2.	Nama	:	Jeffri Susanto	:	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. Pasteur No. 28 Bandung 40161, Jawa Barat	:	*Office Address*
	Nomor Telepon	:	(022) 2033755	:	*Phone Number*
	Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Janur Elok I Blok QE 2 No. 11, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta	:	*Domicile as Stated in ID card*
	Posisi	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance and Risk Management*	:	*Position*

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bio Farma (Persero) dan Entitas Anaknya.
2. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bio Farma (Persero) dan Entitas Anaknya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bio Farma (Persero) and its Subsidiaries.*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information contained in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner.*
   b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and
4. *We are responsible for the internal control system of PT Bio Farma (Persero) and its Subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 12 Juni 2026 / *June 12, 2026*

METERAI TEMPEL 10000 65628ANX113058265

Shadiq Akasya	**Jeffri Susanto**
Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
President Director	*Director of Finance and Risk Manajegement*

Heliantono&Rekan
Parker Russell

Aminta Plaza 7 floor #704
Jl. TB Simatupang Kav. 10
Jakarta 12310 - Indonesia
+62 21 7661348 - 50
www.heliantonorek.co.com
Branch: Bandung • Semarang • Surabaya • Sidoarjo

00951/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/VI/2026

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bio Farma (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bio Farma (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors

PT Bio Farma (Persero)

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bio Farma (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Heliantono & rekan - Registered Public Accountants KEP 093/KM.6/2001 is a member firm of Parker Russell International. Parker Russell is the brand under which the member firms of Parker Russell International (PRI) operate and provide professional services. Together, these firms form the Parker Russell International network. Parker Russell is often used to refer either to individual firm within the Parker Russell International network or to several or all of them collectively.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Informasi Lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung inkonsistensi material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Other Information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect material misstatements when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Heliantono & Rekan

00951

Ade Ikhwan
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0916 | *Public Accountant Registration No. AP.0916*
Jakarta, 12 Juni 2026 | *June 12, 2026*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

Daftar Isi / *Table of Contents*

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 270	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

Informasi Keuangan Tambahan / *Additional Financial Information*

	Lampiran/ *Appendix*	
Informasi Keuangan Tersendiri Entitas Induk:		*Separate Financial Information of the Parent Entity:*
Laporan Posisi Keuangan	i - ii	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	iii	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	iv	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	v	*Statement of Cash Flows*

**PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Catatan/ Notes	2025	2024 *)	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4,47,50,51	3.446.069.869	4.068.189.951	*Cash and cash equivalents*
Dana yang dibatasi penggunaannya	5	276.493.626	231.949.237	*Restricted funds*
Piutang usaha - neto	6,47,51			*Trade receivables - net*
Pihak berelasi		238.570.310	217.576.246	*Related parties*
Pihak ketiga		1.210.253.558	1.100.795.406	*Third parties*
Bagian jangka pendek piutang lain-lain - neto	7,47,51	106.204.766	186.558.857	*Current portion of Other receivables - net*
Persediaan - neto	8	4.354.609.003	4.009.960.977	*Inventories - net*
Uang muka pembelian	9	253.741.711	188.612.330	*Advances for purchases*
Biaya dibayar di muka	10	44.112.447	23.676.240	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar di muka	11a	824.696.964	897.431.411	*Prepaid taxes*
Aset kontrak		3.819.670	--	*Contract assets*
Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual	12	339.058.149	--	*Non-current asset held for sale*
Aset lancar lainnya		--	1.450.045	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		**11.097.630.073**	**10.926.200.700**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Bagian jangka panjang piutang lain-lain	7,47,51	252.504	292.886	*Non-current portion of other receivables*
Taksiran tagihan pajak	11a	147.315.862	140.726.805	*Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	11e	609.852.786	571.129.446	*Deferred tax assets*
Investasi pada entitas asosiasi	13	2.318.660	2.062.735	*Investment in associate*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14, 51	19.418.181	19.418.181	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	15, 51	20.999.392	9.975.769	*Financial assets at fair value through profit or loss*
Aset tetap - neto	16	16.148.830.145	16.765.031.667	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - neto	17	297.483.088	386.828.578	*Right-of-use assets - net*
Properti investasi	18	1.106.561.600	1.118.891.820	*Investment properties*
Aset takberwujud - neto	19	275.109.132	148.172.339	*Intangible assets - net*
Goodwill - neto	20	53.677.824	53.677.824	*Goodwill - net*
Aset agrikultur dan pengembangan	21	4.145.015	2.147.407	*Agricultural and development assets*
Aset tidak lancar lainnya	22	7.642.402	9.273.537	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**18.693.606.591**	**19.227.628.994**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**29.791.236.664**	**30.153.829.694**	***TOTAL ASSETS***

*) Direklasifikasi pada Catatan 57

**) as reclassified in Note 57*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	2025	2024 *)	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	23a,51,55	2.147.451.415	4.078.608.465	*Short-term bank loans*
Utang usaha - jangka pendek	24a,47,50,51			*Short-term trade payables*
Pihak berelasi		188.755.514	212.247.928	*Related parties*
Pihak ketiga		2.227.303.114	2.641.857.095	*Third parties*
Utang lain-lain	25,50,51	673.535.753	744.461.573	*Other payables*
Utang pajak	11b	476.408.421	405.400.785	*Tax payables*
Beban yang masih harus dibayar	26,50,51	1.130.929.718	926.508.627	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	27,51	207.722.497	384.496.828	*Short-term employee benefit liabilities*
Liabilitas kontrak	28	62.912.632	62.140.729	*Contract liabilities*
Provisi kewajiban likuidasi		35.660.307	32.247.319	*Liquidation liability provision*
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current portion of long-term liabilities:*
Utang bank jangka panjang	23b,47,51	2.234.865.288	1.330.005.036	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	31,51	62.253.964	66.632.593	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**9.447.798.623**	**10.884.606.978**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities, net of current portion:*
Utang bank jangka panjang	23b,47,51	3.609.990.730	2.869.863.330	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	31,51	59.272.042	92.728.362	*Lease liabilities*
Titipan hibah ditangguhkan	30	683.217.724	630.173.875	*Deferred grant deposit*
Liabilitas pajak tangguhan	11e	67.504.310	80.843.140	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	32,51	1.423.701.156	1.310.949.183	*Long-term employee benefit liabilities*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	29	245.948.094	257.294.090	*Financial liabilities at fair value through profit or loss*
Utang dana revitalisasi	33	24.625.424	24.625.424	*Revitalization fund payable*
Utang usaha - jangka panjang	24b			*Long-term trade payables*
Pihak berelasi		11.361.206	--	*Related parties*
Pihak ketiga		143.797.138	--	*Third parties*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**6.269.417.824**	**5.266.477.404**	***Total non-current liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**15.717.216.447**	**16.151.084.382**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 61.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.481.279 lembar saham	34	17.481.279.000	17.481.279.000	*Authorized capital - 61,000,000 shares with par value at Rp1,000,000 (full amount), per share respectively; Issued and fully paid up - 17,481,279 shares*
Tambahan modal disetor	35	(6.399.833.488)	(6.399.836.230)	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya	36	3.396.355.318	3.605.100.845	*Other equity component*
Saldo laba (akumulasi defisit)				*Retained earning (accummulated deficit)*
Dicadangkan	37a	1.246.833.875	1.246.833.875	*Appropriated*
Belum dicadangkan	37b	(1.934.231.703)	(2.433.673.957)	*Unappropriated*
Cadangan khusus		8.013.327	5.089.783	*Appropriated reserve*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		13.798.416.329	13.504.793.316	*Total equity attributable to the owners of the Parent Entity*
Kepentingan nonpengendali	38	275.603.888	497.951.996	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**14.074.020.217**	**14.002.745.312**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**29.791.236.664**	**30.153.829.694**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Direklasifikasi pada Catatan 57

*) *as reclassified in Note 57*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
OPERASI YANG DILANJUTKAN				***CONTINUING OPERATIONS***
PENDAPATAN NETO	39	14.673.733.988	15.093.104.348	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	40	(9.484.155.656)	(9.989.425.995)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		**5.189.578.332**	**5.103.678.353**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	41	(2.074.992.078)	(2.734.663.443)	*Selling expense*
Beban umum dan administrasi	42	(2.515.966.021)	(2.741.921.306)	*General and administrative expense*
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans	43	(666.475.539)	(595.225.719)	*Research, development and surveillance expense*
RUGI USAHA		**(67.855.306)**	**(968.132.115)**	***OPERATING LOSS***
Penghasilan lainnya, bersih	44	313.044.307	432.497.836	*Other income, net*
Pendapatan keuangan	45	474.788.327	349.711.014	*Finance income*
Beban keuangan	46	(681.157.861)	(735.266.951)	*Finance expense*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**38.819.467**	**(921.190.216)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Pajak kini	11c & 11d	(131.767.654)	(173.730.078)	*Current tax*
Pajak tangguhan	11c & 11e	47.262.107	36.176.354	*Deferred tax*
Jumlah beban pajak penghasilan - neto		**(84.505.547)**	**(137.553.724)**	***Total income tax expense, net***
OPERASI YANG DIHENTIKAN				***DISCONTINUED OPERATIONS***
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	14	--	(20.952.363)	*Loss for the year from discontinued operation*
RUGI TAHUN BERJALAN		**(45.686.080)**	**(1.079.696.303)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	32	(72.780.706)	(30.796.134)	*Remeasurement on defined benefit program*
Selisih revaluasi	16	(198.758.269)	237.159.166	*Revaluation surplus*
Pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		--	67.263.000	*Fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait		5.641.474	34.604.737	*Related income tax*
Total (rugi)/penghasilan komprehensif lain		(265.897.501)	308.230.769	*Total other comprehensive (loss)/income*
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(311.583.581)**	**(771.465.534)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS OF THE YEAR***
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Loss for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		111.880.056	(563.399.164)	*Owners of the parent*
Kepentingan nonpengendali	38	(157.566.136)	(516.297.139)	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(45.686.080)**	**(1.079.696.303)**	***Total***
Rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive loss for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		(89.212.879)	(279.976.156)	*Owners of the parent*
Kepentingan nonpengendali		(222.370.702)	(491.489.378)	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(311.583.581)**	**(771.465.534)**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to the owners of the parent entity*										
	Modal saham/ *Share capital*	Modal saham ditempatkan/ *Subscribed share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lain/ *Other equity component*	Saldo laba (akumulasi defisit)/ *Retained earning (accummulated deficit)*		Cadangan khusus/ *Appropriate reserve*	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk/ *Total equity attributable to the owners of the Parent Entity*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity/*	
					Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*					
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**17.481.279.000**	**-**	**(6.399.914.959)**	**3.475.660.347**	**1.246.833.875**	**(1.919.121.793)**	**-**	**13.884.736.470**	**1.001.196.785**	**14.885.933.255**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian Dividen dari Entitas Anak untuk Kepentingan Nonpengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	(1.899)	(1.899)	*Dividend Distribution from Subsidiary for Non-controlling interest*
Cadangan	--	--	--	--	--	--	5.089.783	5.089.783	--	5.089.783	*Reserve*
Selisih penjualan investasi jangka panjang				(48.847.000)	--	48.847.000	--	--			*Share Valuation Difference*
Rugi tahun berjalan	--	--	--	--	--	(563.399.164)	--	(563.399.164)	(516.297.139)	(1.079.696.303)	*Loss for the year*
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	283.423.009	--	--	--	283.423.009	24.807.761	308.230.770	*Other comprehensive income*
Penyesuaian dan selisih nilai transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	--	--	78.729	(105.135.511)	--	--	--	-- (105.056.782) --	(11.753.512)	(116.810.294) -	*Adjustment and difference in value from transaction of changes in equity of subsidiaries*
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**17.481.279.000**	**-**	**(6.399.836.230)**	**3.605.100.845**	**1.246.833.875**	**(2.433.673.957)**	**5.089.783**	**13.504.793.316**	**497.951.996**	**14.002.745.312**	***Balance as of December 31, 2024***
Pembagian Dividen dari Entitas Anak untuk Cadangan	--		--	--	--	(1.584.374)	2.923.544	1.339.170	--	1.339.170	*Dividend distribution from subsidiary for Reserve*
Rugi tahun berjalan	--	--	--	--	--	111.880.056	--	111.880.056	(157.566.136)	(45.686.080)	*Loss for the year*
Rugi komprehensif lain	--	--	--	(201.092.935)	--	--	--	(201.092.935)	(64.804.566)	(265.897.501)	*Other comprehensive loss*
Dampak dekonsolidasi entitas anak dalam likuidasi	--	--	--	(12.787.788)	--	394.281.768	--	-- 381.493.980	21.952	381.515.932	*Impact of deconsolidation of Subsidiaries in liquidation*
Penyesuaian dan selisih nilai transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	--	--	2.742		--	--	--	2.742	642	3.384	*Adjustment and difference in value from transaction of changes in equity of subsidiaries*
Penyelesaian program imbalan kerja Entitas Anak	--	--	--	5.135.196	--	(5.135.196)	--	--	--	--	*Settlement of employee benefit plan in subsidiaries*
Saldo tanggal 31 Desember 2025	**17.481.279.000**	**--**	**(6.399.833.488)**	**3.396.355.318**	**1.246.833.875**	**(1.934.231.703)**	**8.013.327**	**13.798.416.329**	**275.603.888**	**14.074.020.217**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BIO FARMA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		13.791.332.903	15.486.018.193	*Receipts from customers*
Pengeluaran kepada pemasok		(8.928.491.882)	(10.660.544.111)	*Payments to suppliers*
Pengeluaran kepada karyawan		(3.473.127.586)	(2.983.863.931)	*Payments to employees*
Penerimaan bunga		93.793.255	121.388.083	*Receipts from interest*
Pembayaran bunga		(400.308.019)	(340.369.629)	*Payments of interest*
Pembayaran pajak		(77.310.597)	(263.589.840)	*Payments of tax*
Penerimaan restitusi pajak		725.827.525	634.565.808	*Receipts from tax restitution*
Pembayaran beban lainnya		(1.500.132.675)	(1.299.274.191)	*Payments of other expenses*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		231.582.924	694.330.382	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap		(604.178.499)	(1.245.643.951)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil pelepasan aset tetap		474.511	553.176	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud		(147.917.379)	(76.329.095)	*Acquisition of intangible assets*
Penerimaan dividen		7.795.625	2.542.295	*Dividend receipt*
Perolehan properti investasi		--	(702.635)	*Acquisition of investment properties*
Penambahan investasi		(10.000.000)	(10.000.000)	*Acquisition of investment*
Penjualan investasi saham		--	229.000.000	*Additions of investment*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(753.825.742)	(1.100.580.210)	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penarikan pinjaman jangka pendek		1.845.329.255	5.241.685.181	*Proceeds from short-term bank loans*
Pembayaran pinjaman jangka pendek		(1.659.707.516)	(5.088.972.462)	*Payments of short-term bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang		--	313.361.098	*Proceeds from long-term bank loans*
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(233.891.674)	(269.130.697)	*Payments of long-term bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa		(103.727.610)	(83.489.942)	*Payment of lease liability*
Pembayaran pembiayaan konsumen		--	(46.969.586)	*Payments of consumer financing*
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya		(44.544.389)	(231.949.237)	*Restricted funds placement*
Pembagian dividen dari entitas anak untuk kepentingan nonpengendali		(8.565)	(1.899)	*Dividend distribution from subsidiaries to non-controlling interest*
Lain-lain				
Lain-lain		--	100.001	*Others*
Penerimaan hibah		53.043.849	54.275.901	*Grant receipts*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(143.506.650)	(111.091.642)	***Net cash used in financing activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(665.749.468)	(517.341.470)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas		44.487.554	79.223.949	*Effect of exchange rate differences on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		4.068.189.951	4.506.307.472	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
Dampak dekonsolidasi		(858.168)	--	*Impact of deconsolidation*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**3.446.069.869**	**4.068.189.951**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bio Farma (Persero) ("Perusahaan"), pada awalnya bernama "Parc Vaccinogene", didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 14 tanggal 6 Agustus 1890. Sejak tahun 1955, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 14 tahun 1955, Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pasteur. Pada tahun 1961, nama Perusahaan berubah menjadi PN Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum, status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1997, Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, dan Akta No. 30 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Maret 1998 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 6884 tanggal 16 Juli 2002.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Notaris No. 47 tanggal 26 September 2025 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU.AH-01.09-0344102 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025.

Perusahaan berdomisili di Jl. Pasteur No. 28 Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40161. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Bio Farma (Persero) ("the Company"), formerly "Parc Vaccinogene", was established based on Decree No.14 dated August 6, 1890 of the Governor of Netherlands Indies. Since 1955, under Emergency Law No. 14 year 1955, the legal status of the Company was changed to a state-owned company named Perusahaan Negara (PN) Pasteur. In 1961, based on the Government Regulation No. 80 year 1961, the Company's name changed to PN Bio Farma. Based on the Government Regulation No. 26 year 1978 regarding the Transformation of the State-Owned Company (PN) Bio Farma, the Company's status was changed to a Public Corporation (Perum).

Based on Government Regulation No. 1 year 1997 regarding the Transformation of the Public Company (Perum) Bio Farma Into a Limited Liability Corporation, the status of the Company was changed into a state-owned limited liability corporation (Persero). The Articles of Association of the Company's transformation was set out in Notarial Deeds No. 1 dated February 3, 1997, No. 188 dated June 20, 1997, and No. 30 dated October 21, 1997 of Muhani Salim, S.H., Notary in Jakarta. It has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-1423 HT.01.01 Th.98 dated March 5, 1998, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 Supplement No. 6884 dated July 16, 2002.

The Company's Articles of Association have been amended several times most recently by Notarial Deeds No. 47 dated September 26, 2025 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, regarding the amendment of the Articles of Association of PT Bio Farma (Persero). This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.AH-01.09-0344102 Year 2025 dated September 26, 2025.

The Company is domiciled at Jl. Pasteur No. 28 Bandung, West Java, Indonesia 40161. The Company's products are sold domestically and internationally.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Entitas induk utama dari Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah).

Kegiatan usaha yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pusat Statistik. Kegiatan usaha Perusahaan tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Notaris No. 37 tanggal 28 Agustus 2025, dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0230853 Tahun 2025.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, industri, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, pertanian, pergudangan, pendidikan, penyediaan akomodasi, *real estate*, rekreasi, aktivitas penunjang usaha lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Industri produk farmasi, bahan farmasi, alat kesehatan, radioisotop, dan produk *life science* lainnya;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknologi dan rekayasa, khususnya di bidang bioteknologi dan produk *life science*;
- Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis barang/jasa yang berkaitan dengan *life science* dan *healthcare industry*;

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia (Government).

The business activities as stated in the Company's Articles of Association have been adjusted to the Indonesian Standard Industrial Classification (ISIC) established by the Central Bureau of Statistics Regulation. The Company's business activities are set out in Article 2 of the Company's Articles of Association pursuant to Notarial Deed No. 37 dated August 28, 2025, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary, and have been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0230853 Year 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association, the purpose of the Company is to conduct business in the field of professional, scientific and technical activities, industry, wholesale and retail trade, human health activities, agriculture, warehousing, education, accommodation services, real estate, recreation, other business support activities as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

To achieve the objectives mentioned above, the Company performs core business activities as follows:

- *Manufacture of pharmaceutical products, pharmaceutical ingredients, medical devices, radioisotopes, and other life science products;*
- *Research and development of natural science, technology, and engineering, especially in the field of biotechnology and life science products;*
- *Professional activities, scientific and technical goods/services related to the life science and healthcare industry;*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (lanjutan)

- Aktivitas kesehatan manusia, apotek, *laboratorium*, klinik, layanan vaksinasi dan pelayanan kesehatan;
- Aktivitas informasi dan komunikasi, pengembangan portal web dan/atau digital platform untuk *healthcare* dan industri *life science*;
- Perdagangan, pemasaran dan distribusi baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya untuk produk-produk *life science*;
- Aktivitas pertanian, pengangkutan dan pergudangan, pendidikan, penyediaan akomodasi, real estate, rekreasi, penyewaan dan aktivitas penunjang usaha lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung serta kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk pendidikan dan pelatihan, pertanian, peternakan, pengembangbiakan hewan laboratorium properti, perkantoran, pergudangan, dan pariwisata.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

To achieve the objectives mentioned above, the Company performs major activities as follows: (continued)

- *Human health activities, pharmacies, laboratories, clinics, vaccination services and health services;*
- *Information and communication activities, development of web portals and/or digital platforms for healthcare and life science industries;*
- *Trading, marketing and distribution of both its own production and the production of other parties, both at domestic and global markets, especially for life science products;*
- *Agricultural activities, transportation and warehousing, education, accommodation services, real estate, recreation, leasing and other business support activities as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to gain profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.*

In addition to the main business activities as mentioned above, the Company can carry out supporting business activities as well as business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources for education and training, agriculture, farming, property laboratory animal breeding, offices, warehousing, and tourism.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Sifat usaha Perusahaan adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut:

- Pasar Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu Vaksin BCG, DPT, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan Vaksin DTP-HB-Hib.
- Pasar swasta nasional, yaitu melayani para distributor dalam negeri untuk memenuhi vaksin di luar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, antisera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia), PPD 2 TU).
- Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan Institusi lain yang telah melakukan kerja sama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi *World Health Organization* (WHO) baik dalam bentuk produk jadi maupun *bulk*, yaitu vaksin nOPV2, TT, Td, Bio TT, DTP, Polio, Campak, Pentabio, *bulk* Polio, *bulk* Difteri, *bulk* Pertusis, dan *bulk* Tetanus.

Berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 26 September 2025 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Tugas Ratmono	*President Commissioner*
Komisaris	Batara Imanuel Sirait	*Commissioner*
Komisaris	Didik Kusnaini	*Commissioner*
Komisaris	Nizar Yamanie	*Commissioner*
Komisaris	Roni Dwi Susanto	*Commissioner*
Komisaris	Relly Reagen	*Commissioner*
Komisaris	Pritta Basuki	*Commissioner*

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The nature of the Company's business is to serve domestic and global market needs as follows:

- *Government market, provides the Government vaccines for basic/regular immunization programs as follows: BCG, DPT, DT, TT, Polio, Measles, Hepatitis B, Td, and DTP-HB-Hib.*
- *National private market, provides domestic distributors for vaccines outside Government's regular immunization programs with BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Measles, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti-sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia) and PPD 2 TU).*
- *International markets, provides particularly the needs of United Nations Children's Fund (UNICEF) and other parties who have bilateral cooperation with the Company. The vaccines are those that meet the pre-qualification of the World Health Organization (WHO), both as finished products and bulk. are nOPV2, TT, Td, Bio TT, DTP, Polio, Measles, Pentabio, Polio bulk, Diphtheria bulk, Pertussis bulk, and Tetanus bulk vaccines.*

Based on Notarial Deed No. 47 dated September 26, 2025, of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Shadiq Akasya	*President Director*
Direktur Produksi dan Supply Chain	Sri Harsi Teteki	*Director of Production and Supply Chain*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	I.G.N. Suharta Wijaya	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Riset dan Pengembangan	Yuliana Indriati	*Director of Research and Development*
Direktur Human Capital	Iin Susanti	*Director of Human Capital*
Direktur Sales	Kamelia Faisal	*Director of Sales*

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 20 September 2024 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Notaris No. 17 tanggal 8 Agustus 2024 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Tugas Ratmono	*President Commissioner*
Komisaris	Ahmad M. Ramli	*Commissioner*
Komisaris	Didik Kusnaini	*Commissioner*
Komisaris	Nizar Yamanie	*Commissioner*
Komisaris	Roni Dwi Susanto	*Commissioner*
Komisaris	Batara Imanuel Sirait	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Shadiq Akasya	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Soleh Udin Al Ayubi	*Vice President Director*
Direktur Produksi dan Supply Chain	Sri Harsi Teteki	*Director of Production and Supply Chain*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	I.G.N. Suharta Wijaya	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Riset dan Pengembangan	Yuliana Indriati	*Director of Research and Development*
Direktur Human Capital	Iin Susanti	*Director of Human Capital*
Direktur Sales	Kamelia Faisal	*Director of Sales*

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, are as follows: (continued)

Based on Notarial Deeds No. 69 dated September 20, 2024 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta and Notarial Deed No. 17 dated August 8, 2024 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the compositon of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 was as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Audit	2025	2024	*Audit Committee*
Ketua[7)]	Roni Dwi Susanto	Roni Dwi Susanto	[7)]*Chairman*
Anggota[5)]	Tugas Ratmono	Tugas Ratmono	[5)]*Member*
Anggota[4)]	Pritta Basuki	Ahmad M. Ramli	[4)]*Member*
Anggota[7)]	Didik Kusnaini	Didik Kusnaini	[6)]*Member*
Anggota[6)]	Relly Reagen	-	[3)]*Member*
Anggota (Eksternal)[1)]	Sukamdani E. Basuki	Sugianto	[1)]*Member (External)*
Anggota (Eksternal)[2)]	Novia Artini	Ade Permadi	[2)]*Member (External)*

1) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-019/DK/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025.
2) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-018/DK/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025.
3) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-011/DK/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
4) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
5) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/DK/BF/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
6) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/DK/BF/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.
7) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/DK/BF/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.

1) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-019/DK/XI/2025 dated December 1, 2025.
2) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-018/DK/X/2025 dated October 20, 2025.
3) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-011/DK/VIII/2025 dated August 11, 2025.
4) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-08/DK/VII/2025 dated July 10, 2025.
5) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-09/DK/BF/08/2024 dated August 13, 2024.
6) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-04/DK/BF/06/2023 dated June 9, 2023.
7) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-02/DK/BF/05/2023 dated May 31, 2023.

Susunan Dewan Komite Pengembangan, Risiko dan GCG pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Audit	2025	2024	*Audit Committee*
Ketua[2)]	Batara Imanuel Sirait	Nizar Yamanie	[2)]*Chairman*
Anggota[5)]	Roni Dwi Susanto	Roni Dwi Susanto	[5)]*Member*
Anggota[3)]	Relly Reagen	Ahmad M. Ramli	[3)]*Member*
Anggota[1)]	Timotius Tarigan	Heru Nur Rahman	[1)]*Member*
Anggota[3)]	Nizar Yamanie	Batara Imanuel Sirait	[3)]*Member*
Anggota[2)]	Pritta Basuki	-	[2)]*Member*
Anggota (Eksternal)[4)]	Soniwell	Soniwell	[4)]*Member (External)*

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The composition of the Company's Board of Development, Risk and GCG Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Dewan Komite Pengembangan, Risiko dan GCG pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-019/DK/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025.
2) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-011/DK/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
3) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
4) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-006/DK/BF/04/2024 tanggal 1 April 2024.
5) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing 1.268 dan 1.226 karyawan (tidak diaudit).

b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The composition of the Company's Board of Development, Risk and GCG Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

1) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-019/DK/XI/2025 dated December 1, 2025.
2) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-011/DK/VIII/2025 dated August 11, 2025.
3) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-08/DK/VII/2025 dated July 10, 2025.
4) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-04/DK/BF/04/2024 dated April 1, 2024.
5) Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-03/DK/BF/03/2022 dated March 16, 2022.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company had 1,268 and 1,226 permanent employees, respectively (unaudited).

b. Subsidiaries

The Company has direct ownership interest of more than 50% in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kedudukan/ *Domicile*	Bidang Usaha/ *Scope of Activities*	Persentase Kepemilikan (Langsung dan Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct and Indirect)* 2025 %	2024 %	Mulai Kegiatan Usaha/ *Start of Operation*	Total Aset/ *Total Assets* 2025 Rp	2024 Rp
PT Kimia Farma Tbk (KAEF)	Jakarta	Industri kimia dan farmasi/ *Manufacturer of chemical and pharmaceutical*	89,82%	89,82%	1817	11.205.740.171	11.461.131.438
Kepemilikan melalui KAEF/ *Ownership through KAEF*							
(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA)	Jakarta	Apotek (ritel)/ *Pharmacy*	59,99%	59,99%	2003	2.249.399.297	2.469.259.050
Kepemilikan melalui KFA/ *Ownership through KFA*							
(i) PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)	Jakarta	Lab. klinik/ *Clinical lab*	99,99%	99,99%	2010	432.783.716	434.451.000
(b) PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)	Jakarta	Distribusi obat-obatan/ *Medicine distribution*	99,99%	99,99%	2003	2.173.405.482	2.300.915.788

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

The Company has direct ownership interest of more than 50% in the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kedudukan/ *Domicile*	Bidang Usaha/ *Scope of Activities*	Persentase Kepemilikan (Langsung dan Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct and Indirect)* 2025 %	2024 %	Mulai Kegiatan Usaha/ *Start of Operation*	Total Aset/ *Total Assets* 2025 Rp	2024 Rp
Kepemilikan melalui KAEF/ *Ownership through KAEF*							
(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA)	Jakarta	Apotek (ritel)/ *Pharmacy*	59,99%	59,99%	2003	2.249.399.297	2.469.259.050
Kepemilikan melalui KFA/ *Ownership through KFA*							
(i) PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)	Jakarta	Lab. klinik/ *Clinical lab*	99,99%	99,99%	2010	432.783.716	434.451.000
(b) PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)	Jakarta	Distribusi obat-obatan/ *Medicine distribution*	99,99%	99,99%	2003	2.173.405.482	2.300.915.788
(c) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)	Subang	Pabrik kina/ *Quinine factory*	51,00%	51,00%	1986	214.833.610	240.337.844
(d) PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)	Cikarang	Pabrik bahan baku obat/ *Drug materials plant*	75,00%	75,00%	2016	163.133.911	115.537.169
(e) PT Kimia Farma Dawaa, Co., Ltd.	Arab Saudi	Apotek (ritel) dan distribusi obat-obatan/ *Pharmacy (retail) and medicine distribution*	60,00%	60,00%	2018	--	--
(e) PT Phapros Tbk (PEHA)	Semarang	Pabrik obat-obatan/ *Drug plant*	56,77%	56,77%	1986	1.387.691.766	1.430.039.358
Kepemilikan melalui PEHA/ *Ownership through PEHA*							
(i) PT Lucas Djaja (LD)	Bandung	Industri farmasi/ *Pharmaceutical industry*	90,22%	90,22%	1968	289.398.566	188.750.889
Kepemilikan melalui LD/ *Ownership through LD*							
(i) PT Marin Liza Farmasi (MLF)	Bandung	Industri farmasi/ *Pharmaceutical industry*	99,91%	99,91%	1973	91.580.820	84.183.313
PT Indofarma Tbk (INAF)	Jakarta	Industri farmasi dan alat kesehatan/ *Manufacturer of pharmaceutical and medical devices*	80,66%	80,66%	1983	535.988.243	618.159.340
Kepemilikan melalui INAF/ *Ownership through INAF*							
(a) PT Indofarma Global Medika (IGM)	Jakarta	Pemasaran, perdagangan dan distribusi obat serta alat kesehatan/ *Marketing, trading and distribution of medicine and medical devices*	99,99%	99,99%	2000	--	64.063.854
Kepemilikan melalui IGM/ *Ownership through IGM*							
(i) PT Farmalab Indoutama	Jakarta	Laboratorium bio dan setara bio/ *Laboratorium bio availability & bio equivalent*	99,93%	99,93%	2014	--	12.055.511
PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)	Jakarta	Industri teknologi nuklir/ *Nuclear technology industry*	99,99%	99,99%	1996	4.112.583	3.990.998

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 862/KMK.06/2019 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, serta ditandatanganinya akta Penyertaan Perjanjian Pengalihan Saham No. 36 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seluruh saham seri B KAEF dan entitas anaknya milik Negara Republik Indonesia dialihkan kepada Perusahaan sebagai penambah Penyertaan Modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan.

Entitas anak yang berada di bawah KAEF:

(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA)

Berdasarkan Akta Notaris. 6 tanggal 4 Januari 2003 dari Notaris Ny. Imas Fatimah, S.H., di Jakarta, KAEF mendirikan dan melakukan penyertaan saham pada KFA sebesar 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor KFA, dengan jumlah investasi sebesar Rp139.999.999.900 (nilai penuh) atau 1.399.999.999 lembar saham.

Pada 27 Desember 2022, KAEF melepaskan 40% kepemilikan sahamnya di KFA berdasarkan Akta Notaris No. 43 dari Notaris M Nova Faisal, S.H., M.Kn., sehingga total persentase kepemilikan KAEF terhadap KFA per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 59,99%.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

By the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 76 of 2019 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company and Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 862/KMK.06/2019 concerning Determination of the Value of Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into Equity Capital of the Company, and the signing of the Deed of Participation of the Share Transfer Agreement No. 36 dated January 31, 2020 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the City Administration of South Jakarta, then all series B shares of KAEF and Its Subsidiaries owned by the Republic of Indonesia were transferred to the Company as an addition to the State Capital Participation in the share capital of the Company.

Subsidiaries under KAEF:

(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA)

Based on Notarial Deed No. 6 dated January 4, 2003 from Notary Mrs. Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, KAEF established and has placed an investment in KFA for 99.99% of the issued and paid-up capital of KFA, with a total investment of Rp139,999,999,900 (full amount) or 1,399,999,999 shares.

On December 27, 2022, KAEF relinquished 40% of its share ownership in KFA pursuant to Notarial Deed No. 43 from Notary M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., as a result, KAEF's percentage ownership in KFA as of December 31, 2025 and 2024 is amounted to 59.99%.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah KAEF: (lanjutan)

(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah KFA:

- PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)

  Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Desember 2008 dari Notaris Amsal Sulaeman, S.H., di Jakarta, KFA, mendirikan dan melakukan penyertaan saham pada KFD sebesar 99,96% dari modal ditempatkan dan disetor KFD, dengan biaya perolehan sebesar Rp12.495.000.000 (nilai penuh).

  Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Ida Farida, S.H., di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar KFD dari Rp50.000.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp250.000.000.000 (nilai penuh) dan modal ditempatkan dari Rp12.500.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp62.500.000.000 (nilai penuh) dimana tambahan modal disetor tersebut sepenuhnya ditempatkan oleh KFA, selaku pemegang saham mayoritas KFD.

  Dengan demikian persentase kepemilikan dan hak suara KFA meningkat menjadi sebesar 99,99%.

(b) PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Januari 2003 dari Notaris Ny. Imas Fatimah, S.H., di Jakarta, KAEF mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada KFTD sebesar 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor KFTD, dengan jumlah investasi sebesar Rp124.999.999.900 (nilai penuh) atau 1.249.999.999 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (continued)

Subsidiaries under KAEF: (continued)

(a) PT Kimia Farma Apotek (KFA) (continued)

Subsidiary under KFA:

- *PT Kimia Farma Diagnostika (KFD)*

  Based on Notarial Deed No. 1 dated December 2, 2008 from Notary Amsal Sulaeman, S.H., in Jakarta, KFA, established and placed investment in shares of KFD for 99.96% of the issued and paid-up capital of KFD, with the cost of acquisition amounting to Rp12,495,000,000 (full amount).

  Based on Notarial Deed No. 19 dated April 29, 2019 from Notary Ida Farida, S.H., in Jakarta, the shareholders agreed to increase KFD authorized capital from Rp50,000,000,000 (full amount) to Rp250,000,000,000 (full amount) and the Company's issued capital from Rp12,500,000,000 (full amount) to Rp62,500,000,000 (full amount) where the additional paid-up capital was fully placed by KFA, as the majority shareholder of KFD.

  As a result, KFA's ownership and voting rights increased up to 99.99%.

(b) PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)

Based on Notarial Deed No. 7 dated January 4, 2003 from Notary Mrs. Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, KAEF established and has placed an investment in KFTD for 99.99% of the issued and paid-up capital of KFTD, with a total investment of Rp124,999,999,900 (full amount) or 1,249,999,999 shares.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah KAEF: (lanjutan)

(c) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 25 Oktober 1986 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H., KAEF melakukan penyertaan saham pada SIL sebesar 51% dari modal ditempatkan dan disetor SIL, dengan jumlah investasi sebesar Rp19.603.240.000 (nilai penuh) atau 9.286 lembar saham.

(d) PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 25 Januari 2016 dari Notaris Windalina, S.H., di Jakarta, KAEF mendirikan dan melakukan penyertaan saham pada KFSP sebesar 75% dari modal ditempatkan dan disetor KFSP, dengan jumlah investasi sebesar Rp20.625.000.000 (nilai penuh) atau 206.250 lembar saham.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 12 Agustus 2020 dari notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp171.400.000.000 (nilai penuh), dengan persentase kepemilikan dan hak suara KAEF menjadi 80,67% dari modal ditempatkan dan disetor KFSP.

(e) PT Phapros Tbk (PEHA)

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Maret 2019 dari Notaris Utiek R. Abdurachman S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, KAEF mengakuisisi PEHA dengan nilai investasi sejumlah Rp1.361.000.000.000 (nilai penuh), dengan persentase kepemilikan KAEF sebesar 56,77%.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (continued)

Subsidiaries under KAEF: (continued)

(c) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

Based on Notarial Deed No. 33 dated October 25, 1986 from Notary Komar Andasasmita, S.H., KAEF has placed an investment in SIL for 51% of the issued and paid-up capital of SIL, with a total investment of Rp19,603,240,000 (full amount) or 9,286 shares.

(d) PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)

Based on Notarial Deed No. 11 dated January 25, 2016 from Notary Windalina, S.H., in Jakarta, KAEF established and has placed an investment in KFSP for 75% of the issued and paid-up capital of KFSP, with a total investment of Rp20,625,000,000 (full amount) or 206,250 shares.

The latest amendment to the Articles of Association based on Notarial Deed No. 40 dated August 12, 2020 from notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., issued and paid-up capital of Rp171,400,000,000 (full amount), with KAEF percentage of ownership and voting rights being 80.67% of the issued and paid-up capital of KFSP.

(e) PT Phapros Tbk (PEHA)

Based on Notarial Deed No. 31 dated March 27, 2019 from Notary Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notary in Jakarta, KAEF acquired PEHA with investment value of Rp1,361,000,000,000 (full amount), with a percentage of KAEF ownership of 56.77%.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah KAEF: (lanjutan)

(e) PT Phapros Tbk (PEHA) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah PEHA:

– PT Lucas Djaja (LD)

Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., No. 56 pada tanggal 29 September 2018, PEHA mengakuisisi 55,00% saham LD yang bergerak dalam bidang industri farmasi dengan jumlah imbalan atas akuisisi sebesar Rp192.500.000.

Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., No. 44 pada tanggal 30 November 2018, PEHA meningkatkan kepemilikan sahamnya di LD dari 55,00% menjadi 90,22% dengan nilai sebesar Rp315.754.548.

Entitas anak yang berada di bawah LD:

- PT Marin Liza Farmasi (MLF)

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 23 Oktober 2015 dari Notaris Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., LD mengakuisisi 99,91% kepemilikan saham PT MLF, entitas yang bergerak di bidang industri farmasi, dengan total imbalan sebesar Rp3.497.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (continued)

Subsidiaries under KAEF: (continued)

(e) PT Phapros Tbk (PEHA) (continued)

Subsidiary under PEHA:

– *PT Lucas Djaja (LD)*

Based on Notarial Deed No. 56 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated September 29, 2018, PEHA acquired 55.00% of the share capital of LD which operates in pharmaceutical industry with total consideration for the acquisition amounted to Rp192,500,000.

Based on Notarial Deed No. 44 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated November 30, 2018, PEHA increased its ownership from 55.00% to 90.22% of the share capital of LD with total consideration amounted to Rp315,754,548.

Subsidiary under LD:

- PT Marin Liza Farmasi (MLF)

Based on Notarial Deed No. 25 dated October 23, 2015, from Notary Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., LD acquired 99.91% of the shares of PT MLF, a pharmaceutical manufacturing company, for a total consideration of Rp3,497,000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 862/KMK.06/2019 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Bio Farma (Persero), Perusahaan, serta ditandatanganinya Akta Penyertaan Perjanjian Pengalihan Saham No. 36 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seluruh saham seri B INAF milik Negara Republik Indonesia dialihkan kepada Perusahaan sebagai penambah penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan.

Entitas anak yang berada di bawah INAF:

- PT Indofarma Global Medika (IGM)

  Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Januari 2000 dari Notaris Ny. Lia Muliani, S.H. pengganti Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian IGM tersebut telah diubah dengan Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2000 dari Notaris Ny. Vita Buena, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., modal dasar IGM sebesar Rp160.000.000 yang terbagi atas 160.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

  Berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 16 Juni 2004, INAF mengonversikan utang IGM sebesar Rp80.000.000 sebagai tambahan modal disetor yang terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham menjadi 99,99%.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF)

By the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 76 of 2019 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company and Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 862/KMK.06/2019 concerning Determination of the Value of Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into Equity Capital of PT Bio Farma (Persero), the Company, and the signing of the Deed of Participation of the Share Transfer Agreement No. 36 dated January 31, 2020 made in the presence of Aulia Taufani, S.H., Notary in the City Administration of South Jakarta, then all series B shares of INAF owned by the Republic of Indonesia were transferred to the Company as an addition to the state capital participation in the share capital of the Company.

Subsidiaries under INAF:

- *PT Indofarma Global Medika (IGM)*

  Based on Deed No. 1 dated January 4, 2000, drawn up before Notary Mrs. Lia Muliani, S.H., as a substitute for Notary Sutjipto, S.H., IGM's deed of establishment was amended by Deed No. 23 dated June 9, 2000, drawn up before Notary Mrs. Vita Buena, S.H., acting as a substitute for Notary Sutjipto, S.H. IGM authorized capital amounts to Rp160,000,000, divided into 160,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

  Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (RUPS) dated June 16, 2004, INAF converted IGM's debt amounting to Rp80,000,000, into additional paid-in capital, consisting of 80,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. As a result, the share ownership composition became 99.99%.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Entitas anak yang berada di bawah INAF: (lanjutan)

- PT Indofarma Global Medika (IGM) (lanjutan)

  Pada tanggal 10 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Indofarma Global Medika (IGM) berada dalam Kepailitan melalui Putusan No. 144/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, (Putusan Pailit), yang mengakibatkan Laporan Keuangan INAF per 31 Desember 2025 tidak lagi mengonsolidasikan Laporan Keuangan IGM (Catatan 48).

Entitas anak yang berada di bawah IGM:

- PT Farmalab Indoutama (FLIU)

  Pada awalnya INAF mempunyai kepemilikan tidak langsung atas FLIU melalui IGM. Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 16 dari Notaris Andalia Farida, S.H, M.H., tanggal 21 September 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071146.AH01.02 tanggal 16 Oktober 2020, dilakukan perubahan persentase kepemilikan PT Indofarma Tbk melalui PT Indofarma Global Medika menjadi 99,93%.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

Subsidiaries under INAF: (continued)

- *PT Indofarma Global Medika (IGM) (continued)*

  On February 10, 2025, the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has decided that PT Indofarma Global Medika (IGM) is in Bankruptcy through Decision No. 144/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, (Bankruptcy Decision), which resulted in INAF financial statements as of December 31, 2025 no longer consolidated the financial statements of IGM (Note 48).

Subsidiary under IGM:

- *PT Farmalab Indoutama (FLIU)*

  Originally, INAF had indirect ownership in FLIU through IGM. Based on Notarial Deed of Amendment to the Articles of Association No. 16 from the Notary Andalia Farida, S.H, M.H., dated September 21, 2020 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0071146.AH01.02 dated October 16, 2020, there has been a change in the percentage of ownership PT Indofarma Tbk through PT Indofarma Global Medika to 99.93%.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham INUKI dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham INUKI, serta ditandatanganinya Akta Pernyataan Perjanjian Pengalihan Saham No. 47 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seluruh saham seri B INUKI milik Negara Republik Indonesia dialihkan kepada Perusahaan sebagai penambah Penyertaan Modal Negara ke dalam saham Perusahaan.

Pada tanggal 18 April 2023, INUKI dikenakan larangan untuk mengoperasikan instalasi produksi elemen bakar reaktor riset serta instalasi produksi radioisotop dan radiofarmaka sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No. 000028.275.00.180423 tentang Pencabutan Izin Operasi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Surat No. T-1593/PI 01/IV/2023 perihal Larangan Operasi Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka, dan Surat No. 1595/PI 01/IV/2023, Perihal Pencabutan Izin Operasi IPEBRR, INUKI berencana melakukan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan aktiva tetap dan persediaan INUKI kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

By the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 10 of 2022 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to INUKI and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 183/KMK.06/2022 concerning Determination of the Value of Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into Equity Capital of INUKI, and the signing of the Deed of Share Transfer Agreement No. 47 dated July 15, 2022 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the City Administration of South Jakarta, thus all series B shares of INUKI owned by the Republic of Indonesia were transferred to the Company as an addition to the State Capital Participation in the share capital of the Company.

On April 18, 2023, INUKI was subjected to prohibition from operating the research reactor fuel element as well as the radioisotope and radiopharmaceutical production facilities, in accordance with the Decree of the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) No. 000028.275.00.180423 Regarding the Revocation of the Operating License for the Production Installation of Elemental Fuel Reactor Research (IPEBRR), Letter No. T-1593/PI 01/IV/2023 regarding the Prohibition of Operations of the Radioisotope and Radiopharmaceutical Production Installation, and Letter No. 1595/PI 01/IV/2023, regarding the Revocation of IPEBRR Operating License, INUKI plans to write-off and/or transfer the INUKI's fixed assets and inventories to the National Research and Innovation Agency (BRIN).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements and statement of compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

New accounting standards

On January 1, 2025, the Group adopted the new and revised statement of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards effective from that date. Adjustments to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions of the respective standards and interpretations. The adoption of the new and revised standards and interpretations did not result in major changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial year:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Standar akuntansi baru (lanjutan)

Amendemen PSAK 221, Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

PSAK 221 menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Amandemen PSAK 221 merujuk pada Amandemen IAS 21 tentang *Lack of Exchangeability.* Amandemen ini mensyaratkan entitas menerapkan pendekatan yang konsisten dalam menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan ke mata uang lain, dan, jika tidak, menentukan kurs yang digunakan serta pengungkapan yang diberikan.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109, Instrumen Keuangan, dan PSAK 107, Instrumen Keuangan, Pengungkapan

Amendemen ini menjelaskan terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan dengan kas menggunakan sistem pembayaran elektronik, klasifikasi aset keuangan, pengungkapan terkait investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan pengungkapan terkait persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements and statement of compliance (continued)

New accounting standards (continued)

Amendments to PSAK 221, Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

PSAK 221 explains how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and how to translate financial statements into a presentation currency.

The amendments to PSAK 221 refer to the amendments to IAS 21: Lack of Exchangeability. These amendments require an entity to apply a consistent approach in assessing whether a currency is exchangeable into another currency, and, when it is not, to determine the exchange rate to be used and the disclosures to be provided.

Accounting standards issued but not yet effective

Effective January 1, 2026

Amendments to PSAK 109, Financial Instruments, and PSAK 107, Financial Instruments, Disclosures

This amendment clarifies the derecognition of financial liabilities with cash using electronic payment systems, the classification of financial assets, disclosures related to investments in equity instruments designated as at fair value through other comprehensive income, and disclosures related to contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109, Instrumen Keuangan, dan PSAK 107, Instrumen Keuangan, Pengungkapan (lanjutan)

Amendemen ini mengatur pertimbangan sebagai pembeli neto dalam menerapkan ketentuan "penggunaan sendiri". Amendemen ini menjelaskan penerapan akuntansi lindung nilai jika kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai serta amendemen ini mensyaratkan pengungkapan agar pengguna dapat memahami risiko dari kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam.

Amandemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan *(pooling of interest)* dan pelepasan di ekuitas *(disposal in equity)* sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338.

Perubahan utama dalam revisi ini mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Amandemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements and statement of compliance (continued)

Effective January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109, Financial Instruments, and PSAK 107, Financial Instruments, Disclosures (continued)

This amendment regulates the consideration as a net buyer in applying the provisions of "own use". This amendment explains the application of hedge accounting if a contract that refers to weather-dependent electricity is designated as a hedging instrument, and requires disclosures so that users can understand the risks from contracts that refer to weather-dependent electricity.

This amendment is not expected to have a material impact on the consolidated financial statements.

PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities Under Common Control

This revision encompasses the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as accounting concepts utilized in PSAK 338.

Key amendments in this revision include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity. This revision also addresses references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-business combination information in instances where the application of the pooling of interest method is deemed impractical.

This amendment is not expected to have a material impact on the consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2027

PSAK 118, Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 118, Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201, Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 118 memberikan persyaratan untuk penyajian subtotal laba (rugi) operasi, laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan, serta laba (rugi).

Selain itu, PSAK 118 juga mensyaratkan penghasilan dan beban untuk diklasifikasikan ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, serta pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan.

PSAK 118 juga mengatur mengenai pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen ("UKTM") dengan tujuan mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. PSAK 118 menjelaskan mengenai peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan serta prinsip dan persyaratan mengenai agregasi dan disagregasi informasi. Prinsip tersebut berlaku baik dalam penyajian di laporan keuangan maupun dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Saat ini, Grup tengah berupaya mengidentifikasi dampak yang akan ditim*bulk*an terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements and statement of compliance (continued)

Effective January 1, 2027

PSAK 118, Presentation and Disclosure in Financial Statements

The Indonesian Audit Board (DSAK IAI) has ratified PSAK 118, Presentation and Disclosure in Financial Statements. PSAK 118 will replace PSAK 201, Presentation of Financial Statements. PSAK 118 provides requirements for the presentation of subtotals of operating income (loss), income (loss) before financing and income taxes, and profit (loss).

In addition, PSAK 118 also requires income and expenses to be classified into operating, investing, and financing categories, as well as income taxes and discontinued operations.

PSAK 118 also addresses the disclosure of Management-defined Performance Measures ("MPM"), which are intended to communicate management's perspective on the entity's overall financial performance. The standard elaborates on the role of the primary financial statements and the notes to the financial statements, and sets out principles and requirements related to the aggregation and disaggregation of information. These principles apply both to the presentation within the financial statements and to the disclosures. The Group is currently assessing the potential impact of PSAK 118 on its consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 119, Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan

DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 119, Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan. PSAK 119 mengatur persyaratan pengungkapan yang dapat diterapkan oleh entitas sebagai pengganti persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian, tersendiri, atau laporan keuangan individual jika dan hanya jika pada akhir periode pelaporan entitas merupakan entitas anak tanpa akuntabilitas publik dimana entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia bagi publik yang mematuhi SAK Indonesia. Amendemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas Anak
Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal di mana Grup kehilangan pengendalian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements and statement of compliance (continued)

Effective January 1, 2027 (continued)

PSAK 119, Subsidiaries Without Public Accountability: Disclosures

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK IAI) has issued PSAK 119, Subsidiaries Without Public Accountability: Disclosures. PSAK 119 sets out disclosure requirements that may be applied by an entity as an alternative to the disclosure requirements in other PSAKs. An entity may elect to apply this Standard in its consolidated, separate, or individual financial statements if, and only if, at the end of the reporting period, the entity is a subsidiary without public accountability whose parent prepares consolidated financial statements that are available to the public and comply with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). This amendment is not expected to have a material impact on the consolidated financial statements.

The adoption of these amended and interpretations of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current period or prior financial years.

b. Principles of consolidation

i. The Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontingensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

i. The Subsidiaries (continued)

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

Imbalan kontingensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 239 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dalam laporan laba rugi. Imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

i. The Subsidiaries (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in accordance with PSAK 239 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas di mana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas (lihat poin (iii) di bawah), setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

iii. Metode Ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari *investee* atas pendapatan komprehensif lain.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

ii. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting (see (iii) below), after initially being recognised at cost.

iii. Equity Method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iii. Metode Ekuitas (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

iv. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan nonpengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan nonpengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

iii. Equity Method (continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

iv. Changes in Ownership Interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.

In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Perubahan Kepemilikan (lanjutan)

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi jika diperlukan.

c. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

iv. Changes in Ownership Interests (continued)

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

c. Business Combination and Goodwill

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila pada periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara:

i. Nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas
ii. Jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combination and Goodwill (continued)

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a change in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income date amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. In its consolidated financial statements, during the measurement period the acquirer adjusted, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as at the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as at that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of:

i. The aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over
ii. The net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

d. Kombinasi Bisnis dan Entitas Sepengendali

PSAK 338 mengharuskan entitas untuk mencatat transaksi kombinasi bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 103) di mana entitas atau bisnis gabungan dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum dan sesudah penggabungan, dan pengendalian tidak bersifat sementara dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Transaksi kombinasi bisnis antar entitas sepengendali, seperti pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi oleh entitas dalam kelompok yang sama, tidak merupakan perubahan kepemilikan dalam hal substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak akan menghasilkan untung atau rugi untuk grup bisnis secara keseluruhan atau untuk entitas individu dalam grup bisnis.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combination and Goodwill (continued)

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

d. Business Combination on Entities Under Common Control

PSAK 338 requires an entity to account a business combination (as defined in PSAK 103) in which the combining entities or businesses ultimately are controlled by the same party, both before and after the combination, and the control is not transitory using pooling of interest method.

Business combination transactions among entities under common control, such as a transfer of a business conducted within a framework of reorganization by entities in the same group, does not constitute a change of ownership in terms of economic substance, thus such transaction shall not result in a gain or loss for the business group as a whole or for the individual entity within the business group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan Entitas Sepengendali (lanjutan)

Karena kombinasi bisnis dari entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi dari kepemilikan bisnis yang berubah, maka transaksi tersebut dicatat sebesar nilai tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas gabungan, untuk periode di mana kombinasi bisnis terjadi dan untuk periode komparatif yang disajikan, harus disajikan seolah-olah telah digabungkan sejak awal periode ketika entitas yang bergabung berada di bawah kendali yang sama. Nilai tercatat elemen laporan keuangan adalah nilai tercatat entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan suatu entitas tidak boleh termasuk penyatuan kepemilikan yang terjadi pada tanggal setelah akhir periode pelaporan.

Pengurangan entitas dalam suatu pengurangan bisnis di antara entitas sepengendali mengakui perbedaan antara imbalan yang diterima dan nilai tercatat dari bisnis yang dikurangi dalam ekuitas dan menyajikannya dalam akun tambahan modal disetor atau selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

e. Transaksi dan penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

(a) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Business Combination on Entities Under Common Control (continued)

Since a business combination of entities under common control does not result in a change in the economic substance of ownership of businesses which are exchanged, such transaction is recorded at carrying amount based on the pooling-of interest method.

In applying the pooling-of-interests method, the financial statements elements of the combining entities, for the period in which the business combination occurs and for the comparative periods presented, shall be presented as if they had been combined since the beginning of the period when the combining entities are under common control. The carrying amounts of the financial statements elements are the carrying amounts of the combining entities in the business combination of entities under common control. An entity's financial statements shall not include a pooling-of interests which occurs on a date after the end of the reporting period.

Disposing entity in a business disposal among entities under common control recognizes the difference between the consideration received and the carrying amount of the disposed business in equity and presents it in the additional paid-in capital account or difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control.

e. Foreign Currency Transaction and Translations of Financial Statements

(a) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dan penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

(b) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian ini ditangguhkan di dalam ekuitas jika terkait dengan lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat atau disebabkan oleh sebagian investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri.

Akun aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign Currency Transaction and Translations of Financial Statements (continued)

(b) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are generally recognised in the profit or loss. They are deferred in equity if they relate to qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges or are attributable to part of the net investment in a foreign operation.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting period are translated into Rupiah using the middle rates of Bank Indonesia at:

	2025	2024	
Poundsterling	22.666	20.333	*Poundsterling*
Franc Swiss	21.274	17.921	*Swiss Franc*
Euro	19.753	16.851	*Euro*
Dolar Amerika Serikat	16.782	16.162	*United States Dollar*
Dolar Singapura	13.069	11.919	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	11.255	10.082	*Australian Dollar*
Yuan Cina	2.401	2.214	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	2.157	2.082	*Hong Kong Dollar*
Rupee India	187	190	*Indian Rupee*
Yen Jepang	108	102	*Japanese Yen*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam menjalankan aktivitas operasinya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Sesuai dengan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", yang menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklasifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh manajemen entitas, yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya yang berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties

In the normal course of business activities, the Group has transactions with certain parties which are related to them.

Based on the PSAK 224 "Related Parties Disclosure" which has added related parties requirements and classified the disclosure of compensation paid by the management entity, related parties are defined as follows:

i) A person or a close member of their family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control of the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (meaning a parent, subsidiary, and any subsequent subsidiary that is related to the other entity).
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture of a member of a Perusahaan of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity administers the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b) Suatu entitas berelasi entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dan saldo yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang dengan pihak ketiga maupun yang tidak, telah diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 47).

g. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas yaitu apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties (continued)

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply: (continued)

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. The person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. The entity, or a member of a group of which the entity is a member, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

All transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Note 47).

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

i) Classification

The Group classifies its financial assets into the following categories:

- *Financial assets measured at amortised costs; and*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

i) Klasifikasi (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii) Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

i) Classification (continued)

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

ii) Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

ii) Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Terdapat 3 kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

i). Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii). Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

ii) Measurement (continued)

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are 3 measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

i). Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

ii). FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

ii) Pengukuran (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Terdapat 3 kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya: (lanjutan)

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam pendapatan/(beban) operasi lainnya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii). Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

ii) Measurement (continued)

Debt instrument (continued)

Subsequent measurement of debt instruments depends on the group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are 3 (three) measurement categories into which the group classifies its debt instruments: (continued)

When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other operating income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest method.

iii). FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss.

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

ii) Pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas (lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

iii) Penurunan nilai aset keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) yang menggunakan provisi KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

ii) Measurement (continued)

Equity instruments (continued)

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gain/ (losses) in the consolidated statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at fair value other comprehensive income are not reported separately from other changes in fair value.

iii) Impairment of financial assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss (ECL) which uses a lifetime expected loss provision on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

When making the assessment, the Group consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iii) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk kas dan setara kas, Grup menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Kemungkinan gagal bayar dan kerugian karena gagal bayar tersedia untuk umum dan dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut dalam basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak awal periode, penyisihan akan didasarkan pada KKE seumur hidup. Perusahaan menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit terkemuka untuk menentukan apakah instrumen utang memiliki Peningkatan Signifikan Risiko Kredit (PSRK) dan untuk memperkirakan KKE.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar krediturnya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang adalah lebih tepat.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iii) Impairment of financial assets (continued)

For cash and cash equivalents, the Group applies the low credit risk simplification. Default possibilities and losses due to default are publicly available and are considered low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECL on these instruments on a 12 months basis. However, if there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on ECL for life. Companies use ratings from leading credit rating agencies to determine whether a debt instrument has an Significant Increase Credit Risk (SICR) and to estimate ECL.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *When there is a breach of financial covenants by the debtor; or.*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a longer default criteria is more appropriate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iii) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Definisi gagal bayar (lanjutan)

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

iv) Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mengalihkan serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang dialihkan, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang dialihkan dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iii) Impairment of financial assets (continued)

Definition of default (continued)

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and fair value through other comprehensive income. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

iv) Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan aset keuangan (lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (FVOCI), keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (SBE).

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iv) Derecognition of financial assets (continued)

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at fair value through other comprehensive income (FVOCI), the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL) or "at amortized cost" using the effective interest rate (EIR) method.

Financial liabilities at amortized cost.

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the EIR.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI *(Solely Payment of Principal and Interest)*, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga memenuhi kondisi ini.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Effective interest rate method

The effective interest rate is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Assessing whether contractual cash are only principal and interest payments

For the purposes of this assessment, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding over period of time and for other underlying borrowing risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as a profit margin.

In assessing whether a contractual cash flow is an SPPI (Solely Payment of Principal and Interest), the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains contractual provisions that could change the timing or amount of the contractual cash flow so that it would satisfy this condition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:
- Kejadian kontingensi yang mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penempatan ulang suku bunga berkala).

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap imbalan yang dibayarkan setelah dikurangi setiap imbalan yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan awal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Assessing whether contractual cash are only principal and interest payments (continued)

In making this assessment, the Company considers:
- *When there is a breach of financial covenants by the debtor;*
- *Leverage feature;*
- *Accelerated repayment requirements and facility extension;*
- *Provisions that limit the Company's claims on cash flows from certain assets (such as non-recourse loans); and*
- *Features that modify the time value of money (such as periodic re-adjustment of interest rates).*

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan (lanjutan)

Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

h. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan tetapi dalam waktu satu tahun sejak tanggal akuisisi yang memiliki risiko perubahan nilai wajar yang tidak signifikan, diklasifikasikan sebagai investasi sementara dan disajikan sebagai aset lancar.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar yang digunakan untuk kas dan setara kas adalah nilai nominalnya.

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro) dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening yang dibatasi penggunaannya dan/atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi sebagai aset lancar jika jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition of financial liabilities (continued)

If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

h. Short-term Investments

Short-term investments comprise of time deposits with maturities of more than three months but within one year from the acquisition date that are subject to an insignificant risk of changes in their fair value, are classified as temporary investments and presented as current assets.

i. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are measured at fair value. The fair value used for cash and cash equivalents is their nominal value.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Current accounts which are restricted and/or used as collateral are classified as current assets when the maturities are less than 12 months after the end of reporting period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas kerugian penurunan nilai.

k. Uang Muka Pembelian

Uang muka pembelian adalah bagian dari kontrak karena dibayar di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, setelah pekerjaan selesai, uang muka tersebut dibebankan pada pekerjaan tersebut.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Trade and Other Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), receivables are classified as current assets. If not, receivables are presented as non-current assets.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Company.

Trade and other receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment loss.

k. Advances for Purchases

Advances for purchases are part of contractually due that is paid in advance for goods or services. Advances are recorded as assets on the consolidated statement of financial position, after the work is completed, the advance payment will be charged to the work.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their term using the straight-line method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Persediaan

1. Penilaian persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2. Biaya perolehan persediaan

Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai *(present location and condition)*, kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu:

- Produk dalam proses untuk barang curah (*bulk*) penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
- Produk dalam proses vaksin untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase produk *reject* saat dikemas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Inventory

1. Measurement

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Cost is determined using weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2. Inventory costs

Inventories are stated at acquisition cost, which includes such purchase price, the Value Added Tax (VAT) that cannot be credited, conversion costs, and other costs incurred in bringing inventories to present location and conditions, except for inventories of products in process which are recorded at the percentage of cost of goods in process on cost of finished goods, those are:

- *The valuation of work in process of bulk goods (bulk) is measured equivalent to which will be formulated to final products or products to be sold.*
- *Work-in-process for final products are carried out based on the average cost of production (HPP) without packaging materials cost of production (HPP) of applied vaccines minus the percentage of reject products when packed.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Persediaan (lanjutan)

3. Persediaan bahan baku, bahan penolong, dan perlengkapan

   Persediaan bahan baku, penolong, dan perlengkapan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

4. Persediaan produk dalam proses

   Persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan, dan pada akhir tahun buku dinyatakan sebesar beban pokok produksi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

   Persediaan produk dalam proses terdiri dari:

   - *Bulk* hasil produksi yang telah lulus uji (*quality control*) dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan siap untuk dijual sebelum dilakukan pengemasan.
   - Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah botol, ampul, *vial, uniject blank,* dan telah lulus uji (*quality control*) sebelum diberi *leaflet* dan dimasukkan ke dalam dus.

5. Persediaan produk jadi dari produksi sendiri

   Biaya persediaan produksi sendiri ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

6. Persediaan produk jadi *trading partnership*

   Biaya persediaan *trading partnership* ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Inventory (continued)

3. Raw materials, auxiliary materials and supplies

   Raw, auxiliary materials, and supplies are stated at the lower of cost and net realizable value, which are determined using the weighted average method.

4. Work-in-process

   Work-in-process inventory is computed at quarterly basis based on the applied production cost. At the end of book year the inventory is stated at production cost using weighted average method.

   Work-in-process inventory consists of:

   - *Bulk products which are already passed the quality control tests and ready to be formulated and converted to finished goods inventory and available for sale, prior to packing process.*
   - *Final production output packaged in bottles, ampoules, vials, and uniject blanks, having passed quality control, prior to leaflet insertion and carton packaging.*

5. Finished goods from production inventory

   The cost of inventory of the Group's production is determined using weighted average method.

6. Finished goods from trading partnership

   The cost of trading partnership inventory is determined by weighted average method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Persediaan (lanjutan)

7. Persediaan dalam perjalanan

Persediaan dalam perjalanan adalah persediaan bahan baku, bahan penolong, perlengkapan, barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima, tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Grup. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPBI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".

8. Persediaan dalam karantina

Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku, bahan penolong, perlengkapan maupun barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima atau tiba di Grup, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus uji. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke akun "Aset Lancar Lainnya".

9. Penurunan nilai persediaan

Penurunan nilai persediaan menjadi sebesar nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban dalam periode terjadinya pemulihan.

Persentase penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Persentase ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Inventory (continued)

7. Goods in transit

Goods in transit are raw materials, auxiliaries, supplies, merchandises that have been arrived, received at the port and according to the delivery terms, is belonging to the Group. Particularly for imported goods are made a temporarily Memorandum of the Calculation of Imported Goods (NPBI) as the basis for recording the value of "Goods in Transit".

8. Inventory in quarantine

Inventory in quarantine is the supply of raw materials, auxiliary materials, equipment or merchandise that at the end of the reporting period of goods has been received or arrived in the Group, but has not qualified the delivery of goods because it has not passed the test. Inventories in quarantine are grouped into "Other Current Assets" account.

9. Impairment of inventory

Impairment of inventory value to be as net realizable value is recognized as expense in the period in which it is incurred. The recovery of inventory value after impairment is recognized as decrease in expense in the period in which it is incurred.

The percentage decrease in the value of inventories is recognized if the carrying amount exceeds the net realizable value. Percentage is determined based on the estimated use or sale of each type of inventory in the future.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal aset tetap kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Tanah dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition fixed assets except land are carried at its cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Land are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in this case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged.

A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is charge to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan terhadap aset tetap, selain tanah, dihitung dengan metode garis lurus *(straight-line method)* dan saldo menurun ganda *(double declining balance)*, berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed Assets (continued)

Depreciation of fixed assets, except land, has been computed on a double declining balance and a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan/ *Depreciation Method*	Tahun/ *Years*	Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rates*	*Category of Fixed Assets*
Bangunan dan prasarana	Garis lurus/ *Straight line*	10-40	*2,5%-10%*	*Building and infrastructure*
Mesin dan instalasi	Garis lurus/ *Straight line*	8-16	*6,25%-25%*	*Machinery and installation*
	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*			
Perabot dan peralatan	Garis lurus/ *Straight line*	4-8	*12,5%-50%*	*Office equipment*
	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*			
Aset pengampunan pajak	Garis lurus/ *Straight line*	8-16	*6,25%-25%*	*Tax amnesty assets*
	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*			
Renovasi bangunan	Garis lurus/ *Straight line*	3-10	*10%-30%*	*Leasehold improvement*
Kendaraan	Garis lurus/ *Straight line*	4-8	*12,5%-50%*	*Vehicles*
	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*			

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Construction in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Kebijakan estimasi untuk alokasi biaya penyusutan

Beban penyusutan aset tetap untuk divisi radioisotop dan radiofarmaka dibebankan 70% ke *overhead* dan 30% ke beban usaha.

Estimation policy for allocation of depreciation costs

Depreciation expense for radioisotopes and radiopharmaceuticals division is charged 70% to overhead and 30% to operating expenses.

$$\frac{\text{Total produksi per periode/ } \textit{Total production per period}}{\text{Total kapasitas produksi per periode/ } \textit{Total production capacity per period}} \times \frac{\text{Beban penyusutan aset tetap/ } \textit{Depreciation of fixed assets}}{\text{Produksi elemen bakar nuklir/ } \textit{Production of nuclear fuel elements}}$$

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Tetap (lanjutan)

Hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaruan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Properti Investasi

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh perusahaan-perusahaan di Grup konsolidasian diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi perusahaan mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed Assets (continued)

Land rights, including the legal costs incurred at initial acquisition of land rights, are stated at cost and not amortized. Specific costs associated with the renewal or extension of land titles are deferred and amortized over the legal term of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

o. Investment Property

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the companies in the consolidated Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment property that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment property under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the company expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed – whichever is earlier.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Properti Investasi (lanjutan)

Terkadang sulit untuk mengukur secara andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa, dan status izin konstruksi.

Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan sifat, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Pengeluaran selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Perubahan nilai wajar diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Properti investasi tidak diakui ketika dilepas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Investment Property (continued)

It may sometimes be difficult to determine reliably the fair value of the investment property under construction. In order to evaluate whether the fair value of an investment property under construction can be determined reliably, management considers the following factors, among others, the stage of completion, whether the project/property is standard (typical for the market) or non-standard, the level of reliability of cash inflows after completion, and the development risk specific to the property, past experience with similar constructions, and status of construction permits.

Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as at the statement of financial position date by professional valuers who hold recognised and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Investment properties are derecognised when they have been disposed.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya selama 3-50 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika, dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud merupakan perbedaan antara nilai neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.

Perangkat lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Intangible Assets

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either definite or indefinite.

Intangible asset with definite useful life

Intangible assets with definite useful is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset less its estimated residual value, over its useful economic life of 3-50 years.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset is derecognised if, disposed or when there was no longer economic benefits future expected from its use or disposal.

Gain or loss arises from derecognition of intangible asset is the difference between the value of net disposed (if any) and carrying amount of the assets. Gain or losses recognized in profit or loss when the asset was retired. Gain is not recognized as revenue.

Computer software

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak komputer (lanjutan)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan proyek internal)

Dalam tahap pengembangan proyek internal, suatu entitas dapat, dalam beberapa kasus, mengidentifikasi aset tak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Ini karena fase pengembangan sebuah proyek lebih maju daripada fase penelitian.

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan proyek internal) harus diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan hal-hal berikut:

1. Kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset takberwujud sehingga akan tersedia untuk penggunaan atau penjualan.
2. Niatnya untuk melengkapi aset takberwujud dan menggunakan atau menjualnya.
3. Kemampuannya untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud.
4. Bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan. Antara lain, entitas dapat menunjukkan adanya pasar untuk keluaran aset takberwujud atau aset tak berwujud itu sendiri atau, jika digunakan secara internal, kegunaan aset takberwujud.
5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan pembangunan dan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud.
6. Kemampuannya untuk mengukur andal pengeluaran yang dapat diatribusikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Intangible Assets (continued)

Computer software (continued)

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Intangible assets arising from development (or the development phase of an internal project)

In the development phase of an internal project, an entity can, in some instances, identify an intangible asset and demonstrate that the asset will generate probable future economic benefits. This is because the development phase of a project is further advanced than the research phase.

An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognized if, and only if, an entity can demonstrate all of the following:

1. *The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale.*
2. *Its intention to complete the intangible asset and use or sell it.*
3. *Its ability to use or sell the intangible asset.*
4. *How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset.*
5. *The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset.*
6. *Its ability to measure reliably the expenditure attributable.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan proyek internal) (lanjutan)

Biaya yang berhubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur yang dapat diidentifikasi, dikendalikan serta memberikan manfaat ekonomis yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 3 sampai 4 tahun.

Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu meliputi biaya-biaya yang terkait dengan penemuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan *bulk*, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut yang dilakukan oleh pihak eksternal. Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun.

Hubungan pelanggan kontrak diperoleh dalam kerja sama usaha diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hubungan kontraktual pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur yang diharapkan dari hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan kontrak dan biaya rehabilitasi memiliki manfaat antara 4 sampai 7 tahun.

Beban rehabilitasi gedung rumah sakit, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

q. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu diperlukan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Intangible Assets (continued)

Intangible assets arising from development (or the development phase of an internal project) (continued)

Costs associated with refinement of systems and procedures that can be identified, controlled and provide economic benefits for more than one year are recognized as intangible assets. These costs are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 3 to 4 years.

Development costs of upstream flu vaccines represent costs associated with research findings or knowledge of production of egg-based flu vaccines from egg preparation, bulk manufacture, clinical trials to registration of such products performed by external parties. The development costs of upstream flu vaccines are recognized as intangible assets and will be amortized using straight line method over the useful life of 8 (eight) years.

Contractual customer relationships acquired in a business cooperation are recognized at fair value at the acquisition date. The contractual customer relations have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight line method over the expected life of the customer relationship. Contractual customer relationship and rehabilitation cost have useful life of 4 to 7 years.

Rehabilitation cost of hospital building shall be amortized over the period benefited.

q. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the recoverable amount is estimated by the Group for the individual asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya, dan diakui sebagai "Rugi Penurunan Nilai" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pembalikan atas rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, beban penyusutan atas aset tersebut dikoreksi pada periode mendatang dengan dialokasikan kepada nilai tercatat aset yang direvisi dikurangi dengan nilai residu, dengan dasar sistematis selama sisa masa manfaat aset.

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

The recoverable amount of an asset is the higher of the asset's fair value less cost to sell and its value in use. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the assets are considered impaired and are written down to its recoverable amount. Impairment loss of continuing operations is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment in Loss".

Reversal of an impairment loss is recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. After such reversal, the depreciation charge on that asset is adjusted in future period to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pinjaman (lanjutan)

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan konsolidasian ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditur untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas *(debt for equity swap)*, keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

s. Biaya Pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Borrowings (continued)

Borrowings are removed from the consolidated statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

s. Borrowings Costs

Interest and other borrowing cost, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowing. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Liabilitas Keuangan Pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Grup melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko hak opsi dan obligasi wajib konversi. Penggunaan derivatif lebih rinci diungkapkan pada Catatan 29.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi.

Derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Grup memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Suatu derivatif disajikan sebagai liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Derivatif yang melekat

Derivatif melekat merupakan komponen dari kontrak hibrida yang juga termasuk kontrak nonderivatif induk dengan dampak arus kas dari instrumen gabungan bervariasi dengan cara yang mirip dengan derivatif yang berdiri sendiri.

Derivatif yang melekat pada kontrak hibrida dengan aset keuangan utama dalam ruang lingkup PSAK 109 tidak dipisahkan. Seluruh kontrak hibrida diklasifikasikan dan selanjutnya diukur sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar yang sesuai.

Jika kontrak hibrida tersebut merupakan liabilitas keuangan yang memiliki kuotasi harga, Grup tidak memisahkan derivatif yang melekat, tapi secara umum menetapkan seluruh kontrak hibrida sebagai FVTPL.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Financial Liabilities at Fair value through Profit or Loss

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to option rights and mandatory convertible bonds. Further details on the use of derivatives are disclosed in Note 29.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately.

A derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Group has both a legally enforceable right and intention to offset.

A derivative is presented as a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current liabilities.

Embedded derivatives

An embedded derivative is a component of a hybrid contract that also includes a nonderivative host – with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative.

Derivatives embedded in hybrid contracts with a financial asset host within the scope of PSAK 109 are not separated. The entire hybrid contract is classified and subsequently measured as either amortized cost or fair value as appropriate.

If the hybrid contract is a quoted financial liability, instead of separating the embedded derivative, the Group generally designates the whole hybrid contract at FVTPL.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Liabilitas Keuangan Pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Derivatif yang melekat (lanjutan)

Derivatif yang melekat disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo instrumen hibrida yang terkait dengan derivatif melekat lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasikan atau diselesaikan dalam 12 bulan.

u. Sewa

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 3 hingga 5 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan nonsewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Namun, untuk sewa real estat di mana Grup merupakan penyewa, Perusahaan telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan nonsewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi);
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Financial Liabilities at Fair value through Profit or Loss (continued)

Embedded derivatives (continued)

An embedded derivative is presented as a non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the hybrid instrument to which the embedded derivative relates is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months.

u. Leases

The Group leases certains property, plant and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of 3 to 5 years but may have extension.

The contract may contain both lease and non-lease components based on stand-alone relative prices. However, for real estate leases in which the Group is the lessee, the Company has chosen not to separate the lease and non-lease components and counts them instead as the single rental component.

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments);*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Sewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut: (lanjutan)

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental tambahan, Grup:

- Jika memungkinkan, gunakan pembiayaan pihak ketiga terbaru yang diterima oleh penyewa individu sebagai permulaan poin, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Leases (continued)

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments: (continued)

- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- *Where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *Uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Sewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental tambahan, Grup: (lanjutan)

- Membuat penyesuaian khusus untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan selama masa manfaat aset yang lebih pendek dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Pembayaran yang terkait dengan sewa guna usaha jangka pendek dan sewa guna aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Leases (continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Group: (continued)

- *Makes adjustments specific to the lease, e.g., term, country, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Sewa (lanjutan)

Opsi perpanjang dan penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh *lessor* yang bersangkutan.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

v. Titipan Hibah Ditangguhkan

Hibah adalah bantuan Pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya untuk suatu entitas sebagai imbalan atas masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional entitas. Dan hibah yang terkait dengan aset adalah hibah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun, atau membeli aset jangka panjang.

Hibah diakui jika terdapat keyakinan memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima.

Ada dua pendekatan akuntansi untuk hibah di antaranya pendekatan modal, dimana hibah diakui di luar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan pendekatan penghasilan, dimana hibah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk satu atau lebih periode.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Leases (continued)

Extension and termination options

Extension and termination option are included in a number of property and equipment leases of the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Guaranteed residual value

To optimize rental costs during the contract period, the Company sometimes guarantees a residual value in connection with equipment leases.

Lease income from leasing operations wherein the Company acts as the lessee is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

v. Deferred Grant Deposit

Grants are assistance by Government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. The grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets.

A grant is recognized only when there is reasonable assurance that the entity will comply with any conditions attached to the grant and the grant will be received.

There are two broad approaches to the accounting for grants: the capital approach, under which a grant is recognized outside the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and the income approach, under which a grant is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over one or more periods.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Titipan Hibah Ditangguhkan (lanjutan)

Grup memilih untuk menerapkan pendekatan penghasilan dan mengakui hibah melalui titipan ditangguhkan.

Hibah terkait aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan sebagai "Titipan Hibah Ditangguhkan" pada liabilitas atau sebagai pengurang nilai tercatat aset, sesuai ketentuan dalam perjanjian hibah. Titipan hibah ditangguhkan diakui saat dana hibah diterima dengan tujuan dan prasyarat tertentu dari pemberi dana. Hibah terkait penghasilan disajikan dalam laba rugi sebagai penghasilan lain-lain atau pengurang beban terkait, dan diakui secara sistematis selama periode pengakuan beban yang dikompensasi hibah. Untuk hibah dari pihak eksternal yang belum memiliki kejelasan atas kepemilikan atau pemanfaatan aset (*underlying*), Perusahaan mengikuti PSAK 220, dan hibah tersebut dicatat sebagai dana titipan, bukan sebagai pendapatan atau aset hingga terpenuhi syaratnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Deferred Grant Deposit (continued)

The Group adopts the income approach model and it recognized a government grants through deferred deposit.

Grants related to assets, including non-monetary grants measured at fair value, are presented as "Deferred Grant Deposit" under liabilities or as a deduction from the carrying amount of the related asset, depending on the terms of the grant. Deferred grant deposit is recognized when the grant funds are received with specific purposes and conditions set by the grantor. Grants related to income are presented in the statement of profit or loss as other income or as a reduction of the related expense, and are recognized systematically over the periods in which the related expenses, intended to be compensated by the grant, are recognized. For grants received from external parties where there is no clear evidence of ownership or utilization of the underlying asset, the Company applies PSAK 220, and such grants are recorded as custodial funds, and are not recognized as income or assets until all conditions are fulfilled.

w. Pengukuran Nilai Wajar

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

w. Fair Value Measurement

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikelompokkan dalam hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *level input* yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

1. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
2. Teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

x. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali berhubungan dengan hal yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau langsung dicatat di ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung di ekuitas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

1. *Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
2. *Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
3. *Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable, either directly or indirectly.*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

x. Current and Deferred Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan undang-undang pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditentukan pada saat tanggal pelaporan. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi pengembalian pajak dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan interpretasinya. Grup menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan ke pihak pajak yang berwenang.

Bunga dan denda atas kurang bayar atau kelebihan pembayaran pajak, jika ada, harus disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" tahun berjalan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah tambahan pokok dan denda yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai bagian dari manfaat atau beban pada tahun berjalan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda yang dikenakan melalui SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban, dan aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- Piutang dan utang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Current and Deferred Income Tax (continued)

Current Tax

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. The Group establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Interest and penalties for the underpayment or overpayment of income tax, if any, are to be presented as part of current "Income Tax Expense" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter (SKP) are recognized as income or expense in the current year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

Value-Added Tax (VAT)

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda atas dasar kompensasi, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding ditetapkan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Current and Deferred Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the applicable tax rate or substantively enacted as at reporting date. Deferred tax is charged or credited in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the consolidated statement of financial position, except if these are for different legal entities. In the same manner, as the current tax assets and liabilities are presented.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense – Current" in the consolidated statement of profit or loss.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if objection or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup telah menerapkan PSAK 115 untuk menentukan apakah akan mengakui pendapatan dari penjualan produk dan jasa, Grup mengikuti proses lima langkah:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, Grup membuat estimasi jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and Expense Recognition

The Group has applied PSAK 115, to determine whether to recognize revenue from the sale of goods and services the Group follows a five-step process:

1. *Identifying the contract with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, The Group determines the transaction price, which is the amount of consideration to which the Group expects to be entitled, net of estimated service warranties, in exchange for transferring goods or services to the customer;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation using the relative standalone selling price of each good or service promised in the contract. When not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini, dalam hal ini terpenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan aset dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif terhadap Grup dan entitas yang memiliki hak untuk dapat diberlakukan sebagai pembayaran atas kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada suatu titik waktu diakui sebagai pendapatan pada saat pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Jika kewajiban pelaksanaan terpenuhi sepanjang waktu, harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup secara umum menyimpulkan bahwa itu adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena biasanya Grup mengontrol barang atau jasa sebelum mentransfernya ke pelanggan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and Expense Recognition (continued)

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *The Customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

The transaction price allocated to performance obligations satisfied at a point intime is recognized as revenue when control of the goods or services transfers to the customer. If the performance obligation is satisfied over time, the transaction price allocated to that performance obligation is recognized as revenue as the performance obligation is satisfied.

Contract assets are recognized after the consideration paid by the customer is less than the outstanding performance obligation. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligation.

The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Penjualan barang

Grup memproduksi dan menjual berbagai macam obat-obatan, vaksin dan serum, alat kesehatan dan kosmetik, elemen bahan bakar nuklir, radioisotop dan radiofarmaka.

Barang umum

Pendapatan diakui pada suatu waktu atau setelah dikirimkan ke pelanggannya. Pelanggan memperoleh kendali atas aset yang dijanjikan dan kewajiban kinerja Grup. Indikator kontrol yang dialihkan ke pelanggan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Grup memiliki hak saat ini untuk pembayaran aset; dan
b. Pelanggan memiliki hak legal atas aset tersebut;
c. Grup telah mengalihkan kepemilikan fisik aset;
d. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan aset; dan
e. Pelanggan telah menerima aset tersebut.

Hak untuk retur

Untuk memperhitungkan pengalihan produk dengan hak pengembalian, entitas harus mengakui semua hal berikut:

a. Pendapatan untuk produk yang diserahkan dalam jumlah imbalan yang diharapkan entitas akan menjadi haknya, oleh karena itu pendapatan tidak akan diakui untuk produk yang diharapkan untuk dikembalikan;
b. Liabilitas pengembalian dana; dan
c. Produk lain sebagai gantinya.

Pendapatan dari jasa teknik

Grup menjual jasa inspeksi radiografi, *radio tracing*, *scanning* kolom, dan jasa lainnya seperti analisis kerusakan, komposisi unsur, uji metalurgi, impor ekspor sumber dan peralatan radioaktif, penggantian sumber radiasi dan *workshop*.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and Expense Recognition (continued)

Sales of goods

The Group manufactures and sells a range of medicines, vaccine and serum, medical devices and cosmetics. nuclear fuel element, radioisotopes and radiopharmaceuticals.

General goods

Revenue is recognized at point in time or upon delivery to its customer. The customer obtain control of a promised asset and the Group's performance obligation. Indicators of control is transferred to customer include but not limited to the following:

a. The Group has a present right to payment of the asset;
b. The Customer has legal title to the asset;
c. The Group has transferred the physical ownership of the asset;
d. The Customer has the significant risks and benefit of ownership of the asset; and
e. The Customer has accepted the asset.

Right of return

To account for the transfer of products with a right of return, an entity shall recognize all of the following:

a. Revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (therefore revenue would not be recognized for the products expected to be returned;
b. A refund liability; and
c. Another product in exchange.

Revenue from technical services

The Group provides technical services such as radiographic, radio tracing, column scanning and other services such as damage analysis, elemental composition, metallurgical testing, import and export of radioactive sources and equipment, replacement of radiation services and workshops.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari jasa teknik (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan jasa-jasa ini diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat jasa-jasa tersebut diberikan. Grup mempertimbangkan apakah terdapat janji-janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban kinerja yang terpisah, sehingga sebagian dari harga transaksi perlu dialokasikan. Dalam menentukan harga transaksi penjualan barang dan jasa, Grup mempertimbangkan pengaruh pertimbangan variabel, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan nontunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan, jika ada.

Grup telah menetapkan bahwa masing-masing jasa ini merupakan kewajiban kinerja yang terpisah karena pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau layanan baik itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia bagi pelanggan dan janji entitas untuk mentransfer barang atau jasa tersebut. kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji-janji lain dalam kontrak.

Imbalan variabel

Untuk kontrak yang sebagian harganya dapat bervariasi, Grup mengestimasi imbalan variabel pada jumlah yang paling mungkin, yang dimasukkan dalam harga transaksi sepanjang kemungkinan besar tidak akan terjadi pembalikan pendapatan kumulatif yang signifikan. Grup menganalisis risiko pembalikan pendapatan yang signifikan dan jika perlu membatasi jumlah imbalan variabel yang diakui untuk memitigasi risiko ini.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from technical services (continued)

Revenue from sale of these services is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon rendering these services. The Group considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated. In determining the transaction price for the sale of goods and services, the Group considers the effects of variable consideration, the existence of significant financing components, noncash consideration, and consideration payable to the customer, if any.

The Group has determined that each of these services is a separate performance obligation as the customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer and the entity's promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other promises in the contract.

Variable consideration

For contracts where a portion of the price may vary, the Group estimates variable consideration at the most likely amount, which is included in the transaction price to the extent it is probable that a significant reversal of cumulative revenue recognized will not occur. The Group analyzes the risk of a significant revenue reversal and if necessary constrain the amount of variable consideration recognized in order to mitigate this risk.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Komponen pembiayaan yang signifikan

Umumnya, Grup menerima uang muka jangka pendek dari para pelanggannya. Dengan menggunakan pertimbangan praktis dalam PSAK 115, Grup tidak menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan atas dampak komponen pembiayaan signifikan jika diharapkan, pada awal kontrak, bahwa periode antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa itu akan menjadi satu tahun atau kurang.

Pendapatan di luar lingkup PSAK 115:

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa yang timbul dari aset yang disewakan dicatat dengan metode garis lurus selama sewa jangka waktu sewa yang sedang berlangsung.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui pada saat perolehan dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE) dimana pendapatan bunga diakui pada tingkat yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and Expense Recognition (continued)

Significant financing component

Generally, the Group receives short-term advances from its customers. Using the practical expedient in PSAK 115, the Group does not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if it expects, at contract inception, that the period between the transfer of the promised good or service to the customer and when the customer pays for that good or service will be one year or less.

Revenue outside the scope of PSAK 115:

Rent income

Rent income arising on lease of fixed assets is accounted for on a straight-line basis over the lease term on ongoing leases.

Interest income

Interest income is recognized as it accrues using the Effective Interest Rate (EIR) method under which interest income is recognized at the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial instrument to the net carrying amount of the financial asset.

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Liabilitas Imbalan Kerja

i. Liabilitas Imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan nonmoneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas dipresentasikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Kewajiban pensiun

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”), Grup disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 11/2020, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai UU lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) – menerbitkan siaran pers mengenai “Pengatribusian imbalan pada periode jasa” dan oleh karena itu, Grup mengubah kebijakan terkait dengan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 219 “Imbalan Kerja” mengikuti pola fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefit Liabilities

i. Short-term employee benefits liabilities

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees’ services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the consolidated statement of financial position.

ii. Pension obligations

In accordance with the Manpower Act No. 13/2003 ("Law 13/2003") as amended through Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation ("Law 11/2020"), the Group is required to provide pension benefits at least as regulated in Law 11 /2020, which is basically a defined benefit plan. If the pension benefit under the Law is greater than the existing pension plan, the difference is recognized as part of the pension benefit liability.

In April 2022, Financial Accounting Standard Boards of Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) published a press release regarding “Attributing benefit to periods of service”, and accordingly the Group changed the policy related to attributing benefit to periods of service in accordance with the provisions in PSAK 219 “Employee Benefit” following the general fact pattern of pension programs based on the Labor Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

ii. Kewajiban pensiun (lanjutan)

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana, imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefit Liabilities (continued)

ii. Pension obligations (continued)

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statement of changes in equity and in the balance sheet.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

ii. Kewajiban pensiun (lanjutan)

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun, karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan entitas membayar jumlah tertentu kepada para pekerja yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Grup rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

iii. Kewajiban pascakerja lainnya

Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunannya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

iv. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefit Liabilities (continued)

ii. Pension obligations (continued)

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.

For defined benefit plans, the Group pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Law No. 11 year 2020 regarding Job Creation requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Group is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

iii. Other post-employment obligations

Some Group companies provide post retirement healthcare benefits to their retirees. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

iv. Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

iv. Pesangon pemutusan kontrak kerja (lanjutan)

Grup mengakui pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

aa. Beban Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan

Biaya-biaya yang dikeluarkan dari tahapan penelitian (atau tahapan penelitian pada proyek internal) uji klinis, pengawasan produk dan lingkungan serta pemantauan produk yang sudah dijual di pasar.

Biaya penelitian diakui sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

bb. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefit Liabilities (continued)

iv. Termination benefits (continued)

The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

aa. Research, Development and Surveillance Expense

Costs incurred from the research stage (or research stage on internal projects) clinical trials, product and environmental surveillance as well as monitoring of products already sold in the market.

Research cost are recognized in expense in the consolidated profit or loss in the current period.

bb. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

bb. Provisi (lanjutan)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomis untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Garansi

Provisi untuk biaya ekspektasian atas kewajiban garansi berdasarkan ketentuan penjualan barang lokal diakui pada tanggal penjualan barang tersebut, sebesar estimasi terbaik direktur atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban Grup.

cc. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ketika Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

dd. Modal Saham yang Ditempatkan

Modal saham yang ditempatkan adalah sebagian dari modal saham yang telah dilunasi namun belum dibayar oleh pemegang saham karena masih belum diterbitkan. Modal saham yang ditempatkan dilaporkan dikurangi piutang penempatan saham yang tidak tertagih.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

bb. Provision (continued)

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

Warranties

Provisions for the expected cost of warranty obligations under local sale of goods legislation are recognized at the date of sale of the relevant products, at the directors' best estimate of the expenditure required to settle the Group's obligation.

cc. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where any Group purchases the company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the company's equity holders.

dd. Subscribed Share Capital

Subscribed share capital is a portion of authorized share capital that has been subscribed but not yet paid by the shareholder therefore still unissued. The subscribed share capital is reported minus subscription receivable not collectible currently.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ee. Kontingensi

Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomis.

ff. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas hukum di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

gg. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ee. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ff. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

gg. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders in the General Meeting of Shareholders.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

hh. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

hh. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Critical Accounting Estimates and Assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

a. The use of going concern assumption

In the process of applying the Group's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the financial statements on the assumption that the Group will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgment that has the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain. The Group's management considers that the Group has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

b. Restrukturisasi

Provisi restrukturisasi diakui ketika Grup telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Pengukuran provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, dimana jumlah tersebut benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, dan tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung.

c. Estimasi penurunan nilai *goodwill*

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas *goodwill* yang telah mengalami penurunan nilai, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan di atas. Terdapat indikator penurunan nilai yang diamati dalam *goodwill* PEHA (Catatan 20).

d. Nilai wajar pada properti investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi. Properti investasi milik Grup dilakukan valuasi oleh penilai independen profesional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan segmen properti investasi yang akan dinilai untuk semua properti investasi, penggunaan saat ini setara dengan penggunaan tertinggi dan terbaik. Nilai wajar untuk semua properti investasi ditentukan menggunakan pendekatan perbandingan nilai jual. Pendekatan ini membandingkan properti dalam jarak yang berdekatan. Nilai ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ukuran properti, lokasi, akses menuju lokasi dan kualitas dari interior properti. Hal yang paling signifikan dalam valuasi ini adalah harga per meter persegi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Accounting Estimates and Assumptions (continued)

b. Restructuring

A restructuring provision is recognized when the Group has developed a detailed formal plan for the restructuring and has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement the plan or announcing its main features to those affected by it. The measurement of restructuring provision includes only the direct expenditures arising from the restructuring, which are those amounts that are both necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activities of the entity.

c. Estimated impairment of goodwill

The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated above. There were impairment indicators observed in goodwill of PEHA (Note 20).

d. Fair value in investment property

The fair value of investment property is determined by using valuation techniques. The group's investment properties were valued by independent professionally qualified valuers who hold a recognized relevant professional qualification and have recent experience in the locations and segment of the investment properties valued. For all investment properties, their current use equates to the highest and best use. The fair value for all investment properties was determined using sales comparison approach. This approach takes into account comparable properties in close proximity. These values are adjusted for differences in key attributes such as property size, location, accessibility, and quality of interior fittings. The most significant input into this valuation approach is price per square metre.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

e. Imbalan pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan memengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 32.

f. Revaluasi aset tetap (kelompok aset tanah)

Revaluasi aset tetap Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Accounting Estimates and Assumptions (continued)

e. Pension benefit

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 32.

f. Fixed asset revaluation (class of asset land)

The Group's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

g. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Grup menilai apakah Grup memiliki pengendalian atau tidak atas entitas asosiasi, dan juga berdasarkan apakah Entitas Anak memiliki kemampuan yang nyata untuk mengatur kegiatan entitas asosiasi secara sepihak. Dalam membuat penilaian mereka, direksi mempertimbangkan keberadaan perwakilan Grup di dewan direksi entitas asosiasi yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan kegiatan entitas asosiasi secara sepihak. Karena entitas asosiasi memiliki perwakilan dalam dewan direksi, direksi menilai bahwa Grup tidak memiliki pengendalian tetapi hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas asosiasi.

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas

a. Pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan setelah memperhitungkan hak untuk mengembalikan produk jika pelanggan merasa tidak puas dengan berdasarkan pengalaman masa lampau atas penjualan yang serupa, yakin bahwa tingkat ketidakpuasan tidak akan lebih dari 0,1%. Oleh karena itu, Grup mengakui pendapatan dikurangi dengan liabilitas kontrak (estimasi penjualan yang akan di kembalikan di periode berikutnya sesuai dengan PSAK 115) (Catatan 28).

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Accounting Estimates and Assumptions (continued)

g. Investments in associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

The Group assesses whether or not the Group has control over the associated entities based on whether the subsidiary has practical ability to direct the relevant activities of associated entities unilaterally. In making their judgments, the directors consider the existence of a Group's representative on the board of directors of an associate entities who has the power to unilaterally direct the activities of the associates. Because the associate entities has representation on the board of directors, the directors judge that the Group has no control but only has a significant influence on the associate entities.

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies

a. Revenue recognition

The Group recognizes revenue after taking into account the right of return for products if customers are not satisfied, based on past experience with similar sales, and is confident that the dissatisfaction rate will not exceed 0.1%. Therefore, the Group recognizes revenue net of contract liability (an estimate of sales expected to be returned in subsequent periods in accordance with PSAK 115) (Note 28).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (lanjutan)

b. Estimasi masa sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

c. Mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang memengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

d. Estimasi penyisihan atas kerugian nilai dari piutang usaha dan piutang lain-lain

Penerapan PSAK 109 mengakibatkan perubahan penilaian atas estimasi akuntansi yang signifikan dan pertimbangan terkait dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies (continued)

b. Estimation of lease term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

c. Functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

d. Estimation of allowance for impairment loss of on trade receivables and other receivables

The implementation of PSAK 109 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgments related to allowance for impairment loss of receivables. The Company applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all receivables.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (lanjutan)

d. Estimasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, lamanya hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat penyisihan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasikan memerlukan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Nilai tercatat penyisihan atas kerugian penurunan nilai dari piutang usaha dan piutang lain-lain Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan pada Catatan 6 dan 7.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies (continued)

d. Estimation of allowance for impairment loss of trade receivables and other receivables (continued)

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgment in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgment has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific allowance is evaluated by management in the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customer and customers' credits status based on third party credit reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due in order to reduce the Group receivables to amounts that it expects to collect.

These specific allowance are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific allowance against individually significant receivables, the Group also recognises a collective impairment allowance against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific allowance, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

The carrying amount of the Group's allowance for impairment loss of trade receivables and other receivables as of December 31, 2025 and 2024 is disclosed in Notes 6 and 7.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (lanjutan)

e. Provisi nilai persediaan

Grup membuat provisi kerugian penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi provisi kerugian penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap provisi kerugian penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil usaha Grup.

Nilai tercatat provisi kerugian penurunan nilai persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan pada Catatan 8.

f. Penurunan nilai atas aset non-keuangan

PSAK mensyaratkan bahwa penelaahan atas penurunan nilai atas aset nonmoneter harus dilakukan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Penentuan jumlah yang dapat diperoleh kembali membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan, yang akan dihasilkan dari penggunaan secara berkelanjutan dan hasil akhir dari aset tersebut. Sementara itu, manajemen yakin bahwa asumsi yang digunakan dalam menghitung estimasi nilai wajar yang tercermin di dalam laporan keuangan adalah sudah sesuai dan wajar. Maka perubahan yang signifikan dalam asumsi ini dapat secara material memengaruhi penilaian atas jumlah yang dapat diperoleh kembali dan kerugian atas penurunan nilai yang dihasilkan bisa memiliki dampak yang material terhadap hasil usaha.

g. Masa manfaat aset non-keuangan

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset takberwujud ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies (continued)

e. Provision for decline in value of inventories

The Group provides provision for impairment loss of inventories based on future estimated inventories. While the assumptions used in the estimation of the provision for impairment loss of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the provision for impairment loss of inventories, which will impact the result of the Group's operations.

The carrying amount of the Group's provision for impairment loss on inventory as of December 31, 2025 and 2024 is disclosed in Note 8.

f. Impairment of non-financial assets

PSAK requires that an assessment of impairment of non-monetary assets be performed when there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying amount of the assets may not be recoverable. Determining the recoverable amount requires estimating the expected cash flows that will be generated from the continued use and ultimate disposal of the assets. Meanwhile, management believes that the assumptions used in calculating the estimated fair value reflected in the financial statements are appropriate and reasonable. Therefore, significant changes in these assumptions could materially affect the assessment of the recoverable amount and impairment losses, which could have a material impact on the result of operation.

g. Useful lives of non-financial assets

The useful life of each item of non-financial assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (lanjutan)

g. Masa manfaat aset non-keuangan (lanjutan)

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset nonmoneter dapat memengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

h. Penentuan nilai wajar atas instrumen keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian. manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

i. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies (continued)

g. Useful lives of non-financial assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of non-financial assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

h. Determining fair value of financial instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

i. Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (lanjutan)

i. Pajak penghasilan (lanjutan)

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

j. Realisasi dari aset pajak tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya.

Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian/ seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

k. Provisi dan kontingensi

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontingensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies (continued)

i. Income tax (continued)

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

j. Realization of deferred tax assets

The Group conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allows the Group to use all or part of the deferred tax assets. The Group's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period.

The estimation is based on the achievement of the Group in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Group can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

k. Provisions and contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
Kas	**8.000.754**	**8.626.249**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Rupiah	1.934.106.849	2.026.833.470	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1.161.670.911	1.705.919.651	*United States Dollar*
Euro	5.228.825	7.129.632	*Euro*
	3.101.006.585	3.739.882.753	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	238.001.193	263.629.504	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	24.600.012	12.887.316	*United States Dollar*
Euro	3.611.493	2.797.701	*Euro*
Dolar Singapura	479.702	--	*Singapore Dollar*
Yuan Cina	702	--	*Chinese Yuan*
	266.693.102	279.314.521	
Jumlah kas di bank	**3.367.699.687**	**4.019.197.274**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Rupiah	50.400.000	40.400.000	*Rupiah*
	50.400.000	40.400.000	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	20.000.000	--	*Rupiah*
Jumlah deposito berjangka	**70.400.000**	**40.400.000**	***Total time deposits***
Total kas dan setara kas sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai	3.446.100.441	4.068.223.523	*Total cash and cash equivalents before allowance for impairment loss*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(30.572)	(33.572)	*Allowance for impairment loss*
Jumlah	**3.446.069.869**	**4.068.189.951**	***Total***

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu yang berlaku untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates and maturity period of the time deposits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat bunga			*Interest rates*
Rupiah dan Mata uang asing	0.25% - 4.50%	0.25% - 3.00%	*Rupiah and Foreign currency*
Jangka waktu	7 - 30 hari/ *days*	1-2 bulan/*month*	*Maturity period*

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents are disclosed in Note 51.

5. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Pada tahun 2025, KAEF memiliki saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

5. RESTRICTED FUNDS

In 2025, KAEF has cash and cash equivalents with restricted usage as follows:

	2025	2024	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	232.044.369	231.949.237	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.400.000	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia	20.718.698	--	*PT Bank Danamon Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	330.559	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**276.493.626**	**231.949.237**	***Total***

Entitas Anak

PT Kimia Farma Tbk dan Entitas Anak (KAEF)

Saldo kas KAEF di bank per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp232.044.369 merupakan saldo yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian COB1/6/670/R pada tanggal 27 Oktober 2023 terkait Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit bahwa dana hasil divestasi saham Mandiri Inhealth dan dana hasil *Earn Out* divestasi saham PT Kimia Farma Apotek akan disalurkan ke rekening Giro BNI dan digunakan untuk menurunkan dan atau pelunasan fasilitas *Term Loan* Sub Alokasi *Corporate Loan* maksimum Rp650.000.000.

Saldo KFTD, entitas anak KAEF, kas di bank sebesar Rp44.118.698, dengan rincian terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp23.400.000 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp20.718.698.

KFA, entitas anak KAEF, menjaminkan saldo di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp330.559.

The Subsidiaries

PT Kimia Farma Tbk and Its Subsidiaries (KAEF)

As of December 31, 2025, KAEF has cash in banks amounting to Rp232,044,369, represents the balance placed with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. which is restricted.

Based on Agreement No. COB1/6/670/R dated October 27, 2023, regarding the Extension and Restructuring of Credit Facilities, the proceeds from the divestment of Mandiri Inhealth shares and the divestment of PT Kimia Farma Apotek shares are required to be deposited into a BNI Giro account and used to reduce and/or repay the Term Loan Sub Allocation facility under the Corporate Loan, with a maximum amount of Rp650,000,000.

KFTD, a subsidiary of KAEF, has cash in banks amounted to Rp44,118,698, with details consisting of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp23,400,000 and PT Bank Danamon Indonesia Tbk. amounting to Rp20,718,698.

KFA, a subsidiary of KAEF, pledged its balance in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp330,559.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Pelanggan dalam negeri	285.029.481	356.110.958	*Domestic customers*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(46.459.171)	(138.534.712)	*Less: Allowance for impairment loss of trade receivables*
Jumlah pihak berelasi	**238.570.310**	**217.576.246**	***Total related parties***
Pihak ketiga			*Third parties*
Pelanggan dalam negeri	1.883.105.501	1.395.940.361	*Domestic customers*
Pelanggan luar negeri	342.932.570	177.959.214	*Foreign customers*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(1.015.784.513)	(473.104.169)	*Less: Allowance for impairment loss of trade receivables*
Jumlah pihak ketiga	**1.210.253.558**	**1.100.795.406**	***Total third parties***
Jumlah	**1.448.823.868**	**1.318.371.652**	***Total***

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 51.

Analysis of trade receivable by maturity is presented in Note 51.

Piutang usaha didenominasi dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 50.

Trade receivables denominated in foreign currency are presented in Note 50.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses of trade receivables are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	611.638.881	516.936.534	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 41 dan 42)	109.565.905	134.199.305	*Addition (Note 41 dan 42)*
Pemulihan (Catatan 44)	(18.744.912)	(17.315.735)	*Recovery (Notes 44)*
Dampak dekonsolidasi	359.783.810	--	*Impact of deconsolidation*
Lainnya	--	(22.181.223)	*Other*
Saldo akhir	**1.062.243.684**	**611.638.881**	***Ending balance***

Piutang usaha tertentu Grup digunakan sebagai jaminan pinjaman bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Permata Tbk (Catatan 23).

Certain trade receivables of the Group are pledged as collateral for bank loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and PT Bank Permata Tbk (Note 23).

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade receivables as disclosed in Note 51.

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

	2025	2024	
Bagian jangka pendek:			*Current portion:*
Pihak berelasi (Catatan 47)	402.942	7.459.734	*Related parties (Note 47)*
Pihak ketiga	208.895.145	279.564.552	*Third parties*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(103.093.321)	(100.465.429)	*Less: Allowance for impairment loss of other receivables*
Jumlah bagian jangka pendek	**106.204.766**	**186.558.857**	***Total current portion***
Bagian jangka panjang:			*Non-current portion:*
Pinjaman kepada karyawan	252.504	292.886	*Loans to Employees*
Jumlah bagian jangka panjang	**252.504**	**292.886**	***Total non-current portion***
Jumlah	**106.457.270**	**186.851.743**	***Total***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of other receivables are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	100.465.429	71.418.834	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 41 dan 42)	43.029.787	31.834.241	*Addition (Notes 41 and 42)*
Pemulihan (Catatan 44)	(49.063)	(2.787.646)	*Recovery (Note 44)*
Reklasifikasi	23.247.221	--	*Reclassification*
Dampak dekonsolidasi	(59.392.011)	--	*Impact of deconsolidation*
Lainnya	(4.208.042)	--	*Others*
Saldo akhir	**103.093.321**	**100.465.429**	***Ending balance***

Berdasarkan penilaian status dan kualitas kredit dari piutang lain-lain, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

Based on the assessment of the status and credit quality of the other receivables, management believes that the above allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses arising from uncollectible other receivables in the future.

a. Jangka Pendek / *a. Current Portion*

Perusahaan / *The Company*

Piutang lain-lain jangka pendek pihak berelasi merupakan piutang lain-lain kepada PT Iglas (Persero) (Catatan 47).

Current portion of other receivables from related parties represent receivables from PT Iglas (Persero) (Note 47).

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

a. Jangka Pendek (lanjutan)

Entitas Anak

Piutang lain-lain kepada PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited merupakan piutang atas imbalan kontingensi dampak divestasi KFA. Pada tanggal transaksi, imbalan kontingensi tambahan diakui sebagai aset keuangan (piutang) pada nilai wajar. KAEF telah mengestimasi probabilitas pencapaian kinerja oleh KFA untuk tahun 2023 dan 2024 dengan menggunakan ekspektasi arus kas masa depan yang diestimasi dengan metode *Discounted Cash Flow* berdasarkan laporan KJPP No. 230131.001/SRR-JK/L-PB/KAEF/OR tanggal 31 Januari 2023 oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan yang ditandatangani oleh Ocky Rinaldy, MAPPI.

Pada 31 Desember 2024, Piutang Lain-lain kepada PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited dihapuskan masing-masing sebesar Rp115.674.000 sebagai akibat bahwa estimasi dan keyakinan manajemen atas kinerja PT Kimia Farma Apotek pada tahun 2024 atas imbalan kontingensi tersebut tidak terjadi.

Tambahan imbalan kas yang diterima di masa depan telah memenuhi kriteria “aset keuangan” berdasarkan PSAK 232 paragraf 11. Aset keuangan (piutang) ini diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Hal ini karena pengembalian aset tidak hanya mewakili kompensasi atas nilai uang, kredit dan risiko pinjaman dasar lainnya, biaya, ditambah margin keuntungan, melainkan juga mencakup eksposur terhadap EBITDA PT Kimia Farma Apotek (KFA) yang tidak sesuai dengan pinjaman dasar.

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

a. Short-term (continued)

The Subsidiaries

Other receivables from PT Akar Investasi Indonesia and CIZJ Limited represent receivables arising from the contingent consideration related to the divestment impact of KFA. On the transaction date, the additional contingent consideration was recognized as a financial asset (receivable) at fair value. KAEF estimated the probability of KFA achieving its performance targets for 2023 and 2024 using expected future cash flows estimated under the Discounted Cash Flow method based on appraisal report No. 230131.001/SRR-JK/L-PB/KAEF/OR dated January 31, 2023, issued by KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan and signed by Ocky Rinaldy, MAPPI.

As of December 31, 2024, Other Receivables from PT Akar Investasi Indonesia and CIZJ Limited have been written-off are as follow amounting to Rp115,674,000 as of estimated and assurance of management for PT Kimia Farma Apotek’s performance in 2024 for compensation did not occur.

The additional cash consideration to be received in the future has met the criteria of a “financial asset” pursuant to PSAK 232 paragraph 11. This financial asset (receivable) is classified as a financial asset measured at fair value through profit or loss. This is because the return on the asset does not solely represent compensation for the time value of money, credit risk, and other basic lending risks, costs, plus a profit margin, but also includes exposure to the EBITDA of PT Kimia Farma Apotek (KFA), which is not consistent with a basic lending arrangement.

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

a. Jangka Pendek (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Pinjaman kepada karyawan merupakan kelebihan uang muka kegiatan operasional yang belum dikembalikan dan piutang lain-lain yang timbul dalam rangka kerja sama untuk kegiatan distribusi obat, biaya kirim, produksi, *product display* (*listing fee*) dan biaya impor bahan baku obat untuk pihak ketiga. Biaya tersebut akan ditagihkan kepada pihak ketiga/mitra kerja sama sesuai dengan pola kerja sama yang telah disepakati, dan tambahan diskon dari *Principal*.

b. Jangka Panjang

Entitas Anak

Piutang lain-lain merupakan fasilitas pinjaman kepada karyawan pada entitas anak untuk hasil perhitungan atas uang muka biaya operasional, pengobatan dan lainnya, yang tidak dikenakan bunga. Pelunasannya melalui pemotongan gaji bulanan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat potensi penurunan nilai dari pinjaman karyawan karena pembayaran piutang langsung memotong dari pendapatan karyawan.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang lain-lain sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

a. Short-term (continued)

The Subsidiaries (continued)

Loans to employees represent excess advances for operational activities that have not been returned and other receivables arising in the framework of cooperation for drug distribution activities, shipping costs, production, product displays (listing fee) and the cost of importing medicinal raw materials for third parties. These fees will be billed to third parties/collaborating partners in accordance with agreed patterns of cooperation, and additional discount from the Principal.

b. Non-current Portion

The Subsidiaries

Other receivables represent loan facilities provided to employees for down payments of operational expenses, medical expenses, and other purposes, which are non-interest bearing. The loans are repayable through monthly payroll deductions.

Management believes there is no potential impairment in value from employee receivable because payment of that receivables are reduced from employee salary.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of other receivables as disclosed in Note 51.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	2025	2024	
Barang jadi:			*Finished goods*
Obat jadi dan alat kontrasepsi	1.314.175.440	1.401.616.050	*Medicine and contraceptives*
Vaksin	819.552.028	642.284.161	*Vaccine*
Alat kesehatan	43.744.751	84.533.197	*Medical equipment*
Lain-lain	--	1.403.998	*Others*
Barang dalam proses	1.655.721.573	1.627.944.525	*Work in process*
Bahan baku dan bahan pembantu	1.393.839.467	1.285.399.800	*Raw materials and indirect materials*
Suku cadang	1.825.139	1.836.118	*Spareparts*
Persediaan barang rusak	478.504	478.504	*Obsolete goods*
	5.229.336.902	**5.045.496.353**	
Dikurangi: Provisi kerugian penurunan nilai persediaan	(874.727.899)	(1.035.535.376)	*Less: Provision for impairment loss of inventories*
Jumlah	**4.354.609.003**	**4.009.960.977**	***Total***

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements in the provision for impairment loss of inventories are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	1.035.535.376	970.094.400	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 40,41 dan 42)	102.349.509	384.514.700	*Addition (Notes 40, 41 and 42)*
Pemulihan (Catatan 40 dan 44)	(142.879.359)	(123.723.845)	*Reversal (Notes 40 and 44)*
Penghapusan	(5.141.403)	(48.346.688)	*Write-off*
Reklasifikasi	(74.563.544)	(147.003.191)	*Reclassification*
Dampak dekonsolidasi	(40.572.680)	--	*Impact of deconsolidation*
Saldo Akhir	**874.727.899**	**1.035.535.376**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai persediaan tersebut memadai untuk menutup kerugian akibat keusangan dan kerugian penurunan persediaan lainnya.

Management believes the provision for impairment loss of inventories is adequate to cover the potential loss from obsolescence and impairment loss of other inventory.

Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kedaluwarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan-aktual dibebankan ke beban lain.

Finished products and raw materials damaged or expired in the current year are charged to the cost of goods sold in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for the excessive actual cost which is charged to other expenses.

Seluruh persediaan milik Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, tsunami, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.604.543.241. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami oleh Grup.

All inventories owned by the Group are insured against risks of fire, theft, earthquake, tsunami, and other risks with a total coverage amounting to Rp7,604,543,241 as of December 31, 2025. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may be incurred by the Group.

8. PERSEDIAAN (lanjutan) / *8. INVENTORIES (continued)*

Persediaan tertentu dari Grup digunakan sebagai jaminan pinjaman bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank DKI, PT Bank Maybank, dan PT Bank Permata Tbk (Catatan 23).

Certain inventories of the Group are used as collateral for bank loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank DKI, PT Bank Maybank, and PT Bank Permata Tbk (Note 23).

9. UANG MUKA DAN PEMBELIAN / *9. ADVANCE FOR PURCHASES*

	2025	2024	
Barang lokal	144.779.022	99.642.594	*Local goods*
Barang impor	105.171.787	91.608.100	*Import goods*
Operasional	8.800	54.347	*Operational*
Lain-lain	6.533.648	10.146.368	*Others*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai uang muka	(2.751.546)	(12.839.079)	*Less: Allowance for impairment loss of advances for purchases*
Jumlah	**253.741.711**	**188.612.330**	***Total***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai uang muka adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of advances for purchases is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	12.839.079	10.000.000	*Beginning balance*
Penambahan	202.753	2.839.079	*Addition*
Pemulihan	(290.286)	--	*Recovery*
Dampak dekonsolidasi	(10.000.000)	--	*Impact of deconsolidation*
Saldo akhir	**2.751.546**	**12.839.079**	***Ending balance***

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

	2025	2024	
Asuransi	18.796.323	8.763.118	*Insurance*
Sewa gedung dan rumah dinas	11.922.424	7.111.917	*Building and house rent*
Lain-lain	13.393.700	7.801.205	*Others*
Total	**44.112.447**	**23.676.240**	***Total***

Sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 di luar cakupan PSAK 116.

Prepaid rent as of December 31, 2025, and 2024 is outside the scope of PSAK 116.

Biaya dibayar di muka lainnya merupakan biaya pemberian tambahan Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tidak Tetap (PKWT) dan Magang Bersertifikat, hari raya keagamaan, dan insentif prestasi yang belum direalisasikan.

Other prepaid expenses represent additional welfare allowance costs for non-permanent employees (PKWT) and certified interns, religious holiday allowances, and unrealized performance incentives.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025		
	Perusahaan/ *The Company*	**Entitas anak/ *Subsidiaries***	**Konsolidasi/ *Consolidation***
Pajak Pertambahan Nilai/*Value Added Tax*	326.248.056	205.168.780	531.416.836
Pajak Penghasilan Pasal 28/*Income Tax Article 28*	44.513.671	131.925.792	176.439.463
Pajak dibayar di muka lainnya/*Other prepaid taxes*	87.488.988	29.351.677	116.840.665
Subjumlah pajak dibayar di muka - lancar/ *Subtotal of prepaid taxes - current*	**458.250.715**	**366.446.249**	**824.696.964**
Taksiran tagihan pajak - tidak lancar/ *Estimated claims for tax refund - non-current*	--	147.315.862	147.315.862
Jumlah/*Total*	**458.250.715**	**513.762.111**	**972.012.826**

	2024*)		
	Perusahaan/ *The Company*	**Entitas anak/ *Subsidiaries***	**Konsolidasi/ *Consolidation***
Pajak Pertambahan Nilai/*Value Added Tax*	500.705.648	122.050.070	622.755.718
Pajak Penghasilan Pasal 28/*Income Tax Article 28*	155.688.743	111.486.950	267.175.693
Pajak dibayar di muka lainnya/*Other prepaid taxes*	7.500.000	--	7.500.000
Subjumlah pajak dibayar di muka - lancar/ *Subtotal of prepaid taxes - current*	**663.894.391**	**233.537.020**	**897.431.411**
Taksiran tagihan pajak - tidak lancar/ *Estimated claims for tax refund - non-current*	--	140.726.805	140.726.805
Jumlah/*Total*	**663.894.391**	**374.263.825**	**1.038.158.216**

*) Direkasifikasi pada catatan 57/
as reclassified in note 57

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2025		
	Perusahaan/ *The Company*	**Entitas anak/ *Subsidiaries***	**Konsolidasi/ *Consolidation***
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran WAPU/ *Value Added Tax - WAPU*	24.652.361	--	24.652.361
Pajak Pertambahan Nilai	--	127.557.898	127.557.898
Pajak Penghasilan/*Income Tax*			--
Pasal/*Article* 4 (2)	1.839.714	806.265	2.645.979
Pasal/*Article* 21	1.386.112	73.158.042	74.544.154
Pasal/*Article* 22	2.307.675	23.430.852	25.738.527
Pasal/*Article* 23	1.438.905	25.030.755	26.469.660
Pasal/*Article* 25	4.888.420	--	4.888.420
Pasal/*Article* 29	--	51.176.964	51.176.964
Surat tagihan pajak/*Tax assessment letters*	--	138.734.458	138.734.458
Jumlah/*Total*	**36.513.187**	**439.895.234**	**476.408.421**

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak (lanjutan) / *b. Taxes payable (continued)*

	2024		
	Perusahaan/ *The Company*	**Entitas anak/ *Subsidiaries***	**Konsolidasi/ *Consolidation***
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran WAPU/ *Value Added Tax - WAPU*	30.416.320	135.112.408	165.528.728
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/*Article* 4 (2)	2.332.556	2.583.965	4.916.521
Pasal/*Article* 21	5.141.675	40.484.255	45.625.930
Pasal/*Article* 22	2.382.482	30.313.709	32.696.191
Pasal/*Article* 23	1.297.639	11.525.972	12.823.611
Pasal/*Article* 25	5.804.837	--	5.804.837
Pasal/*Article* 29	--	37.303.629	37.303.629
Surat tagihan pajak/*Tax assessment letters*	--	100.701.338	100.701.338
Jumlah/*Total*	**47.375.509**	**358.025.276**	**405.400.785**

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan / *c. Income tax benefits/(expenses)*

	2025	2024	
Pajak kini:			*Current tax:*
Perusahaan	(119.382.325)	(159.050.623)	*The Company*
Entitas Anak	(12.385.329)	(14.679.455)	*Subsidiaries*
	(131.767.654)	(173.730.078)	
Pajak tangguhan:			*Deferred tax:*
Perusahaan	46.681.151	50.705.011	*The Company*
Entitas Anak	580.956	(14.528.657)	*Subsidiaries*
	47.262.107	36.176.354	
Jumlah	**(84.505.547)**	**(137.553.724)**	***Total***

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

d. Pajak kini / *d. Current tax*

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan penghasilan fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between (loss) profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and taxable income is as follows:

	2025	2024	
Laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	38.819.467	(921.190.216)	*Profit/(loss) before tax per consolidated statement of profit or loss*
Rugi sebelum pajak Entitas Anak	519.195.063	1.516.730.869	*Loss before tax of Subsidiaries*
Eliminasi	(115.386.298)	(69.586.418)	*Elimination*
Laba sebelum pajak Perusahaan	442.628.232	525.954.235	*Profit before tax of the Company*
Beda waktu:			*Timing differences:*
Imbalan pascakerja	30.213.704	37.932.988	*Post-employment benefit*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	218.794.299	115.285.078	*Allowance for impairment loss of trade and other receivables*
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	(17.654.808)	(17.284.110)	*Recovery of allowance for impairment loss of trade and other receivables*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan	31.780.179	304.851.863	*Provision for impairment loss of inventories*
Pemulihan provisi kerugian penurunan nilai persediaan	(143.625.765)	(89.461.054)	*Recovery of provision for impairment loss of inventories*
Liabilitas kontrak	--	(22.646.040)	*Contract liabilities*
Perubahan nilai wajar atas hak opsi	--	(112.488.806)	*Changes in fair value of option right*
Tantiem	--	5.613.484	*Tantiem*
Perubahan atas nilai wajar aset keuangan melalui laba rugi	(1.242.009)	24.231	*Changes in fair value of financial assets through profit or loss*
Selisih Beban Sewa	(17.254.648)	3.954.777	*Lease Expense Difference*
Defisit revaluasi tanah	--	473.500	*Deficit revaluation of land*
	101.010.952	226.255.911	
Beda tetap:			*Permanent difference:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	76.822.475	74.167.533	*Non-deductible expenses*
Penghasilan dikenakan pajak final	(77.814.728)	(103.420.299)	*Income subject to final tax*
	(992.253)	(29.252.766)	
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	542.646.931	722.957.380	*Estimated taxable income of the Company*
Beban pajak kini perusahaan	119.382.325	159.050.623	*Current tax expense of the company*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			*Less prepaid income tax*
Pasal 22	84.855.627	98.268.359	*Article 22*
Pasal 23	4.913.954	2.101.220	*Article 23*
Pasal 25	53.301.111	79.506.347	*Article 25*
Jumlah	143.070.692	179.875.926	*Total*
Taksiran lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan			***Estimated overpayment of corporate income tax of the Company***
2025	(23.688.367)	--	*2025*
2024	(20.825.303)	(20.825.303)	*2024*
Jumlah	**(44.513.670)**	**(20.825.303)**	***Total***

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

d. Pajak kini (lanjutan) / *d. Current tax (continued)*

Rekonsiliasi antara (beban) manfaat pajak penghasilan dengan hasil perkalian (rugi) laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax (expense) benefit and the amounts computed by applying the applicable tax rate to (loss) profit before income tax is as follows:

	2025	2024	
Laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	38.819.467	(921.190.216)	*Profit/(loss) before tax per consolidated statement of profit or loss*
Rugi sebelum pajak Entitas Anak	519.195.063	1.516.730.869	*Loss before tax of Subsidiaries*
Eliminasi	(115.386.299)	(69.586.418)	*Elimination*
Laba sebelum pajak Perusahaan	442.628.231	525.954.235	*Profit before tax of the Company*
Manfaat pajak sesuai tarif pajak efektif yang berlaku pada 22%	(97.378.211)	(115.709.932)	*Tax benefit by applying effective tax rates at 22%*
Pengaruh pajak atas penghasilan (beban) yang tidak dapat diperhitungkan			*Tax effects on non-deductible income (expense)*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(16.900.945)	(16.316.856)	*Non-deductible expenses*
Penghasilan dikenakan pajak final	17.119.240	22.752.466	*Income subjected to final tax*
Penyesuaian pajak tangguhan Perusahaan	24.458.742	928.710	*Adjustment due to deferred tax of the Company*
Beban pajak penghasilan Perusahaan	(72.701.174)	(108.345.612)	*Income tax expense of the Company*
Entitas Anak:			*Subsidiaries*
Pajak kini	(12.385.329)	(14.679.455)	*Current tax*
Pajak tangguhan	580.956	(14.528.657)	*Deferred tax*
Manfaat/(beban) pajak penghasilan konsolidasian	(84.505.547)	(137.553.724)	*Consolidated income tax benefit/(expense)*

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

e. Pajak tangguhan / *e. Deferred tax*

	2025						
	Saldo awal *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi tahun berjalan/ *Credited to profit or loss for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	Dampak dekonsolidasi/ *Impact of deconsolidation*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Perusahaan:							*Company:*
Kewajiban imbalan pascakerja	107.186.904	6.647.016	4.162.008	--	--	117.995.928	*Post employment benefits obligations*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	9.318.051	--	--	--	--	9.318.051	*Short-term employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	37.382.885	44.250.688	--	--	24.458.741	106.092.314	*Allowance for impairment loss of receivables*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan	159.828.335	(24.606.029)	--	--	--	135.222.306	*Provision for impairment loss of inventories*
Liabilitas kontrak	1.688.812	--	--	--	--	1.688.812	*Contract Liability*
Surplus revaluasi	(5.428.709)	--	--	--	--	(5.428.709)	*Surplus revaluation*
Defisit revaluasi	104.170	--	--	--	--	104.170	*Deficit revaluation*
Perubahan atas nilai wajar:							*Changes in fair value:*
Aset Keuangan	5.331	(273.242)	--	--	--	(267.911)	*Financial assets*
Selisih nilai sewa dan depresiasi PSAK 116	870.051	(3.796.022)	--	--	--	(2.925.971)	*Difference of lease value and depreciation of PSAK 116*
Subjumlah Perusahaan	**310.955.830**	**22.222.411**	**4.162.008**	**-**	**24.458.741**	**361.798.990**	***Subtotal of the Company***
Entitas anak	260.173.616	(8.665.579)	674.917	(841.411)	(3.287.745)	248.053.797	*Subsidiaries*
Subjumlah entitas anak	**260.173.616**	**(8.665.579)**	**674.917**	**(841.411)**	**(3.287.745)**	**248.053.797**	***Subtotal of subsidiaries***
Jumlah aset pajak tangguhan	**571.129.446**					**609.852.787**	***Total deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Entitas anak	(80.843.140)	12.118.907	--	--	--	(68.724.233)	*Subsidiaries*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	**(80.843.140)**					**(68.724.233)**	***Total deferred tax liabilities***

	2024						
	Saldo awal *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi tahun berjalan/ *Credited to profit or loss for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*		Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Perusahaan:							*Company:*
Kewajiban imbalan pascakerja	98.100.546	8.345.257	741.101		--	107.186.904	*Post employment benefits obligations*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	6.867.794	1.234.967	--		1.215.290	9.318.051	*Short-term employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	16.109.252	21.560.213	--		(286.580)	37.382.885	*Allowance for impairment loss of receivables*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan	112.442.357	47.385.978	--		--	159.828.335	*Provision for impairment loss of inventories*
Liabilitas kontrak	6.670.941	(4.982.129)	--		--	1.688.812	*Contract Liability*
Hak opsi	24.747.537	(24.747.537)	--		--	--	*Option right*
Surplus revaluasi	--	--	(5.428.709)		--	(5.428.709)	*Surplus revaluation*
Defisit revaluasi	--	104.170	--		--	104.170	*Deficit revaluation*
Perubahan atas nilai wajar:							*Changes in fair value:*
Aset keuangan	--	5.331	--		--	5.331	*Financial assets*
Selisih nilai sewa dan depresiasi PSAK 116	--	870.051	--		--	870.051	*Difference of lease value and depreciation of PSAK 116*
Subjumlah Perusahaan	**264.938.427**	**49.776.301**	**(4.687.608)**		**928.710**	**310.955.830**	***Subtotal of the Company***
Entitas anak	244.532.959	(16.759.419)	32.400.076		--	260.173.616	*Subsidiaries*
Subjumlah entitas anak	**244.532.959**					**260.173.616**	***Subtotal of subsidiaries***
Jumlah aset pajak tangguhan	**509.471.386**					**571.129.446**	***Total deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Entitas anak	(89.943.180)	2.230.762	6.869.278		--	(80.843.140)	*Subsidiaries*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	**(89.943.180)**					**(80.843.140)**	***Total deferred tax liabilities***

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

f. Surat ketetapan pajak / *f. Tax assessment letter*

PT Bio Farma (Persero)

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SKPKB PPh Badan 2020	00001/206/20/051/25	2020/ *2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	3.237.271	Lunas/ *Paid*
2	SKPKB PPh Pasal 21	00001/201/20/051/25	Januari - Desember 2020/ *January - December 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	956.814	Lunas/ *Paid*
3	SKPKB PPh Pasal 22	00001/202/20/051/25	Januari - Desember 2020/ *January - December 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	68.926	Lunas/ *Paid*
4	SKPKB PPh Pasal 23	00001/203/20/051/25	Januari - Desember 2020/ *January - December 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	138.543	Lunas/ *Paid*
5	SKPKB PPN	00001/207/20/051/25	April 2020/ *April 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	58.826	Lunas/ *Paid*
6	SKPKB PPN	00002/207/20/051/25	Mei 2020/ *May 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	6.415	Lunas/ *Paid*
7	SKPKB PPN	00003/207/20/051/25	Juli 2020/ *July 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	72.249	Lunas/ *Paid*
8	SKPKB PPN	00004/207/20/051/25	Agustus 2020/ *August 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	39.622	Lunas/ *Paid*
9	SKPKB PPN	00005/207/20/051/25	Oktober 2020/ *October 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	76.321	Lunas/ *Paid*
10	SKPKB PPN	00006/207/20/051/25	November 2020/ *November 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	78.832	Lunas/ *Paid*
11	SKPKB PPN	00007/207/20/051/25	Desember 2020/ *December 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	58.480	Lunas/ *Paid*
12	SKPKB PPN	00008/207/20/051/25	Maret 2020/ *March 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	58.875	Lunas/ *Paid*
13	SKPKB PPN	00009/207/20/051/25	Juni 2020/ *June 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	62.501	Lunas/ *Paid*
14	SKPKB PPN	00010/207/20/051/25	September 2020/ *September 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	130.354	Lunas/ *Paid*
15	SKPKB PPN	00001/287/20/051/25	April 2020/ *April 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	4.457	Lunas/ *Paid*
16	SKPKB PPN	00002/287/20/051/25	Agustus 2020/ *August 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	2.854	Lunas/ *Paid*
17	SKPKB PPN	00003/287/20/051/25	Desember 2020/ *December 2020*	21 Maret 2025/ *March 21, 2025*	21.656	Lunas/ *Paid*
18	STP PPh 21	00122/101/24/051/25	Oktober 2024/ *October 2024*	2025/ *2025*	6.156	Lunas/ *Paid*
19	STP PPh 21	00120/101/24/051/25	Agustus 2024/ *August 2024*	2025/ *2025*	1.404	Lunas/ *Paid*
20	STP PPh 21	00121/101/24/051/25	September 2024/ *September 2024*	2025/ *2025*	3.283	Lunas/ *Paid*
21	STP PPh 21	00125/101/24/051/25	Juni 2024/ *June 2024*	2025/ *2025*	22.203	Lunas/ *Paid*
22	STP PPh 21	00124/101/24/051/25	April 2024/ *April 2024*	2025/ *2025*	2.733	Lunas/ *Paid*
23	STP PPh 21	00123/101/24/051/25	November 2024/ *November 2024*	2025/ *2025*	3.971	Lunas/ *Paid*
24	STP PPN	00006/187/24/051/25	Juli 2024/ *July 2024*	2025/ *2025*	183.147	Lunas/ *Paid*
25	STP PPN	00003/187/24/051/25	April 2024/ *April 2024*	2025/ *2025*	86.186	Lunas/ *Paid*

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *f. Tax assessment letter (continued)*

PT Bio Farma (Persero)

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
26	STP PPN	00004/187/24/051/25	Mei 2024/ *May 2024*	2025/ *2025*	181.203	Lunas/ *Paid*
27	STP PPN	00005/187/24/051/25	Juni 2024/ *June 2024*	2025/ *2025*	104.836	Lunas/ *Paid*
28	STP PPN	00033/107/24/051/25	Juni 2024/ *June 2024*	2025/ *2025*	65.462	Lunas/ *Paid*
29	STP PPh 21	00067/101/24/051/25	November 2024/ *November 2024*	2025/ *2025*	37.161	Lunas/ *Paid*
30	STP PPh 21	00066/101/24/051/25	Oktober 2024/ *October 2024*	2025/ *2025*	49.814	Lunas/ *Paid*
31	STP PPh 21	00064/101/24/051/25	Agustus 2024/ *August 2024*	2025/ *2025*	51.154	Lunas/ *Paid*
32	STP PPh 21	00065/101/24/051/25	September 2024/ *September 2024*	2025/ *2025*	36.662	Lunas/ *Paid*
33	STP PPN	00002/107/24/051/25	Agustus 2024/ *August 2024*	2025/ *2025*	121.277	Lunas/ *Paid*
34	STP PPN	00002/187/24/051/25	Maret 2024/ *March 2024*	2025/ *2025*	220.181	Lunas/ *Paid*
35	STP PPN	00001/187/24/051/25	Februari 2024/ *February 2024*	2025/ *2025*	155.130	Lunas/ *Paid*
36	STP PPN	00008/107/24/051/25	November 2024/ *November 2024*	2025/ *2025*	500	Lunas/ *Paid*
37	STP PPN	00007/107/24/051/25	Oktober 2024/ *October 2024*	2025/ *2025*	187.513	Lunas/ *Paid*
38	STP PPN	00005/107/24/051/25	Juli 2024/ *July 2024*	2025/ *2025*	23.071	Lunas/ *Paid*
39	STP PPN	00006/107/24/051/25	September 2024/ *September 2024*	2025/ *2025*	109.056	Lunas/ *Paid*
40	STP PPN	00026/107/24/051/25	November 2024/ *November 2024*	2025/ *2025*	45.991	Lunas/ *Paid*
41	STP PPN	00260/101/24/051/25	Desember 2024/ *December 2024*	2025/ *2025*	61.862	Lunas/ *Paid*

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SPMKP PPN	KEP-00214/KP-CT/KPP.0612/2025	Desember 2023/ *December 2023*	7 Mei 2025/ *May 7, 2025*	513.746	Lunas/ *Paid*
2	SPMKP PPh Badan	KEP-00181/KP-CT/KPP.0612/2025	Desember 2023/ *December 2023*	29 April 2025/ *April 29, 2025*	748.794	Lunas/ *Paid*
3	SKPKB PPh Pasal 21	00043/201/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	198.856	Lunas/ *Paid*
4	SKPKB PPh Pasal 23	00071/203/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	44.587	Lunas/ *Paid*
5	STP PPN	00104/107/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(73.012)	Belum Lunas/ *Unpaid*
6	SKPKB PPh Pasal 4 (2)	00049/240/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(32.420)	Belum Lunas/ *Unpaid*
7	SKPKB PPh 21	00043/201/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(198.856)	Lunas/ *Paid*
8	SKPKB PPh 23	00071/203/23/073/25	Desember 2023/ *December 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(44.587)	Lunas/ *Paid*
9	SKPKB PPN	00247/207/23/073/25	Januari 2023/ *January, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(5.341)	Belum Lunas/ *Unpaid*

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *f. Tax assessment letter (continued)*

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
10	SKPKB PPN	00248/207/23/073/25	Februari 2023/ *February, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(790)	Belum Lunas/ *Unpaid*
11	SKPKB PPN	00249/207/23/073/25	Maret 2023/ *March, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(2.937)	Belum Lunas/ *Unpaid*
12	SKPKB PPN	00250/207/23/073/25	April 2023/ *April, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(2.592)	Belum Lunas/ *Unpaid*
13	SKPKB PPN	00251/207/23/073/25	Mei 2023/ *May, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(3.035)	Belum Lunas/ *Unpaid*
14	SKPKB PPN	00252/207/23/073/25	Juni 2023/ *June, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(2.532)	Belum Lunas/ *Unpaid*
15	SKPKB PPN	00253/207/23/073/25	Juli 2023/ *July, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(783)	Belum Lunas/ *Unpaid*
16	SKPKB PPN	00254/207/23/073/25	Agustus 2023/ *August, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(1.128)	Belum Lunas/ *Unpaid*
17	SKPKB PPN	00255/207/23/073/25	Oktober 2023/ *October, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(289)	Belum Lunas/ *Unpaid*
18	SKPKB PPN	00256/207/23/073/25	November 2023/ *November, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	(139)	Belum Lunas/ *Unpaid*
19	SKPLB PPh	00068/406/23/073/25	2023/ *2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	867.909	Belum Lunas/ *Unpaid*
20	SKPLB PPN	00030/407/23/073/25	Desember 2023/ *December, 2023*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	513.746	Belum Lunas/ *Unpaid*
21	SKPLB PPN	00073/407/24/073/25	Desember 2024/ *December, 2024*	17 April 2025/ *April 17, 2025*	54.383	Belum Lunas/ *Unpaid*

Entitas anak
PT Phapros Tbk

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SKPKB	00006/204/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	20.607	Lunas/ *Paid*
2	SKPKB PPh 4(2)	00018/240/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	3.405	Lunas/ *Paid*
3	SKPKB PPN	00168/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	4.452	Lunas/ *Paid*
4	SKPKB PPN	00169/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	176	Lunas/ *Paid*
5	SKPKB PPN	00170/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	5.390	Lunas/ *Paid*
6	SKPKB PPN	00171/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	106	Lunas/ *Paid*
7	SKPKB PPN	00172/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	276	Lunas/ *Paid*
8	SKPKB PPN	00172/207/23/051/25	2023/ *2023*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	1.156	Lunas/ *Paid*
9	SKPLB PPh	00031/406/23/051/25	Maret 2025/ *March 2025*	30 April 2025/ *April 30, 2025*	(9.244.247)	Lunas/ *Paid*
10	SKPKKP	KEP-00015/PPN/KPP.1903/2025	Maret 2025/ *March 2025*	04 Februari 2025/ *February 04, 2025*	(12.005)	Lunas/ *Paid*
11	SKPKKP	00012/703/25/051/CT/25	Maret 2025/ *March 2025*	19 Mei 2025/ *May 19, 2025*	(886.535)	Lunas/ *Paid*
12	SKPKKP	00096/SKPPKP/KPP.1903/2025	Maret 2025/ *March 2025*	07 Agustus 2025/ *August 07, 2025*	(9.133.277)	Lunas/ *Paid*
13	STP PPN	00015/107/25/051/CT/25	Maret 2025/ *March 2025*	15 Juli 2025/ *July 15, 2025*	302	Lunas/ *Paid*
14	SKPLB PPh 23	.00001/495/25/051/CT/25	Maret 2025/ *March 2025*	02 Desember 2025/ *December 02, 2025*	150	Lunas/ *Paid*

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *f. Tax assessment letter (continued)*

PT Kimia Farma Trading & Distribution

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SKPLB PPh Badan	00055/406/23/051/25	2023/ *2023*	Juli 2025/ *July 2025*	25.974.241	Lunas/ *Paid*
2	SKPPKP PPN	00036/SKPPKP/KPP.1903/2025	Desember 2024/ *December 2024*	Maret 2025/ *March 2025*	100.527.297	Lunas/ *Paid*
3	SKPPKP PPN	00032/703/25/051/CT/25	Juni 2025/ *June 2025*	Agustus 2025/ *August 2025*	87.285.059	Lunas/ *Paid*

PT Lucas Djaja

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SPMKP	00498A	2025/ *2025*	24 Juli 2025/ *July 24, 2025*	374.232	Lunas/ *Paid*
2	SPMKP	00747A	2025/ *2025*	17 Oktober 2025/ *October 17, 2025*	1.799.466	Lunas/ *Paid*

PT Marin Liza Farmasi

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SPMKP PPN	00359A	2025/ *2025*	7 Mei 2025/ *May 7, 2025*	1.812.248	Lunas/ *Paid*
2	SPMKP PPh	00494A	2025/ *2025*	10 Juni 2025/ *June 10, 2025*	649.022	Lunas/ *Paid*
3	SPMKP PPN	00565A	2025/ *2025*	23 Juni 2025/ *June 23, 2025*	589.292	Lunas/ *Paid*
4	SPMKP PPN	KEP-00459/KP-CT/KPP.0917/2025	2025/ *2025*	28 Agustus 2025/ *August 28, 2025*	606.471	Lunas/ *Paid*

PT Sinkona Indo Lestari

No./ *Num.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Pajak/ *Tax Letter Number*	Periode Pajak/ *Tax Period*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Nilai Pajak/ *Tax Amount*	Status/ *Status*
1	SKPLB PPh 25/29	00035/406/23/051/25	Januari - Desember 2023/ *January - December 2023*	29 April 2025/ *April 29, 2025*	1.270.524	Lunas/ *Paid*

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023

Pada tanggal 23 Juni 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. 00052/406/23/051/25 atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2023 dengan nilai lebih bayar pajak sebesar Rp129.281.175.246 (nilai penuh). Atas lebih bayar tersebut dikompensasikan ke Deposit Pajak *(Tax Deposit)* sebesar Rp123.364.218.165 (nilai penuh) pada tanggal 11 Juli 2025. Selain itu, sebesar Rp5.916.957.081 digunakan untuk pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, PPh 21, serta Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang terbit pada tahun 2025.

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2022

Pada tanggal 26 Juli 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PRIN-250/ RIKSIS/KPP.1903/2023 atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2022.

Pada tanggal 20 Mei 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan surat No. 00003/206/ 22/051/24, yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp29.146.624.963 (nilai penuh) dan per tahun 2024 atas nilai tersebut telah dibayarkan.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

The Company

Corporate Income Tax for Fiscal Year 2023

On June 23, 2025, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) No. 00052/406/23/051/25 from the Directorate General of Taxes (DGT) in respect of corporate income tax for the 2023 fiscal year, confirming a tax overpayment amounting to Rp129,281,175,246 (full amount). The tax overpayment was credited to the Tax Deposit account amounting to Rp123,364,218,165 (full amount) on July 11, 2025. In addition, an amount of Rp5,916,957,081 was utilized to settle VAT Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB), Article 21 Income Tax Underpayment Tax Assessment Letters, and VAT Tax Collection Letters (STP) issued in 2025.

Corporate Income Tax for Fiscal Year 2022

On July 26, 2023, the Company received a Tax Audit Notification from the Directorate General of Taxes (DGT) No. PRIN-250/RIKSIS/ KPP.1903/2023 on corporate income tax for fiscal year 2022.

On May 20, 2024, the Company received an Notice of Tax Underpayment Assessment (SKPKB) on corporate income tax for fiscal year 2022 from the Directorate General of Taxes (DGT) with letter No. 00003/206/22/051/24, which stated that the Company had underpaid corporate income tax for fiscal year 2022 amounting to Rp29,146,624,963 (full amount) and as of 2024 the outstanding amount has been paid.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PRIN-141/RIKSIS/KPP.1903/2024 atas pajak penghasilan badan tahun 2020.

Pada tanggal 21 Maret 2025, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan surat No. 00001/206/20/051/25, yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2020 sebesar Rp3.237.270.514 (nilai penuh).

Pembayaran atas kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2020 dilakukan dengan kompensasi utang pajak melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. KEP-00039/KP-CT/KPP.1903/2025 tertanggal 23 April 2025.

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019

Pada tanggal 19 Oktober 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PRIN-397/RIKSIS/KPP.1903/2023 atas pajak penghasilan badan tahun 2019.

Hasil pemeriksaan pajak oleh DJP atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00015/206/19/051/24 pada tanggal 19 September 2024 dengan jumlah kurang bayar atas PPh Badan yang telah disetujui sebesar Rp2.639.881 dan Perusahaan sudah membayarkan atas kurang bayar tersebut pada tanggal 15 Oktober 2024.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

The Company (continued)

Corporate Income Tax for Fiscal Year 2020

On June 21, 2024, the Company received a Tax Audit Notification Letter from the Directorate General of Taxes (DGT) No. PRIN-141/RIKSIS/KPP.1903/2024 concerning the 2020 corporate income tax.

On March 21, 2025, the Company received a Tax Underpayment Assessment from the Directorate General of Taxes (DGT) through Letter No. 00001/206/20/051/25, which stated that the Company had an underpayment of corporate income tax for the 2020 fiscal year amounting to Rp3,237,270,514 (full amount).

The corporate income tax underpayment for the 2020 fiscal year was settled through the compensation of tax liabilities by way of deduction from the Tax Overpayment Refund Payment Order (SPMKP) No. KEP-00039/KP-CT/KPP.1903/2025 dated April 23, 2025.

Corporate Income Tax for Fiscal Year 2019

On October 19, 2023, the Company received a Tax Audit Notification Letter from the Directorate General of Taxes (DGT) No. PRIN-397/RIKSIS/KPP.1903/2023 on corporate income tax for fiscal year 2019.

As a result of the tax audit by the Directorate General of Taxes (DGT) on Corporate Income Tax for fiscal year 2019, the Company has received a Tax Assessment Notice (SKPKB) No. 00015/206/19/051/24 dated September 19, 2024, with an approved underpayment of Corporate Income Tax amounting to Rp2,639,881, which the Company has been paid on October 15, 2024.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2025 sebesar Rp331.034.704 setelah memperhitungkan:

- Restitusi PPN Masa Juni 2024 sebesar Rp195.425.715 Sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. KEP-00002/SKPPKP/KPP. 1903/2025 tanggal 14 Januari 2025;
- Restitusi PPN Masa Desember 2024 sebesar Rp290.227.516 Sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. KEP-00060/SKPPKP/KPP. 1903/2025 tanggal 26 Maret 2025;
- Restitusi PPN Masa September 2025 sebesar Rp148.194.038 Sesuai Surat No. KEP-00482/KP-CT/KPP.1903/2025 tanggal 17 November 2025;

Entitas Anak

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan menerima Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan pasal badan sebesar Rp45.345.901. Ketetapan ini telah tertuang pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00053/406/22/051/24 tanggal 17 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut.

Selama tahun 2025 perusahaan tidak menerima Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

The Company (continued)

Value Added Tax (VAT) Input

The balance of VAT Input as of December 31, 2025 amounted to Rp331,034,704 after calculated:

- *VAT refund for June 2024 amounted to Rp195,425,715 according to Tax Overpayment Refund Instruction (SPMKP) No. KEP-00002/SKPPKP/KPP. 1903/2025 dated January 14, 2025;*
- *VAT refund for December 2024 amounted to Rp290,227,516 according to Tax Overpayment Refund Instruction (SPMKP) No. KEP-00060/SKPPKP/KPP. 1903/2025 dated March 26, 2025;*
- *VAT refund for September 2025 amounted to Rp148,194,038 according to No. KEP-00482/KP-CT/KPP.1903/2025 dated November 17, 2025.*

Subsidiaries

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Corporate Income Tax

The Company received a Decision Letter on the Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) of Corporate Income amounting to Rp45,345,901. This stipulation has been stated in the Notice of Overpayment Assessment No. 00053/406/22/051/24 dated July 17, 2024. As of December 31, 2024, the Company has received a refund of the overpayment.

During 2025, the Company did not receive any Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Phapros Tbk (PEHA)

Pada tahun 2025, PEHA menerima surat restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai masa Maret 2024 berdasarkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (SKPPKP) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2023 dengan total Rp19.240.043.

Setelah tanggal pelaporan, PEHA menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") dari otoritas pajak untuk tahun pajak 2024 dan 2025 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.917.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas SKP dan STP tersebut dan berpendapat bahwa kewajiban terkait telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Oleh karena itu, penerbitan SKP dan STP tersebut tidak menimbulkan dampak penyesuaian material terhadap laporan keuangan, namun diungkapkan sebagai peristiwa setelah periode pelaporan.

PT Marin Liza Farmasi (MLF)

Pada tahun 2025, PT Marin Liza Farmasi menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMKP) Pajak Pertambahan Nilai selama periode tahun 2025 dengan total Rp5.830.731.

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)

KFTD menerima Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 dengan No. 00055/406/23/051/25 sebesar Rp25.974.241 yang diterima pada bulan Juli 2025.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Phapros Tbk (PEHA)

In 2025, PEHA has received the restitution letter of Value Added Tax for March 2025 based on preliminary return for tax overpayment (SKPPKP) and an Overpaid Tax Assessment Letter (SKPLB) Corporate Income Tax of 2023 Rp19,240,043.

Subsequent to the reporting date, the PEHA received several Tax Assessment Letters ("SKP") and Tax Collection Letters ("STP") from the tax authorities for the 2024 and 2025 fiscal years, with a total amount of Rp15,917.

Management has evaluated these SKP and STP and believes that the related liabilities have been adequately provided for in the financial statements for the year ended December 31, 2025. Accordingly, the issuance of these SKP and STP does not have a material adjusting impact on the financial statements and therefore has been disclosed as a subsequent event.

PT Marin Liza Farmasi (MLF)

In 2025, PT Marin Liza Farmasi received an Order to Pay Excess Value Added Tax (SPMKP) for the period of 2025 Rp5,830,731.

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD)

KFTD received a Corporate Income Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for the 2023 fiscal year, No. 00055/406/23/051/25, amounting to Rp25,974,241, which was received in July 2025.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) (lanjutan)

Selain itu, KFTD menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai dengan No. KEP-00036/SKPPKP/ KPP.1903/2025 sebesar Rp100.527.297 atas masa pajak Desember 2024 yang diterima pada bulan Maret 2025.

KFTD juga menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai dengan No. 00032/703/25/051/CT/25 sebesar Rp87.285.059 atas masa pajak Juni 2025 yang diterima pada bulan Agustus 2025.

Per 31 Desember 2025, KFTD masih dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2024 yang dilaporkan lebih bayar. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, hasil akhir pemeriksaan belum diterima. Manajemen berpendapat bahwa jumlah lebih bayar yang dilaporkan dapat dipulihkan.

PT Kimia Farma Apotek (KFA)

Pada September 2024, KFA telah menerima surat ketetapan pajak untuk berbagai jenis pajak dari tahun pajak 2019. KFA telah menyetujui seluruh ketetapan tersebut dan telah mencatat penyesuaian dari putusan tersebut sebesar Rp2,9 Miliar dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)

Pemeriksaan pajak penghasilan tahun pajak 2023 dan pemeriksaan pajak pertambahan nilai masa Desember tahun 2024 telah selesai di tahun 2025, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) telah diterima oleh KFSP sebesar Rp1.316.923.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) (continued)

In addition, KFTD received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax, No. KEP- 00036/SKPPKP/KPP.1903/2025, amounting to Rp100,527,297 for the December 2024 tax period, which was received in March 2025.

KFTD also received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax, No. 00032/703/25/051/CT/25, amounting to Rp87,285,059 for the June 2025 tax period, which was received in August 2025.

As of December 31, 2025, KFTD is still undergoing a tax audit conducted by the Directorate General of Taxes on its 2024 Corporate Income Tax Annual Return, which reported an overpayment. As of the date of these financial statements, the final audit result has not yet been received. Management believes that the reported overpayment is recoverable.

PT Kimia Farma Apotek (KFA)

In September 2024, KFA received tax assessments for underpayment of various taxes in respect 2019 fiscal years. KFA has fully accepted the assessments and recorded adjustments of Rp2.9 Billion profit or loss for the year ended December 31, 2023.

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)

The audit of Corporate Income Tax for fiscal year 2023 and the audit of Value Added Tax for the December 2024 tax period were completed in 2025, and the Company has received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) amounting to Rp1,316,923.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) (lanjutan)

Pada tahun 2025, KFSP menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dari DJP atas pajak pertambahan nilai untuk masa Desember tahun 2024 dan atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2024. Sampai dengan laporan keuangan diterbitkan, proses pemeriksaan pajak tersebut yang masih berjalan.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 187/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga Pajak Penghasilan Pasal 23 Februari 2021 - Desember 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp241.431.575. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 188/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga Pajak Penghasilan Pasal 21 Februari 2021 - Desember 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp2.265.989.616. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) (continued)

In 2025, KFSP received a Tax Audit Notification Letter from the Directorate General of Taxes (DGT) concerning Value Added Tax for the December 2024 tax period and Corporate Income Tax for the 2024 fiscal year. As of the issuance date of the financial statements, the tax audit process is still ongoing.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 187/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Income Tax Article 23 for the period from February 2021 to December 2021, amounting to Rp241,431,575. As of the financial reporting date, INAF has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 188/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Income Tax Article 21 for the period from February 2021 to December 2021, amounting to Rp2,265,989,616. As of the financial reporting date, the Company has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 187/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga Pajak Penghasilan Pasal 22 Februari 2021 - Desember 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp2.313.182.416. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 187/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Februari 2021 - Desember 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp66.545.551. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 187/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga PPN 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp7.079.300.564. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 187/KPP.1903/2026 pada tanggal 26 Februari 2026, PT Indofarma Tbk memperoleh STP atas bunga PPH badan 2021, dengan nilai sanksi sebesar Rp20.777.983.484. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, INAF belum membayarkan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 187/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Income Tax Article 22 for the period from February 2021 to December 2021, amounting to Rp2,313,182,416. As of the financial reporting date, the Company has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 187/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Income Tax Article 4(2) for the period from February 2021 to December 2021, amounting to Rp66,545,551. As of the financial reporting date, INAF has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 187/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Value Added Tax (VAT) for fiscal year 2021, amounting to Rp7,079,300,564. As of the financial reporting date, INAF has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

Based on Tax Assessment Letter (SKP) No. 187/KPP.1903/2026 dated February 26, 2026, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes, PT Indofarma Tbk received a Tax Collection Letter (STP) for interest penalties related to Corporate Income Tax for fiscal year 2021, amounting to Rp20,777,983,484. As of the financial reporting date, the Company has not yet settled the Tax Assessment Letter (SKP).

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Indofarma Global Medika (IGM)

Pajak Penghasilan Badan

Saldo pajak dibayar di muka atas pajak penghasilan badan merupakan nilai lebih bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan IGM tahun 2023 yang dilaporkan pada tanggal 18 November 2024.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, IGM masih dalam proses pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2023.

Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 00011/SKPPKP/KPP.1903/2024 pada tanggal 5 Februari 2024, IGM memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2023, dengan nilai sebesar Rp2.401.101. Pada tanggal 12 Desember 2024, IGM telah menerima pembayaran atas restitusi tersebut sesuai dengan SPMKP No. 00838A tanggal 10 Desember 2024. Selisih hasil restitusi dengan catatan IGM sebesar Rp3.070 telah dibukukan sebagai beban pajak pada tahun 2024.

Berdasarkan SKPPKP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 00016/SKPPKP/KPP.1903/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, IGM memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN Masa Januari 2023, dengan nilai sebesar Rp2.153.234. Pada tanggal 20 Desember 2024, IGM telah menerima pembayaran atas restitusi tersebut sesuai dengan SPMKP 2024. Selisih hasil restitusi dengan catatan IGM No. 00853A tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp743.986 telah dibukukan sebagai beban pajak pada tahun 2024.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Indofarma Global Medika (IGM)

Corporate Income Tax

The balance of prepaid tax from corporate income taxes represents the overpayment amount based on Annual Tax Return for the year of 2023 from IGM which reported on November 18, 2024.

Until the date of issuance of this consolidated financial statements, IGM is in the audit process from the Directorate General of Taxes of Republic Indonesia for overpayment in corporate income tax for the year of 2023.

Value-Added Tax

Based on the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) from the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, No. 00011/SKPPKP/KPP.1903/2024 dated February 5, 2024, IGM obtained a preliminary refund of overpaid Value Added Tax (VAT) for the February 2023 tax period in the amount of Rp2,401,101. As of December 12, 2024, IGM has received the refund for this overpayment based on SPMKP No. 00838A dated December 10, 2024. The difference between the refund result with IGM recordings amounting to Rp3,070 has been recorded as tax expense in the 2024 financial year.

Based on SKPPKP from the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, No. 00016/SKPPKP/KPP.1903/2024 dated February 15, 2024, IGM obtained a preliminary refund of overpaid Value Added Tax (VAT) for the January 2023 tax period in the amount of Rp2,153,234. As of December 20, 2024, IGM has received the refund for this overpayment based on SPMKP No. 00853A dated December 18, 2024 amounting to Rp743,986 has been recorded as tax expense in the 2024 financial year.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (lanjutan)

Berdasarkan SKPPKP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak No. 00013/SKPPKP/KPP.1903/2024 pada tanggal 13 Februari 2024, IGM memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN Masa Januari 2023, dengan nilai sebesar Rp2.448.588. Pada tanggal 10 Januari 2025, IGM telah menerima pembayaran atas restitusi tersebut sesuai dengan SPMKP No. 00019A tanggal 7 Januari 2025.

g. Administrasi perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

**h. Aturan Model Pilar *Dua Organization for Economic Cooperation and Development*
(“OECD”)**

Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. PMK-136 Tahun 2024 (“PMK-136”) telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat perseroan didirikan, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Grup sedang dalam proses menilai apakah mereka termasuk dalam cakupan model Pilar Dua dan terdapat eksposur terhadap PMK-136 saat PMK-136 diberlakukan. Dikarenakan kompleksitas dalam penerapan PMK-136 dan perhitungan pendapatan *Global Anti-Base Erosion* (”GloBE”) dampak PMK-136 yang telah diundangkan belum dapat diperkirakan secara wajar.

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (continued)

Based on the SKPPKP from the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, No. 00013/SKPPKP /KPP.1903/2024 dated February 13, 2024, IGM obtained a preliminary refund of overpaid Value Added Tax (VAT) for the January 2023 tax period in the amount of Rp2,448,588. As of January 10, 2025, IGM have received the refund for this overpayment based on SPMKP No. 00019A dated January 7, 2025.

g. Tax administration

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

h. The Organisation for Economic Cooperation and Development (“OECD”) Pillar Two Model Rules

The Minister of Finance Regulator (“PKM”) No. PMK-136 of 2024 (“PMK-136”) has been enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and is effective as of January 1, 2025.

The Group is in the process of assessing whether they are within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when PMK-136 comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating Global Anti-Base Erosion (“GloBE”) income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

12. ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL / *12. NON-CURRENT ASSET HELD FOR SALE*

	2025	2024	
Nilai Wajar	350.460.000	-	*Fair value*
Biaya untuk menjual	(11.401.851)	-	*Cost to sale*
Total	**339.058.149**	**-**	*Total*

Berdasarkan Rencana Restrukturisasi Perusahaan Bio Farma Grup Tahun 2025-2035 tertanggal 17 Desember 2025 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("BP-BUMN") sesuai dengan suratnya No. S-180/BPU/12/2025 tertanggal 30 Desember 2025, akan dilakukan pengalihan lahan Cikarang milik Perusahaan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk keperluan pembangunan fasilitas produksi PT Bio Farma (Persero) dan modal kerja Perusahaan. Pada tahun 2025, terjadi kerugian penurunan nilai sehubungan dengan lahan tersebut sebesar Rp11.401.851 yang diakui sebagai beban lain-lain.

Based on the Bio Farma Group Corporate Restructuring Plan for 2025–2035 dated December 17, 2025, which was approved by the head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency of the Republic of Indonesia ("BP-BUMN") through letter No. S-180/BPU/12/2025 dated December 30, 2025, the Company plans to transfer the Cikarang land to PT Bio Farma (Persero) for the development of production facilities and to support the Company's working capital. In 2025, the Company recognized an impairment loss related to the land amounting to Rp11,401,851, which was recorded as other expenses.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran KAEF tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 dan Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma Tbk No. KEP.016/DIR/HUK/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma Tbk tanggal 9 Agustus 2024 No. KEP.027/DIR/ HUK/VIII/2024 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aset Tanah dan Bangunan Milik PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Based on KAEF Work Plan and Budget for2026 dated January 2, 2026 and the Decree of the Board of Directors of PT Kimia Farma Tbk No. KEP.016/DIR/HUK/V/2025 dated May 14, 2025 regarding the amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Kimia Farma Tbk dated August 09, 2024 No. KEP.027/DIR/HUK/VIII/2024 concerning the Guidelines for the Transfer of Land and Building Assets of PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *13. INVESTMENT IN ASSOCIATE*

	2025	2024	
Saldo awal	2.062.735	1.642.691	*Beginning balance*
Bagian laba perusahaan asosiasi (Catatan 44)	467.105	512.132	*Share in profit of associate (Note 44)*
Dividen	(211.180)	(92.088)	*Dividend*
Saldo akhir	**2.318.660**	**2.062.735**	***Ending balance***

Pada tahun 2000, PT Indofarma Tbk, entitas anak menempatkan investasi sebagai penyertaan saham kepada PT Asindo Husada Bhakti (AHB) dengan kepemilikan 20%. Nilai tercatat investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 20% dari total ekuitas.

In 2000, PT Indofarma Tbk, a subsidiary, made an investment in shares of PT Asindo Husada Bhakti (AHB) with a 20% ownership interest. The carrying amount of the investment as of December 31, 2025 and 2024 represented 20% of the total equity.

14. ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

14. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Nilai penyertaan/ *Investment value*		Nilai wajar/ *Fair value*	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	%	%				
PT Raudhatussyifaa Sehat Bersama	19,8000	19,8000	19.362.000	19.362.000	19.362.000	19.362.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	0,0028	0,0028	56.181	56.181	56.181	56.181
PT Promosindo Medika	19,0000	19,0000	--	--	--	--
Total			**19.418.181**	**19.418.181**	**19.418.181**	**19.418.181**

Pada tanggal 26 Juni 2024, Grup mengalihkan 100.000 lembar saham atau setara dengan 10% dari saham yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia kepada PT Asuransi Jiwa IFG, dengan nilai pengalihan sebesar Rp229.000.000.000 (nilai penuh) berdasarkan Akta Jual Beli saham No. 89 tanggal 26 Juni 2024 di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., di Jakarta. Nilai pengalihan atas saham yang dijual tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan merujuk pada laporan penilaian No. 00343/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

On June 26, 2024, the Group transferred 100,000 shares or equivalent to 10% of the shares issued by PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia to PT Asuransi Jiwa IFG, with a transfer value amounted Rp229,000,000,000 (full amount) based on the Deed Sale of Shares No. 89 dated June 26, 2024 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., in Jakarta. The Value of Shares Transferred has been assessed by KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan in accordance with the appraisal report No. 00343/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 dated June 21, 2024.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF), entitas anak menjual kepemilikan saham sebanyak 10% kepada PT Asuransi Jiwa IFG berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 89 tanggal 26 Juni 2024 oleh Notaris Mala Mukti yang berkedudukan di Jakarta. Nilai divestasi tersebut adalah sebesar Rp229.000.000. Sesuai dengan nilai wajar investasi saham, KAEF mengakui keuntungan atas divestasi saham sebesar Rp15.153.000 yang dicatatkan pada pendapatan lain-lain.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF), a subsidiary sold its 10% shareholding to PT Asuransi Jiwa IFG based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 89 on June 26, 2024, Notary Mala Mukti domiciled in Jakarta. The value of the divestment amounted to Rp229,000,000. In accordance with the fair value of the investment, KAEF recognized gain on divestment amounted to Rp15,153,000, which was recorded under other income.

INAF membentuk pencadangan sebesar 100% atas investasi saham PT Promosindo Medika yang dimiliki oleh IGM, entitas anak INAF. Pembentukan pencadangan ini dilakukan berdasarkan evaluasi atas kondisi keuangan dan prospek operasional PT Promosindo Medika, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi yang berlaku.

INAF recognized a 100% allowance for the equity investment in PT Promosindo Medika held by IGM, a subsidiary of INAF. This allowance was established based on an evaluation of the financial condition and operational prospects of PT Promosindo Medika, taking into account the prudence principle and applicable accounting standards.

15. ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

Aset keuangan ini merupakan penempatan pada reksa dana yang dikelola oleh PT BNI Life Sekuritas dengan nilai aset bersih reksa dana pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp20.999.392 dan Rp9.975.769.

15. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

This financial asset represents an investment in a mutual fund managed by PT BNI Life Sekuritas with the net asset value of the mutual fund as of December 31, 2025, and 2024 is Rp20,999,392 and Rp9,975,769.

16. ASET TETAP / *16. FIXED ASSETS*

	2025									
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penurunan/ *Impairment*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Dampak dekonsolidasi/ *Impact of deconsolidation*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:										*At cost:*
Kepemilikan langsung										*Direct ownership*
Tanah	9.185.531.780	–	–	–	(350.787.850)	(200.270.407)	(27.353.309)	32.410.243	8.639.530.457	*Land*
Bangunan dan prasarana	3.429.378.963	38.214.687	–	(10.966.141)	313.041.145	–	(22.655.855)	5.408.600	3.752.421.399	*Building and infrastructure*
Renovasi bangunan	1.146.194.952	39.327.000	–	(95.000)	35.432.000	–	–	–	1.220.858.952	*Leasehold improvement*
Mesin dan instalasi	4.993.892.614	5.464.863	–	(54.776.303)	589.257.586	1.087.520	(8.724.451)	(21.070.112)	5.505.131.717	*Machinery and installation*
Perabot dan peralatan	1.466.002.611	23.014.766	–	(20.084.729)	37.384.013	–	(34.632.906)	(15.238)	1.471.668.517	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	204.302.667	113.509	–	(662.569)	–	–	(1.534.810)	–	202.218.797	*Vehicles*
Aset pengampunan pajak	6.019.704	–	–	–	–	–	–	–	6.019.704	*Tax amnesty assets*
Aset dalam penyelesaian	2.507.157.425	671.103.069	–	(71.153.360)	(976.661.528)	–	–	(38.269.391)	2.092.176.215	*Construction in progress*
Jumlah	22.938.480.716	777.237.894	–	(157.738.102)	(352.334.634)	(199.182.887)	(94.901.331)	(21.535.898)	22.890.025.758	*Total*
Dikurangi penurunan nilai tercatat	(37.114.365)	–	–	–	–	–	–	623.500	(36.490.865)	*Less impairment in the value of assets*
Jumlah	**22.901.366.351**	**777.237.894**	**–**	**(157.738.102)**	**(352.334.634)**	**(199.182.887)**	**(94.901.331)**	**(20.912.398)**	**22.853.534.893**	***Total***
Akumulasi penyusutan:										*Accumulated depreciation*
Kepemilikan langsung										*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	1.169.364.427	166.548.444	–	(22.077.503)	–	–	(8.911.787)	925.883	1.305.849.464	*Building and infrastructure*
Renovasi bangunan	956.366.951	82.798.000	–	–	–	–	–	–	1.039.164.951	*Leasehold improvement*
Mesin dan instalasi	2.775.893.293	319.278.015	925.883	(35.001.118)	(234)	–	(6.018.219)	(925.883)	3.054.151.737	*Machinery and installation*
Perabot dan peralatan	1.067.578.511	105.065.531	1.128.060	(15.732.275)	(16.085)	–	(31.642.297)	–	1.126.381.445	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	161.453.167	14.903.573	–	(480.004)	16.319	–	(2.455.058)	–	173.437.997	*Vehicles*
Aset pengampunan pajak	5.678.335	40.819	–	–	–	–	–	–	5.719.154	*Tax amnesty assets*
Jumlah	6.136.334.684	688.634.382	2.053.943	(73.290.900)	–	–	(49.027.361)	–	6.704.704.748	*Total*
Nilai buku neto	**16.765.031.667**								**16.148.830.145**	***Net book value***

	2024*)								
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penurunan/ *Impairment*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:									*At cost:*
Kepemilikan langsung									*Direct ownership*
Tanah	9.033.735.838	–	–	–	(85.363.224)	237.159.166	–	9.185.531.780	*Land*
Bangunan dan prasarana	3.374.981.069	8.738.481	–	–	45.659.413	–	–	3.429.378.963	*Building and infrastructure*
Renovasi bangunan	1.062.133.952	3.982.000	–	(4.283.000)	84.362.000	–	–	1.146.194.952	*Leasehold improvement*
Mesin dan instalasi	4.658.865.378	34.174.140	–	(62.645.870)	363.498.966	–	–	4.993.892.614	*Machinery and installation*
Perabot dan peralatan	1.368.635.891	35.388.699	–	(9.865.808)	71.843.829	–	–	1.466.002.611	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	197.273.417	10.168.776	–	(1.211.297)	(1.928.229)	–	–	204.302.667	*Vehicles*
Aset pengampunan pajak	6.019.704	–	–	–	–	–	–	6.019.704	*Tax amnesty assets*
Aset dalam penyelesaian	2.034.673.189	1.114.928.702	–	(111.544.793)	(530.899.673)	–	–	2.507.157.425	*Construction in progress*
Jumlah	21.736.318.438	1.207.380.798	–	(189.550.768)	(52.826.918)	237.159.166	–	22.938.480.716	*Total*
Dikurangi penurunan nilai tercatat	(36.640.865)	(473.500)	–	–	–	–	–	(37.114.365)	*Less impairment in the value of assets*
Jumlah	21.699.677.573	1.206.907.298	–	(189.550.768)	(52.826.918)	237.159.166	–	22.901.366.351	*Total*
Akumulasi penyusutan:									*Accumulated depreciation*
Kepemilikan langsung									*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	999.535.013	154.870.366	–	-	14.959.048	–	–	1.169.364.427	*Building and infrastructure*
Renovasi bangunan	851.652.951	107.089.000	–	(2.375.000)	-	–	–	956.366.951	*Leasehold improvement*
Mesin dan instalasi	2.514.344.986	265.989.936	–	(3.465.125)	(976.504)	–	–	2.775.893.293	*Machinery and installation*
Perabot dan peralatan	966.880.357	102.465.105	–	(1.483.049)	(283.902)	–	–	1.067.578.511	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	145.387.333	16.792.228	–	(726.394)	-	–	–	161.453.167	*Vehicles*
Aset pengampunan pajak	5.201.362	476.973	–	-	-	–	–	5.678.335	*Tax amnesty assets*
Jumlah	5.483.002.002	647.683.608	–	(8.049.568)	13.698.642	–	–	6.136.334.684	*Total*
Nilai buku neto	**16.216.675.571**							**16.765.031.667**	***Net book value***

*) Direklasifikasi pada catatan 57 / *) as reclassified in note 57

16. ASET TETAP (lanjutan) / *16. FIXED ASSETS (continued)*

Sisa reklasifikasi masing-masing sebesar Rp352.334.634 dan Rp39.128.276 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah direklasifikasi ke aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, aset takberwujud, serta dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada tahun berjalan.

The remaining reclassification amounting to Rp352,334,634 and Rp39,128,276 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, has been reclassified to non-current assets held for sale and intangible assets, with the remaining balance recognized in the consolidated statement of profit or loss for the current year.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense of fixed assets was allocated as follows:

	2025	2024	
Beban pokok penjualan (Catatan 40)	328.450.169	338.436.144	*Cost of goods sold (Note 40)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 42)	184.721.995	142.478.571	*General and administrative expenses (Note 42)*
Beban penjualan (Catatan 41)	119.479.926	166.341.116	*Selling expenses (Note 41)*
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans (Catatan 43)	55.982.292	427.777	*Research, development and surveillance expenses (Note 43)*
Total	**688.634.382**	**647.683.608**	***Total***

Pelepasan aset tetap sebagai berikut:

Disposal of fixed assets are as follows:

	2025	2024	
Harga Jual	354.618	553.176	*Selling Price*
Nilai Tercatat	(132.567)	(181.501.200)	*Carrying Value*
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	**222.051**	**(180.948.024)**	***Profit (loss) from sale of fixed assets***

Aset tetap tertentu dari Grup digunakan sebagai jaminan pinjaman bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank DKI, PT Bank Maybank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Krom Bank Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia (Catatan 23).

Certain fixed assets of the Group are pledged as collateral for bank loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank DKI, PT Bank Maybank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Krom Bank Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, and PT Bank KEB Hana Indonesia (Note 23).

Perusahaan / ***The Company***

Perusahaan membuat daftar aset yang digunakan atas penggunaan dana titipan hibah ditangguhkan yang secara fisik pekerjaannya telah selesai sedangkan aset-aset tersebut masih dapat dipergunakan pada proyek yang sejenis (Catatan 30).

The Company prepared a list of assets utilized from the use of deferred grant entrusted funds, for which the physical construction work has been completed, while such assets can still be utilized for similar projects (Note 30).

16. ASET TETAP (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada tahun 2009, Perusahaan menyediakan lahan untuk digunakan sebagai fasilitas vaksin flu burung oleh Departemen Kesehatan RI. Lahan tersebut berlokasi di desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat seluas 5.145 m2 dan di Jalan Pasteur seluas 3.953 m2. Sejak tahun 2011 proyek tersebut terhenti dan sampai dengan tanggal laporan ini lahan tersebut masih tertutup dan belum dapat digunakan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 22 September 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pemakaian Sementara Aset Ex. Flu Burung No. HK.03.01/ Menkes/1342/2020; No. 001.22/DIR/IX/2020.

Aset dalam pembangunan terdiri dari bangunan yang sedang dalam proses konstruksi dan peralatan pabrik/mesin/utilitas/kantor yang masih dalam proses pengerjaan/instalasi, yang berlokasi di Pasteur dan Cisarua Bandung. Pada 31 Desember 2025 dan 2024, persentase penyelesaian dari bangunan prasarana dan pabrik masing-masing berkisar antara 27% sampai dengan 99% dan 1% sampai dengan 37%.

Aset tetap tertentu dan aset tetap dalam pembangunan yang dimiliki oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp8.649.742.493 per 31 Desember 2025 yang menurut pendapat Manajemen cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Entitas Anak

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

KAEF melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muhammad Taufik dan Rekan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 dalam laporan No. 00076/2.0175-00/PI/04/0194/1/III/2026 tanggal 25 Februari 2026, pada tanggal 31 Desember 2025 nilai wajar tanah milik KAEF sebesar Rp5.249.764.400.

16. FIXED ASSETS (continued)

The Company (continued)

In 2009, the Company provided land for use as a bird flu vaccine facility by the Ministry of Health. The land is located in the village of Kertawangi District Cisarua West Bandung Regency covering an area of 5,145 m2 and Pasteur Street covering an area of 3,953 m2. Since 2011 the project has been halted and until the date of this report the land is still closed and cannot be used by the Company.

On September 22, 2020, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Company signed a Temporary Utilization Agreement concerning the Ex-Avian Influenza Assets No. HK.03.01/Menkes/1342/2020; No. 001.22/DIR/IX/2020.

Assets under construction consist of the construction of the building and factory/machine/utility/office equipment, located in Pasteur and Cisarua Bandung. On December 31, 2025, and 2024, percentage of completion of the building and infrastructure ranging from 27% to 99% and 1% to 37%, respectively.

Certain fixed assets and construction in progress owned by the Company are insured against fire and other risks with total insurance coverage amounting to Rp8,649,742,493 as of December 31, 2025, which, in Management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise.

Subsidiaries

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

The Company revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Muhammad Taufik dan Rekan according to POJK No. 28/POJK.04/2021 in report No. 00076/2.0175-00/PI/04/0194/1/III/2026 dated February 25, 2026, with fair value of KAEF land as of December 31, 2025, amounting to Rp5,249,764,400.

16. ASET TETAP (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

KFTD melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 dalam laporan No. 00024/2/0109-00/PI/05/0288/1/III/2026 tanggal 4 Maret 2026, pada tanggal 31 Desember 2025 nilai wajar tanah milik KFTD sebesar Rp318.280.000.

PEHA melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan dalam laporan No. 00006/2.0176-01/PI/04/0551/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, pada tanggal 31 Desember 2025 nilai wajar tanah milik PEHA sebesar Rp166.566.000.

LD melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan dalam laporan No. 00055/2.0176-00/PI/04/0333/1/III/2026 tanggal 6 Maret 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025 nilai pasar tanah milik LD sebesar Rp153.861.800.

MLF melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan dalam laporan No. 00056/2.0176-00/PI/04/0333/1/III/2026 tanggal 6 Maret 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025 nilai pasar tanah milik MLF sebesar Rp50.710.200.

SIL melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Fuadah, Rudi, dan Rekan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 dalam laporan No. 00103/2.0100-03/P1/04/0175/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, pada tanggal 31 Desember 2025 nilai wajar tanah milik SIL sebesar Rp21.750.000.

KFA melakukan penilaian atas tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 dalam laporan No. 00004/2.0051-00/PI/04/0152/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, pada tanggal 29 November 2025 nilai wajar tanah milik KFA sebesar Rp643.740.711.

16. FIXED ASSETS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

KFTD revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Febriman Siregar dan Rekan according to POJK No. 28/POJK.04/2021 in report No. 00024/2/0109-00/PI/05/0288/1/III/2026 dated March 4, 2026, with fair value of KFTD's land as of December 31, 2025, amounting to Rp318,280,000.

PEHA revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan according to POJK No. 28/POJK.04/2021 in report No. 00006/2.0176-01/PI/04/0551/1/III/2026 dated March 5, 2026, with the fair value of PEHA's land as of December 31, 2025, amounting to Rp166,566,000.

LD revalued its land based on appraisals conducted by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan as stated in reports No. 00055/2.0176-00/PI/04/0333/1/III/2026 on March 6, 2026. As of December 31, 2025, the market value of LD land amounted to Rp153,861,800.

MLF revalued its land based on an appraisal conducted by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan as stated in report No. 00056/2.0176-00/PI/04/0333/1/III/2026 dated March 6, 2026. As of December 31, 2025, the market value of MLF land amounted to Rp50,710,200.

SIL revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Fuadah, Rudi, dan Rekan according to POJK No. 28/POJK.04/2021 in report No. 00103/2.0100-03/P1/04/0175/1/III/2026 dated March 25, 2026, with fair value of SIL's land as of December 31, 2025 amounting to Rp21,750,000.

KFA revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan according to POJK No.28/POJK.04/2021 in report No. 00004/ 2.0051-00/PI/04/0152/1/I/2026 dated January 6, 2026, with fair value of KFA's land as of November 29, 2025 amounting to Rp643,740,711.

16. ASET TETAP (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Pendekatan yang digunakan dalam penentuan nilai wajar adalah pendekatan pasar, dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar.

Penilaian dilakukan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aset dalam pembangunan terdiri dari pembangunan di unit produksi, apotek dan diagnostika baru serta pengadaan gudang untuk KFTD. Jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut berkisar antara 6 sampai dengan 36 bulan.

Aset tetap tertentu yang dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp2.253.673.880 pada tanggal 31 Desember 2025, yang menurut pendapat Manajemen cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Pada tanggal 31 Desember 2024, INAF melakukan reklasifikasi aset properti investasi ke aset tetap sebesar Rp12.461.083. serta dari aset dalam penyelesain ke aset lancar lainnya sebesar Rp226.270.

Tanah berikut bangunan pabrik serta mesin dan peralatan pabrik INAF digunakan sebagai jaminan atas pinjaman pihak berelasi dengan nilai buku Rp295.195.097 dan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 17 Januari 2024 untuk lokasi Gandasari dan Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan pada tanggal 18 Januari 2023 untuk lokasi Sukadanau dengan pendekatan biaya dengan metode penjumlahan dan biaya reproduksi bangunan. Jumlah nilai buku setelah dilakukan penilaian sebesar Rp737.421.549. Berdasarkan penelaahan lebih lanjut terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, terdapat indikasi penurunan nilai pada aset Bangunan sebesar Rp36.490.865.

16. FIXED ASSETS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

The approach used in determining fair value is the market approach, using the market price comparison method.

The valuation was carried out in accordance with POJK No. 28/POJK.04/2021 by a Public Appraisal Firm registered with the Financial Services Authority (OJK).

Assets under construction consists of the construction of the production unit, pharmacy and new clinic and procurement of warehouse for KFTD. The finishing time for construction is from 6 to 36 months.

Certain fixed assets owned by PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries are insured against fire and other risks with total insurance coverage amounting to Rp2,253,673,880 as of December 31, 2025, which, in Management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise.

PT Indofarma Tbk (INAF)

As of December 31, 2024, INAF reclassified investment property to fixed assets amounting to Rp12,461,083 and reclassified construction in progress to other current assets amounting to Rp226,270.

Land, factory buildings, as well as INAF's factory machinery and equipment are pledged as collateral for related party loans with a carrying amount of Rp295,195,097 and were appraised by Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan on January 17, 2024 for the Gandasari location and by Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan on January 18, 2023 for the Sukadanau location using the cost approach with the summation and building reproduction cost methods. The total carrying amount after the appraisal amounted to Rp737,421,549. Based on further review of the appraisal results performed by the Public Appraisal Offices, there was an indication of impairment in building assets amounting to Rp36,490,865.

17. ASET HAK GUNA / *17. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2025							
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Dampak dekonsolidasi/ *impact of the consolidation*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:								*At cost:*
Bangunan dan prasarana	663.795.182	78.604.262	(137.068.958)	--	32.987.118	(15.612.456)	622.705.148	*Building and infrastructure*
Kendaraan	127.307.673	19.263.563	(36.100.161)	--	(22.220.919)	(1.116.451)	87.133.705	*Vehicles*
Perabot dan peralatan	39.631.587	3.813.535	(16.106.535)	(1.380.000)	2.536.543	--	28.495.130	*Furniture and fixtures*
Jumlah	830.734.442	101.681.360	(189.275.654)	(1.380.000)	13.302.742	(16.728.907)	738.333.983	*Total*
Akumulasi penyusutan:								*Accumulated depreciation*
Bangunan dan prasarana	343.894.482	137.618.404	(110.582.261)	--	8.120.207	(15.612.456)	363.438.376	*Building and infrastructure*
Kendaraan	83.005.619	15.499.532	(13.834.092)	--	(20.184.106)	(1.116.451)	63.370.502	*Vehicles*
Perabot dan peralatan	17.005.763	10.040.465	(15.484.939)	(1.380.000)	3.860.728	--	14.042.017	*Furniture and fixtures*
Jumlah	443.905.864	163.158.401	(139.901.292)	(1.380.000)	(8.203.171)	(16.728.907)	440.850.895	*Total*
Nilai buku neto	**386.828.578**						**297.483.088**	***Net book value***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Saldo akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan:					*At cost:*
Bangunan dan prasarana	697.902.703	99.006.910	(133.114.431)	663.795.182	*Building and infrastructure*
Kendaraan	120.863.827	29.159.254	(22.715.408)	127.307.673	*Vehicles*
Perabot dan peralatan	26.143.071	13.488.516	--	39.631.587	*Furniture and fixtures*
Jumlah	844.909.601	141.654.680	(155.829.839)	830.734.442	*Total*
Akumulasi penyusutan:					*Accumulated depreciation*
Bangunan dan prasarana	367.567.818	109.441.095	(133.114.431)	343.894.482	*Building and infrastructure*
Kendaraan	78.325.054	27.395.973	(22.715.408)	83.005.619	*Vehicles*
Perabot dan peralatan	13.438.251	3.567.512	--	17.005.763	*Furniture and fixtures*
Jumlah	459.331.123	140.404.580	(155.829.839)	443.905.864	*Total*
Nilai buku neto	**385.578.478**			**386.828.578**	***Net book value***

Beban penyusutan aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense of right of use assets was allocated as follows:

	2025	2024	
Beban penjualan (Catatan 41)	109.321.701	69.978.835	*Selling expenses (Note 41)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 42)	50.932.193	68.944.610	*General and administrative expenses (Note 42)*
Beban pokok penjualan (Catatan 40)	2.030.237	835.001	*Cost of goods sold (Note 40)*
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans (Catatan 43)	874.270	646.134	*Research, development and surveillance expenses (Note 43)*
Total	**163.158.401**	**140.404.580**	***Total***

18. PROPERTI INVESTASI / *18. INVESTMENT PROPERTIES*

	2025						
	Saldo awal *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Kenaikan nilai wajar/ *Fair value incremental*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:							*At cost:*
Tanah	1.078.726.894	--	--	--	(14.871.710)	1.063.855.184	*Land*
Bangunan	39.268.993	--	--	895.933	2.541.490	42.706.416	*Building*
Mesin *Scenting*	895.933	--	--	(895.933)	--	--	*Scenting machine*
Jumlah	**1.118.891.820**	**--**	**--**	**--**	**(12.330.220)**	**1.106.561.600**	***Total***

	2024*)						
	Saldo awal *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Kenaikan nilai wajar/ *Fair value incremental*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:							*At cost:*
Tanah	1.042.983.214	--	(4.789.170)	33.123.743	7.409.107	1.078.726.894	*Land*
Bangunan	33.457.758	702.635	--	5.108.600	--	39.268.993	*Building*
Mesin *Scenting*	–	–	–	895.933	–	895.933	*Scenting machine*
Jumlah	**1.076.440.972**	**702.635**	**(4.789.170)**	**39.128.276**	**7.409.107**	**1.118.891.820**	***Total***

*) Direklasifikasi pada catatan 57 / **) as reclassified in note 57*

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Pada 31 Desember 2025, PT Kimia Farma Tbk, entitas anak mencatat nilai dari Properti Investasi sebesar Rp509.303.500 berdasarkan laporan penilai KJPP Muhammad Taufik dan Rekan No. 00014/2.0175-00/PI/04/0194 /1/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Muhammad Taufik, ST., MAPPI (Cert.).

Pada 31 Desember 2025, PT Phapros Tbk, entitas anak mencatat nilai dari Properti Investasi sebesar Rp104.317.000 berdasarkan laporan penilai KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan dalam laporan No. 00007/2.0176-01/PI/04/0551/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

As of December 31, 2025, PT Kimia Farma Tbk, a subsidiary, recorded the value of its Investment Property amounting to Rp509,303,500 based on the appraisal report of KJPP Muhammad Taufik dan Rekan No. 00014/2.0175-00/PI/04/0194/1/I/2025 dated January 20, 2025, signed by Muhammad Taufik, ST., MAPPI (Cert.).

As of December 31, 2025, PT Phapros Tbk, a subsidiary, recorded the value of Investment Property of Rp104,317,000 based on the appraisal report of KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan in report No. 00007/2.0176-01/PI/04/04/0551/1/III/2026 dated March 5, 2026.

18. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Pada 31 Desember 2025, PT Kimia Farma Apotek, entitas anak mencatat nilai dari Properti Investasi sebesar Rp67.794.437 berdasarkan laporan penilai KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dalam laporan No. 00347/2.0051-00/PI/04/0152/1/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021.

Metodologi penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Konsep dasar dari metode penilaian ini adalah pada prinsip penawaran dan permintaan, yaitu keseimbangan antara penawaran dan permintaan serta prinsip substitusi, yaitu adanya kecenderungan minat yang tinggi pada properti yang ditawarkan lebih murah dibandingkan properti sejenis yang lebih mahal. Dengan metode ini, penilaian atas suatu properti dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan properti lain yang sejenis yang terdapat di pasar.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Properti investasi berupa tanah dari hasil sita jaminan atas piutang yang tidak dapat ditagih terletak di Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Lampung, Palembang, Batam serta pabrik produksi MP-ASI di Cikarang direklasifikasi ke aset tetap (Catatan 16).

Atas agunan diambil alih berupa tanah di Bogor tidak dilakukan penilaian kembali oleh *appraisal* independen dikarenakan telah dilakukan penurunan nilai atas aset tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah provisi kerugian penurunan nilai atas properti investasi telah memadai.

18. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

As of December 31, 2025, PT Kimia Farma Apotek, a subsidiary recorded the value of Investment Property amounting to Rp67,794,437, based on appraisal report of KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan in report No. 00347/2.0051-00/PI/04/0152/1/X/2024 dated October 18, 2024.

Appraisal has been performed in accordance with POJK No. 28/POJK.04/2021.

Valuation method used for the Market Data Comparison Approach. The basic concept of this assessment method is the principle of supply and demand that is equilibrium of supply and demand as well as the substitution principle, the tendency of interest for cheaper property is higher than similar property quoted with more expensive price. Under this method, the assessment of a property is conducted by comparing it directly with other similar properties on the market.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Investment property represents land from confiscated collateral of uncollectible trade receivables located in Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Lampung, Palembang, Batam, and MP-ASI manufacturing Plant in Cikarang reclassification to property, plant, and equipment (Note 16).

Abandoned land in Bogor was no longer revalued by an independent appraisal as this was already impaired in full.

The management believes that the provisi for impairment losses on investment property is adequate.

19. ASET TAKBERWUJUD / *19. INTANGIBLE ASSETS*

	2025							
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Dampak dekonsolidasi/ *Impact of deconsolidation*	Penurunan/ *Impairments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:								*At cost:*
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Pengembangan produk	16.775.471	--	--	1.472.500	--	--	18.247.971	*Product development*
Software komputer dan lisensi	266.861.044	2.604.379	(13.178)	17.584.336	(1.290.473)	(457.256)	285.288.852	*Computer software and license*
Hak atas tanah	13.341.089	--	--	170.000	--	--	13.511.089	*Land rights*
Aset tak berwujud dalam penyelesaian	32.593.577	157.808.986	(4.210.750)	(14.924.321)	--	--	171.267.492	*Flu vaccine in progress*
Jumlah	329.571.181	160.413.365	(4.223.928)	4.302.515	(1.290.473)	(457.256)	488.315.404	*Total*
Akumulasi amortisasi:								*Accumulated amortization:*
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Pengembangan produk	14.772.006	2.006.643	--	--	--	--	16.778.649	*Product development*
Software komputer dan lisensi	161.323.844	29.370.585	(12.519)	1.380.000	(730.305)	--	191.331.605	*Computer software and license*
Hak atas tanah	5.302.992	914.436	--	(1.121.410)	--	--	5.096.018	*Land rights*
Jumlah	181.398.842	32.291.664	(12.519)	258.590	(730.305)	--	213.206.272	*Total*
Nilai buku neto	**148.172.339**						**275.109.132**	***Net book value***

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:						*At cost:*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan produk	13.684.549	--	--	3.090.922	16.775.471	*Product development*
Software komputer dan lisensi	287.157.662	22.416.700	(42.325.812)	(387.506)	266.861.044	*Computer software and license*
Hak atas tanah	5.427.327	7.628.756	--	285.006	13.341.089	*Land rights*
Aset tak berwujud dalam penyelesaian	53.009.895	46.283.639	(65.317.457)	(1.382.500)	32.593.577	*Flu vaccine in progress*
Jumlah	359.279.433	76.329.095	(107.643.269)	1.605.922	329.571.181	*Total*
Akumulasi amortisasi:						*Accumulated amortization:*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Pengembangan produk	12.879.143	2.016.725	(123.862)	--	14.772.006	*Product development*
Software komputer dan lisensi	131.226.734	30.064.488	32.622	--	161.323.844	*Computer software and license*
Hak atas tanah	4.212.206	647.501	443.285	--	5.302.992	*Land rights*
Jumlah	148.318.083	32.728.714	352.045	--	181.398.842	*Total*
Nilai buku neto	**210.961.350**				**148.172.339**	***Net book value***

Beban amortisasi aset takberwujud dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense of intangible assets was allocated as follows:

	2025	2024	
Beban umum dan administrasi (Catatan 42)	30.588.591	13.761.180	*General and administrative expenses (Note 42)*
Beban pokok penjualan (Catatan 40)	914.514	1.015.452	*Cost of goods sold (Note 40)*
Beban penjualan (Catatan 41)	680.617	17.685.499	*Selling expenses (Note 41)*
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans (Catatan 43)	107.942	266.583	*Research, development and surveillance expenses (Note 43)*
Total	**32.291.664**	**32.728.714**	***Total***

Aset takberwujud merupakan biaya pengembangan produk, perangkat lunak, dan lisensi serta hak atas tanah yang dimiliki oleh Grup.

Intangible assets represent product development costs, software, and licenses as well as land rights owned by the Group.

19. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Biaya pengembangan produk merupakan biaya uji klinis untuk produk Pioglitazone, Clopidogrel, Rifampicin, dan Captopril diamortisasi selama 3 tahun milik PT Kimia Farma Tbk dan biaya yang terkait dengan pengujian uji ekuivalensi untuk membuktikan kesetaraan produk baru terhadap produk obat inovator milik PT Indofarma Tbk. Biaya pengembangan diamortisasi masa manfaatnya selama antara 3 sampai 5 tahun.

19. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Product development costs comprise of clinical test of Pioglitazone, Clopidogrel, Rifampicin, and Captopril products of PT Kimia Farma Tbk that are amortized for 3 years and cost associated with equivalence test to prove the equality of a new product to innovate product of PT Indofarma Tbk that are amortized over the period of 3 to 5 years.

20. *GOODWILL*

Goodwill pada awalnya adalah sebesar Rp134.443.900 berasal dari selisih antara harga beli PT Lucas Djaja (LD) dan entitas anak oleh PT Phapros Tbk (PEHA) sebesar Rp315.754.548 dengan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi sebesar Rp181.310.648 yang terjadi di tahun 2019.

Nilai wajar aset bersih LD dan entitas anak dan *goodwill* atas akuisisi di atas adalah sebagai berikut:

20. GOODWILL

The goodwill initially amounted to Rp134,443,900 arise from the difference between the acquisition cost of Rp315,754,548 of PT Lucas Djaja (LD) and subsidiary by PT Phapros Tbk (PEHA) and fair value of net assets acquired of Rp181,310,648 that incurred in 2019.

The fair value of the net assets of LD and its subsidiaries and the goodwill arising from the above acquisition are as follows:

	2025	2024	
Modal saham - nilai nominal	28.500.000	28.500.000	*Share capital*
Tambahan modal disetor	118.596.177	118.596.177	*Additional paid in capital*
Revaluasi aset tetap	12.430.480	12.430.480	*Asset revaluation*
Komponen ekuitas lainnya	(239.695)	(239.695)	*Other equity component*
Saldo laba	41.639.454	41.639.454	*Retained earning*
Kepentingan nonpengendali	38.612	38.612	*Non-controlling interest*
Total nilai wajar aset bersih	200.965.028	200.965.028	*Total fair value of net assets*
Porsi kepemilikan nilai wajar aset bersih (90,22%)	(181.310.648)	(181.310.648)	*Ownership portion of fair value of net assets (90.22%)*
Harga pembelian	315.754.548	315.754.548	*Purchase price*
Kerugian penurunan nilai *Goodwill* pada saat Akuisisi	134.443.900	134.443.900	*Goodwill at acquisition date*
Kerugian penurunan nilai	(80.766.076)	(80.766.076)	*Impairment loss*
Total	**53.677.824**	**53.677.824**	***Total***

Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang telah dilakukan, per 31 Desember 2025 PEHA tidak mengalami penurunan nilai *goodwill* (Catatan 44) dari nilai tercatat (per 31 Desember 2024 terdapat penurunan nilai sebesar Rp53.877.296).

Based on the impairment testing that has been conducted, as of December 31, 2025 PEHA recognized not impairment on goodwill by (Note 44) of the carrying value (as of December 31, 2024, there was a decrease in value of Rp53,877,296).

20. *GOODWILL (lanjutan)*

Penilaian atas ekuitas LD dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 ditentukan berdasarkan laporan penilaian oleh Penilai Publik No. 00015/2.0176-02/BS/04/0089/1/III/2026 dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, penilai independen tanggal 9 Maret 2026. Dari hasil penilaian tersebut, tidak terdapat penurunan nilai yang perlu dibukukan pada tahun 2025.

20. GOODWILL (continued)

Value of the equity of LD and its subsidiary for the year ended December 31, 2025 was determined based on the Public Appraiser's report No. 00015/2.0176-02/BS/04/0089/1/III/2026 from KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, and Partners, independent appraisers dated March 9, 2026. Based on the assessment result, there was no impairment loss required to be recognized in the 2025.

21. ASET AGRIKULTUR DAN PENGEMBANGAN

21. AGRICULTURAL AND DEVELOPMENT ASSETS

	2025						
	Saldo awal *Beginning balance*	**Penambahan/** *Addition*	**Pengurangan/** *Disposal*	**Reklasifikasi/** *Reclassification*	**Penyesuaian /** *Adjustment*	**Saldo akhir/** *Ending balance*	
Biaya perolehan:							*At cost:*
Tanaman menghasilkan	5.539.340	--	--	--	--	5.539.340	*Mature plantations*
Hewan menghasilkan	4.461.940	--	(339.892)	2.464.000	(520.600)	6.065.448	*Mature animal*
Tanaman belum menghasilkan	--	--	--	--	--	--	*Immature plantations*
Hewan belum menghasilkan	700.000	2.520.000	--	(2.464.000)	--	756.000	*Immature animal*
Jumlah	10.701.280	2.520.000	(339.892)	–	–	12.360.788	*Total*
Akumulasi penyusutan:							*Accumulated depreciation:*
Tanaman menghasilkan	5.539.340	--	--	--	--	5.539.340	*Mature plantations*
Hewan menghasilkan	3.014.533	471.232	(288.732)	--	(520.600)	2.676.433	*Mature animal*
Jumlah	8.553.873	471.232	(288.732)	–	–	8.215.773	*Total*
Nilai buku neto	**2.147.407**					**4.145.015**	***Net book value***

	2024						
	Saldo awal *Beginning balance*	**Penambahan/** *Addition*	**Pengurangan/** *Disposal*	**Reklasifikasi/** *Reclassification*	**Penyesuaian /** *Adjustment*	**Saldo akhir/** *Ending balance*	
Biaya perolehan:							*At cost:*
Tanaman menghasilkan	5.539.340	--	--	--	--	5.539.340	*Mature plantations*
Hewan menghasilkan	4.585.100	--	(795.000)	671.840	--	4.461.940	*Mature animal*
Tanaman belum menghasilkan	2.295.247	--	(2.295.247)	--	--	--	*Immature plantations*
Hewan belum menghasilkan	671.840	700.000	--	(671.840)	--	700.000	*Immature animal*
Jumlah	13.091.527	700.000	(3.090.247)	–	–	10.701.280	*Total*
Akumulasi penyusutan:							*Accumulated depreciation:*
Tanaman menghasilkan	5.539.340	--	--	--	--	5.539.340	*Mature plantations*
Hewan menghasilkan	3.476.081	305.852	(767.400)	--	--	3.014.533	*Mature animal*
Jumlah	9.015.421	305.852	(767.400)	–	–	8.553.873	*Total*
Nilai buku neto	**4.076.106**					**2.147.407**	***Net book value***

Aset Agrikultur dan Pengembangan disajikan dalam angka neto. Penyusutan aset agrikultur dan pengembangan pada tahun 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp471.232 dan Rp305.852 dibebankan pada biaya pabrikasi.

Agricultural and Development Assets are presented on a net basis. Depreciation of agricultural and development assets for the years ended December 31, 2025, and 2024 amounting to Rp471,232 and Rp305,852, respectively, was charged to manufacturing costs.

22. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *22. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2025	2024	
Persediaan tidak produktif	331.813.466	254.324.668	*Non-productive inventories*
Beban tangguhan	9.024.791	9.024.791	*Deferred expenses*
Uang jaminan	5.049.783	4.989.674	*Deposits*
Mobil ambulans PCR	4.603.333	4.603.333	*PCR ambulance*
Biaya dibayar di muka kerja sama jangka panjang	2.302.007	4.087.213	*Long-term prepaid expense*
Aset tetap tidak produktif	249.384	49.091.811	*Non-productive fixed assets*
Mesin *genose*	--	4.300.313	*Machine genose*
Aset agrikultur dan pengembangan tidak produktif	--	109.600	*Non-productive agricultural and development assets*
Lain-lain	120.200	--	*Others*
	353.162.964	330.531.403	
Dikurangi penurunan nilai:			*Less accumulated impairment losses:*
Persediaan tidak produktif	(331.813.466)	(254.324.668)	*Non-productive inventories*
Beban tangguhan	(9.024.791)	(9.024.791)	*Deferred expenses*
Mobil ambulans PCR	(4.603.333)	(4.603.333)	*PCR ambulance*
Aset tetap tidak produktif	(78.972)	(48.895.161)	*Non-productive fixed assets*
Mesin *genose*	--	(4.300.313)	*Machine genose*
Aset agrikultur dan pengembangan tidak produktif	--	(109.600)	*Non-productive agricultural and development assets*
Jumlah	**7.642.402**	**9.273.537**	***Total***

23. UTANG BANK / *23. BANK LOANS*

a. Utang bank jangka pendek / *a. Short-term bank loans*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank DKI	400.000.000	610.000.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	334.850.655	1.052.572.836	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000.000	240.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200.000.000	743.452.852	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	130.000.000	17.000.000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.056.800	8.289.365	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah pihak berelasi	**1.454.907.455**	**2.671.315.053**	***Total related parties***
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank ICBC	336.286.940	350.000.000	*PT Bank ICBC*
PT Bank Danamon	195.000.000	255.000.000	*PT Bank Danamon*
PT Bank Central Asia Tbk	100.000.000	529.991.950	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	34.171.954	39.034.355	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank KEB Hana Indonesia	17.085.066	15.495.268	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Krom	10.000.000	--	*PT Bank Krom*
PT Bank QNB Indonesia Tbk	--	169.108.731	*PT Bank QNB Indonesia Tbk*
PT BPR Universal	--	31.718.788	*PT BPR Universal*
PT BPR Intidana Sukses Makmur	--	16.944.320	*PT BPR Intidana Sukses Makmur*
Jumlah pihak ketiga	**692.543.960**	**1.407.293.412**	***Total third parties***
Jumlah utang bank jangka pendek	**2.147.451.415**	**4.078.608.465**	***Total short-term bank loan***

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. (1) 33 tanggal 16 Juni 2023 dari Fatiah Helmi, S.H., yang diubah dengan Akta Persetujuan Perubahan Kredit No. 33 tanggal 30 Oktober 2023, KAEF dan entitas anak, PT Kimia Farma Apotek (KFA), PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), dan PT Phapros Tbk (PEHA), selanjutnya secara bersama-sama disebut Debitur, menyetujui perubahan perjanjian fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Kreditur, sebesar maksimum Rp500.000.000 yang juga dapat digunakan untuk menerbitkan *Letter of Credit* (LC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi, *Stand by Letter of Credit* (SBLC), *Trust Receipt,* dan *Treasury Line.*

Selain itu, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. (1) 32 tanggal 16 Juni 2023 dari Fatiah Helmi, S.H dan telah di adendum dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 30 Oktober 2023, Debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan *Corporate Loan* sebesar maksimum Rp650.000.000. Fasilitas ini dibebani suku bunga 7,50% p.a. dan jatuh tempo pada 30 November 2024.

Berdasarkan Surat Permohonan Penyesuaian Ketentuan Perjanjian Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 014/KU 100/27/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang Perjanjian Pembiayaan No.001 /KU/100/26/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang/*Standstill Period* No. 004A/KU 100/26/IX/2024 tanggal 26 September 2024, KAEF mengajukan penyesuaian perjanjian kredit (sebagaimana mungkin diubah, ditambah, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, "Perjanjian pembiayaan dan masih dalam proses pengajuan persetujuan").

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on Credit Working Capital Agreement No. (1) 33 dated June 16, 2023 of Fatiah Helmi, SH., that changed with Credit Working Capital Agreement No. 33 dated October 30, 2023, KAEF and its subsidiaries, PT Kimia Farma Apotek (KFA), PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), and PT Phapros Tbk (PEHA), hereinafter collectively referred to as Borrower, agreed to amend working capital credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, hereinafter referred to as Creditor, amounted maximum Rp500,000,000 which can also be used to issue Letter of Credit (LC), Letter of Credit Domestic (SKBDN), Bank Guarantee, Trust Receipt, and Treasury Line.

Besides that, based on Credit Working Capital Agreement (1) 32 dated June 16, 2023, of Fatiah Helmi, S.H and has been extended with Loan Corporate Credit No. 32 dated October 30, 2023, Borrower obtained Corporate Loan Facilities with maximum Rp650,000,000. This facility bears an interest rate of 7.50% p.a. and will mature on November 30, 2024.

Based on the Letter of Request for Adjustment of Credit Agreement Terms to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 014/KU 100/27/III/2024 dated March 27, 2024, the Letter of Request for Extension of Grace Period of the Financing Agreement No. 001 /KU/100/26/VI/2024 dated June 26, 2024, and the Letter of Request for Extension of Grace Period/Standstill Period No. 004A/KU 100/26/IX/2024 dated September 26, 2024, KAEF has proposed an adjustment to the credit agreement (as may be amended, supplemented, or restated from time to time, the "Financing Agreement and Financing Application in Progress").

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan surat tanggapan dari Bank No. COB/1/4/260/R tanggal 31 Juli 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024 atau sampai dengan restrukturisasi disetujui, Perusahaan berada dalam status *standstill*.

Pada 30 April 2025, Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Kredit di hadapan Notaris Fatiah Helmi, S.H., sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 30 tentang Perjanjian Kredit *Corporate Loan* Restrukturisasi, Akta No. 31 tentang Perjanjian Kredit Restrukturisasi (KMK *Tranche* B), dan Akta No. 32 tentang Perjanjian Kredit Restrukturisasi (*Term Loan Tranche* B). Berdasarkan perjanjian dimaksud, *outstanding* pinjaman diklasifikasikan ke dalam dua *Tranche*, yakni *Tranche* A dan *Tranche* B. Perjanjian ini mulai berlaku ketika entitas anak, KFA, menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA). Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, porsi pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek telah direklasifikasi ke dalam liabilitas jangka panjang (Catatan 23b).

Pada tanggal 16 Desember 2025, entitas anak, KFA, bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan lima bank lainnya telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA) berupa Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 39 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini, perjanjian tersebut belum berlaku efektif.

Per 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini masing-masing tercatat sebesar Rp334.850.655.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (continued)

Based on the Bank's response letter No. COB/1/4/260/R dated July 31, 2024, as of December 31, 2024, or until the restructuring is approved, the Company remains under standstill status.

On April 30, 2025, the Company and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk executed a Credit Restructuring Agreement before Notary Fatiah Helmi, S.H., as set out in Deed No. 30 (Corporate Loan Restructuring Credit Agreement), Deed No. 31 (Working Capital Loan [KMK] Restructuring – Tranche B), and Deed No. 32 (Term Loan Restructuring – Tranche B). Under the agreement, the outstanding borrowings are classified into two Tranches, namely Tranche A and Tranche B. This agreement became effective when the subsidiary, KFA, executed the Master Restructuring Agreement (MRA). In connection with the restructuring, the portion of the loan previously classified as current liabilities has been reclassified as non-current liabilities (Note 23b).

On December 16, 2025, the subsidiary, KFA, together with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and five other banks, executed the Master Restructuring Agreement (MRA) in the form of Deed of Master Restructuring Agreement No. 39 before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.H. As of the date of issuance of this report, the agreement has not yet become effective.

As of December 31, 2025, the outstanding balances of this loan amounted to Rp334,850,655, respectively.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF)

INAF memperoleh persetujuan restrukturisasi pinjaman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Akta No. 10 tertanggal 7 November 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta tentang Perjanjian Antar Kreditur Sehubungan Dengan Restrukturisasi Utang. Nilai utang yang direstrukturisasi Rp95.000.000, dengan jangka waktu 120 bulan.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Debitur diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk persyaratan administrasi dan batasan rasio keuangan tertentu. Namun, selama periode restrukturisasi, INAF tidak memenuhi ketentuan batasan rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak Bank. Oleh karena itu, INAF mengajukan dan memperoleh dua kali perpanjangan atas fasilitas kredit, yaitu melalui Surat No. KPS1/2.3/401/R tanggal 1 November 2022 yang memperpanjang fasilitas hingga 8 November 2023, serta Surat No. COB1/6/674/R tanggal 3 November 2023 yang memperpanjang kembali hingga 6 November 2024. Perpanjangan tersebut disertai dengan nilai plafon maksimal Rp55.000.000 dan tingkat bunga sebesar 9% p.a. dan mencakup perpanjangan waktu pemenuhan terhadap batasan rasio keuangan, sebagai berikut:

- *Financial Covenant Current Ratio* minimal 1x; Pemenuhan rasio keuangan *Current Ratio* paling lambat pada periode 31 Desember 2025.
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 3x; Dan pemenuhan rasio *Debt to Equity Ratio* paling lambat pada laporan keuangan yang telah diaudit 31 Desember 2029.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%. Pemenuhan rasio keuangan DSCR paling lambat pada periode 31 Desember 2026.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF)

INAF obtained loan restructuring approval from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk through Deed No. 10 dated November 7, 2019, was made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta concerning the Inter-Creditor Agreement Regarding Debt Restructuring. The value of the restructured debt is Rp95,000,000 with term of facility is 120 months.

In accordance with the loan agreement, the Debtor is required to comply with several covenants, including administrative requirements and certain financial ratio restrictions. However, during the restructuring period, INAF did not comply with the financial ratio covenants as required by the Bank. Accordingly, INAF applied for and obtained two extensions of the credit facility through Letter No. KPS1/2.3/401/R dated November 1, 2022, which extended the facility until November 8, 2023, and Letter No. COB1/6/674/R dated November 3, 2023, which further extended the facility until November 6, 2024. These extensions were granted with a maximum facility limit of Rp55,000,000 and an interest rate of 9% p.a., and included an extension of the period for compliance with the required financial ratio covenants, as follows:

- *Financial Covenant Current Ratio minimum 1x; Fulfillment of the financial ratio Current Ratio no later than December 31, 2025*
- *Debt to Equity Ratio not exceed 3x; And fulfillment of the Debt to Equity Ratio is no later than the audited financial statements of December 31, 2029.*
- *Debt Service Coverage minimum 100%. Fulfillment of DSCR's financial ratios by December 31, 2026 at the latest.*

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut :

- Persediaan;
- Piutang usaha; dan
- Tanah, bangunan pabrik, mesin/ peralatan pabrik dan inventaris kantor/pabrik di Cibitung.

INAF memperoleh persetujuan restrukturisasi pinjaman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Akta No. 10 tertanggal 7 November 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta tentang Perjanjian Antar Kreditur Sehubungan Dengan Restrukturisasi Utang. Nilai utang yang direstrukturisasi Rp95.000.000.

Jangka Waktu Fasilitas: 120 Bulan
Suku Bunga: 9%

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

The facility is secured by the following collateral:

- *Inventory;*
- *Trade receivables; and*
- *Land, factory building, machine/ factory supplies, and equipment office/factory in Cibitung.*

INAF obtained loan restructuring approval from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk through Deed No. 10 dated November 7, 2019, was made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta concerning the Inter-Creditor Agreement Regarding Debt Restructuring. The value of the restructured debt is Rp95,000,000.

Term of Facility: 120 Months
Interest Rate: 9%

Tahun/ *Year*	Suku Bunga/ *Interest Rate*
2019	9%
2020	6%
2021	6%
2022	7%
2023	7%
2024	8%
2025	8%
2026	9%
2027	9%
2028	9%
2029	9%

Pada tanggal 31 Desember 2025, INAF telah merestrukturisasi pinjaman bank jangka pendek menjadi jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 0,25% p.a. yang dibayar setiap setengah tahunan. Restrukturisasi ini berdasarkan keputusan Homologasi tertanggal 25 Maret 2025 (Catatan 48). Pinjaman bank jangka pendek ini disajikan sebagai pinjaman bank jangka panjang.

Sebagai dampak dari restrukturisasi utang bank melalui proses PKPU, batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh INAF mengikuti rencana pada Proposal Perdamaian.

As of December 31, 2025, INAF restructured its short-term bank loans into a 5 year term loan bearing interest at a rate of 0.25% p.a., payable semi-annually. The restructuring was based on the Homologation Decision dated March 25, 2025 (Note 48). Accordingly, the short-term bank loans were presented as long-term bank loans.

As a result of the restructuring of the Company's bank loans through the PKPU process, the covenants applied to INAF will follow the plan on the Settlement Agreement.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Berdasarkan Akta Adendum *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 03/ADD-018/CB2-FOG/VIII/2023/LF tanggal 23 Agustus 2023, KAEF memperoleh Fasilitas Pinjaman *Revolving Uncommitted Line* Musyarakah sebesar maksimum Rp500.000.000 *(Line Facility* I) untuk KAEF dan maksimum Rp450.000.000 (*Line Facility* II) untuk KAEF dan/atau *joint borrower* dengan *limit Line Facility I & Line Facility II* maksimal sebesar Rp950.000.000. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan imbal hasil ditentukan pada saat realisasi. Fasilitas ini berlaku hingga 4 November 2024.

Atas fasilitas kredit yang diterima sebagaimana dijelaskan di atas, Debitur diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain persyaratan administrasi dan batasan rasio keuangan antara lain rasio aktiva lancar terhadap utang lancar tidak kurang dari 1x, rasio total kewajiban terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,5x, rasio EBITDA terhadap kewajiban yang jatuh tempo dan biaya bunga (*Debt Service Coverage Ratio*/DSCR) tidak kurang dari 1,2x, serta *coverage ratio* minimum sebesar 100%.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the Addendum Deed of the Sharia-Based Financing Line Facility Agreement No. 03/ADD-018/CB2-FOG/VIII/2023/LF dated August 23, 2023, the Group obtained a Revolving Uncommitted Musyarakah Line Facility with a maximum limit of Rp500,000,000 (Line Facility I) granted to KAEF, and Rp450,000,000 (Line Facility II) available to KAEF and/or joint borrower, with a combined maximum facility limit of Rp950,000,000 for both Line Facility I and Line Facility II. The facility has a term of 12 months from the signing date of the agreement, and the profit-sharing rate is determined at the time of each drawdown. This facility is valid until November 4, 2024.

Under the credit facilities obtained as described above, Borrower is required to comply administrative requirements and financial ratio covenant, such as a current assets to current liabilities ratio of not less than 1x, a total liabilities to equity ratio of not more than 2.5x, an EBITDA to maturing obligations and interest expenses ratio (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) of not less than 1.2x, and a minimum coverage ratio of 100%.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Pada periode laporan keuangan per 31 Desember 2024 melalui Surat Permohonan Penyesuaian Ketentuan Perjanjian Kredit kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 067/KU 100/27/III/ 2024 tanggal 27 Maret 2024, Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang Perjanjian Pembiayaan No. 003/KU/100/26/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, serta Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang/*Standstill Period* No. 003A/KU-100/26/IX/2024 tanggal 26 September 2024, Debitur mengajukan permohonan penyesuaian terhadap ketentuan dalam perjanjian pembiayaan (yang selanjutnya dapat diubah, ditambahkan, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, "Perjanjian Pembiayaan").

Sebagaimana dinyatakan dalam surat dari pihak Kreditur No. 04/039-3/SP3/CB2 tertanggal 29 April 2024, Kreditur menyetujui penangguhan pembayaran pokok dan imbal hasil hingga Juli 2024 atau hingga restrukturisasi dinyatakan efektif.

Saldo pinjaman pada periode 31 Desember 2025 adalah Rp200.000.000.

Pada tanggal 17 Maret 2025, KAEF dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menandatangani Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 16 di hadapan Notaris. Berdasarkan perjanjian tersebut, *outstanding* pinjaman dibagi menjadi 2 *Tranche*, yaitu *Tranche A dan Tranche B. Tranche A* memiliki nilai pokok sebesar Rp112.500.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat imbal hasil sebesar 5,5% p.a. yang dibayarkan setiap kuartal. Sebagai jaminan atas fasilitas tersebut, KAEF menyerahkan agunan berupa aset tetap dan piutang/persediaan secara proporsional terhadap jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank (Catatan 6, 8, dan 16).

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

In the financial period as of December 31, 2024 through the Request Letter for Adjustment of Credit Agreement Terms submitted to PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 067/KU 100/27/III/2024 dated March 27, 2024, the Request for Extension of the Grace Period under the Financing Agreement No. 003/KU/100/26/VI/2024 dated June 26, 2024, and the Request for Extension of the Grace Period/Standstill Period No. 003A/KU-100/26/IX/2024 dated September 26, 2024, Borrower has submitted a request for amendment to the terms and conditions of the financing agreement (as may be amended, supplemented, or restated from time to time, the "Financing Agreement").

As stated in the Creditor's letter No. 04/039-3/SP3/CB2 dated April 29, 2024, the Creditor approved the deferral of principal and profit-sharing payments until July 2024 or until the restructuring becomes effective.

The outstanding loan balance as of December 31, 2025, amounting to Rp200,000,000.

On March 17, 2025, KAEF and PT Bank Syariah Indonesia Tbk entered into a Sharia Based Line Facility Financing Agreement Deed No. 16 before a Notary. Pursuant to the agreement, the outstanding loan was structured into 2 Tranches, namely Tranche A and Tranche B. Tranche A has a principal amount of Rp112,500,000 with a term of 5 years and a profit-sharing rate of 5.5% p.a., payable on a quarterly basis. As collateral for the facility, KAEF pledged fixed assets and receivables/inventories in proportion to the total loan amount obtained from the bank (Notes 6, 8, and 16).

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, KAEF menyerahkan agunan berupa:

a. Aset tetap atas nama KAEF dengan nilai pasar jaminan minimal sebesar 30% dari total limit fasilitas *Tranche* A, yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari nilai agunan.
b. Piutang usaha dan/atau persediaan yang ada maupun yang akan ada, dengan nilai pasar jaminan minimal sebesar 95% dari total limit fasilitas *Tranche* A, yang telah dilakukan pengikatan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari nilai agunan.
c. Aset tetap atas nama KAEF dengan nilai pasar jaminan minimal sebesar 70% dari total limit fasilitas *Tranche* B, yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari nilai agunan.

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 16 tanggal 17 Maret 2025, Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pinjaman di hadapan Notaris. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, bagian pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek telah direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang (Catatan 23b).

Pada tanggal 16 Desember 2025, entitas anak, KFA, bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan lima bank lainnya telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA) berupa Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 39 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini, perjanjian tersebut belum berlaku efektif.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

As part of the agreement, KAEF pledged collateral in the form of:

a. Fixed assets under KAEF's name with a minimum market value of 30% of the total limit of Tranche A facility, secured by a first-ranking mortgage with a collateral coverage of 110% of the asset value.
b. Existing and future trade receivables and/or inventories, with a minimum market value of 95% of the total limit of the Tranche A facility, secured through fiduciary transfer with a collateral coverage of 100% of the asset value.
c. Fixed assets under KAEF's name with a minimum market value of 70% of the total limit of the Tranche B facility, secured by a first-ranking mortgage with a collateral coverage of 110% of the asset value.

Based on the Line Facility Financing Agreement under Sharia Principles Deed No. 16 dated March 17, 2025, the Company restructured its loan before a Notary. In relation to this restructuring, the portion of the loan previously classified as current liabilities has been reclassified as long-term liabilities (Note 23b).

On December 16, 2025, the subsidiary, KFA, together with PT Bank Syariah Indonesia Tbk and five other banks, executed the Master Restructuring Agreement (MRA) in the form of Deed of Master Restructuring Agreement No. 39 before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.H. As of the date of issuance of this report, the agreement has not yet become effective.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank DKI

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

KAEF memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank DKI berdasarkan beberapa surat persetujuan kredit yang diterbitkan pada Maret 2023. Fasilitas yang diberikan meliputi dua pinjaman tetap berjangka masing-masing sebesar maksimum Rp175.000.000 dan Rp200.000.000, serta dua fasilitas pembiayaan modal kerja berbasis prinsip syariah (musyarakah) masing-masing maksimum sebesar Rp175.000.000 dan Rp200.000.000, yang juga dapat digunakan oleh entitas anak, PT Kimia Farma Apotek (KFA), selanjutnya secara bersama-sama disebut Debitur. Seluruh fasilitas memiliki jangka waktu 12 bulan sejak tanggal perjanjian dan dibebani tingkat suku bunga antara 5,50% hingga 7,60% p.a. untuk fasilitas konvensional, serta imbal hasil berbasis *gross profit sharing* untuk fasilitas musyarakah.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut kepada pihak bank. Permohonan ini telah direspons oleh pihak bank melalui surat-surat sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Kredit (SPPRK) atas nama KAEF No.4292.9/SPPRK/RPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPRK) Perubahan Fasilitas KMK Tetap Berjangka–I No. 4376.8/SPPRK/RPK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, KAEF memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka dari PT Bank DKI untuk tambahan modal kerja operasional sebesar maksimum Rp105.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan berlaku sampai dengan 28 Maret 2028. Atas fasilitas kredit tersebut, dikenakan suku bunga sebesar 7,6% p.a.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank DKI

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

KAEF obtained working capital credit facilities from PT Bank DKI based on several credit approval letters issued in March 2023. The facilities consist of two Term Loan facilities with maximum limits of Rp175,000,000 and Rp200,000,000 respectively, and two sharia principles working capital financing facilities (musyarakah), each with a maximum limit of Rp175,000,000 and Rp200,000,000. All facilities may be utilized by the Company and its subsidiary, PT Kimia Farma Apotek (KFA), hereinafter collectively referred to as Borrower, and have a tenor of 12 months from the date of the agreement. The conventional facilities bear interest rates ranging from 5.50% to 7.60% p.a., while the musyarakah facilities provide returns based on a gross profit-sharing scheme.

On March 27, 2024, Borrower submitted a request for the restructuring of the respective loan facilities to the bank. This request was responded to by the bank through letters as listed below.

Based on the Credit Restructuring Approval Letter (SPPRK) on behalf of KAEF No. 4292.9/SPPRK/RPK/III/2024 dated March 27, 2024 and the Credit Approval Letter (SPPRK) for the Amendment of the Fixed-Term Working Capital Loan Facility I No. 4376.8/SPPRK/RPK/III/2024 dated March 28, 2024, KAEF obtained a Working Capital Loan (Fixed-Term Loan) facility from PT Bank DKI to support additional operational working capital with a maximum limit of Rp105,000,000. The facility has a term of 12 months from the date of the credit agreement signing and is valid until March 28, 2028. The loan bears an annual interest rate of 7.6% p.a.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPPRP) atas nama KAEF No. 4292.3/SPPRP/RPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPRP) Perubahan Fasilitas KMK Aflopend No.4376.11/SPPRP /RPK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, KAEF memperoleh Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Tetap Berjangka I sebesar maksimum Rp105.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan hingga 28 Maret 2025. Fasilitas ini menggunakan skema bagi hasil dengan metode *profit sharing* atas laba kotor (*gross profit*), yang dapat ditinjau kembali dan dievaluasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Kredit (SPPRK) atas nama KAEF No.4292.4/SPPRK/RPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPRK) Perubahan Fasilitas KMK Tetap Berjangka-II *Joint Borrower* KAEF dan entitas anak, KFA, No. 4376.12/SPPRK/RPK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, KAEF memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Musyarakah yang digunakan untuk Modal Kerja Operasional Jangka Pendek KAEF sebesar maksimum Rp200.000.000 yang dapat digunakan oleh KAEF dan KFA dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan, dengan nisbah bagi hasil 99,38% untuk KAEF dan 99,58% untuk KFA menggunakan *profit sharing (gross profit)* yang dapat direviu dan dievaluasi atas kesepakatan para pihak.

Atas fasilitas kredit yang diterima di atas KAEF Grup diharuskan menjaga rasio keuangan secara konsolidasi, seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar tidak kurang dari 1x, rasio total kewajiban terhadap modal tidak lebih dari 3x, rasio EBITDA terhadap kewajiban yang jatuh tempo dan biaya bunga (DSCR) tidak kurang dari 1x. Pada tanggal 31 Desember 2024, KAEF Grup belum memenuhi semua persyaratan *covenant* yang ditentukan dalam perjanjian.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank DKI (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Based on the SPPRP (Financing Restructuring Approval Letter) of KAEF No. 4292.3/SPPRP/RPK/III/2024 dated March 27, 2024 and the SPPRP (Approval Letter for Financing Facility Amendment) KMK Aflopend No. 4376.11/SPPRP/RPK/III/2024 dated March 28, 2024, KAEF obtained a Fixed-Term Working Capital Financing Facility I (PMK Tetap Berjangka I) with a maximum amount of Rp105,000,000, with a term of 12 months from the signing date of the financing agreement until March 28, 2025. This facility applies a profit-sharing scheme, using a profit-sharing method based on gross profit, which is subject to review and evaluation in accordance with mutual agreement between the parties.

Based on Credit Restructuring Approval Notification Letter of KAEF No.4292.4/ SPPRK/RPK/III/2024 dated on March 27, 2024 and Credit Restructuring Approval Notification Letter amendment of KMK Facility-II joint borrower the company and subsidiaries KFA, No.4376.12/SPPRK /RPK/III/2024 dated on March 28, 2024, KAEF obtained a Musyarakah Working Capital Credit Facility which is used for the Short-Term Operational Working Capital Company of a maximum of Rp200,000,000 that can be used for KAEF and KFA with a period of 12 months from the signing of the financing agreement, with a profit sharing ratio of 99.38% for KAEF and 99.58% for KFA using profit sharing (gross profit) that can be reviewed and evaluated on the agreement of the parties.

For the credit facilities received above the Group of KAEF are required to maintain financial ratio on a consolidated basis, as the ratio of current assets to current liabilities of not less than 1x, the ratio of total liabilities to equity is not more than 3x, the ratio of EBITDA to its maturing obligations and costs interest (DSCR) of not less than 1x. As of December 31, 2024 the Group of KAEF has not fulfilled all covenant requirements within the agreement.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur wajib:

1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaannya;
2. Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* setiap triwulan paling lambat 60 hari setelah akhir laporan;
3. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang paling lambat 180 hari setelah akhir periode laporan. Apabila terjadi pelanggaran atas batas waktu tersebut, maka kolektibilitas fasilitas kredit diturunkan menjadi setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar;
4. Menjaga rasio keuangan secara konsolidasi, seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar tidak kurang dari 1x, rasio total kewajiban terhadap modal tidak lebih dari 3x, rasio EBITDA terhadap kewajiban yang jatuh tempo dan biaya bunga (DSCR) tidak kurang dari 1x;
5. Segera memberitahukan kepada PT Bank DKI apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya risiko kredit;
6. Dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas PT Bank DKI atau pihak lain yang ditunjuk diizinkan untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bank serta meminta informasi dari pihak ketiga lainnya dan biaya-biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan tersebut merupakan Debitur;
7. Memperpanjang/ memperbarui perizinan-perizinan yang diperlukan dan menyampaikan salinannya pada PT Bank DKI;
8. Menyampaikan akta perubahan anggaran dasar perusahaan setiap ada perubahan anggaran dasar disertai kelengkapan dokumentasinya;

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank DKI (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

For so long as the credit facility remains outstanding, and without the Bank's prior written consent, the Borrower shall:

1. *Using credit facilities according to their intended use;*
2. *Submit quarterly internal financial reports no later than 60 days after the end of the reporting period;*
3. *Submit annual financial statements audited by a Public Accounting Firm (KAP) registered with the OJK, no later than 180 days after the end of the reporting period. In the event of a breach of such deadline, the collectability classification of the credit facility shall be downgraded to, at best, Substandard (Non-Performing Loan classification: Substandard);*
4. *Maintain consolidated financial ratio, such as the ratio of current assets to current liabilities of not less than 1x, the ratio of total liabilities to capital is not more than 3x, the ratio of EBITDA to maturing liabilities and interest expense (DSCR) is not less than 1x;*
5. *Promptly notify PT Bank DKI of any events or circumstances that may give rise to credit risk;*
6. *In the event of a downgrade in collectability, PT Bank DKI or any appointed party shall be entitled to conduct an inspection of the Borrower's business and financial activities, as well as the Borrower's books and records maintained in relation to its obligations to the Bank, and to obtain information from third parties. Any costs incurred in connection with such activities shall be borne by the Borrower;*
7. *Extend/renew the required permits and submit copies to PT Bank DKI;*
8. *Submit a deed of amendment to the articles of association of the company every time there is a change in the articles of association accompanied by complete documentation;*

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur wajib: (lanjutan)

9. Mengizinkan PT Bank DKI atau pihak lain ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Nasabah, serta pemeriksaan terhadap seluruh jaminan;
10. Memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dikeluarkan oleh Bank, Pemerintah Republik Indonesia, atau ketentuan umum praktik bisnis;
11. Senantiasa menjaga kolektibilitas KAEF dan pengurus KAEF dalam kondisi lancar.

Pada tanggal 28 Maret 2024, KAEF kembali mengajukan permohonan penyesuaian ketentuan atas perjanjian kredit melalui Surat No.013/KU 100/27/III/2024 kepada Bank DKI dan Surat No.012/KU 100/28/III/2024 kepada pihak bank terkait. Hingga tanggal 31 Desember 2024, proses penyesuaian atas permohonan tersebut masih berlangsung.

Pada tanggal 27 Maret 2025, berdasarkan Akta No. 39 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Perusahaan bersama PT Bank DKI menandatangani Adendum atas Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja (KMK). Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, bagian pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek telah direklasifikasi ke dalam liabilitas jangka panjang (Catatan 23b).

Pada tanggal 16 Desember 2025, KFA, bersama PT Bank Jakarta dan lima banklainnya telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA) berupa Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 39 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini, perjanjian tersebut belum berlaku efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp400.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank DKI (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

For so long as the credit facility remains outstanding, and without the Bank's prior written consent, the Borrower shall: (continued)

9. Permit PT Bank DKI or other parties to be appointed to conduct audits of the Customer's business and financial activities, as well as examination of all guarantees;
10. Comply with applicable regulations, whether issued by the Bank, the Government of the Republic of Indonesia, or general provisions of business practice;
11. Always maintain the collectibility of KAEF and the management of KAEF in a smooth condition.

On March 28, 2024, KAEF submitted further requests for the amendment of loan agreement terms through Letter No.013/KU 100/27/III/2024 to Bank DKI and Letter No.012/KU 100/28/III/2024 to the respective bank. As of December 31, 2024, the amendment process was still ongoing.

On March 27, 2025, based on Deed No. 39 executed before Notary Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., the Company and PT Bank DKI entered into an Addendum to the Working Capital Loan (KMK) Restructuring Agreement. In connection with this restructuring, the portion of the loan previously classified as current liabilities has been reclassified as non-current liabilities (Note 23b).

On December 16, 2025, KFA, together with PT Bank Jakarta and five other banks, executed the Master Restructuring Agreement (MRA) in the form of Deed of Master Restructuring Agreement No. 39 before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.H. As of the date of issuance of this report, the agreement has not yet become effective.

As of December 31, 2025, the outstanding balance this loan amounted to Rp400,000,000.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Adendum Kesebelas tanggal 15 Agustus 2025 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja *Revolving* No. CDO.BDG/319/KMK/2015 dan Surat Penyesuaian Suku Bunga No. CBG.CB5/SIC7.3238C/2025 pada tanggal 23 Januari 2025, PT Bio Farma (Persero), selanjutnya disebut Perusahaan/Debitur, telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang bersifat *Committed, Revolving,* dan *Advised* sebesar Rp580.000.000 yang dipergunakan untuk Modal Kerja Operasional dengan bunga sebesar 6,80% p.a. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak 15 Agustus 2024 dengan jaminan fidusia berupa mesin-mesin senilai Rp265.000.000 dan Rp430.000.000 serta persediaan dan piutang senilai Rp850.000.000 (*Joint Collateral* dengan fasilitas pembiayaan bilateral lainnya di Bank Mandiri).

Sesuai perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan menjaga batasan rasio keuangan, seperti *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1,1x, *Current Ratio* minimum sebesar 120%, *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 250%, dan Total *Debt/EBITDA* maksimal sebesar 400%. Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman ini sebesar Rp300.000.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 03 tanggal 9 Desember 2024, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk memberikan Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Transaksional *sublimit* kepada Perusahaan, selanjutnya disebut Perusahaan/Debitur, berupa Pembukaan *LC*/*Sight*/*Usance* dan/atau SKBDN *Sight/Usance*, serta Pembiayaan *LC* dan/atau SKBDN yang bersifat *Revolving* Transaksional dan *Uncommitted* senilai Rp300.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company

Based on the Eleventh Addendum dated August 15, 2025, to the Revolving Working Capital Credit Agreement No. CDO.BDG/319/KMK/2015 and the Interest Rate Adjustment Letter No. CBG.CB5/SIC7.3238C/2025 dated January 23, 2025, PT Bio Farma (Persero), hereinafter referred to as the Company/Borrower, has obtained Committed, Revolving, and Advised Working Capital Credit (KMK) in the amount of Rp580,000,000, which is used for Operational Working Capital with an interest rate of 6.80% p.a. This facility has a term of 1 year starting from August 15, 2024, and is secured by fiduciary collateral in the form of machinery valued at Rp265,000,000 and Rp430,000,000 as well as inventories and receivables with Rp850,000,000 (Joint Collateral with other bilateral financing facilities at Bank Mandiri).

In accordance with the loan agreement, the Company is required to comply with administrative covenants and maintain certain financial ratios, including a minimum Debt Service Coverage Ratio of 1.1x, a minimum Current Ratio of 120%, a maximum Debt to Equity Ratio of 250%, and a maximum Total Debt to EBITDA of 400%. As of December 31, 2025, the outstanding balance of this loan amounted to Rp300,000,000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

The Company

Based on the Export Working Capital Credit Agreement Deed No. 03 dated December 9, 2024, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia or Indonesia Eximbank has agreed to provide the Company, hereinafter referred to as the Company/Borrower, with a Transactional Export Working Capital Financing sublimit in the form of Opening of LC/Sight/Usance and/or SKBDN Sight/ Usance, as well as LC and/or SKBDN Financing, which is Revolving, Transactional, and Uncommitted, amounting to Rp300,000,000.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (lanjutan)

Fasilitas pembiayaan ini dipergunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pembelian bahan baku dengan *LC*/SKBDN atau non-*LC*/SKBDN atau dokumen sejenis untuk memenuhi kontrak-kontrak ekspor perusahaan. Fasilitas pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu maksimal 12 bulan sejak 9 Desember 2024 dengan tenor pencairan selama 180 hari.

Atas Fasilitas Pembiayaan ini, Perusahaan dikenai bunga sebesar 6% p.a. dan diwajibkan untuk membayar provisi sebesar 0,225% p.a., yang ditarik per pencairan. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran, maka Perusahaan dikenai denda sebesar 2% p.a. di atas tingkat bunga. Atas Fasilitas Pembiayaan ini, Perusahaan juga diharuskan untuk memelihara *Debt to Equity Ratio* selama tahun proyeksi maksimal 3 kali, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali, dan *Current Ratio* minimal 1 kali. Tidak terdapat hal khusus yang dijaminkan atas Fasilitas Pembiayaan ini atau *clean basis.* Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman ini sebesar Rp130.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Adendum X (Kesepuluh) No. 07 pada tanggal 25 Maret 2025 Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk menyetujui pinjaman fasilitas Kredit Jangka Pendek, KMK *Buyer, L/C* SKBDN *Line,* dan Bank Garansi dengan limit sebesar Rp500.000.000 terhitung sejak jangka waktu 4 April 2025 s.d 4 April 2026. Beserta jaminan persediaan senilai Rp300.000.000 dan jaminan piutang senilai Rp250.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp80.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (continued)

This financing facility is intended for Working Capital Financing in connection with the purchase of raw materials using LC/SKBDN or non-LC/SKBDN or similar documents to fulfill the company's export contracts. The financing facility is granted for a maximum term of 12 months from December 9, 2024, with a disbursement tenor of 180 days.

Under this Financing Facility, the Company is subject to an interest rate of 6% p.a. and is required to pay a provision fee of 0.225% p.a., charged at each disbursement. In the event of late payment, the company will incur a penalty of 2% p.a. above the interest rate. The Company is also required to maintain a maximum Debt to Equity Ratio of 3 times during the projection year, a minimum Debt Service Coverage Ratio of 1 time, and a minimum Current Ratio of 1 time. This facility is provided on a clean basis, with no specific collateral required. As of December 31, 2025, the outstanding loan balances amounted to Rp130,000,000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company

Based on Addendum Agreement Deed X (Tenth) No. 07 dated March 25, 2025, the Company entered into an agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. to obtain approval for Short-Term Credit Facility, Working Capital Loan (KMK Buyer), L/C SKBDN Line, and Bank Guarantee with a total limit of Rp500,000,000, effective for the period from April 4, 2025, to April 4, 2026. The facilities are secured by inventory valued at Rp300,000,000 and receivables valued at Rp250,000,000.

As of December 31, 2025, the outstanding balance this loan amounted to Rp80,000,000.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

a. Fasilitas modal kerja Rp5.850.000

Pada tanggal 10 Agustus 2021, INUKI menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan jangka waktu dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.

Pinjaman ini dibebankan bunga dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar 10% p.a. yang dihitung dari maksimum kredit dan secara proporsional berdasarkan jangka waktu kredit.

Saldo pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.055.670.

b. Fasilitas modal kerja Rp250.000

Pada tanggal 10 Agustus 2021, INUKI menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan jangka waktu dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.

Pinjaman ini dibebankan bunga dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar 10% p.a. yang dihitung dari maksimum kredit dan secara proporsional berdasarkan jangka waktu kredit.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan segala kekayaan harta baik bergerak maupun tidak yang sudah maupun yang kemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh penerimaan kredit.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

a. Working capital facility Rp5,850,000

On August 10, 2021, INUKI signed a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with term from August 10, 2021 until January 31, 2022.

This loan bears floating interest rate of 10% p.a. which calculated from the maximum credit and proportionally based on the credit period.

The outstanding balance of this short-Term Loan as of December 31, 2025 amounted to Rp10,055,670.

b. Working capital facility Rp250,000

On August 10, 2021, INUKI signed a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with term from August 10, 2021 until January 31, 2022.

This loan bears floating interest rate of 10% p.a. which calculated from the maximum credit and proportionally based on the credit period.

The loan facilities are secured by all movable and non movable assets that have been or are later pledged to be a guarantee for all receipts of credit.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum dibayar penuh, tanpa izin tertulis dari BRI, INUKI tidak diperbolehkan untuk:

i. Melakukan tindakan *merger*, akuisisi, investasi, dan *go public*.
ii. Memberikan piutang kepada pemegang saham, kecuali piutang dagang dana atau transaksi bisnis lazim.
iii. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang mengakibatkan *Debt to Equity Ratio* (DER) INUKI lebih dari 400% (lebih dari sama dengan empat ratus persen). DER yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah utang (kecuali yang dijamin seluruhnya dengan agunan kas) terhadap Jumlah ekuitas pada laporan keuangan INUKI.
iv. Apabila terdapat utang kepada pemegang saham, kecuali utang dagang dan atau transaksi bisnis lazim, maka harus memenuhi syarat bahwa utang kepada pemegang saham dan segala kewajiban lainnya yang timbul akibat adanya utang kepada pemegang saham tersebut tidak boleh dibayar hingga pinjaman bank telah dinyatakan lunas oleh bank, kecuali sebagian atau seluruhnya dikonversi menjadi modal disetor.
v. Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham di atas 20% dari laba tahun berjalan.
vi. Menjual, mengalihkan, atau memindahtangankan harta kekayaan/aset tetap INUKI yang produktif dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan operasional INUKI.
vii. Melakukan investasi dan/atau penyertaan ke perusahaan lain.
viii. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang pihak lain atau menjaminkan harta kekayaan INUKI kepada pihak lain.
ix. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (continued)

As long as the credit facilities have not been fully paid, without written permission from BRI, INUKI is not allowed to:

i. Perform mergers, acquisitions, investments, and go public.
ii. Providing receivables to shareholders, except for trade receivables transactions.
iii. Receiving a new loan/credit from a bank or other financial institution resulting in INUKI's Debt to Equity Ratio (DER) of more than 400%. The DER in question is the ratio between the total debt (except those guaranteed entirely by cash as collateral) to the total equity in INUKI's financial statements.
iv. If there is debt to shareholders, except for trade payables and or ordinary business transactions, it must fulfill the requirement that debts to shareholders and all other obligations arising from debts to shareholders may not be paid until the bank loan has been declared paid off by the bank, unless the part or all of it is converted into paid-up capital.
v. Distribute dividends to shareholders of more than 20% of the current year's profit.
vi. Sell, transfer, or transfer INUKI's productive assets/fixed assets and are directly related to INUKI's production and operational activities.
vii. Making investments and/or participation in other companies.
viii. Bind yourself as a guarantor for other parties' debts or guarantee INUKI's assets to other parties.
ix. Transferring/handing over to other parties, part or all of the rights and obligations arising in connection with this Credit Facility.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum dibayar penuh, tanpa izin tertulis dari BRI, INUKI tidak diperbolehkan untuk: (lanjutan)

x. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit No. 40166/GBK/2024 tanggal 7 Februari 2024, KAEF memperoleh perpanjangan atas fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk dengan jangka waktu sampai dengan 12 Mei 2024. Fasilitas yang diperoleh terdiri dari fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM) dengan batas maksimum sebesar Rp300.000.000 yang dapat digunakan oleh PT Kimia Farma Apotek (KFA), entitas anak KAEF, sebesar maksimum Rp100.000.000, fasilitas *time loan revolving* 1 dengan batas maksimum sebesar Rp100.000.000 dan *sublimit* penggunaan oleh KFA sebesar Rp75.000.000, fasilitas bank garansi sebesar Rp35.000.000, fasilitas *Letter of Credit* (LC) Sight/Usance dengan batas maksimum sebesar USD3.500.000, fasilitas rekening koran sebesar Rp30.000.000, fasilitas *Time Loan Revolving* 2 dengan pokok pinjaman maksimum Rp100.000.000, serta fasilitas *forex line* dengan batas maksimum sebesar USD1.500.000.

Fasilitas kredit ini dibebani bunga tahunan sebesar 8,00% hingga 8,60% dan dapat berubah sewaktu-waktu. Fasilitas ini dijamin dengan sertifikat HGB No. 2341/Pasar Baru dan sertifikat HGB No. 275/Gambir atas nama KAEF, dengan nilai pengikatan hak tanggungan sebesar Rp155.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (continued)

As long as the credit facilities have not been fully paid, without written permission from BRI, INUKI is not allowed to: (continued)

x. To submit a bankruptcy declaration petition to the Commercial Court.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the Notification Letter for the Extension of the Drawdown and/or Utilization Period of Credit Facilities No. 40166/GBK/2024 dated February 7, 2024, KAEF obtained an extension of its working capital credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, with a term until May 12, 2024. The facilities obtained consist of a Money Market Term Loan (PBMM) facility with a maximum limit of Rp300,000,000, of which PT Kimia Farma Apotek (KFA), a subsidiary of KAEF, may utilize up to Rp100,000,000, a Time Loan Revolving 1 facility with a maximum limit of Rp100,000,000 and a sublimit for KFA of Rp75,000,000, a Bank Guarantee facility of Rp35,000,000, a Letter of Credit (LC) Sight/Usance facility with a maximum limit of USD3,500,000, an Overdraft facility of Rp30,000,000, a Time Loan Revolving 2 facility with a maximum principal of Rp100,000,000, and a Forex Line Facility with a maximum limit of USD1,500,000.

The facility was charged by an annual interest rate of 8.00% to 8.60% and may change at any time. These facilities are secured by HGB No. 2341/ Pasar Baru and HGB No. 275/Gambir, both registered under KAEF, with a mortgage binding value of Rp155,000,000.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Entitas anak PEHA melalui PT Marin Liza Farmasi berdasarkan perjanjian kredit No.1547/0437/21 tanggal 6 Mei 2021 dan telah diperpanjang memperoleh fasilitas berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu (SPKJ) No. 00195/AYA /SPKJ/2025 tanggal 2 Mei 2025. Fasilitas Rekening Koran (RK) memiliki jumlah batas sebesar Rp568.000, dan Fasilitas *Installment Loan*, dengan jumlah batas sebesar Rp142.000. Suku bunga sebesar 11% p.a. dan provisi 1% jatuh tempo pada 6 Mei 2026.

Seluruh fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan dengan SHGB No. 020266/ Margasari sebesar Rp2.000.000 atas nama PT Marin Liza Farmasi yang terletak di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Bandung (Catatan 16).

Atas fasilitas kredit yang diperoleh sebagaimana dijelaskan di atas, KAEF dan entitas anak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan secara konsolidasian, antara lain menjaga rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek minimal sebesar 1x, rasio total liabilitas terhadap ekuitas maksimal sebesar 3x, serta rasio EBITDA terhadap total kewajiban yang jatuh tempo ditambah beban bunga (*Debt Service Coverage Ratio*/DSCR) minimal sebesar 2 kali. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, KAEF belum memenuhi ketentuan rasio keuangan (*covenant*) sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

The subsidiary, PEHA, through PT Marin Liza Farmasi, based on Credit Agreement No. 1547/0437/21 dated May 6, 2021, which has been extended, obtained facilities based on the Notification and Confirmation of Extension of Term (SPKJ) No. 00195/AYA/SPKJ/2025 dated May 2, 2025, whereby the Overdraft Facility (Rekening Koran/RK) has a maximum limit of Rp568,000 and the Installment Loan Facility has a maximum limit of Rp142,000, with an interest rate of 11% p.a. and a provision fee of 1%, maturing on May 6, 2026.

All these facilities were secured by Building Right Title No. 020266/Margasari as Amount Rp2,000,000 in the name of MLF located in Margasari, Buah Batu, Bandung (Note 16).

Under the credit facilities obtained as described above, the Group is required to maintain certain consolidated financial covenants, including a Current Ratio of at least 1x, a maximum debt-to-equity ratio of 3x, and an EBITDA to maturing obligations and interest expenses ratio (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) of no less than 2 times. As of December 31, 2024, the Group had not complied with the financial covenant requirements stipulated in the loan agreements.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Berdasarkan Surat Permohonan Penyesuaian Ketentuan Perjanjian Kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk No. 009/KU 100/27/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang Perjanjian Pembiayaan No.001/KU/100/ 26/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang/*Standstill Period* No. 002A/KU/100/26/IX/2024 tanggal 26 September 2024, KAEF telah mengajukan permohonan kepada Kreditur untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Perjanjian Pembiayaan (yang selanjutnya dapat diubah, ditambahkan, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu). Hingga tanggal laporan ini, proses restrukturisasi atas fasilitas pinjaman tersebut masih berlangsung.

Pada tanggal 3 Desember 2025, KAEF bersama PT Bank Central Asia Tbk menandatangani Akta No. 1 tentang Perubahan Atas Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., yang mengatur fasilitas pinjaman *Tranche B* memiliki nilai sebesar Rp429.992.664 dengan jangka waktu 7 tahun atas fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5,5%. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, porsi pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah direklasifikasi ke dalam utang bank jangka panjang (Catatan 23b).

Pada tanggal 16 Desember 2025, Entitas Anak, KFA, bersama PT Bank Central Asia Tbk dan lima bank lainnya telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA) berupa Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 39 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini, perjanjian tersebut belum berlaku efektif.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Based on the Letter of Request for Adjustment of Credit Agreement Terms to PT Bank Central Asia Tbk No. 009/KU 100/27/III/2024 dated March 27, 2024 and Letter of Request for Extended Standstill of Credit Agreement No. 001/KU/100/26/ VI/2024 dated June 26, 2024 and letter of Notification of extended of Grace Period No. 002A/KU/100/26/IX/2024 dated on September 26, 2024, KAEF has submitted requests to the lender for adjustments to the provisions of the Financing Agreement (which may be amended, supplemented, or restated from time to time). As of the date of these financial statements, the restructuring process of the loan facility is still ongoing.

On December 3, 2025, KAEF and PT Bank Central Asia Tbk signed Deed No. 1 regarding the Amendment to the Credit Agreement before Notary Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., which stipulates that the Tranche B loan facility amounts to Rp429,992,664 with a term of 7 years, and bears an interest rate of 5.5%. In connection with the restructuring, the portion of the loan previously classified as short-term bank loans has been reclassified as long-term bank loans. (Note 23b).

On December 16, 2025, the Subsidiary, KFA, together with PT Bank Central Asia Tbk and five other banks, executed the Master Restructuring Agreement (MRA) in the form of Deed of Master Restructuring Agreement No. 39 before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.H. As of the date of issuance of this report, the agreement has not yet become effective.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp100.000.000.

PT Bank ICBC Indonesia

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 21 Desember 2023, PT Bank ICBC Indonesia telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit *Omnibus Line* kepada Perusahaan senilai Rp350.000.000 dalam bentuk Pinjaman Tetap *on Demand-A* (PTD-A)/*Uncommitted Revolving, Letter of Credit (L/C)* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Trust Receipt* (TR), *Usance Payable at Sight* (UPAS)/*Usance Financing at Maturity* (UFAM), dan *Negotiation/Discounting* L/C, atau SKBDN. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan sejak 21 Desember 2024 yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan umum Perusahaan dan anak Perusahaan. Atas Fasilitas Kredit ini, tidak terdapat hal khusus yang dijaminkan atau *clean* basis.

Atas fasilitas kredit ini, Perusahaan dikenai bunga *Repo Rate* Bank Indonesia 7 hari ditambah 0,75% p.a. Selain bunga tersebut, Perusahaan juga dikenai biaya fasilitas sebesar Rp35.000 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% p.a. Perusahaan juga diharuskan untuk memelihara *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 2,5x, *Current Ratio* minimum 1x, EBITDA *to Interest* minimum 1.1x, serta wajib membuka dan menjaga rekening operasional pada PT Bank ICBC Indonesia yang mana kegiatan operasional dan pembayaran kewajiban pinjaman harus dilakukan melalui rekening tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman ini sebesar Rp336.286.940.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

As of December 31, 2025, the outstanding balance of this loan amounted to Rp100,000,000.

PT Bank ICBC Indonesia

The Company

Based on Credit Agreement Deed No. 53 dated December 21, 2023, PT Bank ICBC Indonesia has agreed to provide an Omnibus Line Credit Facility to the Company amounting to Rp350,000,000 in the form of Fixed Loan on Demand-A (PTD-A)/Uncommitted Revolving, Letter of Credit (L/C) or Domestic Documentary Credit (SKBDN), Trust Receipt (TR), Usance Payable at Sight (UPAS)/Usance Financing at Maturity (UFAM), and Negotiation/ Discounting of L/C or SKBDN. This Facility has a term of 12 months from December 21, 2024, and is intended to finance the general needs of The Company and its subsidiaries. This Credit Facility is provided on a clean basis, with no specific collateral required.

Under this Credit Facility, The Company is subject to an interest rate of the Bank Indonesia 7-day Repo Rate plus 0.75% p.a. In addition to the interest, The Company is also charged a facility fee of Rp35,000 and a penalty for late payment of 2% p.a. The company is also required to maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 2.5x, a minimum Current Ratio of 1x, a minimum EBITDA to Interest ratio of 1,x, and is obliged to open and maintain an operational account at PT Bank ICBC Indonesia, through which operational activities and loan repayment obligations must be carried out. As of December 31, 2025, the outstanding loan balances amounted to Rp336,286,940.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah No. 30 tanggal 10 Februari 2021 yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan V Terhadap Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah tanggal 15 Mei 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan fasilitas syariah *Omnibus Trade Facility* 2 yang bersifat *Uncommitted* dan *Revolving* dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp260.000.000 dan jangka waktu fasilitas sampai dengan 10 Februari 2025 (tenor selama 6 bulan).

Fasilitas pembiayaan ini dipergunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan perdagangan Perusahaan. Atas fasilitas pembiayaan ini tidak terdapat hal khusus yang dijaminkan atau *clean basis*. Atas fasilitas pembiayaan ini, Perusahaan dikenai bunga/nisbah yang akan disetujui per setiap transaksi sebelum penarikan atau perpanjangan dan dikenai denda/ta'zir atas keterlambatan sebesar 2%. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini sebesar Rp195.000.000.

Berikut merupakan detail atas Fasilitas Syariah *Omnibus Trade Facility* 2:

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The Company

Based on the Sharia Financing Agreement Deed No. 30 dated February 10, 2021, most recently amended by the Fifth Amendment Agreement to the Sharia Financing Agreement dated May 15, 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk has provided an Omnibus Trade facility 2 sharia facility, which is Uncommitted and Revolving, with a total financing amount of Rp260,000,000 and a facility period until February 10, 2025 (a 6-month tenor).

This financing facility is intended to support the Company's working capital and trade financing needs. This facility is provided on a clean basis, with no specific collateral required. Under this financing facility, The Company is subject to a profit-sharing rate/nisbah to be agreed upon for each transaction prior to disbursement or extension, and is also subject to a penalty/ta'zir for late payment of 2%. As of December 31, 2025, the outstanding balances of this loan amounted to Rp195,000,000.

The following are the details of the Sharia Omnibus Trade Facility 2:

Limit/ *Limit*	:	Rp260.000.000
Jenis fasilitas/ *Types of facilities*	:	*Syariah Open Account Financing (OAF) Buyer II - Uncommitted, Syariah Letter of Credit (LC) II* / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) II & *Syariah Financing Against Trust Receipt* (FATR)
Suku bunga/ *Interest*	:	Akan disetujui per setiap transaksi sebelum penarikan atau perpanjangan pinjaman / *Subject to approval for each transaction prior to loan drawdown or extension.*
Jangka waktu/ *Period*	:	10 Februari 2025 s/d 10 Maret 2025 (Perpanjangan sementara 1); 10 Maret 2025 s/d 10 April 2025 (Perpanjangan sementara 2); 10 April 2025 s/d 10 Februari 2026 / *February 10, 2025 to March 10, 2025 (Temporary extension 1); March 10, 2025 to April 10, 2025 (Temporary extension 2); April 10, 2025 to February 10, 2026.*
Tujuan/ *Purpose*	:	Untuk keperluan modal kerja dan kebutuhan operasional lainnya PT Bio Farma di luar pembiayaan aset tetap dan investasi / *For working capital purposes and other operational needs of PT Bio Farma, excluding fixed asset and investment financing.*

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan juga melakukan Perjanjian Kredit Fasilitas *Omnibus Trade Facility* dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta No. 52 tanggal 29 September 2020 dan perubahannya dengan No. 108/PP/EB/0324 tanggal 14 April 2025 yang meliputi:

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

The Company (continued)

In addition, the Company also entered into an Omnibus Trade Facility Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk, pursuant to Deed No. 52 dated September 29, 2020, and its amendment No. 108/PP/EB/0324 dated April 14, 2025, which includes the following:

Limit/ *Limit*	:	Rp490.000.000
Jenis fasilitas/ *Types of facilities*	:	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) & *Financing Against Trust Receipt (FATR) / Open Account Financing (OAF) Buyer / OAF Buyer Wesel - Uncommitted sublimit Letter of Credit (LC)*
Suku bunga/ *Interest*	:	Akan disetujui per setiap transaksi sebelum penarikan atau perpanjangan pinjaman / *Subject to approval for each transaction prior to loan drawdown or extension.*
Jangka waktu/ *Period*	:	10 Februari 2025 s/d 10 Maret 2025 (Perpanjangan sementara 1); 10 Maret 2025 s/d 10 April 2025 (Perpanjangan sementara 2); 10 April 2025 s/d 10 Februari 2026 / *February 10, 2025 to March 10, 2025 (Temporary extension 1); March 10, 2025 to April 10, 2025 (Temporary extension 2); April 10, 2025 to February 10, 2026.*
Tujuan/ *Purpose*	:	Untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan perdagangan Perusahaan Debitur secara umum / *To support the general working capital and trade financing needs of the Debtor Company.*

PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 096/PK-1114/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, KAEF memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk *Revolving Credit Facility* (RFC) untuk membiayai modal kerja yang dapat dipergunakan oleh KAEF dan PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), dengan *limit* Rp200.000.000. Perjanjian ini berlaku 6 bulan hingga 6 Juli 2024.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the credit Agreement Addendum No. 096/PK-1114/XII/2023 dated December 6, 2023, KAEF obtained a credit facility in the form of a Revolving Credit Facility (RFC) to finance working capital that can be used by KAEF and PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), with a limit of Rp200,000,000. This agreement is valid for 6 months until July 6, 2024.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Surat Permohonan Penyesuaian Ketentuan Perjanjian Kredit kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 010/KU 100/27/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang Perjanjian Pembiayaan No. 006/KU/100/26/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, serta Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang/*Standstill Period* No. 001A/KU 100/26/IX/2024 tanggal 26 September 2024, Perusahaan mengajukan permohonan penyesuaian terhadap ketentuan perjanjian kredit (sebagaimana dapat diubah, ditambah, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, "Perjanjian Pembiayaan").

Pada tanggal 24 Maret 2025, Perusahaan bersama PT Bank QNB Indonesia Tbk menandatangani Akta No. 13 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., yang mengatur fasilitas pinjaman *Tranche B*. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, bagian pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang (Catatan 23b).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Berdasarkan Perpanjangan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No. 57/Ppj/Musy /CDU1/2023 tanggal 24 Mei 2023, KAEF memperoleh Fasilitas Musyarakah *Line* yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja sebesar maksimum Rp1.500.000.000 dengan tingkat nisbah setara ditentukan 2 hari kerja sebelum penarikan.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Based on the Letter of Request for Adjustment to the Terms of the Credit Agreement addressed to PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 010/KU 100/27/III/2024 dated March 27, 2024, the Letter of Request for Extension of the Grace Period of the Financing Agreement No. 006/KU/100/ 26/VI/2024 dated June 26, 2024, and the Letter of Request for Extension of the Grace Period/Standstill Period No. 001A/KU 100/26/IX/2024 dated September 26, 2024, the Company submitted a request for adjustments to the terms of the credit agreement (as may be amended, supplemented, or restated from time to time, the "Financing Agreement").

On March 24, 2025, the Company and PT Bank QNB Indonesia Tbk entered into Deed No. 13 regarding the Amendment and Restatement of the Credit Agreement before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., which governs the Tranche B loan facility. In connection with this restructuring, the portion of the loan previously classified as short-term bank loans has been reclassified as long-term bank loans (Note 23b).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the Extension of Musyarakah Financing Facility Line Agreement No. 57/Ppj/Musy/CDU1/2023 dated May 24, 2023, KAEF obtained a Musyarakah Line Facility to finance working capital requirements with a maximum facility amount of Rp1,500,000,000, whereby the equivalent profit-sharing ratio (nisbah) is determined 2 working days prior to drawdown.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Selain itu diberikan juga fasilitas SKBDN/LC *line* sebesar Rp500.000.000, BG/SBLC *line* senilai Rp250.000.000, dan TR *Financing* sebesar Rp350.000.000 yang merupakan *sublimit* dari fasilitas Musyarakah *Line* serta *Forex Line* sebesar USD60.000 selama 6 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit. Fasilitas kredit ini diberikan tanpa jaminan (*Clean Basis*). *Sublimit* penggunaan fasilitas juga dapat digunakan oleh KFA sampai dengan Rp1.000.000.000, KFD sampai dengan Rp240.000.000, KFTD sampai dengan Rp500.000.000, KFSP sampai dengan Rp500.000.000, SIL sampai dengan Rp240.000.000 dan PEHA sampai dengan Rp750.000.000.

Pada tanggal 30 Mei 2024, KAEF dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Pembiayaan Musyarakah iB (Badan Usaha) No. 98/PrbAkad/CDU1 tanggal 30 Mei 2024 dan telah dinotarilkan Pada tanggal 20 Juni 2024 menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Pembiayaan Musyarakah iB (Badan Usaha) No. 124/PrbAkad/CDU1/24 di hadapan Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Sesuai dengan perjanjian tersebut, sisa pinjaman (*outstanding*) dibagi ke dalam dua bagian, yaitu *Tranche* A dan *Tranche* B. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, porsi pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah direklasifikasi ke dalam utang bank jangka panjang (Catatan 23b).

Fasilitas Rekening Koran

Berdasarkan perpanjangan Perjanjian Kredit No.S.2025.0271/Dir CFS - Business Banking - Reg. Jabar - Bandung tanggal 30 Juni 2025, entitas anak, PEHA, melalui PT Lucas Djaja, memperoleh fasilitas pinjaman berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp20.000.000, PPB1 sebesar Rp7.015.000, dan PB2 sebesar Rp1.522.000.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Other than those, the Group received Letter of Credit (SKBDN/LC) amounting to Rp500,000,000 BG/SBLC Line amounting to Rp250,000,000 and TR Financing amounting to Rp350,000,000 as a sublimit of Musyarakah Line facility and Forex Line amounting to USD60,000 for 6 months since the signing of credit agreement. This facility was had no collateral (Clean Basis). The sublimit was be able use by KFA up to Rp1,000,000,000, KFD up to Rp240,000,000, KFTD up to Rp500,000,000, KFSP up to Rp500,000,000 SIL up to Rp240,000,000 and PEHA up to Rp750,000,000.

On May 30, 2024, KAEF and PT Bank Maybank Indonesia Tbk signed the Amendment and Restatement of the Musyarakah iB Financing Agreement (Corporate) No. 98/PrbAkad/CDU1 dated May 30, 2024, and it was notarized on June 20, 2024 through the signing of the Amendment and Restatement of the Musyarakah iB Financing Agreement (Corporate) No. 124/PrbAkad/CDU1/24 before Notary Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., whereby based on the agreement, the outstanding loan is divided into two portions, namely Tranche A and Tranche B. In connection with the restructuring, the portion of the loan previously classified as short-term bank loans has been reclassified as long-term bank loans (Note 23b).

Overdraft Facilities

Based on the extension of Credit Agreement No. S.2025.0271/Dir CFS - Business Banking - Reg. Jabar - Bandung dated June 30, 2025, the subsidiary, PEHA, through PT Lucas Djaja, obtained loan facilities consisting of an overdraft facility (Pinjaman Rekening Koran/PRK) amounting to Rp20,000,000, PPB1 amounting to Rp7,015,000, and PB2 amounting to Rp1,522,000.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Fasilitas Rekening Koran (lanjutan)

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama LD yang berlokasi di Jl. Margacitra/Ciwastra No.81/100.

Perjanjian tersebut mensyaratkan LD untuk menjaga rasio lancar minimum sebesar 1,1x dan rasio *Debt to* EBITDA maksimum sebesar 4,5x. Namun, hingga tanggal 31 Desember 2024, LD belum memenuhi seluruh ketentuan *financial covenant* sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp34.171.935.

PT Krom Bank Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 3 Maret 2025 yang telah disahkan di hadapan notaris, entitas anak Perusahaan, SIL, memperoleh fas R. Tendy Suwarman, S.H, entitas anak KAEF, SIL, memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp10.000.000. Fasilitas ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga tetap sebesar 10,25% p.a.

Atas pinjaman tersebut, SIL memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Sarireja, yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juli 2036.

Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp10.000.000.

Pada 2 Maret 2026, entitas anak, SIL telah melunasi fasilitas pinjaman ini.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Overdraft Facilities (continued)

All of the loan facilities are secured by land and buildings registered under the name of LD, located at Jl. Margacitra/Ciwastra No.81/100.

The agreement requires LD to maintain a minimum Current Ratio of 1.1x and a maximum Debt to EBITDA ratio of 4.5x. As of December 31, 2024, LD had not complied with all of the financial covenant requirements stipulated in the agreement.

As of December 31, 2025, the outstanding loan balances amounted to Rp34,171,935.

PT Krom Bank Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the Credit Agreement Deed No. 01 dated March 3, 2025, notarized before a notary R. Tendy Suwarman, S.H., KAEF subsidiary, SIL, obtained an overdraft loan facility amounting to Rp10,000,000. This facility was granted for a period of 12 months and bears a fixed interest rate of 10.25% p.a.

In relation to the loan facility, SIL provided collateral in the form of a parcel of land under Building Use Rights (Hak Guna Bangunan/HGB) Certificate No. 1/Desa Sarireja, valid until July 27, 2036.

As of December 31, 2025 the outstanding loan balance amounted to Rp10,000,000.

On March 2, 2026, SIL, a subsidiary of KAEF, fully settled this loan facility.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT KEB Hana Indonesia

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33/18/PK/ BDG/2021 tanggal 26 Juli 2021, LD memperoleh Fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk *Refinancing* sebesar maksimum Rp4.000.000 dengan jangka waktu 6 tahun sejak tanggal pencairan perjanjian pembiayaan, dengan suku bunga 8,5% p.a.

Sebagai bagian dari persyaratan atas fasilitas kredit yang diterima, LD diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan gedung/pabrik yang terletak di Jl. Margacinta/Ciwastra No. 100, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dengan total luas tanah sebesar 2.096 m² dan total luas bangunan sebesar 2.912 m², yang terdaftar atas nama LD.

Berdasarkan Perjanjian Kredit LD dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. S.2022.0330/Dir CFS – *Business Banking* tanggal 11 Mei 2022, seluruh Fasilitas kredit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia telah di *take over* oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT KEB Hana Indonesia

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on Credit Agreement No. 33/18/PK/ BDG/2021 dated July 26, 2021, LD obtained an Investment Credit Facility for refinancing purposes with a maximum facility amount of Rp4,000,000 and a term of 6 (six) years from the disbursement date of the financing agreement, bearing an interest rate of 8.5% p.a.

As part of the requirements for the credit facilities received, LD is required to provide collateral in the form of land and factory/office buildings located at Jl. Margacinta/Ciwastra No. 100, Margasari – Buah Batu, Bandung, with a total land area of 2,096 m² and a total building area of 2,912 m², registered under the name of LD.

Based on Letter of Credit Facility LD with PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. S.2022.0330/Dir CFS – Business Banking dated May 11, 2022, all credit facilities with PT Bank KEB Hana Indonesia have been taken over by PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT KEB Hana Indonesia (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Tendy Suwarman dan telah diperpanjang serta Penambahan Fasilitas Kredit Baru atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Fasilitas Kredit Baru No. BDG/SME/SPPK/071/XI/2025 tanggal 18 November 2025 PT Marin Liza Farmasi memperoleh fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp16.000.000, Fasilitas *Working Capital Installment* I sebesar Rp4.000.000, *Working Capital Installment* II Rp6.500.000 dan *Working Capital Installment* III sebesar Rp2.000.000. Keempat fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 8,5 % p.a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2025, sedangkan Fasilitas *Working Capital Installment* I jatuh tempo pada 27 Oktober 2027, *Working Capital Installment* II jatuh tempo pada 30 Agustus 2029 dan *Working Capital Installment* III pada 18 November 2026.

Seluruh fasilitas tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh MLF, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02052/Kel. Margasari, dengan luas tanah sebesar 2.345 m² dan luas bangunan sebesar 2.049 m², yang berlokasi di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

Per 31 Desember 2025, saldo terutang atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp17.085.066.

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT KEB Hana Indonesia (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Based on Credit Agreement Deed No. 85 dated October 27, 2022, executed before Notary Raden Tendy Suwarman, which has been extended and amended through the Approval Notification Letter for Extension of Credit Term and Addition of New Credit Facilities No. BDG/SME/SPPK/071/XI/2025 dated November 18, 2025, PT Marin Liza Farmasi obtained credit facilities consisting of an Overdraft Loan (Pinjaman Rekening Koran) with a plafond of Rp16,000,000, Working Capital Installment I amounting to Rp4,000,000, Working Capital Installment II amounting to Rp6,500,000, and Working Capital Installment III amounting to Rp2,000,000, all of which bear an interest rate of 8.5% p.a., with the Overdraft Loan facility maturing on October 27, 2025, Working Capital Installment I maturing on October 27, 2027, Working Capital Installment II maturing on August 30, 2029, and Working Capital Installment III maturing on November 18, 2026.

All of the above facilities are secured by land and building owned by MLF, as stipulated in Building Use Rights Certificate (Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB) No. 02052/Kel. Margasari, with a land area of 2,345 m² and a building area of 2,049 m², located in Margasari Subdistrict, Buah Batu District, Bandung City.

As of December 31, 2025, the outstanding loan facility amounted to RpRp17,085,066.

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT BPR Universal

PT Indofarma Global Medika (IGM)

IGM memperoleh Fasilitas Kredit sindikasi dari beberapa bank dengan PT BPR Universal sebagai *arranger* dari PT BPR Universal dengan Plafon kredit Rp30.000.000.000 (nilai penuh), berdasarkan surat No. 023/U-BTR/ I/23 tanggal 20 Januari 2023.

Bank	Limit Fasilitas/ *Plafond* (dalam nilai penuh)/ *(full amount)*
BPR Universal *(Arranger)*	8.500.000.000
BPR Agung Sejahtera	1.500.000.000
BPR Bank Jombang Perseroda	3.000.000.000
BPR Ceper	1.500.000.000
BPR Cipatujah Jabar Perseroda	1.500.000.000
BPR Delta Artha Perseroda	3.000.000.000
BPR Hariarta Sedana	2.000.000.000
BPR Kredit Mandiri Indonesia	2.000.000.000
BPR Mahkota Arta Sejahtera	2.000.000.000
BPR Universal – Kalbar	2.000.000.000
BPR Universal - Karya Mandiri Riau	1.000.000.000
BPR Universal - Sentosa	2.000.000.000
Jumlah	**30.000.000.000**

Fasilitas yang diperoleh IGM antara lain:

- Jangka waktu fasilitas 12 bulan, mulai dari 20 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2024.
- Tingkat suku bunga ditetapkan sebesar 18%.

Tujuan penggunaan:

- *Standby loan* modal kerja IGM sebesar Rp25.000.000.000 (nilai penuh).
- Kebutuhan modal kerja untuk proyek Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait pengadaan barang kontrasepsi suntik dan implan dengan total keseluruhan sebesar Rp90.000.000.000 (nilai penuh).

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT BPR Universal

PT Indofarma Global Medika (IGM)

IGM, obtained syndication from several banks with PT BPR Universal as arranger Credit Facility from PT BPR Universal with a credit limit of Rp30,000,000,000 (full amount), based on letter No. 023/U-BTR/I/23 dated January 20, 2023.

The loan facilities obtained by IGM are as follows:

- *The facility term is 12 months, commencing from January 20, 2023 until January 19, 2024.*
- *The interest rate is set at 18%.*

The intended use:

- *IGM working capital standby loan of Rp25,000,000,000 (full amount)*
- *Working capital requirements for the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) project related to the procurement of contraceptive injections and implants with a total of Rp90,000,000,000 (full amount).*

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT BPR Universal (lanjutan)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (lanjutan)

Tujuan penggunaan: (lanjutan)

- Digunakan untuk biaya-biaya akta inbreng dari PT Indofarma Tbk (INAF) kepada IGM sebesar Rp5.000.000.000 (nilai penuh) dengan agunan sebagai berikut:
  - Semarang (Kantor IGM), SHGB No. 00833/Bongsari atas nama INAF di Jakarta Timur.
  - Surabaya (IGM), SHGB No. 578/Margorejo & 577/Margorejo & 813/Margorejo atas nama INAF di Jakarta Timur.

Agunan Utama

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00833/Bongsari, Surat ukur tanggal 2 April 2008, No. 63/Bongsari/2008, seluas 1.385 m2 di Kelurahan Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atas nama INAF di Jakarta Timur (tanggal berakhirnya hak 15-04-2028);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 578/Margorejo, Berdasarkan gambar situasi tanggal 11 Desember 1995, No. 14.337/1995, seluas 160 m2 di Kelurahan Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atas nama INAF di Jakarta Timur (tanggal berakhirnya hak 08-10-2035);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 577/Margorejo, berdasarkan gambar situasi tanggal 11 Desember 1995, No. 14.386/1995, seluas 656 m2 di Kelurahan Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atas nama INAF di Jakarta Timur (tanggal berakhirnya hak 02-11-2029);

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT BPR Universal (continued)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (continued)

The intended use: (continued)

- *Used for the costs of the inbreng deed from PT Indofarma Tbk (INAF) to IGM in the amount of Rp5,000,000,000 (full amount) with the following collateral:*
  - *Semarang (Office of IGM), SHGB No. 00833/Bongsari on behalf of INAF in East Jakarta.*
  - *Surabaya (IGM), SHGB No. 578/Margorejo & 577 /Margorejo & 813/Margorejo on behalf of INAF in East Jakarta.*

Main collateral

- *Building Use Right Certificate No. 00833/Bongsari, Measurement letter dated April 2, 2008, No. 63/Bongsari/2008, covering an area of 1,385 m2 in Bongsari village, Kec. West Semarang, Semarang City, Prov. Central Java, on behalf of INAF in East Jakarta (expiry date of the rights 15-04-2028);*
- *Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 578/Margorejo, based on the site plan dated December 11, 1995, No. 14,337/1995, covering an area of 160 m², located in Margorejo Subdistrict, Wonocolo District, Surabaya City, East Java Province, under the name of INAF in East Jakarta (expiry date of the rights: October 8, 2035);*
- *Building Use Right Certificate No. 577/Margorejo, based on the picture of the situation dated December 11, 1995, No. 14.386/1995, covering an area of 656 m2 in Margorejo village, Kec. Wonocolo, City of Surabaya, Prov. East Java, on behalf of INAF in East Jakarta (expiry date of the rights 02-11-2029);*

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT BPR Universal (lanjutan)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (lanjutan)

Agunan Utama (lanjutan)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 813/Margorejo, Berdasarkan gambar situasi tanggal 27 Agustus 2008, No. 32/Margorejo/2008, seluas 183 m^2 di Kelurahan Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atas nama INAF di Jakarta Timur (tanggal berakhirnya hak 07-07-2028).

Agunan tambahan

- *Corporate Guarantee Notary* atas nama INAF.

Aset yang dijadikan agunan tersebut merupakan aset inbreng berupa aset nonkas yang disetorkan oleh PT Indofarma (Persero) Tbk kepada PT Indofarma Global Medika sebagai setoran modal. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, kepemilikan legal atas aset tersebut masih tercatat atas nama PT Indofarma (Persero) Tbk karena proses pengalihan hak/balik nama belum diselesaikan. Mengingat PT Indofarma Global Medika telah dinyatakan pailit, proses balik nama atas aset dimaksud tidak akan dilaksanakan. Aset tersebut merupakan bagian dari boedel pailit PT Indofarma Global Medika dan penyelesaiannya akan mengikuti proses hukum kepailitan yang sedang berjalan.

Pinjaman sindikasi yang telah jatuh tempo ini menjadi bagian dari tagihan pada kasus hukum dalam perkara gugatan PKPU yang dihadapi oleh IGM (Catatan 48).

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT BPR Universal (continued)

PT Indofarma Global Medika (IGM) (continued)

Main collateral (continued)

- *Building Use Right Certificate No. 813/Margorejo, based on the picture of the situation dated August 27, 2008, No. 32/Margorejo/2008, covering an area of 183 m2 in Margorejo sub-district, Kec. Wonocolo, City of Surabaya, Prov. East Java, on behalf of INAF in East Jakarta (end of rights 07-07-2028).*

Additional collateral

- *Corporate Guarantee Notary on behalf of INAF.*

The assets used as collateral represent encumbered non-cash assets (aset inbreng) contributed by PT Indofarma (Persero) Tbk to PT Indofarma Global Medika as capital injection. However, as of the date of completion of the financial statements, the legal ownership of these assets remains registered under the name of PT Indofarma (Persero) Tbk as the title transfer process has not yet completed. Given that PT Indofarma Global Medika has been declared bankrupt, the title transfer of these assets will not be carried out. These assets form part of PT Indofarma Global Medika's bankruptcy estate and their resolution will be subject to the ongoing bankruptcy legal proceedings.

This matured syndicated loan become part of claim in the legal issue on PKPU lawsuit case faced by IGM (Note 48).

23. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT BPR Intidana Sukses Makmur

PT Indofarma Global Medika (IGM)

IGM memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *Revolving* dari PT BPR Intidana Sukses Makmur dengan Plafon kredit Rp15.000.000.000 (nilai penuh), berdasarkan surat No. 0100/ISM-SME/SPPK/1122 tanggal 29 November 2022.

IGM memperoleh perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *Revolving* dari PT BPR Intidana Sukses Makmur dengan Plafon kredit Rp15.000.000.000 (nilai penuh), Berdasarkan adendum No. 61253/ISM/ADDPKKMKDI/ 122023 IGM telah memperpanjang fasilitas kredit sampai tanggal 12 Juni 2024.

Fasilitas yang diperoleh IGM antara lain:

- Jangka waktu fasilitas 6 bulan, mulai dari 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Juni 2024.
- Tingkat suku bunga ditetapkan sebesar 21%.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di Coblong, Bandung.
- Tanah dan bangunan di Babakan Ciparay, Bandung.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, pinjaman sindikasi ini telah jatuh tempo dan belum ada perpanjangan. Tidak ada *covenant* yang harus dipenuhi oleh IGM.

Pinjaman yang telah jatuh tempo ini menjadi bagian dari tagihan pada kasus hukum dalam perkara gugatan PKPU yang dihadapi oleh IGM (Catatan 48).

23. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

PT BPR Intidana Sukses Makmur

PT Indofarma Global Medika (IGM)

IGM obtained a Revolving Working Capital Credit Facility from PT BPR Intidana Sukses Makmur with a credit limit of Rp15,000,000,000 (full amount), based on letter No. 0100/ISM-SME/SPPK/1122 dated November 29, 2022.

IGM obtained an extension of the Revolving Working Capital Credit Facility from PT BPR Intidana Sukses Makmur with a credit limit of Rp15,000,000,000 (full amount), Based on addendum No. 61253/ISM/ADDPKKMKDI/ 122023, IGM has extended the credit facility until June 12, 2024.

The loan facilities obtained by IGM are as follows:

- *The term of this agreement is 6 months, begin from December 12, 2023, until June 12, 2024.*
- *The interest rate is set at 21%.*

The facility is secured by the following collateral:

- *Land and building in Coblong, Bandung.*
- *Land and building in Babakan Ciparay, Bandung.*

Until the date of the financial statements, the syndicated loan facility has matured and has not yet been extended. There are no covenants required to be complied with by IGM.

This matured loan become part of claim in the legal issue on PKPU lawsuit case faced by IGM (Note 48).

23. UTANG BANK (lanjutan) / *23. BANK LOANS (continued)*

b. Utang bank jangka panjang / *b. Long-term bank loans*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	1.267.722.181	550.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank BPD Jabar Banten Tbk	1.048.158.461	1.049.632.119	*PT Bank BPD Jabar Banten Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia	542.346.645	542.536.566	*PT Bank Rakyat Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	541.105.750	--	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	539.761.500	330.000.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	333.255.073	466.064.568	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah pihak berelasi	**4.272.349.610**	**2.938.233.253**	*Total related parties*
			Third parties
Pihak ketiga			
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	964.120.977	1.057.851.784	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	429.938.916	--	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Muamalat	211.492.500	213.277.765	*PT Bank Muamalat*
PT Bank Permata	196.973.529	197.042.505	*PT Bank Permata*
PT Bank QNB	167.671.306	--	*PT Bank QNB*
PT Bank KEB Hana Indonesia	6.688.956	8.613.576	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
Jumlah pihak ketiga	**1.976.886.184**	**1.476.785.630**	***Total third parties***
Jumlah utang bank jangka panjang sebelum dampak modifikasi	**6.249.235.794**	**4.415.018.883**	***Total long-term bank loans before modification impact***
Modifikasi Utang Bank (Restrukturisasi) sesuai PSAK terkait:			*Modification of Bank Debt (Restructuring) according to the relevant PSAK:*
Keuntungan atas restrukturisasi pinjaman (Catatan 45)	(454.316.075)	(228.322.931)	*Gain on Loan restructuring (Note 45)*
Amortisasi dampak restrukturisasi pinjaman (Catatan 46)	48.505.507	13.172.414	*Amortization of loan restructuring impact (Note 46)*
Beban bunga ditangguhkan (Catatan 44)	1.430.792	--	*Deferred Interest expense (Note 44)*
Jumlah utang bank jangka panjang setelah dampak modifikasi	**5.844.856.018**	**4.199.868.366**	***Total long-term loan after restructuring impact***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.234.865.288)	(1.330.005.036)	*Less the portion due within one year*
Jumlah utang bank jangka panjang	**3.609.990.730**	**2.869.863.330**	***Total long-term bank loans***

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Pada tanggal 20 September 2024, Perusahaan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk telah menandatangani Adendum Perjanjian Kredit, yang merujuk pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Kredit atas nama Perusahaan No. 35/KKOKO2/ SPPRK/2024 tertanggal 3 September 2024. Berdasarkan adendum tersebut, *outstanding* pinjaman dibagi menjadi 2 *Tranche*, yaitu *Tranche* A dan *Tranche* B.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

On September 20, 2024, the Company and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk signed an Addendum to the Loan Agreement, referring to the Credit Restructuring Approval Notification Letter on behalf of the Company No. 35/KKO-KO2/SPPRK/2024 dated September 3, 2024. Pursuant to the addendum, the outstanding loan was divided into 2 Tranches: Tranche A and Tranche B.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

Tranche A memiliki nilai sebesar Rp163.313.684 dengan jangka waktu 12 bulan, yang dapat diperpanjang setiap 12 bulan tanpa kewajiban *clean-up,* dengan total periode perpanjangan hingga 5 tahun. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 5,5% p.a.

Sebagai jaminan atas fasilitas yang diterima, KAEF menyerahkan agunan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, serta persediaan dan tagihan, secara proporsional terhadap nilai fasilitas yang diperoleh.

Tranche B memiliki nilai sebesar Rp787.315.263 dengan jangka waktu 7 tahun, dan dapat diperpanjang selama 3 tahun tambahan apabila seluruh ketentuan *financial covenant* terpenuhi. Atas fasilitas ini, KAEF membayar bunga sebesar 1,5% p.a., sedangkan sisa bunga sebesar 4,0% p.a ditangguhkan selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga September 2027. Sebagai bagian dari perjanjian, KAEF memberikan jaminan berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin secara proporsional terhadap nilai pinjaman yang diterima dari Bank.

Berdasarkan perjanjian kredit ini, KAEF diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan triwulanan, yang akan berlaku mulai tahun 2027, antara lain *current ratio* minimal 1,0 x dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1,0x.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Entitas Anak KAEF, PEHA, bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menandatangani Akta No. 07 tentang Adendum II Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Agung Irianto, S.H., M.H., memiliki nilai sebesar Rp100.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun atas fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Tranche A amounts to Rp163,313,684 with a 12-month term, which may be extended annually without a clean-up requirement, for a maximum total extension period of up to 5 years. This facility carries a fixed interest rate of 5.5% p.a.

As collateral for the facilities obtained, KAEF pledged land, buildings, machinery, as well as inventories and receivables, proportionate to the value of the facilities obtained.

Tranche B amounted to Rp787,315,263 with a term of 7 years and may be extended for an additional 3 years, provided that all financial covenant requirements are fulfilled. Under this facility, KAEF bears interest at 1.5% p.a, while the remaining 4.0% p.a. is deferred for 3 years from the signing date of the agreement until September 2027. As part of the agreement, KAEF pledged land, buildings, and machinery as collateral, proportionate to the value of the loan obtained from the Bank.

Based on this credit agreement, KAEF is required to maintain certain financial ratios based on its quarterly financial statements, which will become effective starting from 2027, including a minimum current ratio of 1.0 x and a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.0x.

On December 6, 2024, PEHA, a subsidiary of KAEF, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk entered into Deed No. 07 regarding the Second Addendum to the Credit Agreement before Notary Agung Irianto, S.H., M.H. The facility amounted to Rp100,000,000 with a term of 5 years and bears an interest rate of 5.5% p.a.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp1.048.158.461.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak

Pada tanggal 30 April 2025, KAEF dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Kredit di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang dituangkan dalam Akta No. 30 tentang Perjanjian Kredit *Corporate Loan* Restrukturisasi, Akta No. 31 tentang Perjanjian Kredit Restrukturisasi (KMK *Tranche B*), dan Akta No. 32 tentang Perjanjian Kredit Restrukturisasi (*Term Loan Tranche B*). Berdasarkan perjanjian tersebut, *outstanding* pinjaman dibagi menjadi 2 *Tranche*, yaitu *Tranche A* dan *Tranche B. Tranche A* memiliki nilai sebesar Rp136.101.690 dengan jangka waktu 5 tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a. yang dibayarkan secara kuartalan. Sebagai jaminan atas *Tranche A*, KAEF menyerahkan aset tetap serta piutang dan/atau persediaan secara proporsional terhadap nilai pinjaman yang diterima dari Bank.

Tranche B memiliki nilai sebesar Rp867.626.861 dengan jangka waktu 7 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun berikutnya. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5,5% per tahun, dibayarkan secara kuartalan. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, sebesar 4,0% per tahun dari tingkat bunga tersebut ditangguhkan pembayarannya selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Sebagai jaminan atas fasilitas ini, KAEF menyerahkan agunan berupa aset dengan nilai yang sebanding secara proporsional terhadap jumlah fasilitas yang diterima dari Bank. Fasilitas Kredit telah efektif per tanggal 16 Desember 2025.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (continued)

As of December 31, 2025, the outstanding balance this loan amounted to Rp1,048,158,461, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

On April 30, 2025, KAEF and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk entered into a Credit Restructuring Agreement before Notary Fathiah Helmi, S.H., as set out in Deed No. 30 concerning the Corporate Loan Restructuring Agreement, Deed No. 31 concerning the Restructuring Agreement (Working Capital Loan Tranche B), and Deed No. 32 concerning the Restructuring Agreement (Term Loan Tranche B). Under the agreement, the outstanding loan was divided into 2 Tranches: Tranche A and Tranche B. Tranche A amounted to Rp136,101,690 with a term of 5 years and an interest rate of 5.5% p.a., payable quarterly. As collateral for Tranche A, the Company pledged fixed assets as well as receivables and/or inventories proportionally to the value of the loan received from the Bank.

Tranche B amounted to Rp867,626,861 with a term of 7 years and may be extended for an additional 3 years. This facility bears interest at 5.5% per annum, payable quarterly. Based on the provisions set forth in the Credit Agreement, 4.0% per annum of such interest rate is deferred for 3years from the signing date of the agreement. As collateral for this facility, KAEF pledged assets proportionate to the amount of the facility obtained from the Bank. The Credit Facility became effective on December 16, 2025.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anak (lanjutan)

KAEF dan entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, antara lain rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek minimal sebesar 1 kali paling lambat pada tahun 2031, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 100% paling lambat pada tahun 2027, serta rasio total liabilitas terhadap ekuitas tidak melebihi 3 kali.

Pada tanggal 19 Desember 2025, PT Phapros dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit Restrukturisasi di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memiliki nilai sebesar Rp170.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5%.

Per 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.173.728.552.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman bank jangka panjang Perusahaan merupakan utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah direstrukturisasi dengan jangka waktu selama 5 tahun. Selama Masa Tenggang *(Grace Period)*, pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,25% p.a. atas nilai utang pokok Debitur selama 2 tahun dan dibayarkan setiap 6 bulan.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

KAEF and its subsidiaries is required to maintain certain financial ratios, including a minimum Current Ratio of 1 time by no later than 2031, a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 100% by no later than 2027, and a total liabilities to equity ratio not exceeding 3 times.

On December 19, 2025, PT Phapros and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk entered into a Restructured Credit Agreement before Notary Fathiah Helmi, S.H., with a facility amount of Rp170,000,000 and a tenor of 5 years from the date of signing of the Credit Agreement. The facility bears an rate of 5.5%.

As of December 31, 2025, the outstanding loan balance amounted to Rp1,173,728,552.

PT Indofarma Tbk (INAF)

As of December 31, 2025, the Company's long-term bank loans represent liabilities to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which were restructured with a term of 5 years. During the Grace Period, interest is charged at 0.25% p.a. on the Debtor's outstanding principal amount for a period of 2 years and is payable every 6 months.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Setelah Masa Tenggang (*Grace Period*), pembayaran dikenakan bunga sebesar 1% p.a., yang terdiri atas 0,5% bunga berjalan yang dibayarkan setiap 6 bulan dan 0,5% bunga ditangguhkan (*deferred interest*) yang akan dibayarkan pada saat terjualnya Aset Jaminan Produksi dan/atau Aset Jaminan Nonproduksi. Restrukturisasi tersebut dilakukan berdasarkan putusan homologasi tertanggal 25 Maret 2025 (Catatan 48).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Pada tanggal 31 Juli 2024, KAEF dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani Perubahan VI atas Perjanjian Kredit No. 19 di hadapan Notaris. Dalam perubahan tersebut, saldo pinjaman dibagi menjadi 2 *Tranche*, yaitu *Tranche A* dan *Tranche B.*

Tranche A memiliki nilai sebesar Rp162.790.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Jangka waktu tersebut dapat ditinjau kembali untuk diperpanjang hingga 2 tahun, berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal.

Sebagai bentuk jaminan atas fasilitas *Tranche A*, KAEF memberikan agunan berupa persediaan, piutang, serta tanah dan bangunan secara proporsional terhadap jumlah fasilitas yang diterima.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

Subsequent to the Grace Period, interest is charged at 1% p.a., consisting of 0.5% (current interest payable every 6 months and 0.5% deferred interest, which shall be payable upon the sale of Production Collateral Assets and/or Non-Production Collateral Assets. The restructuring was carried out based on the homologation decision dated March 25, 2025 (Note 48).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

On July 31, 2024, KAEF and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk signed the VI Amendment to Credit Agreement No. 19 before a Notary. Under this amendment, the outstanding loan was divided into 2 Tranches, namely Tranche A and Tranche B.

Tranche A amounts to Rp162,790,000 with a term of 3 years from the signing date of the Credit Agreement. The term may be reviewed for an extension of up to 2 years, subject to the agreement of the Parties. This facility bears interest at a rate of 5.5% per annum, payable on a quarterly basis.

As collateral for this facility, KAEF pledged inventory, receivables, and land and buildings on a proportional basis to the amount of the facility received.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (lanjutan)

Tranche B memiliki nilai sebesar Rp379.842.000 dengan jangka waktu 7 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a. yang dibayarkan secara kuartalan, dengan penangguhan pembayaran sebesar 4% dari suku bunga tersebut hingga bulan ke-36 sejak tanggal akad kredit.

Sebagai bentuk jaminan atas fasilitas *Tranche* B, KAEF memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan secara proporsional terhadap jumlah fasilitas yang diterima.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu, yaitu memastikan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) berada di bawah 1 kali dalam hal akan melakukan pembagian dividen, serta menjaga rasio *Debt to Equity* kurang dari 3 kali sebagai prasyarat untuk memperoleh pinjaman baru.

Per 31 Desember 2025, saldo atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp542.536.566.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK. 143/2021 tanggal 17 Desember 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui pemberian Fasilitas *Term Loan* II yang bersifat *Non-revolving* dan *Committed* sebesar Rp355.000.000 dengan jangka waktu selama 6 tahun sejak 17 Desember 2021.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (continued)

Tranche B amounted to Rp379,842,000 with a term of 7 years and may be extended for up to an additional 3 years. This facility bears interest at 5.5% p.a., payable quarterly, with the payment of 4% of such interest rate deferred until the 36th month from the date of the credit agreement.

As collateral for the Tranche B facility, KAEF provided land and buildings as security on a proportional basis to the amount of the facility received.

The Company is required to comply with certain financial ratio covenants, namely to ensure that the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is below 1 time in the event of dividend distribution, and to maintain a Debt-to-Equity ratio of less than 3 times as a condition for obtaining new borrowings.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of this loan facility amounted to Rp542,536,566.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company

Based on the Credit Offering Letter (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK.143/ 2021 dated December 17, 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk approved the provision of a Term Loan II Facility which is Non-revolving and Committed in the amount of Rp355,000,000 with a term of 6 years from December 17, 2021.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas ini dipergunakan untuk *general purpose*, *corporate action*, dan pengembangan anak usaha yang kemudian digunakan oleh PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Indofarma Global Medika (IGM) untuk pelunasan utang restrukturisasi di Bank Mandiri serta tambahan modal kerja dan/atau pelunasan pinjaman eksisting. Terdapat jaminan dengan *negative pledge* untuk seluruh harta kekayaan perseroan. Atas Fasilitas ini, terdapat bunga sebesar 6,15% p.a yang dikenakan kepada Perusahaan dan juga denda keterlambatan sebesar 2% di atas suku bunga kredit yang berlaku. Perusahaan juga diharuskan menjaga DSCR minimum 1,1x, *Current Ratio* minimum 120%, DER maksimal 250%, dan Total Debt/EBITDA maksimal 400%.

Berdasarkan Akta No. 7 Perjanjian Fasilitas *Term Loan* No. WCO.KP/320/II.N/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Perusahaan telah mendapatkan Fasilitas Kredit yang bersifat *Non-revolving* dan *Committed* senilai Rp450.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak 18 Agustus 2021. Fasilitas Kredit ini dipergunakan untuk pembiayaan kembali utang *Medium Term Notes* eksisting yang jatuh tempo pada Agustus 2021. Tidak terdapat hal khusus yang dijaminkan untuk fasilitas kredit ini atau *clean basis*. Atas fasilitas kredit ini, terdapat bunga sebesar 6,9% sesuai dengan Surat Penyesuaian Suku Bunga Kredit No. CBG.CB1/SPD.1879/2023 tanggal 1 September 2023. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran, maka Perusahaan dikenai denda sebesar 2% p.a.

Perusahaan juga diharuskan untuk menjaga *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1,1x, *Current Ratio* minimum sebesar 120%, *Debt to Equity Ratio* maksimal 250%, dan Total *Debt to EBITDA* maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp333.255.073.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

The Company (continued)

This facility is intended for general purposes, corporate actions, and the development of subsidiaries, which was subsequently utilized by PT Indofarma Tbk (INAF) and PT Indofarma Global Medika for the repayment of restructured debt at Bank Mandiri as well as for additional working capital and/or repayment of existing loans. The facility is secured with a negative pledge on all of the company's assets. Under this facility, The Company is subject to an interest rate of 6.15% p.a and a penalty for late payment of 2% above the applicable credit interest rate. The company is also required to maintain a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.1x, a minimum Current Ratio of 120%, a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 250%, and a maximum Total Debt to EBITDA ratio of 400%.

Based on Deed No. 7 of the Term Loan Facility Agreement No. WCO.KP/320/ II.N/2021 dated August 18, 2021, The Company obtained a Non-revolving and Committed Credit Facility in the amount of Rp450,000,000 with a term of 5 years from August 18, 2021. This Credit Facility was used to refinance existing Medium Term Notes debt maturing in August 2021. This Facility is provided on a clean basis, with no specific collateral required. Under this Credit Facility, an interest rate of 6.9% applies as per the Credit Interest Rate Adjustment Letter No. CBG.CB1/ SPD.1879/2023 dated September 1, 2023. In the event of a late payment, the Company is subject to a penalty of 2% p.a.

The company is also required to maintain a minimum Debt Service Coverage Ratio of 1.1x, a minimum Current Ratio of 120%, a maximum Debt to Equity Ratio of 250%, and a maximum Total Debt to EBITDA ratio of 400%.

As of December 31, 2025, the outstanding loans balances at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk were Rp333,255,073.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank DKI

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) memperoleh 2 fasilitas pembiayaan dari PT Bank DKI berdasarkan Akta No. 10 dan No. 16 tertanggal 29 Maret 2021, yang terdiri dari fasilitas Kredit Modal Kerja Konvensional *Aflopend Non-revolving* dan fasilitas Kredit Modal Kerja Musyarakah *Aflopend*, dengan total plafon sebesar Rp750.000.000.

Pada tanggal 27 Maret 2024, KAEF mengajukan permohonan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut kepada pihak bank. Permohonan ini telah ditanggapi oleh pihak bank melalui surat-surat sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Pada tanggal 27 Maret 2025, Perusahaan dan PT Bank DKI telah menandatangani Adendum atas Perjanjian Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana dituangkan dalam Akta No.39, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, pinjaman telah direklasifikasi dari utang bank jangka pendek (Catatan 23a) menjadi utang bank jangka panjang.

Pada tanggal yang sama, KAEF juga menandatangani Akad Restrukturisasi Pembiayaan Musyarakah dengan PT Bank DKI Unit Syariah berdasarkan Akta No. 40, dengan ketentuan dan nilai fasilitas yang mengacu pada struktur dan persyaratan yang sama sebagaimana perjanjian restrukturisasi konvensional.

Tranche A memiliki nilai sebesar Rp31.500.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 tahun. *Tranche* ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a. Sebagai jaminan atas fasilitas *Tranche A*, KAEF menyerahkan tanah dan bangunan, serta persediaan dan tagihan/piutang secara proporsional terhadap nilai fasilitas yang diterima.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank DKI

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) obtained 2 financing facilities from PT Bank DKI based on Deed No. 10 and No. 16 dated March 29, 2021, consisting of a Conventional Working Capital Loan Facility (Aflopend Non-revolving) and a Musyarakah Working Capital Loan Facility (Aflopend), with a total credit limit of Rp750,000,000.

On March 27, 2024, KAEF submitted a request for the restructuring of the respective loan facilities to the banks. This request was responded to by the banks through letters as listed below.

On March 27, 2025, the Company and PT Bank DKI entered into an Addendum to the Restructuring Agreement for the Working Capital Loan (KMK), as set forth in Deed No. 39, executed before Notary Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. In relation to the restructuring, the loan has been reclassified from short-term bank loans (Note 23a) to long-term bank loans.

On the same date, KAEF also entered into a Musyarakah Financing Restructuring Agreement with PT Bank DKI Sharia Unit under Deed No. 40, with terms and facility amount referring to the same structure and requirements as the conventional restructuring agreement.

Tranche A amounted to Rp31,500,000 with a term of 3 years and may be extended for up to an additional 2 years. This tranche bears interest at 5.5% p.a. As collateral for the Tranche A facility, KAEF pledged land and buildings, as well as inventories and receivables, proportionate to the value of the facility obtained.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (lanjutan)

Tranche B memiliki nilai sebesar Rp238.500.000 dengan jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun. *Tranche* ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun, dengan penangguhan sebesar 4% dari suku bunga tersebut selama 3 tahun sejak tanggal efektif perjanjian. Sebagai jaminan atas *Tranche* B, KAEF memberikan tanah dan bangunan secara proporsional terhadap jumlah fasilitas yang diterima.

Perjanjian tersebut mewajibkan KAEF untuk mempertahankan rasio lancar minimum sebesar 1 kali dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 2,5 kali, yang akan berlaku efektif mulai laporan keuangan tahun 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp539.761.500.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Pada tanggal 31 Juli 2024, KAEF dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menandatangani Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah masing-masing No. 301D/BMI/EBFOP/VII/2024 dan No. 061C/BMI/EBFOP/II/2025. Adendum tersebut mengatur restrukturisasi, termasuk penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil untuk periode 1 April 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 serta 1 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025.

Pada tanggal 23 Juni 2025, KAEF dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip (SP3) Restrukturisasi (Perpanjangan Penundaan Pembayaran Pokok dan Bagi Hasil) No. 027/OL/CCB-CORP/VI/2025. Adendum tersebut memuat ketentuan restrukturisasi, termasuk penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil untuk periode 1 April 2024 sampai dengan 31 Juli 2025.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank DKI (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (continued)

Tranche B amounted to Rp238,500,000 with a term of 7 years and may be extended for up to an additional 3 years. This Tranche bears interest at 5.5% per annum, with 4% of such interest rate deferred for 3 years from the effective date of the agreement. As collateral for Tranche B, KAEF pledged land and buildings proportionate to the amount of the facility obtained.

The agreement requires KAEF to maintain a minimum Current Ratio of 1 time and a maximum debt-to-equity ratio of 2.5 times, which will become effective starting from the 2030 financial statements.

As of December 31, 2025, the outstanding balance amounted of this loan amounted to Rp539,761,500.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Kimia Farma (KAEF) and Its Subsidiaries

On July 31, 2024, KAEF and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk signed an Addendum to the Musyarakah Financing Agreement No.301D/BMI/EBFOP/VII/2024 and No. 061C/BMI/EBFOP/II/2025, respectively. The addenda set forth restructuring provisions, including the deferment of principal and profit-sharing payments for the periods from April 1, 2024 to January 31, 2025 and from February 1, 2025 to April 30, 2025.

On June 23, 2025, KAEF and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk entered a Letter of Principle Approval (SP3) for Restructuring (Extension of Principal and Profit-Sharing Payment Postponement) No. 027/OL/ CCBCORP/VI/2025. The addendum stipulates restructuring provisions, including the deferment of principal and profit-sharing payments for the period from April 1, 2024, to July 31, 2025.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juli 2025, KAEF dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menandatangani Surat Persetujuan Restrukturisasi No. 034/OL/CCB-CORP/VII/2025 dan telah dilaksanakan Akad atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 8 tanggal 29 Juli 2025. di hadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.H., yang mengatur Fasilitas pinjaman *Tranche* B.

Tranche A memiliki nilai sebesar Rp31.500.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 tahun. *Tranche* ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun. Sebagai jaminan atas fasilitas *Tranche* A, Perusahaan menyerahkan tanah dan bangunan, serta persediaan dan tagihan/piutang secara proporsional terhadap nilai fasilitas yang diterima.

Fasilitas *Tranche* B memiliki nilai sebesar Rp15.000.000 dengan jangka waktu 7 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun. *Tranche* ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun, dengan penangguhan sebesar 4% dari suku bunga tersebut selama 3 tahun sejak tanggal efektif perjanjian.

Atas perjanjian tersebut, KAEF memberikan jaminan aset sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Nasabah dengan nilai *Collateral Coverage Ratio* sebesar 70% dari jumlah utang Nasabah kepada seluruh Bank *Tranche* B; dan
b. Nilai penjaminan untuk pengikatan jaminan (APHT) minimal 110% *Collateral Coverage Ratio*.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma (KAEF) Tbk and Its Subsidiaries (continued)

On July 29, 2025, KAEF and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk signed Restructuring Approval Letter No. 034/OL/CCB-CORP/VII/2025, and entered into the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Financing Agreement No. 8 dated July 29, 2025 before Notary Muchlis Patahna, S.H., M.H., which governs the Tranche B loan facility.

Tranche A amounted to Rp31,500,000 with a term of 3 years and may be extended for up to an additional 2 years. This Tranche bears interest at 5.5% per annum. As collateral for the Tranche A facility, the Company pledged land and buildings, as well as inventories and receivables, proportionate to the value of the facility obtained.

The Tranche B facility amounts to Rp15,000,000 with a term of 7 years and may be extended for up to 3 years. This Tranche bears interest at a rate of 5.5% per annum, with a deferred portion of 4% of such interest rate for a period of 3 years from the effective date of the agreement.

Under this agreement, KAEF provides collateral assets as follows:

a. Land and buildings owned by the borrower, with a Collateral Coverage Ratio of 70% of the borrower's total outstanding obligations to all Tranche B banks; and
b. minimum collateral binding value (APHT) equivalent to 110% of the Collateral Coverage Ratio.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

KAEF dan entitas anak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu, yaitu menjaga *current ratio* minimal sebesar 1x, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali yang berlaku mulai tahun 2027, serta rasio *Debt to Equity* tidak melebihi 2,5 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, KAEF dan entitas anak belum memenuhi persyaratan *covenant* sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pinjaman tersebut sudah diklasifikasikan ke porsi jangka pendek.

Pada tanggal 16 Desember 2025, PT Kimia Farma Apotek bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan lima bank lainnya telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* (MRA) berupa Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 39 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. Pada saat laporan ini terbit, perjanjian tersebut belum efektif.

Per 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp211.492.500.

PT Bank Permata Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Pada tanggal 7 Oktober 2024, KAEF bersama dengan PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 2 di hadapan Notaris dengan PT Bank Permata Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, *outstanding* pinjaman dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Tranche A* dan *Tranche B*.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

KAEF and its subsidiaries are required to comply with certain financial covenants, including maintaining a minimum Current Ratio of 1.0x, a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.0x effective from 2027, and a Debt to Equity Ratio not exceeding 2.5x. As of December 31, 2025, KAEF and its subsidiaries have not complied with the covenant requirements as stipulated in the agreement. Accordingly, the loan has been classified as current portion (short-term liability).

On December 16, 2025, PT Kimia Farma Apotek, together with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and five other banks, signed a Master Restructuring Agreement (MRA) in the form of Deed of Master Restructuring Agreement No. 39 before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.H. As of the date of this report, the agreement has not yet become effective.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of the loan facility amounted to Rp211,492,500.

PT Bank Permata Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

On October 7, 2024, KAEF, together with PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), entered into Deed of Agreement for the Provision of Banking Facilities (Special Terms) No. 2 before a Notary with PT Bank Permata Tbk. Under the agreement, the outstanding loan was divided into two Tranches, namely Tranche A and Tranche B.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Tranche A memiliki nilai sebesar Rp59.123.097 dengan jangka waktu 5 tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun yang dibayarkan secara kuartalan.

Tranche B memiliki nilai sebesar Rp137.953.895 dengan jangka waktu 7 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun berikutnya berdasarkan evaluasi dari pihak Bank. *Tranche* ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun, di mana sebesar 4% dari suku bunga tersebut ditangguhkan selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan akta.

KAEF memberikan jaminan dalam bentuk aset tetap, persediaan, dan piutang secara proporsional dengan nilai fasilitas pinjaman yang diterima dari Bank.

Berdasarkan perjanjian kredit, KAEF diwajibkan untuk memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasian yang telah diaudit serta laporan keuangan entitas induk (*standalone*), yang berlaku efektif mulai laporan keuangan per 31 Desember 2027. Ketentuan tersebut antara lain mencakup *Current Ratio* minimal 1kali dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp196.973.529.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Permata Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Tranche A amounted to Rp59,123,097 with a term of 5 years and bears interest at 5.5% p.a., payable on a quarterly basis.

Tranche B amounted to Rp137,953,895 with a term of 7 years and may be extended for an additional 3 years subject to the Bank's evaluation. This Tranche bears interest at a rate of 5.5% p.a, of which 4% is deferred for a period of 3 years from the date of execution of the deed.

KAEF provided collateral in the form of fixed assets, inventories, and receivables, proportionally to the value of the loan facility received from the Bank.

Pursuant to the loan agreement, the Company is required to maintain certain financial ratios based on the audited annual consolidated financial statements and standalone financial statements, effective from the financial statements as of December 31, 2027. These requirements include, among others, a minimum Current Ratio of 1 time and a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1x.

As of December 31, 2025, the balance of this loan amounted to Rp196,973,529.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Berdasarkan Surat Permohonan Penyesuaian Ketentuan Perjanjian Kredit kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 067/KU 100/27/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang Perjanjian Pembiayaan No. 003/KU/ 100/26/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, serta Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tenggang/ *Standstill Period* No. 003A/KU 100/26/IX/2024 tanggal 26 September 2024, KAEF telah mengajukan permohonan penyesuaian terhadap ketentuan dalam perjanjian pembiayaan (yang selanjutnya dapat diubah, ditambahkan, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, "Perjanjian Pembiayaan").

Sebagaimana dinyatakan dalam surat dari pihak bank No. 04/039-3/SP3/CB2 tertanggal 29 April 2024, Bank menyetujui penangguhan pembayaran pokok dan imbal hasil hingga Juli 2024 atau hingga restrukturisasi dinyatakan efektif.

Pada tanggal 21 Februari 2025, PT Phapros Tbk bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk menandatangani Akta No. 22 tentang Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah di hadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.H., memiliki nilai sebesar Rp168.452.852 dengan jangka waktu 5 tahun atau fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a.

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 16 tanggal 17 Maret 2025, KAEF telah melakukan restrukturisasi pinjaman di hadapan Notaris. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, bagian pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah direklasifikasi menjadi utang bank jangka panjang, Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, proses restrukturisasi atas fasilitas KFA dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk masih dalam penyelesaian.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

Based on the Letter of Request for Adjustment of Credit Agreement Terms addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 067/KU 100/27/III/2024 dated March 27, 2024, the Letter of Request for Extension of Grace Period under the Financing Agreement No. 003/KU/100/ 26/VI/2024 dated June 26, 2024, and the Letter of Request for Extension of Grace Period/Standstill Period No. 003A/KU 100/26/IX/2024 dated September 26, 2024, KAEF submitted requests for adjustments to the terms and conditions of the financing agreement (which may be amended, supplemented, or restated from time to time, the "Financing Agreement").

As stated in the Bank's letter No. 04/039-3/SP3/CB2 dated April 29, 2024, the Bank approved the deferment of principal and profit-sharing payments until July 2024 or until the restructuring becomes effective.

On February 21, 2025, PT Phapros Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk entered into Deed No. 22 regarding a Sharia Financing Line Facility Agreement before Notary Muchlis Patahna, S.H., M.H. The facility amounted to Rp168,452,852 with a term of 5 years and bears an interest/profit-sharing rate of 5.5% p.a.

Based on the Sharia-Based Financing Line Facility Agreement Deed No. 16 dated March 17, 2025, the Company has carried out a loan restructuring before a Notary. In connection with such restructuring, the portion of the loan that was previously classified as a short-term bank loans has been reclassified as a long-term bank loans. As of the date of issuance of these financial statements, the restructuring process of the KFA facility with PT Bank Syariah Indonesia Tbk is still in progress.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tersebut, fasilitas pembiayaan dibagi ke dalam dua *Tranche*, yaitu *Tranche* A dan *Tranche* B. *Tranche* A memiliki nilai pokok sebesar Rp112.500.000 dengan jangka waktu 5 tahun serta memberikan imbal hasil yang ditentukan berdasarkan realisasi pendapatan usaha dan nisbah, dengan pembayaran dilakukan secara kuartalan. Untuk menjamin fasilitas tersebut, KAEF menyerahkan agunan berupa aset tetap serta piutang dan/atau persediaan secara proporsional dengan jumlah pinjaman yang diterima dari bank.

Tranche B memiliki nilai pokok sebesar Rp262.500.000 dengan jangka waktu 7 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun berikutnya. Tingkat Imbal hasil berdasarkan realisasi pendapatan usaha dan nisbah Pembayaran imbal hasil dilakukan secara kuartalan.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, KAEF menyerahkan agunan berupa:

a. Aset tetap atas nama KAEF dengan nilai pasar jaminan minimal sebesar 30% dari total limit fasilitas *Tranche* A, yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari nilai agunan.
b. Piutang usaha dan/atau persediaan yang ada maupun yang akan ada, dengan nilai pasar jaminan minimal sebesar 95% dari total limit fasilitas *Tranche* A, yang telah dilakukan pengikatan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari nilai agunan.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Based on the agreement, the financing facility was divided into two Tranches, namely Tranche A and Tranche B. Tranche A had a principal amount of Rp112,500,000 with a term of 5 years and provides profit sharing determined based on the realization of operating revenue and the agreed profit-sharing ratio (nisbah), with payments made on a quarterly basis. To secure the facility, KAEF pledged collateral in the form of fixed assets as well as receivables and/or inventories proportionate to the amount of financing obtained from the Bank.

Tranche B has a principal amount of Rp262,500,000 with a tenor of 7 years and may be extended for a further 3 years. The rate of return is determined based on the realization of operating revenue and the profit-sharing ratio (nisbah), with payments made on a quarterly basis.

As part of the agreement, KAEF provides collateral in the form of:

a. Fixed assets in the name of KAEF with a minimum collateral market value of 30% of the total limit of the Tranche A facility, which has been burdened with a first-rank mortgage with a collateral value of 110% of the collateral value.
b. Trade receivables and/or inventories, existing and future, with a minimum collateral market value of 95% of the total Tranche A facility limit, secured under a fiduciary arrangement with a secured value of 100% of the collateral value.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Perjanjian tersebut mewajibkan KAEF untuk mempertahankan rasio lancar minimum sebesar 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 2,5 kali, serta *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali yang akan diuji secara tahunan. Kewajiban pemenuhan DSCR tersebut akan berlaku efektif mulai laporan keuangan tahun 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp539.110.750.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Pada tanggal 3 Desember 2025, KAEF bersama PT Bank Central Asia Tbk menandatangani Akta No. 1 tentang Perubahan Atas Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., yang mengatur fasilitas pinjaman *Tranche* B memiliki nilai sebesar Rp429.992.664 dengan jangka waktu 7 tahun atas fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a.

Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut, bagian pinjaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah direklasifikasi menjadi utang bank jangka Panjang. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 5,5% p.a yang dibayarkan setiap kuartal.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

The agreement requires KAEF to maintain a minimum Current Ratio of 1 time, a maximum debt-to-equity ratio of 2.5 times, and a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time, which will be tested on an annual basis. The DSCR compliance requirement will become effective starting from the 2027 financial statements.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of the loan is amounted to Rp539,110,750.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

On December 3, 2025, KAEF and PT Bank Central Asia Tbk entered into Deed No. 1 regarding the Amendment to the Credit Agreement before Notary Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., which governs the Tranche B loan facility with an amount of Rp429,992,664 and a tenor of 7 years. The facility bears an interest rate of 5.5% p.a.

In connection with the restructuring, the portion of the loan that was previously classified as a short-term liability has been reclassified as a long-term liability. The facility bears an interest rate of 5.5% p.a, payable on a quarterly basis.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Atas perjanjian tersebut, KAEF memberikan jaminan aset sebagai berikut:

a. Agunan *existing* sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing antara BCA dan KAEF yang telah ditandatangani berikut segala perubahannya.
b. Debitur wajib meningkatkan APHT menjadi 77% *outstanding* pokok.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh, KAEF diwajibkan untuk memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu, yaitu menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1x yang mulai berlaku sejak laporan keuangan per 31 Desember 2027, *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali, serta rasio total utang terhadap total ekuitas maksimal sebesar 2,5x. Pada tanggal 31 Desember 2025, KAEF belum memenuhi persyaratan *covenant* sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pinjaman tersebut sudah diklasifikasikan ke porsi jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp429.938.916.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya

Pada tanggal 24 Maret 2025, KAEF bersama PT Bank QNB Indonesia Tbk menandatangani Akta No. 13 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., yang mengatur fasilitas pinjaman *Tranche* B.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries (continued)

Under the agreement, KAEF provided the following assets as collateral:

a. Existing collateral as stipulated in the Credit Agreement Deed and the Foreign Exchange Sale and Purchase Agreement between BCA and KAEF, including all amendments thereto.
b. The Debtor is required to increase the Mortgage Deed (APHT) to 77% of the outstanding principal.

In connection with the credit facility obtained, KAEF is required to comply with certain financial covenants, including maintaining a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1x effective from the financial statements as of December 31, 2027, a minimum Current Ratio of 1x, and a maximum total debt-to-equity ratio of 2.5x. As of December 31, 2025, KAEF had not complied with the covenant requirements as stipulated in the agreement. Accordingly, the related loan has been classified as current maturities of long-term borrowings.

As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of the loan is amounted to Rp429,938,916.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries

On March 24, 2025, KAEF and PT Bank QNB Indonesia Tbk entered into Deed No. 13 regarding the Amendment and Restatement of the Credit Agreement before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., which governs the Tranche B.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya (lanjutan)

Atas perjanjian tersebut, KAEF memberikan jaminan aset sebagai berikut:

a. Fasilitas *Term Loan* dijamin dengan tanah dan bangunan milik KAEF, dengan nilai jaminan sebesar 70% dari total utang Perusahaan yang terutang kepada bank.

b. Nilai penjaminan untuk pengikatan jaminan (APHT) Akta Pemberian Hak Tanggungan minimal 110% dari *Collateral Coverage Ratio*.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, *financial covenants* KAEF akan diuji menggunakan laporan keuangan tahunan standalone yang diaudit per 31 Desember. Ketentuan tersebut mencakup rasio lancar minimum sebesar 1x, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1x yang mulai dinilai sejak tahun buku 2027, serta rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 1,2x.

Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp167.671.306.

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33/18/PK/BDG/2021 tanggal 26 Juli 2021, LD memperoleh Fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk *Refinancing* sebesar maksimum Rp4.000.000 dengan jangka waktu 6 tahun sejak pencairan perjanjian pembiayaan, dengan suku bunga 8,5% p.a.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

Under the agreement, KAEF provided the following assets as collateral:

a. The Term Loan facility is secured by land and buildings owned by KAEF, with a collateral value equivalent to 70% of the total outstanding indebtedness of the Company to the Bank.
b. The guaranteed value for collateral binding under the Deed of Granting of Mortgage (APHT) is set at a minimum of 110% of the Collateral Coverage Ratio.

Based on the loan agreement, KAEF financial covenants will be tested against the standalone audited annual financial statements as of December 31. The requirements include a minimum Current Ratio of 1x, a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1x to be assessed starting from the 2027 fiscal year, and a maximum debt-to-equity ratio of 1.2x.

As of December 31, 2025, the outstanding loan balance amounted to Rp167,671,306.

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries

Based on Credit Agreement No. 33/18/PK/BDG/2021 dated July 26, 2021, LD obtained an Investment Credit Facility which is used for Refinancing of a maximum of Rp4,000,000 having a term of 6 years from the disbursement date of the financing agreement and bearing interest at a rate of 8.5% p.a.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya (lanjutan)

Sebagai bagian dari persyaratan atas fasilitas kredit yang diterima, KAEF diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan gedung/pabrik yang terletak di Jl. Margacinta/Ciwastra No. 100, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dengan total luas tanah sebesar 2.096 m² dan total luas bangunan sebesar 2.912 m², yang terdaftar atas nama LD.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Tendy Suwarman, PT Marin Liza Farmasi (MLF) memperoleh fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp16.000.000 dan Fasilitas *Working Capital Installment* dengan plafon sebesar Rp4.000.000. Kedua fasilitas tersebut dikenakan suku bunga sebesar 8% p.a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2023, sedangkan Fasilitas *Working Capital Installment* jatuh tempo pada 27 Oktober 2027.

Seluruh fasilitas tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh MLF, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02052/Kel. Margasari, dengan luas tanah sebesar 2.345 m² dan luas bangunan sebesar 2.049 m², yang berlokasi di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

Per 31 Desember 2025, saldo terutang atas fasilitas pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp4.669.988.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

As part of the requirements for the credit facilities received, KAEF is required to provide collateral in the form of land and factory/office buildings located at Jl. Margacinta/Ciwastra No. 100, Margasari – Buah Batu, Bandung, with a total land area of 2,096 m² and a total building area of 2,912 m², registered under the name of LD.

Based on Loan Agreement Deed No. 85 dated October 27, 2022, executed before Notary Raden Tendy Suwarman, PT Marin Liza Farmasi (MLF) obtained credit facilities comprising an Overdraft Loan Facility with a maximum limit of Rp16,000,000 and a Working Capital Installment Facility with a maximum limit of Rp4,000,000. Both facilities bear interest at a rate of 8% p.a. The Overdraft Facility is valid until October 27, 2023, while the Working Capital Installment Facility matures on October 27, 2027.

All of the facilities are secured by land and buildings owned by MLF, as stated in the Right to Build Certificate (SHGB) No. 02052/Kel. Margasari, covering a land area of 2,345 m² and a building area of 2,049 m², located in Kelurahan Margasari, Buah Batu District, Bandung

As of December 31, 2025, the outstanding balance of the loan facility amounted to Rp4,669,988.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Musyarakah iB *Financing Line* (Badan Usaha) No. 256/Akad/CDU1/2021 dan No. 001.27/ DIR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang terakhir diamendemen dengan Perubahan Perjanjian Musyarakah iB *Financing Line* No. 211/PrbAkad/CDU1/24 tanggal 13 Agustus 2024, Perusahaan telah mendapatkan Fasilitas Musyarakah yang bersifat *Non-revolving* sebesar Rp171.876.054 dengan jangka waktu sejak 27 Oktober 2021 sampai 27 Oktober 2026. Bunga/realisasi bagi hasil dan denda/ta'zir akan ditentukan lebih lanjut pada setiap penarikan dan pembiayaan melalui Dokumen Realisasi Pembiayaan Musyarakah.

Fasilitas ini digunakan Perusahaan untuk *General Corporate Purposes* yang selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan KAEF. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman ini sebesar Rp68.750.422.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh, KAEF diwajibkan untuk memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu, yaitu menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali yang mulai berlaku sejak laporan keuangan per 31 Desember 2027, serta *Current Ratio* minimal sebesar 1x. Pada tanggal 31 Desember 2025, KAEF belum memenuhi persyaratan *covenant* sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pinjaman tersebut sudah diklasifikasikan ke utang bank jangka pendek.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

The Company

Based on the Musyarakah iB Financing Line Agreement (Business Entity) No. 256/Akad/CDU1/2021 and No. 001.27/ DIR/X/2021 dated October 27, 2021, which was most recently amended by the Amendment to the Musyarakah iB Financing Line Agreement No. 211 /PrbAkad/CDU1/24 dated August 13, 2024, the Company obtained a Non-revolving Musyarakah Facility in the amount of Rp171,876,054 with a term from October 27, 2021 to October 27, 2026. The profit-sharing realization (nisbah) and penalty (ta'zir) rates are to be determined for each disbursement and financing transaction through the Musyarakah Financing Realization Document.

This facility is used by the Company for General Corporate Purposes , and may subsequently be allocated for the benefit of KAEF. As of December 31, 2025, the outstanding loan balances amounted to Rp68,750,422.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and Its Subsidiaries

In relation to the credit facilities obtained, KAEF is required to comply with certain financial ratio covenants, including maintaining a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1x effective from the financial statements as of December 31, 2027, and a minimum Current Ratio of 1 time. As of December 31, 2025, KAEF has not complied with the covenant requirements as stipulated in the agreement. The borrowings have been classified to short-term bank loans.

23. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya (lanjutan)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Fasilitas Kredit No. S.2022.0330 tanggal 11 Mei 2022, KAEF memperoleh fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

i. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah batas sebesar Rp15.000.000. Suku bunga sebesar 7,5% per tahun, dan memiliki jangka waktu 1 tahun sejak pencairan.

ii. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PBB)-1 dengan jumlah batas sebesar Rp20.000.000. Suku bunga sebesar 7,5% per tahun, dan memiliki jangka waktu 1 tahun sejak pencairan.

iii. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PBB)-2 dengan jumlah batas sebesar Rp6.000.000. Suku bunga sebesar 7,5% per tahun, dan memiliki jangka waktu 1 tahun sejak pencairan. Biaya Provisi sebesar 0,25%.

iv. Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB)-1 dengan jumlah batas sebesar Rp15.000.000. Suku bunga sebesar 7,5% p.a., dan memiliki jangka waktu 5 tahun sejak pencairan.

v. Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB)-2 dengan jumlah batas sebesar Rp3.783.000. Suku bunga sebesar 7,5% p.a., jatuh tempo sampai dengan 27 April 2027.

Seluruh fasilitas dikenakan suku bunga tetap sebesar 7,5% p.a., dengan jangka waktu bervariasi antara satu hingga lima tahun, dan jatuh tempo terakhir hingga 27 April 2027. Biaya provisi dikenakan sebesar 0,25% pada fasilitas PBB-2.

23. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

Subsequently, based on Credit Facility Agreement Letter No. S.2022.0330 dated May 11, 2022, KAEF obtained a credit facility with the following details:

i. An Overdraft Loan Facility (Pinjaman Rekening Koran/PRK) with a maximum limit of Rp15,000,000, bearing interest at a rate of 7.5% p.a. and having a term of 1 year from the date of disbursement.

ii. Recurring Promissory Loans Facility (RPL)-1, with an initial limit of Rp20,000,000. Interest rate is 7.5% p.a., and having a term of 1 year from the date of disbursement.

iii. Recurring Promissory Loans Facility (RPL)-2, with an initial limit of Rp6,000,000. Interest rate is 7.5% p.a., and having a term of 1 year from the date of disbursement. Provision charge is a 0,25%

iv. Term Loan Facility (TL)-1, with an initial limit of Rp15,000,000. Interest rate is 7.5% p.a., and having a term of 1 year from the date of disbursement.

v. A Term Loan Facility (Pinjaman Berjangka/PB)-2 with a maximum limit of Rp3,783,000, bearing interest at a rate of 7.5% p.a. and maturing on 27 April 2027.

All facilities bear a fixed interest rate of 7.5% p.a., with tenors ranging from one to five years and the latest maturity date falling on April 27, 2027. A provision fee of 0.25% applies to the PBB-2 facility.

23. UTANG BANK (lanjutan) / *23. BANK LOANS (continued)*

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term bank loans (continued)*

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan) / ***PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)***

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan entitas anaknya (lanjutan) / *PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)*

Seluruh fasilitas ini dijamin dengan bidang tanah dan bangunan atas nama PT Lucas Djaja (LD) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02048 (LT 1,040 m^2), 02049 (LT 905 m^2), 02050 (LT 695 m^2), 02039 (LT905 m^2), 02046 (LT910 m^2), 02032 (LT 213 m^2), 02041 (LT436 m^2), 02025 (LT 279 m^2), 02038 (LT 422 m^2), 02035 (LT 959 m^2) yang berlokasi di Jl. Ciwastra No. 100, Bandung dengan nilai aset tercatat sebesar Rp77.927.000. Penilaian aset dilakukan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dengan No. 00284/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

All of these facilities are secured by parcels of land and buildings owned by PT Lucas Djaja under Building Use Rights Certificates No. 02048 (LT 1,040 m2), 02049 (LT 905 m2), 02050 (LT 695 m2), 02039 (LT905 m2), 02046 (LT910 m2), 02032 (LT 213 m2), 02041 (LT436 m2), 02025 (LT 279 m2), 02038 (LT 422 m2), 02035 (LT 959 m2) located in Jl. Ciwastra No. 100, Bandung with Market value amounted Rp77,927,000. The asset appraisal was performed by KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan based on appraisal report No. 00284/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2022 dated May 30, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp862.575.438.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of this loan this facility amounted to Rp 862,575,438.

24. UTANG USAHA / *24. TRADE PAYABLES*

a. Utang usaha jangka pendek / *a. Short-term trade payables*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 47)	188.755.514	212.247.928	*Related parties (Note 47)*
Pihak ketiga	2.227.303.114	2.641.857.095	*Third parties*
Jumlah	**2.416.058.628**	**2.854.105.023**	***Total***

b. Utang usaha jangka panjang / *b. Long-term trade payables*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 47)	11.361.206	--	*Related parties (Note 47)*
Pihak ketiga	268.818.734	--	*Third parties*
Dikurangi dampak restrukturisasi	(125.021.596)	--	*Less impact of restructuring*
Jumlah	**155.158.344**	**–**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025, utang usaha jangka panjang Perusahaan merupakan utang yang telah direstrukturisasi dengan jangka waktu selama 10 tahun untuk Tipe D dan 15 tahun untuk Tipe E dan dibayarkan setiap 6 bulan. Restrukturisasi tersebut dilakukan berdasarkan putusan homologasi tertanggal 25 Maret 2025 (Catatan 48).

As of December 31, 2025, the Company's long-term trade payables represented payables that had been restructured with terms of 10 years for Type D and 15 years for Type E, and are payable every 6 months. The restructuring was carried out based on the homologation decision dated March 25, 2025 (Note 48).

24. UTANG USAHA (lanjutan) / *24. TRADE PAYABLES (continued)*

Alokasi dampak restrukturisasi yang dicatat pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The allocation of the impact of the restructuring recognized in the statement of profit or loss is as follows:

	2025	2024	
Amortisasi dampak restrukturisasi utang usaha	2.221.709	--	*Amortization of impact on trade payable restructuring*
Keuntungan restrukturisasi utang usaha	(127.243.305)	--	*Gain on trade payable restructuring*
Jumlah	**(125.021.596)**	**–**	***Total***

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade payables as disclosed in Note 51.

Rincian saldo dan transaksi atas utang usaha kepada pihak berelasi dapat dilihat pada Catatan 47.

Details of balances and transactions relating to trade payables to related parties are disclosed in Note 47.

25. UTANG LAIN-LAIN / *25. OTHER PAYABLES*

	2025	2024*)	
Trade Supplier Financing	336.248.887	299.962.273	*Trade Supplier Financing*
Lain-lain	337.286.866	444.499.300	*Other*
Jumlah	**673.535.753**	**744.461.573**	***Total***

*) direklasifikasi pada catatan 57 / *) *as reclassified in note 57*

Trade Supplier Financing merupakan fasilitas pembiayaan lainnya yang diterima PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dan entitas anak dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan akta No. 424/00/DIR/KEU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan jumlah pembiayaan yang digunakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp336.248.887.

Trade Supplier Financing is other financing facility received by PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) and its Subsidiaries from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. based on Deed No. 424/00/DIR/KEU/10/2022 dated October 26, 2022 with a total financing used as of December 31, 2025 amounting to Rp336,248,887.

Distribution financing merupakan fasilitas pembiayaan sementara lainnya yang digunakan untuk pembayaran kepada *principal* yang diperoleh KAEF dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berdasarkan Akta perjanjian No. 11 tanggal 9 Juni 2022 berupa Fasilitas *Buyer Financing* dengan jatuh tempo 90 hari.

Distribution financing is other temporary financing facility used for payments to the principals which received by KAEF from PT Bank Syariah Indonesia Tbk. based on the Deed No. 11 date June 9, 2022, in kind of Buyer Financing Facility term 90 days.

25. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas utang lain-lain sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

25. OTHER PAYABLES (continued)

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of other payables is disclosed in Note 51.

26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

26. ACCRUED EXPENSES

	2025	2024*)	
Beban bunga	739.214.568	416.478.561	*Interest expense*
Modifikasi bunga bank tangguhan (Restrukturisasi) sesuai PSAK terkait (Catatan 46)	3.459.918	--	*Modification of deferred interest bank (Restructuring) according to the relevant PSAK (Note 46)*
Diskonto belum diamortisasi (Catatan 46)	(58.166.568)	--	*Unamortized discount (Note 46)*
Subjumlah beban bunga	684.507.918	416.478.561	*Subtotal interest expense*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	166.322.339	163.005.410	*Salaries and employee welfare*
Biaya umum dan pemeliharaan	93.063.064	118.240.590	*General and maintenance expenses*
Beban penghentian program imbalan pasti	50.221.174	75.570.610	*Termination fee of defined contribution obligation*
Beban denda pajak	31.321.184	--	*Tax penalty expenses*
Keagenan ekspor, royalti dan insentif penjualan	20.637.800	18.545.558	*Export agencies, royalties and sales incentives*
Promosi dan beban penjualan	11.013.545	31.398.490	*Promotion and selling expenses*
Beban kantor	8.590.240	67.748.065	*Office expenses*
Beban angkut dan *embalage*	5.263.627	1.275.736	*Transport and embalage expenses*
Biaya listrik, gas, air dan bahan bakar	4.771.115	4.715.155	*Water, electricity and gasoline expenses*
Beban operasional dan distribusi	4.556.735	22.575.194	*Operational and distribution expenses*
Jasa profesional	952.720	--	*Professional fee*
Biaya pabrikasi dan produksi	--	2.660.626	*Manufacturing expenses*
Lain-lain	49.708.257	4.294.632	*Others*
Jumlah	**1.130.929.718**	**926.508.627**	***Total***

*) direklasifikasi pada catatan 57

*) *as reclassified in note 57*

Berdasarkan laporan tanggal 13 Maret 2026 No. 1343/ST-DA-LIAB-PEHA/III/2026 oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kewajiban atas kekurangan solvabilitas dan dana normalisasi yang belum dibayarkan oleh Grup kepada DPLK BRI sebesar Rp50.221.174.

Based on the report dated March 13, 2026 No. 1343/ST-DA-LIAB-PEHA/III/2026 issued by Steven & Mourits Actuarial Consulting Firm, as of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of obligations for solvency shortfall and normalization fund payable by the Group to DPLK BRI amounted to Rp50,221,174.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas beban yang masih harus dibayar sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is represented by the carrying amount of each class of accrued expenses as disclosed in Note 51.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

27. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2025	2024*)	
Gaji, upah dan manfaat karyawan lainnya	207.722.497	384.496.828	*Salaries, wages and other employee benefit*
Jumlah	**207.722.497**	**384.496.828**	***Total***

*) direklasifikasi pada catatan 57

*) as reclassified in note 57

Pada 15 September 2025, INAF melakukan penyesuaian jumlah karyawan (*rightsizing*) sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian operasional melalui pengakhiran hubungan kerja terhadap seluruh karyawan tetap INAF. Sehubungan dengan hal tersebut, INAF merealisasikan pembayaran kewajiban kepada karyawan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dengan total sebesar Rp213.287.782, yang mencakup penyelesaian kewajiban kepada karyawan yang telah tercatat pada periode sebelumnya serta beban terkait karyawan yang diakui pada periode berjalan.

On September 15, 2025, the Company conducted a workforce adjustment (rightsizing) as part of its efficiency and operational restructuring efforts through the termination of employment of all permanent employees of INAF. Accordingly, INAF realized payments of employee obligations in accordance with Labor Law No. 13 of 2003 concerning Termination of Employment Settlement and Severance Pay Determination, with a total amount of Rp213,287,782, which included the settlement of employee obligations previously recorded in prior periods as well as employee-related expenses recognized during the current period.

28. LIABILITAS KONTRAK

28. CONTRACT LIABILITIES

Liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.912.632 dan Rp62.140.729 merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan Grup.

Contract liabilities as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp62,912,632 and Rp62,140,729, respectively, represent advances received from customers in relation to the Group's sales.

Terdapat reklasifikasi dari liabilitas pembiayaan konsumen pada tahun 2024 (Catatan 57).

A reclassification of consumer financing liabilities was made in 2024 (Note 57).

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of short-term employee benefits liabilities is disclosed in Note 51.

29. LIABILITAS KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

Pada tanggal 13 November 2022, Perusahaan menandatangani *Warranty Agreement* sehubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) antara PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), CIZJ Limited, dan Indonesia Investment Authority. OWK akan jatuh tempo 5 tahun dari tanggal penerbitan. Terdapat ketentuan hak opsi dalam perjanjian investasi dan merupakan salah satu tanggung jawab KAEF sebagai pemberi *warranty* jika investor akan mengeksekusi hak opsi tersebut dan/atau jika KAEF mengalami *event of default* sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sehingga dilakukan pembukuan atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Berdasarkan surat OJK No. S-34/D.04/2023 tanggal 31 Januari 2023, KAEF memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi yang diberi nama Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 (OWK).

OWK yang belum dikonversi memiliki kupon sebesar 5% p.a yang dibayarkan setiap enam bulan sekali. Setiap satu pemilikan OWK dapat mengonversi OWK tersebut menjadi 1 saham baru dengan periode konversi 1 hari setelah tanggal distribusi OWK sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, total akumulasi OWK yang telah dikonversi menjadi saham baru sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 12.588.407 OWK atau senilai Rp12.903.117, sehingga sisa OWK yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

29. FINANCIAL LIABILITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

On November 13, 2022, the Company entered into a Warranty Agreement in connection with the issuance of Mandatory Convertible Bonds (MCB) between PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), CIZJ Limited, and the Indonesia Investment Authority. The MCB will mature 5 years from the date of issuance. There is a put option provision in the investment agreement and it is one of KAEF's obligations as a warrantor if the investor exercises the put option and/or if KAEF experiences an event of default as required in the agreement, resulting in the booking of a financial liability measured at fair value through profit or loss.

Based on OJK letter No. S-34/D.04/2023 dated January 31, 2023, KAEF obtained an effective statement from OJK for Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights I (PMHMETD I) in the form of Mandatory Convertible Bonds named Mandatory Convertible Bonds Kimia Farma I Year 2023 (MCB).

The MCB that had not been converted has 5% p.a coupon that paid semi annually. Every MCB owner can convert the MCB with 1 new share with conversion period 1 day after MCB distribution date to maturity.

Based on the report issued by the Securities Administration Bureau, the total accumulated Mandatory Convertible Bonds (OWK) that have been converted into new shares as of December 31, 2025 amounted to 12,588,407 OWK, equivalent to Rp12,903,117. Accordingly, the remaining OWK recognized in the financial statements is as follows:

	2025	2024	
Obligasi Wajib Konversi	245.948.094	257.294.090	*Mandatory convertible bond*
Akumulasi selisih nilai wajar atas hak-opsi	--	--	*Accumulated fair value of put-option difference*
Jumlah	**245.948.094**	**257.294.090**	***Total***

Mutasi akumulasi selisih nilai wajar atas hak-opsi adalah sebagai berikut:

The movement in the accumulated fair value difference of put-option are as follows:

	2025	2024	
Provisi	--	(112.488.806)	*Provision*
Kerugian perubahan nilai wajar atas hak-opsi (Catatan 44)	--	112.488.806	*Fair value of put-option (Note 44)*
Jumlah	**--**	**--**	***Total***

29. LIABILITAS KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

Utang obligasi ini mensyaratkan KAEF untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara utang dan ekuitas tidak lebih dari 400%.
b. Perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100%.

Per tanggal 31 Desember 2025, KAEF tidak mencapai rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Akta, OWK diterbitkan tanpa jaminan khusus, namun secara umum dijamin dengan seluruh harta kekayaan KAEF, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki saat ini maupun di kemudian hari, yang menjadi jaminan bagi Pemegang OWK.

Berdasarkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara RUPO No. 22 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat dan disahkan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, KAEF telah menyelenggarakan RUPO dengan agenda sebagai berikut:

1. Menyetujui penjelasan KAEF dan persetujuan terkait dengan belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 Poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% berdasarkan laporan keuangan konsolidasi KAEF yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan konsolidasi *unaudited* tanggal 30 September 2024.

2. Menyetujui penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan terkait dengan kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100%. Ketentuan ini mulai berlaku dari periode laporan keuangan tahunan *audited* 31 Desember 2024 sampai dengan 28 Februari 2028 atau sampai seluruh obligasi telah dilakukan konversi.

29. FINANCIAL LIABILITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (continued)

The Bonds payable require KAEF to maintain financial ratios as follows:

a. The ratio of total liabilities to equity shall not exceed 400%.
b. The ratio of current assets to current liabilities shall not be less than 100%.

As of December 31, 2025, KAEF had not met the required financial ratios as stipulated in the loan agreements.

Based on the Deed, the MCB was issued without any specific collateral; however, it is generally secured by all assets of KAEF, both movable and immovable, whether currently owned or acquired in the future, which serve as collateral for the MCB holders.

Based on the implementation of the Bondholders' General Meeting (RUPO) for the Mandatory Convertible Bonds of Kimia Farma I Year 2023, as stated in the Minutes of Meeting No. 22 dated March 18, 2025, which was prepared and legalized by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, KAEF held the RUPO with the following agenda:

1. Approved KAEF's explanation and the resolution concerning the non-fulfillment of the Company's financial covenant as stipulated in Article 6.3 point i of the Trustee Agreement, namely the failure to maintain the minimum ratio of current assets to current liabilities of not less than 100%, as reflected in the KAEF's audited consolidated financial statements as of December 31, 2023, and the unaudited consolidated financial statements as of September 30, 2024.

2. Approved the removal of the provision set out in Article 6.3 point i of the Trustee Agreement relating to the financial covenant requiring the maintenance of a Current Ratio of not less than 100%. This provision is effective from the audited annual financial reporting period ended December 31, 2024 until February 28, 2028 or until all bonds have been converted.

29. LIABILITAS KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

Berdasarkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara RUPO No. 22 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat dan disahkan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, KAEF telah menyelenggarakan RUPO dengan agenda sebagai berikut: (lanjutan)

3. Persetujuan percepatan pelaksanaan Konversi OWK menjadi saham sebanyak 100% pada tanggal 17 April 2025 dalam rangka peningkatan modal kerja KAEF.

4. Persetujuan penundaan kewajiban pembayaran bunga OWK yang akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2025 yang akan dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait dengan penundaan tersebut.

Dari keempat agenda yang dibahas dalam RUPO, hanya satu agenda yang disetujui, yaitu terkait penjelasan atas belum terpenuhinya rasio perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang tidak kurang dari 100%, sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan KAEF per 31 Desember 2023 *(audited)* dan 30 September 2024 *(unaudited)*. Adapun agenda pada poin 2, 3 dan 4 tidak memperoleh persetujuan dari para pemegang obligasi.

29. FINANCIAL LIABILITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (continued)

Based on the implementation of the Bondholders' General Meeting (RUPO) for the Mandatory Convertible Bonds of Kimia Farma I Year 2023, as stated in the Minutes of Meeting No. 22 dated March 18, 2025, which was prepared and legalized by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, KAEF held the RUPO with the following agenda: (continued)

3. Approval for the acceleration of the conversion of 100% of the MCB into shares on April 17, 2025, in order to increase KAEF's working capital.

4. Approval of the postponement of the MCB interest payment obligation due on August 22, 2025, to be paid on August 22, 2027, and approval of the waiver of penalties related to such postponement.

Of the four agenda items discussed during the RUPO, only one was approved, namely the explanation regarding the non-fulfillment of the current assets to current liabilities ratio of not less than 100%, as reflected in KAEF's Financial Statements as of December 31, 2023 (audited) and September 30, 2024 (unaudited). Meanwhile, agenda items 2, 3 and 4 were not approved by the bondholders.

30. TITIPAN HIBAH DITANGGUHKAN / *30. DEFERRED GRANT DEPOSIT*

	2025	2024	
Hibah	683.217.724	630.173.875	*Grant*
Total	**683.217.724**	**630.173.875**	***Total***

Titipan hibah ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, merupakan dana atas hibah dalam proses realisasi yang dananya diberikan oleh Gates Foundation (d/h Bill and Melinda Gates Foundation), Program of Appropriate Technonogy in Health (PATH), Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Medicines Patent Pool (MPP), Islamic Development Bank (IsDB) dan pemberi hibah lainnya sebagai penunjang sarana dalam pelaksanaan produksi nOPV2 dan proyek lainnya dalam jangka panjang sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dengan pemberi dana hibah.

Deferred grant deposits as of December 31, 2025 and 2024, represents grant fund relating to projects still in the realization stage, funded by the Gates Foundation (d/h Bill and Melinda Gates Foundation), Program of Appropriate Technonogy in Health (PATH), Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Medicines Patent Pool (MPP), Islamic Development Bank (IsDB) and another grantors to support facilities for the production of nOPV2 and other long-term projects, in accordance with the agreements entered into between the Company and the grant providers.

31. LIABILITAS SEWA / *31. LEASE LIABILITIES*

	2025	2024	
Liabilitas sewa pembiayaan bruto			*Gross finance lease liabilities*
Pembayaran sewa minimum			*Minimum lease payments*
tidak lebih dari 1 tahun	62.253.964	66.632.593	*no later than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan			*Later than 1 year and no*
kurang dari 5 tahun	59.272.042	92.728.362	*later than 5 years*
Jumlah	**121.526.006**	**159.360.955**	***Total***

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There are no significant restrictions imposed by the lessors under the finance lease agreements with the Group regarding the use of assets or the achievement of certain financial performance targets.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas liabilitas sewa sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 51.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is represented by the carrying amount of each class of lease liabilities as disclosed in Note 51.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG / *32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2025	2024	
Imbalan pascakerja	1.139.523.406	1.060.175.961	*Post employment benefit*
Dana pensiun	146.945.840	134.820.370	*Pension fund*
Pengabdian	103.859.584	74.127.378	*Service award*
Cuti panjang	33.372.326	41.825.474	*Long leaves*
Jumlah	**1.423.701.156**	**1.310.949.183**	***Total***

Dana Pensiun / *Pension Fund*

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Kimia Farma (DPKF) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-023/KM.17/2000 tanggal 31 Januari 2000. Dana Pensiun Kimia Farma (DPKF) merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Kimia Farma yang dibentuk berdasarkan Akta No. 38 tanggal 20 April 1970 dari Nerdy, S.H., Notaris di Jakarta.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Kimia Farma (DPKF) which the deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-023/KM.17/2000 dated January 31, 2000. Dana Pensiun Kimia Farma (DPKF) is a continuation of Yayasan Dana Pensiun Kimia Farma Foundation which was established by notarial deed No. 38 dated on April 20, 1970 of Nerdy, S.H., Notary in Jakarta.

Pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Pension benefits payable are calculated based on the employee's pensionable salary and years of service.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Dana Pensiun

Pendanaan dana pensiun PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,5% dan 6,8% dari penghasilan dasar pensiun.

Program Dana Pensiun ini diimplementasi oleh KAEF, PT Kimia Farma Apotek (KFA), dan PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD).

Liabilitas manfaat pensiun karyawan adalah sebagai berikut:

Pension Fund

Funding of the pension fund of PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) is derived from contributions made by both the employer and employees. Employee and employer contributions amount to 6.5% and 6.8% of the pensionable salary, respectively.

This pension fund program is implemented by KAEF, PT Kimia Farma Apotek (KFA), and PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD).

The details of employee benefits pension plan liabilities are as follow:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun	461.590.356	435.355.075	*Present value of defined pension plan liabilities*
Nilai wajar aset program	(314.644.516)	(300.534.705)	*Fair value of asset*
Jumlah	**146.945.840**	**134.820.370**	***Total***

Rekonsiliasi manfaat pensiun sebagai berikut:

Reconciliation of employee benefits is as follows:

	2025	2024	
Beban bunga	28.960.055	7.315.930	*Interest expense*
Biaya jasa kini	7.969.552	9.097.235	*Current service cost*
Penyesuaian liabilitas akibat IFRIC	(20.196.165)	--	*Liability assumed due to IFRIC*
Pengakuan (keuntungan)/kerugian iuran karyawan yang dibayarkan periode berjalan	(772.845)	(1.566.393)	*Recognition of actuarial gain/loss for employee contribution during the period*
Jumlah	**15.960.597**	**14.846.772**	***Total***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Mutasi liabilitas program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

The movement of defined benefits pension plan liabilities are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini dana pensiun awal periode	134.820.370	132.053.864	*Beginning balance pension fund*
Manfaat pensiun yang diakui periode berjalan	15.960.597	14.846.772	*Pension benefits in current period*
Penghasilan komprehensif lain	1.528.568	9.611.878	*Other comprehensive income*
Pembayaran imbalan kerja	(5.363.695)	(21.692.144)	*Employee benefit paid*
Saldo pada akhir tahun	**146.945.840**	**134.820.370**	***Ending balance***

Imbalan Pascakerja / ***Post-Employment Benefits***

Kewajiban imbalan pascakerja Grup dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Group's post-employment benefit obligations in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.139.523.406	1.060.175.961	*Present value of defined benefit obligation*
Jumlah	**1.139.523.406**	**1.060.175.961**	***Total***

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense recognized in consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	76.272.567	75.468.237	*Current service cost*
Beban bunga	73.955.987	72.820.059	*Interest expense*
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	36.256.740	2.176.172	*Liabilities assumed due to recognition of past services*
Beban jasa lalu	1.228.392	3.322.123	*Past service cost*
Jumlah	**187.713.686**	**153.786.591**	***Total***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in employee benefits are as follows:*

	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	1.121.095.611	1.105.533.347	*Beginning balance*
Beban imbalan pascakerja yang diakui periode berjalan selama periode berjalan	187.713.686	153.786.591	*Post-employment benefits expense during the year*
Penghasilan komprehensif lain	70.884.890	21.092.450	*Other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	(176.159.421)	(143.774.296)	*Benefit paid*
Pembayaran kontribusi	--	(8.445.609)	*Contribution paid*
Reklasifikasi	--	(7.096.872)	*Reclassification*
Liabilitas imbalan kerja, bersih	**1.203.534.766**	**1.121.095.611**	***Employee benefit obligation, net***
Dikurangi: bagian jangka pendek	(64.011.360)	(60.919.650)	*Less: short term portion*
Saldo akhir tahun	**1.139.523.406**	**1.060.175.961**	***Ending balance***

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used in determining the post-employment benefit obligations as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	2025	2024	
Tingkat diskonto	6%-6,7%	6,6%-7,1%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	5%-8% per tahun/*per year*	6%-8% per tahun/*per year*	*Future salary incremental rate*
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	0,01%-1% tingkat mortalitas/ *of mortality rate*	0,01%-1% tingkat mortalitas/ *of mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	2,0%-4,0% per tahun/*per annum*	2,0%-4,0% per tahun/*per annum*	*Resignation rate*
Usia pensiun normal	50 - 58 tahun/*years*	50 - 58 tahun/*years*	*Normal retirement age*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pascakerja, beban jasa kini dan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: / *The following table presents the sensitivity to possible changes in market interest rates, with all other variables held constant, on the post-employment benefit obligations, current service cost, and interest cost as of December 31, 2025 and 2024:*

	2025	2024	
Tingkat diskonto			*Initial discount rate*
Tingkat diskonto +1%	957.978.283	947.791.777	*Discount rate +1%*
Tingkat diskonto -1%	1.072.240.084	1.053.702.832	*Discount rate -1%*
Tingkat kenaikan gaji			*Future salary increment rate*
Tingkat kenaikan gaji +1%	1.072.404.719	1.053.592.253	*Salary increment rate +1%*
Tingkat kenaikan gaji -1%	956.871.390	947.230.611	*Salary increment rate -1%*

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Cuti Panjang / *Long-service leave*

Liabilitas cuti panjang adalah sebagai berikut: / *Long leaves liabilities are as follows:*

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas cuti panjang	33.372.326	41.825.474	*Present value of defined long leaves*
Jumlah	**33.372.326**	**41.825.474**	***Total***

Rekonsiliasi beban cuti panjang sebagai berikut: / *The reconciliation of long-service leave expense is as follows:*

	2025	2024	
Biaya jasa kini	7.318.611	11.232.209	*Current service cost*
Beban bunga	2.096.006	2.474.589	*Interest expense*
Keuntungan aktuaria	506.135	--	*Actuarial gain*
Biaya jasa lalu	167.591	--	*Past service cost*
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	86.111	--	*(Gain)/loss from changes in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi pengalaman	16.757	--	*(Gain)/loss from changes in experience adjustment*
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	(6.314.238)	(1.134.404)	*Liabilities assumed due to recognition of past services*
Penyesuaian	--	913.916	*Adjustment*
Jumlah	**3.876.973**	**13.486.310**	***Total***

Mutasi liabilitas cuti panjang adalah sebagai berikut: / *The movements in long-service leave liabilities are as follows:*

	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	41.825.474	40.102.375	*Beginning balance*
Beban imbalan cuti yang diakui periode berjalan	3.876.973	13.486.310	*Long leaves benefits expense during the year*
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	367.189	--	*(Gain)/loss from changes in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian atas penyesuaian pengalaman	(3.087.204)	--	*Gain/loss from experience adjustments*
Pembayaran cuti panjang selama periode berjalan	(9.610.106)	(11.763.211)	*Long leaves benefit paid during the year*
Saldo pada akhir tahun	**33.372.326**	**41.825.474**	***Ending balance***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pengabdian

PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Kimia Farma Apotek (KFA), PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) dan PT Phapros Tbk (PEHA) memberikan imbalan kerja berupa uang penghargaan dalam hal karyawan mengundurkan diri, meninggal, sakit/cacat ataupun mencapai usia pensiun dini/normal yang besarnya tergantung dari masa kerja masing-masing karyawan, sesuai yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama antara KAEF dan Entitas Anak dan Serikat Pekerja Kimia Farma. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 2026, KAEF telah melaksanakan program *rightsizing* terhadap 186 karyawan dengan total biaya sebesar Rp77.273.710 sebagai bagian dari implementasi rencana restrukturisasi KAEF, seperti yang tertuang dalam Rencana Restrukturisasi Perusahaan Tahun 2025-2035 Grup Bio Farma tertanggal 17 Desember 2025 (RRP Bio Farma) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BP-BUMN) dalam suratnya pada tanggal 30 Desember 2025. Kebijakan *rightsizing* tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, memperkuat fungsi pengendalian internal, serta mendukung pencapaian strategi bisnis KAEF secara berkelanjutan.

Liabilitas pengabdian adalah sebagai berikut:

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Service Award

PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Kimia Farma Apotek (KFA), PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), and PT Phapros Tbk (PEHA) provide employee benefits in the form of service award payments in the event of resignation, death, illness/disability, or early/normal retirement, the amount of which depends on the respective employee's years of service, in accordance with the Collective Labor Agreement between KAEF and its Subsidiaries and the Kimia Farma Labor Union. No funding has been made in relation to the employee benefit program.

On March 3, 2026, KAEF performed a rightsizing program affecting 186 employees, with a total cost of Rp77,273,710 as part of the implementation of the KAEF's restructuring plan, as set out in the Bio Farma Group Restructuring Plan for the Years 2025-2035 dated December 17, 2025 (Bio Farma RRP), which has been approved by the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency of the Republic of Indonesia (BP-BUMN) in his letter dated December 30, 2025. The rightsizing initiative was undertaken to enhance operational effectiveness and efficiency, strengthen internal control functions, and support the achievement of KAEF long-term business strategy.

The service award liabilities are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas pengabdian	103.859.584	74.127.378	*Present value of defined services liability*
Jumlah	**103.859.584**	**74.127.378**	***Total***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Rekonsiliasi beban pengabdian yang diakui: / *The reconciliation of recognized service award expense is as follows:*

	2025	2024	
Biaya jasa kini	7.926.276	6.250.363	*Current service cost*
Dampak perubahan ekonomis	6.078.267	1.690.389	*Impact from economic changes*
Beban bunga	5.097.101	3.613.856	*Interest expense*
Dampak penyesuaian pengalaman	15.951.588	4.517.590	*Impact from experience adjustment*
Biaya jasa lalu	148.664	718.655	*Past service cost*
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	90.501	5.729.550	*Liabilities assumed due to recognition of past services*
Jumlah	**35.292.397**	**22.520.403**	***Total***

Mutasi liabilitas pengabdian adalah sebagai berikut: / *The movements in service award liabilities are as follows:*

	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	74.127.378	48.980.374	*Beginning balance*
Beban imbalan pengabdian periode berjalan	35.292.397	22.520.403	*Service award benefits expense during the year*
Pembayaran pengabdian selama periode berjalan	(5.560.191)	(2.162.260)	*Service award benefit paid during the year*
Penyesuaian	--	4.788.861	*Adjustment*
Saldo pada akhir tahun	**103.859.584**	**74.127.378**	***Ending balance***

33. UTANG DANA REVITALISASI

Utang dana revitalisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp24.625.424, merupakan utang atas dana revitalisasi fasilitas produksi Radioisotop dan Radiofarmaka. Utang ini bersifat disubordinasikan.

Pada tanggal 4 November 2015, INUKI telah menandatangani perjanjian kerja sama bisnis dengan PT Timah (Persero) Tbk (TINS) tentang Revitalisasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka. Dalam kerja sama bisnis ini, TINS akan menyediakan kontribusi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp30.000.000. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan baru, memperbaiki peralatan lama, dan sebagai modal kerja dalam memproduksi radiofarmaka dan radioisotop. Kerja sama bisnis antara INUKI dan TINS adalah dalam bentuk kerja sama bagi hasil *(profit sharing)* yaitu masing-masing akan memperoleh 40% dan 60% setelah terlebih dahulu dikembalikan kontribusi dari TINS tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pembagian keuntungan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi yang ada atas kesepakatan antara kedua Perusahaan. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 tahun, terhitung saat ditandatangani perjanjian pada tanggal 4 November 2015, dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan dapat dipercepat kalau terjadi kegagalan.

33. REVITALIZATION FUND PAYABLE

Revitalization fund payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp24,625,424 represent liabilities related to the revitalization funding of Radioisotope and Radiopharmaceutical production facilities. These liabilities are subordinated in nature.

On November 4, 2015, INUKI entered into a business cooperation agreement with PT Timah (Persero) Tbk (TINS) regarding the Revitalization of Radioisotope and Radiopharmaceutical Production Facilities. Under this business cooperation, TINS agreed to provide funding contributions of up to Rp30,000,000. The funds were intended to finance the acquisition of new equipment, refurbishment of existing equipment, and working capital for the production of radiopharmaceuticals and radioisotopes. The business cooperation between INUKI and TINS was structured as a profit-sharing arrangement, whereby INUKI and TINS would receive 40% and 60%, respectively, after the recovery of TINS' contribution in accordance with the agreed schedule.

This profit-sharing arrangement may be reviewed based on prevailing conditions and mutual agreement between both companies. The cooperation agreement is valid for 5 years from the date of signing on November 4, 2015, may be extended upon mutual agreement of the parties, and may be terminated earlier in the event of failure or default.

33. UTANG DANA REVITALISASI (lanjutan)

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah dan diperpanjang yang terakhir dilakukan berdasarkan surat TINS No. 4936/Tbk/UM-0000/23-S10.5 tanggal 16 November 2023, penyelesaian kewajiban INUKI dengan TINS sebesar Rp24.625.424 dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dan pembayaran dimulai pada Triwulan I tahun 2024. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, jumlah cicilan yang akan dibayarkan masih belum disepakati.

33. REVITALIZATION FUND PAYABLE (continued)

This agreement has been amended and extended several times, with the latest amendment made under TINS letter No. 4936/Tbk/UM-0000/23-S10.5 dated 16 November 2023. The settlement of INUKI's obligation to PT Timah (Persero) Tbk amounted to Rp24,625,424, to be settled over a maximum period of 5 years, with payments commencing in the first quarter of 2024. As of the date of authorization of the consolidated financial statements, the installment amounts have not yet been agreed.

34. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 37 tanggal 28 Agustus 2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-AH.01.03-0230853 terdapat pernyataan keputusan pemegang saham serta Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas PT Bio Farma (Persero) (Perusahaan), perubahan struktur pemegang saham atas modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp17.481.279.000 (terdiri dari 17.481.279 lembar saham) terbagi menjadi saham seri A Dwiwarna sebesar Rp1.000 (terdiri dari 1 lembar saham) milik Negara Republik Indonesia dan saham seri B Rp17.481.278.000 (terdiri dari 17.481.278 lembar saham) milik PT Danantara Asset Management (Persero) yang semula saham seri B milik PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Akta Notaris No. 43 tanggal 17 April 2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-AH.01.03-0105332 terdapat pernyataan keputusan pemegang saham serta Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas PT Bio Farma (Persero) (Perusahaan), perubahan struktur pemegang saham atas modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp17.481.279.000 (terdiri dari 17.481.279 lembar saham) terbagi menjadi saham seri A Dwiwarna sebesar Rp1.000 (terdiri dari 1 lembar saham) milik Negara Republik Indonesia dan saham seri B Rp17.481.278.000 (terdiri dari 17.481.278 lembar saham) milik PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

34. SHARE CAPITAL

Based on the Deed of Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 37 dated August 28, 2025 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0230853 regarding the shareholders' resolution and the acknowledgment of the amendment to the Articles of Association of PT Bio Farma (Persero) (the Company), the shareholding structure of the issued and fully paid capital amounting to Rp17,481,279,000 (consisting of 17,481,279 shares) was amended. The capital comprises Series A Dwiwarna shares amounting to Rp1,000 (consisting of 1 share) owned by the Government of the Republic of Indonesia and Series B shares amounting to Rp17,481,278,000 (consisting of 17,481,278 shares) owned by PT Danantara Asset Management (Persero), which were previously owned by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Based on Notarial Deed No. 43 dated April 17, 2025 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0105332 regarding the resolution of the shareholders and the acknowledgment of the amendment to the Articles of Association of PT Bio Farma (Persero) (the Company), the shareholding structure of the issued and fully paid capital amounting to Rp17,481,279,000 (consisting of 17,481,279 shares) was amended. The capital comprises Series A Dwiwarna shares amounting to Rp1,000 (consisting of 1 share) owned by the Government of the Republic of Indonesia and Series B shares amounting to Rp17,481,278,000 (consisting of 17,481,278 shares) owned by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

34. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 8 tanggal 8 Maret 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0157656 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas PT Bio Farma (Persero) (Perusahaan), modal dasar Perusahaan sebesar Rp61.000.000.000 (terdiri dari 61.000.000 lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp15.479.821.000 (terdiri dari 15.479.821 lembar saham) menjadi Rp17.481.279.000 (terdiri dari 17.481.279 lembar saham).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 862/KMK.06/2019 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, serta ditandatanganinya akta Penyertaan Perjanjian Pengalihan Saham No. 36 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seluruh saham seri B KAEF dan INAF milik Negara Republik Indonesia dialihkan kepada Perusahaan sebesar Rp12.479.821.000 sebagai penambah Penyertaan Modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan.

34. SHARE CAPITAL (continued)

In accordance with the Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 8 dated March 8, 2021 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0157656 Year 2021 dated March 10, 2021 regarding the approval of amendments to the Articles of Association of PT Bio Farma (Persero) (the Company), the Company's authorized capital amounted to Rp61,000,000,000 (consisting of 61,000,000 shares), while the issued and paid-up capital increased from Rp15,479,821,000 (consisting of 15,479,821 shares) to Rp17,481,279,000 (consisting of 17,481,279 shares).

By the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No.76 of 2019 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 862/KMK.06/2019 concerning Determination of the Value of Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into Equity Capital of the Company, and the signing of the Deed of Participation of the Share Transfer Agreement No. 36 dated January 31, 2020 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the City Administration of South Jakarta, then all series B shares of KAEF and INAF owned by the Republic of Indonesia were transferred to the Company amounted to Rp12,479,821,000 as an addition to the State Capital Participation in the share capital of the Company.

34. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, serta ditandatanganinya akta Penyertaan Perjanjian Pengalihan Saham No. 47 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka seluruh saham seri B INUKI milik Negara Republik Indonesia di Perusahaan dialihkan kepada Perusahaan sebesar Rp1.457.703.206 (nilai penuh) sebagai penambah penyertaan Modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan.

Pengalihan atas seluruh saham seri B KAEF, INAF, dan INUKI, Perusahaan mencatat selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Rincian atas selisih restrukturisasi entitas sepengendali dapat dilihat pada Catatan 35.

34. SHARE CAPITAL (continued)

By the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 10 of 2022 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 183/KMK.06/2022 concerning Determination of the Value of Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into Equity Capital of the Company, and the signing of the Deed of Participation of the Share Transfer Agreement No. 47 dated July 15, 2022 made before Aulia Taufani, Bachelor of Law, Notary in the City Administration of South Jakarta, then all series B shares of INUKI owned by the Republic of Indonesia were transferred to the Company amounted to Rp1,457,703,206 (full amount) as an addition to the State Capital participation in the share capital of the Company.

The Company recognized a restructuring difference arising from the transfer of all Series B shares of KAEF, INAF, and INUKI, which are transactions under common control. Details of this difference are presented in Note 35.

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	2025	2024	
Selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(5.479.436.992)	(5.479.436.992)	*Difference in value arising from transactions restructuring of entities under common control*
Penyesuaian transaksi perubahan ekuitas Entitas anak	2.564.786	2.562.044	*Adjustment from transaction of changes in equity of Subsidiaries*
Aset pengampunan pajak	29.876.377	29.876.377	*Tax amnesty assets*
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(952.837.659)	(952.837.659)	*Difference due to transaction with non-controlling interest*
Jumlah	**(6.399.833.488)**	**(6.399.836.230)**	***Total***

Selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali merupakan perbedaan harga perolehan nilai aset bersih dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (entitas sepengendali) sebesar Rp4.328.698.826.

Difference arising from restructuring transactions of entities under common control

The difference between the acquisition cost and the net assets of PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (entity under common control) amounted to Rp4,328,698,826.

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

Difference arising from restructuring transactions of entities under common control (continued)

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali merupakan perbedaan harga perolehan nilai aset bersih dari PT Indofarma Tbk (INAF) (entitas sepengendali) sebesar Rp1.119.060.233.

As of December 31, 2024 and 2023, difference between the acquisition cost and the net assets of PT Indofarma Tbk (INAF) (entity under common control) amounted to Rp1,119,060,233.

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali merupakan perbedaan harga perolehan nilai aset bersih dari PT Industri Nuklir Indonesia (entitas sepengendali) sebesar Rp31.677.933.

As of December 31, 2024, difference between the acquisition cost and the net assets of PT Industri Nuklir Indonesia (entity under common control) is amounted to Rp31,677,933.

Tambahan modal disetor aset pengampunan pajak merupakan tambahan dari aset pengampunan pajak Entitas Anak (INAF) sebesar Rp6.995.473 berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 tanggal 26 September 2016, dan aset pengampunan pajak entitas anak (KAEF) sebesar Rp23.856.673 berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan pada bulan April 2017.

Additional paid-in capital from tax amnesty asset is credited due to the tax amnesty assets of entity (INAF) amounting to Rp6,995,473 based on Tax Amnesty Approval (SKPP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 dated September 26, 2016 and tax amnesty assets of subsidiary (KAEF) amounting to Rp23,856,673 based on Letter Wealth (SPH) to Finance Ministry of Indonesia has been published on April 2017.

36. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

36. OTHER COMPONENTS OF EQUITY

	2025	2024	
Saldo awal	3.605.100.845	3.475.660.347	*Beginning balance*
Penghasilan komprehensif lain	(201.092.935)	283.423.009	*Other comprehensive income*
Penyesuaian atas dekonsolidasi entitas anak dalam likuidasi	(12.787.788)	--	*Adjustments for deconsolidation of subsidiaries in liquidation*
Penyesuaian dan selisih nilai transaksi perubahan ekuitas entitas anak	--	(105.135.511)	*Adjustment and difference in value from transaction of changes in equity of subsidiaries*
Selisih penilaian investasi saham	--	(48.847.000)	*Difference in valuation of share investment*
Penyelesaian program imbalan kerja entitas anak	5.135.196	--	*Settlement of employee benefits plan in subsidiaries*
Jumlah	**3.396.355.318**	**3.605.100.845**	***Total***

37. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA

37. RETAINED EARNINGS AND USE OF PROFIT

a. Saldo laba dicadangkan

a. Appropriated retained earnings

	2025	2024	
Saldo awal	1.246.833.875	1.246.833.875	*Beginning balance*
Jumlah	**1.246.833.875**	**1.246.833.875**	***Total***

37. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA (lanjutan)

a. Saldo laba dicadangkan (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PE-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dana PKBL bersumber dari:

1. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau;
2. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;

Grup mengambil kebijakan, dan PKBL bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

37. RETAINED EARNINGS AND USE OF PROFIT (continued)

a. Appropriated retained earnings (continued)

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PE-09/MBU /07/2015 on Partnership Programs and Community Development Programs of SOEs, PKBL funds are sourced from:

1. *Appropriation of a portion of the net profit of State-Owned Enterprises (SOEs) and/or;*
2. *Budget recognized as expenses in State-Owned Enterprises (SOEs);*

Group prepares and provides policy, and PKBL comes from a budget that is calculated as the estimated Group's cost.

b. Saldo laba belum dicadangkan

b. Unappropriated retained earnings

	2025	2024	
Saldo awal	(2.433.673.957)	(1.919.121.793)	*Beginning balance*
(Rugi) laba tahun berjalan	111.880.056	(563.399.164)	*(Loss) profit for the year*
Penyesuaian atas dekonsolidasi entitas anak dalam likuidasi	394.281.768	--	*Adjustments for deconsolidation of subsidiaries in liquidation*
Cadangan khusus (Utang dividen >5th)	(1.584.374)	--	*Appropriate reserve (Dividend payable >5 years)*
Selisih penilaian investasi saham	--	48.847.000	*Difference in valuation of share investment*
Penyelesaian program imbalan kerja entitas anak	(5.135.196)	--	*Settlement of employee benefit plan in subsidiaries*
Jumlah	**(1.934.231.703)**	**(2.433.673.957)**	***Total***

38. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

38. NON-CONTROLLING INTEREST

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
PT Kimia Farma Tbk. dan entitas anak	808.748.697	1.016.038.564	*PT Kimia Farma Tbk. and its subsidiaries*
PT Indofarma Tbk.	(533.142.614)	(518.084.728)	*PT Indofarma Tbk.*
PT Industri Nuklir Indonesia	(2.195)	(1.840)	*PT Industri Nuklir Indonesia*
Jumlah	**275.603.888**	**497.951.996**	***Total***

38. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan) / *38. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)*

Bagian kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan adalah sebagai berikut:

Non-controlling interest portion for income (loss) for the period are as follows:

	2025	2024	
PT Kimia Farma Tbk. dan entitas anak	(142.485.943)	(451.616.665)	*PT Kimia Farma Tbk. and its subsidiaries*
PT Indofarma Tbk.	(15.079.838)	(64.679.583)	*PT Indofarma Tbk.*
PT Industri Nuklir Indonesia	(355)	(891)	*PT Industri Nuklir Indonesia*
Jumlah	**(157.566.136)**	**(516.297.139)**	***Total***

39. PENJUALAN NETO / *39. NET SALES*

Rincian penjualan menurut lini produk adalah sebagai berikut:

The details of sales by product line are as follows:

	2025	2024	
Vaksin dan Sera	5.494.384.528	5.147.760.987	*Vaccines and Serum*
Obat *ethical*, lisensi dan narkotika	3.342.019.398	3.751.436.222	*Ethical, license and narcotic medicines*
Obat generik	2.427.654.164	2.603.057.477	*Generic medicine*
Obat *over the counter* (OTC) dan kosmetik	1.861.983.958	1.751.527.383	*Over the counter medicines (OTC) and cosmetics*
Alat Kesehatan dan lain-lain	1.543.729.280	1.595.670.924	*Medical Devices and Other*
Bahan baku (minyak nabati, yodium dan kina)	3.962.660	243.651.355	*Raw materials (oil & fats, iodine, and quinine)*
Jumlah	**14.673.733.988**	**15.093.104.348**	***Total***

Rincian penjualan menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of sales based on customers are as follows:

	2025	2024	
Lokal:			*Local:*
Pihak Ketiga	8.371.773.235	9.002.795.095	*Third Parties*
Berelasi	3.452.862.604	3.049.663.779	*Related Parties*
Ekspor			*Exports*
Pihak Ketiga	2.849.098.149	3.040.645.474	*Third Parties*
Jumlah	**14.673.733.988**	**15.093.104.348**	***Total***

40. BEBAN POKOK PENJUALAN / *40. COST OF GOODS SOLD*

	2025	2024	
Biaya produksi			*Production cost*
Pemakaian bahan baku	3.464.431.487	2.634.789.837	*Raw materials used*
Pabrikasi	873.297.139	1.032.919.000	*Manufacturing overhead*
Beban tenaga kerja langsung	347.109.196	398.262.946	*Direct labor cost*
Pemakaian bahan penolong	278.158.903	273.240.211	*Auxiliary materials used*
Beban langsung (catatan 16)	34.060.765	--	*Direct cost (note 16)*
Ongkos angkut	73.846.908	63.300.839	*Transportation*
Total biaya produksi	5.070.904.398	4.402.512.833	*Total production cost*
Persediaan barang dalam proses:			*Work in process:*
Awal tahun	1.627.944.525	1.290.296.215	*At beginning of the year*
Akhir tahun	(1.655.721.573)	(1.627.944.525)	*At end of the year*
Beban pokok produksi	5.043.127.350	4.064.864.523	*Cost of goods manufactured*
Persediaan barang jadi			*Finished goods*
Awal tahun	2.129.837.406	2.824.090.114	*At beginning of the year*
Pembelian	4.595.846.069	5.211.584.397	*Purchases*
Barang tersedia untuk dijual	11.768.810.825	12.100.539.034	*Goods available for sale*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	24.176.201	53.029.728	*Provision for impairment loss of inventory (Note 8)*
Pemulihan provisi kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	(22.278.908)	(34.305.361)	*Recovery of provision for impairment loss of inventory (Note 8)*
Penggunaan produk untuk operasional	(23.048.687)	--	*Products consumed for own operations*
Kerugian penurunan nilai persediaan & rusak	(55.390.824)	--	*Inventory impairment and spoilage loss*
Lain-lain	(30.640.732)	--	*Others*
Akhir tahun	(2.177.472.219)	(2.129.837.406)	*At end of the year*
Beban pokok penjualan	**9.484.155.656**	**9.989.425.995**	***Cost of good sold***

40. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) / *40. COST OF GOODS SOLD (continued)*

Rincian biaya pabrikasi adalah sebagai berikut: / *Details of factory overhead:*

	2025	2024	
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	294.389.404	338.436.144	*Depreciation fixed assets (Note 16)*
Gaji dan tunjangan	215.179.789	284.640.302	*Employee expenses and allowances*
Pemeliharaan aset tetap	119.518.148	177.872.286	*Maintenance of fixed asset*
Energi	97.593.638	91.603.227	*Energy*
Pengembangan produk	27.382.561	14.214.064	*Product development*
Biaya kantor	18.950.637	24.848.653	*Office expenses*
Manfaat karyawan	16.463.935	20.258.994	*Employee benefit*
Asuransi	14.088.169	18.288.802	*Insurance*
Biaya pengadaan	2.465.631	917.991	*Procurement cost*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 17)	2.030.237	835.001	*Depreciation of right-of-use asset (Notes 17)*
Jasa profesional	6.266.626	10.740.140	*Professional fee*
Perjalanan dinas	1.874.535	1.983.417	*Business travel*
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 19)	914.514	1.015.452	*Amortization of intangible assets (Note 19)*
Penyusutan aset agrikultur dan pengembangan (Catatan 21)	471.232	305.852	*Depreciation agricultural and development assets (Note 21)*
Suku cadang	366.528	396.775	*Supplies*
Lain-lain	55.341.555	46.561.900	*Others*
Jumlah	**873.297.139**	**1.032.919.000**	***Total***

41. BEBAN PENJUALAN / *41. SELLING EXPENSES*

	2025	2024	
Karyawan	1.121.234.079	1.174.763.827	*Employees*
Promosi dan periklanan	280.262.745	448.494.059	*Promotion and advertising*
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	119.479.926	166.341.116	*Depreciation fixed assets (Note 16)*
Ongkos angkut dan *embalage*	115.693.223	148.829.619	*Transportation and embalage*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 17)	109.321.701	69.978.835	*Depreciation of right of use assets (Note 17)*
Komisi penjualan	108.350.421	127.134.157	*Sales commission*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	50.852.042	45.787.755	*Allowance for impairment loss of trade receivables (Note 6)*
Pemeliharaan dan perbaikan	48.897.590	2.427.237	*Repairs and maintenance*
Monitoring produk	22.222.904	20.635.760	*Monitoring of products*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	20.441.967	206.765.310	*Provision for impairment loss of inventory (Note 8)*
Royalti dan insentif penjualan	11.940.616	9.459.835	*Royalties and sales incentives*
Perjalanan dinas	8.295.622	7.634.598	*Business travel*
Beban kantor	5.087.695	8.874.945	*Office expense*
Manfaat karyawan	2.967.853	4.708.419	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 7)	2.732.469	--	*Allowance for impairment loss of other receivables (Note 7)*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 19)	680.617	17.685.499	*Amortization of intangible assets (Note 19)*
Asuransi	499.933	452.803	*Insurance*
Sumbangan produk jadi	--	6.380.712	*Donation of finished goods*
Lain-lain	46.030.675	268.308.957	*Others*
Jumlah	**2.074.992.078**	**2.734.663.443**	***Total***

42. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *42. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	1.198.074.284	1.354.988.399	*Salaries and employee's welfare*
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	184.721.995	142.478.571	*Depreciation fixed assets (Note 16)*
Pemeliharaan dan perbaikan	154.173.369	235.730.600	*Repairs and maintenance*
Listrik, air dan gas	122.411.962	81.272.273	*Electricity, water and gasoline*
Jasa profesional	120.727.432	151.791.720	*Professional services*
Pajak kendaraan	80.241.766	38.428.929	*Vehicle taxes*
Manfaat karyawan	69.778.075	35.182.086	*Employee benefit*
Beban kantor	64.600.221	82.989.599	*Office expense*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 7)	63.471.506	26.802.856	*Allowance for impairment loss of other receivables (Note 7)*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	57.731.341	52.666.090	*Provision for impairment loss of inventory (Note 8)*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 17)	50.932.193	68.944.610	*Depreciation of right of use assets (Note 17)*
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	49.834.701	85.647.753	*Provision (recovery) from impairment loss of trade receivables (Note 6)*
Perjalanan dinas	45.892.597	28.405.058	*Business travel*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 19)	30.588.591	13.761.180	*Amortization of intangible assets (Note 19)*
Alat kantor dan percetakan	30.465.263	21.566.049	*Tools office and printed*
Telepon, faksimile dan telegram	29.823.783	27.710.727	*Telephone, fax and telegram*
Jamuan tamu	24.837.526	21.412.519	*Entertainment*
Sewa	21.401.211	52.994.234	*Rent*
Asuransi	14.932.838	14.216.333	*Insurance*
Penelitian dan pengembangan	14.540.830	31.620.242	*Research and development*
Pendidikan dan pelatihan	13.518.339	21.929.220	*Education and training*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	13.177.536	--	*Corporate social and environmental responsibility*
Lain-lain	60.088.662	151.382.258	*Others*
Jumlah	**2.515.966.021**	**2.741.921.306**	***Total***

Beban Produk Digital per 31 Desember 2024 dilakukan reklasifikasi ke dalam Beban Administrasi & Umum sehubungan dengan perubahan struktur yang terjadi pada SBU Digital Healthcare sesuai keputusan No. KEP-001.13/DIR/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Perusahaan pada tanggal 13 September 2024.

Digital Product Expenses as of December 31, 2024 have been reclassified into General & Administrative Expenses due to the structural changes implemented in the SBU Digital Healthcare, in accordance with Decree No. KEP-001.13/DIR/IX/2024 regarding the Organizational Structure of the Company dated September 13, 2024.

43. BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

43. RESEARCH, DEVELOPMENT AND SURVEILLANCE EXPENSES

	2025	2024	
Beban alokasi litbang	248.878.175	122.542.195	*Allocation cost of R&D*
Jasa profesional	108.840.398	44.813.213	*Professional fee*
Pemakaian bahan baku dan penolong	99.356.813	201.499.777	*Use of raw and auxiliary materials*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	90.208.780	94.309.499	*Salaries and employee's welfare*
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	55.982.292	427.777	*Depreciation fixed assets (Note 16)*
Pemeliharaan dan perbaikan	42.221.227	45.966.051	*Maintenance and services*
Pendidikan dan pelatihan	5.864.216	1.962.422	*Education and training*
Asuransi	4.816.005	1.506.170	*Insurance*
Perjalanan dinas	3.700.940	3.851.858	*Business travel*
Manfaat karyawan	3.093.439	3.515.504	*Employee benefit*
Promosi dan Periklanan	1.312.400	--	*Advertising and Promotion Expenses*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 17)	874.270	646.134	*Depreciation of right-of-use assets (Note 17)*
Beban kantor	796.394	1.448.933	*Office expense*
Keperluan jamuan tamu	395.593	208.061	*Entertainment expenses*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 19)	107.942	266.583	*Amortization of intangible assets (Note 19)*
Provisi kerugian penurunan nilai persediaan	--	72.053.572	*Provision of impairment loss of inventory*
Lain-lain	26.655	207.970	*Others*
Jumlah	**666.475.539**	**595.225.719**	***Total***

44. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN / *44. OTHER INCOME (EXPENSE)*

	2025	2024	
Pemulihan provisi kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	120.600.451	89.418.484	*Recovery of provision for impairment loss of inventories (Note 8)*
Listing fee dan brand activity fee	14.325.101	17.715.786	*Listing fee and brand activity fee*
Pendapatan sewa gedung dan ruangan	11.138.633	32.032.164	*Building and space rent income*
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	10.858.184	17.315.735	*Recovery of allowance for impairment loss of trade receivables (Note 6)*
Pendapatan dividen	7.584.445	2.450.206	*Dividend income*
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	3.166.874	91.023.467	*Gain (loss) on foreign exchange*
Pemulihan provisi kerugian penurunan nilai persediaan tidak produktif (Catatan 8)	1.233.683	--	*Recovery of provision for impairment loss of non productive inventories (Note 8)*
Bagian laba dari entitas asosiasi (Catatan 13)	467.105	512.132	*Share in net profit of associate (Note 13)*
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 7)	49.063	2.787.646	*Recovery of allowance for impairment loss of other receivables (Note 7)*
Kerugian perubahan nilai wajar atas hak-opsi obligasi wajib konversi (Catatan 29)	--	112.488.806	*Loss on changes fair value put option of mandatory convertible bond (Note 29)*
Kerugian pelepasan aset tetap (Catatan 16)	--	(30.712)	*Loss on disposal of fixed assets (Note 16)*
Keuntungan penjualan dari lelang aset lain-lain	--	(7.643.345)	*Gain on sale from auction of other assets*
Penurunan nilai *goodwill* (Catatan 20)	--	(53.877.296)	*Impairment of goodwill (Note 20)*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 7)	(73.033)	(5.031.385)	*Allowance for impairment loss of other receivables (Note 7)*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	(992.434)	(2.763.797)	*Allowance for impairment losses of trade receivables (Note 6)*
Penurunan nilai aset tetap (Catatan 16)	(5.294.910)	--	*Impairment of fixed assets (Note 16)*
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 18)	(12.330.220)	7.409.107	*Income in fair value of investment property (Note 18)*
Lain-lain	162.311.365	128.690.838	*Others*
Jumlah	**313.044.307**	**432.497.836**	***Total***

45. PENDAPATAN KEUANGAN / *45. FINANCE INCOME*

	2025	2024	
Keuntungan restrukturisasi bank	249.932.097	228.322.931	*Gain on bank restructuring*
Keuntungan restrukturisasi utang usaha	127.243.305	--	*Gain on trade payable restructuring*
Pendapatan jasa giro	96.936.568	84.087.480	*Interest income from current account*
Pendapatan bunga deposito	676.357	37.300.603	*Interest income from time deposit*
Jumlah	**474.788.327**	**349.711.014**	***Total***

46. BEBAN KEUANGAN / *46. FINANCE COSTS*

	2025	2024	
Beban keuangan terdiri atas:			*Finance expenses consist of:*
Bunga Pinjaman	667.037.205	712.171.698	*Interest charges*
Hak sewa guna	4.298.416	7.750.616	*Lease liabilities*
Provisi bank	--	1.041.906	*Bank provision*
Amortisasi keuntungan restrukturisasi bank	3.794.336	13.172.414	*Amortization of gains on bank restructuring*
Amortisasi OWK	3.806.195	1.130.317	*OWK Amortization*
Amortisasi keuntungan restrukturisasi utang usaha	2.221.709	--	*Amortization of gains on accounts payable restructuring*
Jumlah	**681.157.861**	**735.266.951**	***Total***

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI / *47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES*

Sifat relasi

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan; dan
- Manajemen kunci termasuk Direksi, Komisaris, dan Komite Audit.

Nature of relationship

- *The Government of Republic of Indonesia is the majority shareholder of the Company; and*
- *Key management includes Directors, Commissioners, and Audit Committee.*

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut meliputi antara lain:

a. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham seri A per 31 Desember 2025 dan 2024. Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.

Transactions with related parties

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. These transactions are conducted based on terms agreed by both parties, where such terms may differ from those prevailing in transactions with unrelated parties. Transactions with related parties are including the following:

a. *The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) is the majority shareholder of the Entity amounted of 100% as of December 31, 2025 and 2024. The Company and other stated owned enterprise have affiliation relation through inclusion of Government of Republic of Indonesia share capital.*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut meliputi antara lain: (lanjutan)

b. Grup menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga.
c. Grup mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Grup dengan BUMN-BUMN lain.

Rincian akun - akun dan transaksi - transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

Transactions with related parties (continued)

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. These transactions are conducted based on terms agreed by both parties, where such terms may differ from those prevailing in transactions with unrelated parties. Transactions with related parties are including the following: (continued)

b. *Group places funds and has loan funds with state-owned banks with normal terms and interest rates as applicable to the bank's third party customers.*
c. *The Group enters into agreements in connection with its business activities with other State-Owned Enterprises (SOEs).*

The detail of accounts and transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan dengan Perusahaan *Relationship with the Company*	Sifat Saldo Akun/Transaksi *Nature of Accounts/Transactions*
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank, fasilitas pinjaman dari bank dan penjualan vaksin dan obat/ *Placement of bank account, bank loan facilities, vaccines & medicine sales*
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank, fasilitas pinjaman dan penjualan obat/ *Placement of bank account, bank loan facilities, and medicine sales*
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank/ *Placement of bank account*
5	PT Bank Syariah Nasional	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank/ *Placement of bank account*
6	PT Bank Pembangunan Daerah	Pemerintah Daerah/ *Local Government*	Penempatan dana di rekening bank/ *Placement of bank account*
7	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Penempatan dana di rekening bank/ *Placement of bank account*
8	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*
9	PT Bank DKI	Pemerintah Daerah/ *Local Government*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*
10	PT Bank DKI Syariah	Pemerintah Daerah/ *Local Government*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun - akun dan transaksi - transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The detail of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

No.	Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan dengan Perusahaan *Relationship with the Company*	Sifat Saldo Akun/Transaksi *Nature of Accounts/Transactions*
11	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Lembaga pembiayaan/ *Financial Institution*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*
12	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk	Pemerintah Daerah/ *Local Government*	Penempatan dana di rekening bank dan fasilitas pinjaman/ *Placement of bank account, bank loan facilities,*
13	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Pusat/ *Central Government*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
14	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Piutang usaha, utang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
15	PT Promosindo Medika	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang usaha, utang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
16	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Piutang usaha, utang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
17	PT Promosindo Medika	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang usaha, utang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
18	BPJS Kesehatan	Layanan Umum Pemerintah/ *Government Public Services*	Penjualan obat menggunakan kartu ASKES/ *Medicine sales using ASKES card*
19	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
20	PT Pertamina (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha, utang usaha, dan penjualan obat dan vaksin *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
21	PT Angkasa Pura II (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
22	PT Aneka Tambang Tbk.	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
23	PT Bukit Asam Tbk	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
24	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha, utang usaha, dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*
25	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
26	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha, utang usaha, dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables, trade payables and medicine and vaccine sales*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun - akun dan transaksi - transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The detail of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

No.	Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan dengan Perusahaan *Relationship with the Company*	Sifat Saldo Akun/Transaksi *Nature of Accounts/Transactions*
27	PT Pupuk Indonesia (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
28	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
29	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
30	PT Petrokimia Gresik	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
31	PT Angkasa Pura I (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
32	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
33	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang usaha dan penjualan obat dan vaksin/ *Trade receivables and medicine and vaccine sales*
34	PT Iglas (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
35	Koperasi Karyawan Bio Farma	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Utang usaha/ *Trade payables*
36	PT Amarta Karya (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Utang usaha/ *Trade payables*
37	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas Anak BUMN/ *State Owned Enterprise Subsidiaries*	Utang usaha/ *Trade payables*
38	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Utang Usaha/ *Trade Payables*
39	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Utang Usaha/ *Trade Payables*
40	CV Karya Cahya Abadi	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Utang usaha/ *Trade payables*
41	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
42	PT Timah (Persero) Tbk	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
43	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
44	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
45	PT Pegadaian (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
46	PT Garam (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine Sales*
47	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	BUMN/ *State Owned Enterprise*	Penjualan Obat/ *Medicine sales*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. *RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)*

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Kas di bank (Catatan 4)			*Cash in bank (Note 4)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.134.848.236	1.149.284.167	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	631.575.110	306.050.256	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	92.228.739	79.358.437	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	36.076.844	94.397.057	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	14.372.142	9.662.515	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	696.008	882.597	*PT Bank DKI*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk	350.744	260.075.996	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	208.005	80.118.262	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Nasional	8.671	9.031	*PT Bank Syariah Nasional*
Lainnya	23.742.350	46.995.152	*Other*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.137.250.097	1.497.511.305	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.247.453	6.868.165	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.173.361	201.540.181	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro			*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.228.825	7.129.632	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah kas di bank	**3.101.006.585**	**3.739.882.753**	***Total cash in bank***
Persentase terhadap total aset	10,41%	12,40%	*Percentage to total assets*

	2025	2024	
Deposito berjangka (Catatan 4)			*Time deposits (Note 4)*
Rupiah			*Rupiah*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	20.000.000	--	*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000	--	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.000.000	--	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	400.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	40.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah deposito berjangka	**50.400.000**	**40.400.000**	***Total time deposits***
Persentase terhadap total aset	0,17%	0,13%	*Percentage to total assets*

	2025	2024	
Dana yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)			*Resctricted funds (Note 5)*
PT Bank Negara Indonesia	232.044.369	231.949.237	*PT Bank Negara Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia	23.400.000	--	*PT Bank Rakyat Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	330.559	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah dana yang dibatasi penggunaannya	**255.774.928**	**231.949.237**	***Total restricted funds***
Persentase terhadap total aset	0,86%	0,77%	*Percentage to total assets*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The details of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Piutang usaha (Catatan 6)			*Trade receivable (Note 6)*
BPJS Kesehatan	108.691.900	--	*BPJS Kesehatan*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	34.779.873	19.554.107	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	34.582.445	35.362.612	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
Kementerian Kesehatan RI	30.274.119	--	*Kementerian Kesehatan RI*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	17.230.007	8.972.856	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	12.065.619	22.960.739	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Pertamina (Persero)	8.709.927	9.343.619	*PT Pertamina (Persero)*
PT Petrokimia Gresik	629.310	629.310	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	801	4.933.260	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
PT Promosindo Medika	--	122.940.378	*PT Promosindo Medika*
Lain-lain	38.065.480	131.414.077	*Others*
Jumlah piutang usaha	**285.029.481**	**356.110.958**	***Total trade receivables***
Persentase terhadap total aset	0,96%	1,18%	*Percentage to total assets*

	2025	2024	
Piutang lain-lain (Catatan 7)			*Other receivables (Note 7)*
PT Promosindo Medika	--	7.447.561	*PT Promosindo Medika*
Lain-lain	402.942	12.173	*Others*
Jumlah piutang lain-lain	**402.942**	**7.459.734**	***Total other receivables***
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,02%	*Percentage to total assets*

	2025	2024	
Investasi pada entitas asosiasi (Catatan 13)			*Investment in associate (Note 13)*
PT Asindo Husada Bhakti	**2.318.660**	**2.062.735**	*PT Asindo Husada Bhakti*
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,01%	*Percentage to total assets*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The details of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Utang bank (Catatan 23)			*Bank loans (Note 23)*
Utang bank jangka pendek			*Short-term bank loans*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank DKI	400.000.000	610.000.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	334.850.655	1.052.572.836	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000.000	240.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200.000.000	743.452.852	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	130.000.000	17.000.000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.056.800	8.289.365	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah utang jangka pendek	**1.454.907.455**	**2.671.315.053**	***Total short-term bank loans***
Utang bank jangka panjang			*Long-term bank loans*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	1.267.722.181	550.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank BPD Jabar Banten Tbk	1.048.158.461	1.049.632.119	*PT Bank BPD Jabar Banten Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia	542.346.645	542.536.566	*PT Bank Rakyat Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia	541.105.750	--	*PT Bank Syariah Indonesia*
PT Bank DKI	539.761.500	330.000.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	333.255.073	466.064.568	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah utang jangka panjang	**4.272.349.610**	**2.938.233.253**	***Total long-term bank loans***
Jumlah utang bank	**5.727.257.065**	**5.609.548.306**	***Total bank loans***
Persentase terhadap total liabilitas	36,44%	34,73%	*Percentage to total liabilities*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The details of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Utang usaha (Catatan 24)			*Trade payables (Note 24)*
Utang usaha jangka pendek			*Short-term trade payables*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	95.460.619	124.976.272	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	84.708.244	44.752.370	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.902.940	2.902.940	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pertamina Patra Niaga	2.688.710	5.845.840	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pos Properti Indonesia	1.050.000	--	*PT Pos Properti Indonesia*
PT Yodya	649.651	--	*PT Yodya*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	355.477	6.222.834	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Surveyor Indonesia	35.000	--	*PT Surveyor Indonesia*
PT Sucofindo	25.500	--	*PT Sucofindo*
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	--	21.900.497	*PT Pembangunan Perumahan (Persero)*
PT Amarta Karya (Persero)	--	4.071.616	*PT Amarta Karya (Persero)*
PT Promosindo Medika	--	389.475	*PT Promosindo Medika*
Lain-lain	879.373	1.186.084	*Others*
Jumlah utang usaha jangka pendek	**188.755.514**	**212.247.928**	***Total short-term trade payable***
Utang usaha jangka panjang			*Long-term trade payables*
PT Telekomunikasi Indonesia	11.361.206	--	*PT Telekomunikasi Indonesia*
Jumlah utang usaha jangka panjang	**11.361.206**	**--**	***Total long-term trade payables***
Jumlah utang usaha	**200.116.720**	**212.247.928**	***Total trade payables***
Persentase terhadap total liabilitas	1,27%	1,31%	*Percentage to total liabilities*

	2025	2024	
Utang dana revitalisasi (Catatan 33)			*Revitalization fund payable (Note 33)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Timah Tbk	24.625.424	24.625.424	*PT Timah Tbk*
Jumlah utang dana revitalisasi	**24.625.424**	**24.625.424**	***Total revitalization fund payable***
Persentase terhadap total liabilitas	0,16%	0,15%	*Percentage to total liabilities*

47. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

The details of accounts and transactions with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Penjualan (Catatan 39)			*Sales (Note 39)*
Kementerian Kesehatan	2.491.895.013	2.532.249.509	*Kementerian Kesehatan*
BPJS Kesehatan	505.431.041	--	*BPJS Kesehatan*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	74.051.148	28.243.463	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	57.846.530	88.569.998	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	42.370.075	42.075.101	*PT Pertamina (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	30.797.860	3.933.743	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.267.238	246.034	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.115.437	65.786.391	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	8.389.632	1.739.729	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
Taspen	5.275.259	--	*Taspen*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	5.047.471	3.267.176	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
PT Timah Tbk	3.340.319	2.810.388	*PT Timah Tbk*
PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk	3.015.438	12.751.973	*PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	946.867	5.596.351	*PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	155.506	--	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	--	15.680.733	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	--	13.548.631	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
Kementerian Keuangan	--	13.513.515	*Kementerian Keuangan*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	--	5.154.127	*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	--	4.522.075	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	--	2.631.150	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	1.871.314	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Krakatau Steel	--	1.847.830	*PT Krakatau Steel*
PT Bukit Asam Tbk	--	502.483	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk	--	272.980	*PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang Tbk	--	55.481	*PT Aneka Tambang Tbk*
Asabri	--	27.011	*Asabri*
Lain-lain	199.917.770	202.766.593	*Others*
Jumlah penjualan	**3.452.862.604**	**3.049.663.779**	***Total sales***
Persentase terhadap total penjualan	23,53%	20,21%	*Percentage to total sales*

48. KASUS HUKUM

Perusahaan

PT Akar Investasi Indonesia (INA) dan CIZJ Limited (SRF) menyampaikan klaim kepada PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Bio Farma (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan proses persidangan di antara para pihak dan saat ini para pihak masih menunggu putusan atas proses persidangan yang telah dilakukan. Kasus hukum ini diungkapkan secara lengkap pada kasus hukum PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dan Entitas Anaknya di bawah.

PT Indofarma Tbk (INAF)

a. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 172/Pdt.Sus-PKPU /2023/PN.Jkt.Pst.

INAF sebagai entitas induk menghadapi permasalahan hukum terkait dengan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.172/Pdt.SusPKPU/2023/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan pada 14 Juni 2023 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak-pihak:

a) PT Solarindo Energi Internasional, sebagai pemohon I
b) PT Trimitra Wisesa Abadi, sebagai pemohon II
c) INAF, sebagai Termohon

Pada 12 Juli 2023, telah terjadi perdamaian dengan PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi. Para Pemohon telah melakukan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim dan pada 13 Juli 2023 ditetapkan amar putusan sebagai berikut:

a) Menga*bulk*an pencabutan perkara oleh Kuasa Para Pemohon PKPU
b) Menyatakan sah pencabutan perkara PKPU
c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara PKPU tersebut
d) Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp2.390.

Dengan telah tercapainya perdamaian, tidak terdapat kerugian pada INAF yang menyebabkan INAF mengalami status PKPU Sementara hingga potensi dinyatakan pailit.

48. LEGAL ISSUES

The Company

PT Akar Investasi Indonesia (INA) and CIZJ Limited (SRF) have submitted claims against PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Tbk, and PT Bio Farma (Persero). In connection with this matter, court proceedings have been conducted among the parties, and the parties are currently awaiting the decision from the completed proceedings. This legal issue is disclosed in more detail in the disclosure for the legal issues of PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) and its subsidiaries below.

PT Indofarma Tbk (INAF)

a. *Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Case No.172/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst.*

INAF as a parent entity is facing legal issue related to the Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 172/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Jkt.Pst which was registered on June 14, 2023 at the Central Jakarta District Court with the following parties:

a) PT Solarindo Energi Internasional, as Applicant I
b) PT Trimitra Wisesa Abadi, as Applicant II
c) INAF, as Respondent

On July 12, 2023, there was a settlement with PT Solarindo Energi Internasional and PT Trimitra Wisesa Abadi. The Plaintiffs have withdrawn the case to the Panel of Judges and on July 13, 2023, the following decision was made:

a) Granting the revocation of the case by the Attorney of the PKPU Applicants
b) Declare the revocation of the PKPU case valid
c) Ordering the Registrar of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court to record the revocation of the PKPU case
d) Charged the costs of this case to the PKPU Applicants in the amount of Rp2,390.

Following the settlement, there is no loss incurred in INAF which caused INAF to sustain the temporary PKPU status to the potential of declared bankrupt.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

a. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 172/Pdt.Sus-PKPU /2023/PN.Jkt.Pst.(lanjutan)

Sebagai tindak lanjut perjanjian perdamaian antara INAF dan Para Pemohon, INAF tetap memiliki kewajiban pembayaran kepada kedua pihak tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a) INAF wajib melakukan angsuran pembayaran atas sisa utang kepada PT Solarindo Energi Internasional senilai Rp7.572.000 secara pro rata sampai dengan bulan Juli 2024 senilai Rp631.000 per bulan, dengan jaminan pembayaran berupa bilyet giro senilai angsuran per bulan selama 12 bulan; dan

b) INAF wajib melakukan angsuran pembayaran atas sisa utang kepada PT Trimitra Wisesa Abadi senilai Rp4.762.026 secara pro rata sampai dengan bulan Juli 2024 senilai Rp396.835, dengan jaminan pembayaran berupa bilyet giro senilai angsuran per bulan selama 12 bulan.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, INAF melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. INAF akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada kreditur sesuai dengan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst.

b. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst

INAF (Termohon) menghadapi permasalahan hukum terkait dengan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang didaftarkan pada 3 Januari 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan PT Tjahaya Inti Gemilang (Pemohon).

Termohon masih memiliki kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp6.420.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021. Sampai dengan Permohonan PKPU diajukan, Termohon belum melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut kepada Pemohon.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

a. *Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Case No.172/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst. (continued)*

As a follow-up to the settlement agreement between INAF and the Petitioners, INAF still has payment obligations to both parties, with the following details:

a) INAF is required to make installment payments of the remaining outstanding debt to PT Solarindo Energi Internasional amounting to Rp7,572,000 on a pro-rata basis until July 2024, at Rp631,000 per month, with payment guaranteed by post-dated cheques (bilyet giro) equivalent to the monthly installment for 12 months; and

b) INAF is required to make installment payments of the remaining outstanding debt to PT Trimitra Wisesa Abadi amounting to Rp4,762,026 on a pro-rata basis until July 2024, at Rp396,835 per month, with payment guaranteed by post-dated cheques (bilyet giro) equivalent to the monthly installment for 12 months.

Until the issuance of this financial statements, INAF is fulfilled its obligations to the creditors. INAF will fulfill its payment obligations to the creditors in accordance with the Settlement Agreement (Homologation) related to the Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) No. 74/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/PN. Niaga.Jkt. Pst.

b. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst.*

INAF ("Respondent") is facing legal issue related to the Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst which was registered on January 3, 2024, at the Central Jakarta District Court with PT Tjahaya Inti Gemilang (Petitioner).

The Respondent still has an outstanding obligation to the Applicant amounting to Rp6,420,000, which was due on 15 March 2021. As of the filing of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition, the Respondent has not yet settled the said obligation to the Applicant.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

b. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst (lanjutan)

Berdasarkan hasil putusan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka pada tanggal 29 Februari 2024, mengadili:

a) Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon.
b) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dan perkara tersebut sebesar Rp2.930.

c. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.

INAF (Termohon) menghadapi permasalahan hukum terkait dengan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst yang didaftarkan pada 1 Maret 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan PT Foresight Global (Pemohon).

Berdasarkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2024, Majelis Hakim membacakan Putusan yang diawali dengan Pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim kemudian melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian untuk dijadikan sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat para pihak melalui Putusan Homologasi, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Debitur/Termohon PKPU dan Para Kreditur;

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

b. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst (continued)*

Based on the decision rendered in the deliberation meeting of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on February 26, 2024, which was pronounced in an open court session on February 29, 2024, it is hereby adjudicated:

a) To reject the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition filed by the Applicant.
b) To order the Applicant to pay the costs of the case amounting to Rp2,930.

c. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst.*

INAF (Respondent) is facing legal matter related to the Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) Case No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst which was registered on March 1, 2024 at the Central Jakarta District Court with PT Foresight Global (the Applicant).

Based on the Deliberative Session of the Panel of Judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on August 15, 2024, the Panel of Judges read out the Decision which began with the Consideration of the Panel of Judges.

Based on the considerations of the Panel of Judges, the Panel of Judges then ratified the Settlement Plan to be used as a Settlement Agreement that binds the parties through a Homologation Decision, with the following Decision:

a) Declare valid and legally binding the Settlement Agreement dated August 7, 2024 which has been signed by the Debtor/PKPU Respondent and the Creditors;

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

c. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst. (lanjutan)

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim kemudian melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian untuk dijadikan sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat para pihak melalui Putusan Homologasi, dengan Amar Putusan sebagai berikut: (lanjutan)

b) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Indofarma Tbk (Dalam PKPU) demi hukum berakhir; Menghukum Debitur/Termohon PKPU dan Para Kreditur untuk tunduk dan memenuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;

c) Menghukum Debitur/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

Dengan telah dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim maka status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang INAF demi hukum telah berakhir.

d. Permohonan Kasasi terhadap Perjanjian Perdamaian dari Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 74/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst.

Pada 29 Agustus 2024, INAF telah menerima Surat No. 5056/PAN.03/W.10.U1/HK2.5 /VIII/2024.MIR tanggal 27 Agustus 2024 Perihal: Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Akta No. 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Ps. (*Relaas* Pemberitahuan), dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pada intinya *Relaas* Pemberitahuan tersebut memberitahukan bahwa:

a) Telah diajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan No. 74/Pdt.Sus PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., oleh PT Solarindo Energi International selaku Pemohon Kasasi I dan PT Trimitra Wisesa Abadi selaku Pemohon Kasasi II pada tanggal 23 Agustus 2024.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

c. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst. (continued)*

Based on the considerations of the Panel of Judges, the Panel of Judges then ratified the Settlement Plan to be used as a Settlement Agreement that binds the parties through a Homologation Decision, with the following Decision: (continued)

b) To declare that the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) of PT Indofarma Tbk (under PKPU) has legally terminated; and to order the Debtor/PKPU Respondent and the Creditors to comply with, observe, and implement the terms of the Homologated Composition Agreement:

c) Sentencing the Debtor/PKPU Respondent to pay the court costs.

With the decision read out by the Panel of Judges, the status of Postponement of Debt Payment Obligations of INAF has ended by law.

d. *Cassation Petition against Settlement Agreement from Postponement of Debt Payment Obligations Case No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.*

On August 29, 2024, INAF received Letter No. 5056/PAN.03/W.10.U1/HK2.5/VIII/ 2024.MIR dated August 27, 2024 Regarding: Notification and Submission of a Copy of the Application for Cassation and Memorandum of Cassation Deed No. 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Ps. (Relaas Notification), from the Central Jakarta District Court. In essence, the Official Notification Release informs that:

a) A cassation petition has been submitted against Decision No. 74/Pdt.SusPKPU/ 2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., by PT Solarindo Energi International as the first cassation applicant and PT Trimitra Wisesa Abadi as the second cassation applicant on August 23, 2024.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

d. Permohonan Kasasi terhadap Perjanjian Perdamaian dari Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 74/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. (lanjutan)

Pada 29 Agustus 2024, INAF telah menerima Surat No. 5056/PAN.03/W.10.U1/HK2.5 /VIII/2024.MIR tanggal 27 Agustus 2024 Perihal: Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Akta No. 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Ps. (*Relaas* Pemberitahuan), dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pada intinya *Relaas* Pemberitahuan tersebut memberitahukan bahwa: (lanjutan)

b) Dengan telah diterimanya *Relaas* Pemberitahuan, maka INAF selaku Termohon Kasasi diberikan waktu 7 hari sejak hari ini atau selambat-lambatnya pada hari Kamis, 5 September 2024 untuk mengajukan jawaban atas Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi).

Pada 3 September 2024, INAF telah mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas Putusan No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga. Jkt.Pst antara PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi selaku Para Pemohon Kasasi melawan INAF selaku Termohon Kasasi dan PT Foresight Global selaku Turut Termohon Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

d. *Cassation Petition against Settlement Agreement from Postponement of Debt Payment Obligations Case No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.(continued)*

On August 29, 2024, INAF received Letter No. 5056/PAN.03/W.10.U1/HK2.5/VIII/ 2024.MIR dated August 27, 2024 Regarding: Notification and Submission of a Copy of the Application for Cassation and Memorandum of Cassation Deed No. 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst.Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Ps. (Relaas Notification), from the Central Jakarta District Court. In essence, the Official Notification Release informs that: (continued)

b) With the receipt of the Notification Release, INAF as the Cassation Respondent is given 7 days from today or no later than Thursday, September 5, 2024 to submit a response to the Cassation Memorandum (Counter Cassation Memorandum).

On September 3, 2024, INAF submitted a Counter Cassation Memorandum (Kontra Memori Kasasi) in response to the Cassation Memorandum relating to Decision No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst between PT Solarindo Energi Internasional and PT Trimitra Wisesa Abadi as the Cassation Applicants against INAF as the Cassation Respondent and PT Foresight Global as the Co-Respondent in Cassation. The submission was filed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Clerk's Office of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

d. Permohonan Kasasi terhadap Perjanjian Perdamaian dari Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 74/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. (lanjutan)

Pada 21 Oktober 2024, PT Indofarma Tbk telah menerima Surat No. 975/PAN.3/HK2.5/Reg.Pailit /X/1267-K/ Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal: Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun Surat tersebut pada intinya menginformasikan bahwa Perkara Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi terhadap Putusan Homologasi INAF telah terdaftar dengan No. Register Perkara 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Pada tanggal 25 Maret 2025, INAF telah menerima Surat No. 1417/PAN.03/W.10. U1/HK2.5/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal: Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst., dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta Salinan Putusan Kasasi atas Perkara No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 28 November 2024.

Adapun Surat tersebut pada intinya menginformasikan bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

a) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Solarindo Energi Internasional, 2. PT Trimitra Wisesa Abadi tersebut;
b) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.

Dengan telah diperolehnya Salinan Putusan Kasasi tersebut, maka Perjanjian Perdamaian (Homologasi) INAF telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif sejak tanggal Putusan Kasasi diterima oleh Para Pihak, yaitu tanggal 25 Maret 2025.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

d. *Cassation Petition against Settlement Agreement from Postponement of Debt Payment Obligations Case No. 74/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. (continued)*

On October 21, 2024, INAF received Letter No. 975/PAN.3/HK2.5/Reg. Pailit/X/1267-K/ Pdt.Sus-Pailit/2024 dated October 18, 2024 Regarding: Notification of Bankruptcy Cassation Case Register Number from the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The letter essentially informs that the Cassation Case regarding the Cassation Application submitted by PT Solarindo Energi Internasional and PT Trimitra Wisesa Abadi regarding the Homologation Decision of INAF has been registered under Case Register No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

On March 25, 2025, INAF received Letter No. 1417/PAN.03/W.10.U1/HK2.5/III/2025 dated March 24, 2025 Subject: Submission of Copy of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Jo. No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst., from the Central Jakarta District Court together with a Copy of the Cassation Decision on Case No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dated November 28, 2024.

The Letter essentially informs that the Panel of Judges at the Supreme Court has rejected the Cassation Application submitted by the Cassation Applicants by issuing the following ruling:

a) To reject the cassation petition filed by the Cassation Applicants: 1. PT Solarindo Energi Internasional, 2. PT Trimitra Wisesa Abadi;
b) To order the Cassation Applicants to pay the litigation costs at the cassation level in the amount of Rp5,000.

With the receipt of the copy of the Cassation Decision, the Composition Agreement (Homologation) of PT Indofarma Tbk has become legally binding and effective as of the date the Cassation Decision was received by the Parties, dated March 25, 2025.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

e. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst

PT Indofarma Global Medika (IGM) menghadapi kasus hukum dalam perkara gugatan PKPU dengan No. perkara 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2024, terkait dengan tagihan dari PT Era Medika Alkensindo, PT Medihop, PT Emjebe Pharma, PT Distriversa Buanamas, PT Distributor Bersama Nusantara, PT Merapi Utama Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Kalmed Manufaktur Indonesia, PT Permana Putra Mandiri, PT Tiga Pilar Sejahtera, BPR Intidana dan PT Bank Perkreditan Rakyat Universal.

Berdasarkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2024, pada intinya disampaikan sebagai berikut:

a) Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, Tim Pengurus menyampaikan bahwa Tim Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Rabu, 9 Oktober 2024, di mana dalam rapat tersebut Debitur PKPU telah menyampaikan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditur. Namun demikian, oleh karena Debitur PKPU masih memerlukan waktu untuk menyempurnakan Rencana Perdamaian, Debitur PKPU dan Para Kreditur telah sepakat untuk dilakukan perpanjangan terhadap masa PKPU Tetap supaya Debitur PKPU dapat memaksimalkan Rencana Perdamaian.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

e. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 144/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/ PN Niaga.Jkt.Pst*

PT Indofarma Global Medika (IGM) is facing a legal issue in the PKPU lawsuit case with case No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst dated May 8, 2024, related to bills from PT Era Medika Alkensindo, PT Medihop, PT Emjebe Pharma, PT Distriversa Buanamas, PT Distributor Bersama Nusantara, PT Merapi Utama Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Kalmed Manufaktur Indonesia, PT Permana Putra Mandiri, PT Tiga Pilar Sejahtera, BPR Intidana and PT Bank Perkreditan Rakyat Universal.

Based on the Deliberative Session of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on October 11, 2024, in essence it was stated as follows:

a) In Deliberative Session of the Panel of Judges, the Management Team said that the Management Team had held a Peace Plan Discussion Meeting on Wednesday, October 9, 2024, at which meeting the PKPU Debtor had submitted the Settlement Plan to the Creditors. However, because the PKPU Debtor still needs time to perfect the Settlement Plan, the PKPU Debtor and Creditors have agreed to extend the Permanent PKPU period so that the PKPU Debtor can maximize the Settlement Plan.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

e. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst (lanjutan)

Berdasarkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2024, pada intinya disampaikan sebagai berikut: (lanjutan)

b) Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tersebut, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perpanjangan masa PKPU Tetap selama 30 hari.

c) Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menga*bulk*an perpanjangan masa PKPU Tetap Debitur PKPU selama 31 hari.

d) Dengan demikian, Majelis Hakim menunda persidangan dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat, 11 November 2024 dengan agenda Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.

Berdasarkan Penetapan No. 144/Pdt.Sus PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 November 2024, Hakim Pengawas telah menetapkan masa PKPU Tetap PT Indofarma Global Medika (dalam PKPU) diperpanjang selama 60 hari. Melalui Putusan tersebut pula, Hakim Pengawas telah menetapkan bahwa Rapat Permusyawaratan Majelis akan dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Januari 2025.

Pada Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 10 Januari 2025, Hakim Pengawas telah menetapkan masa PKPU Tetap IGM (dalam PKPU) diperpanjang selama 31 hari. Melalui Putusan tersebut pula, pemungutan suara atas Rencana/Proposal Perdamaian yang diajukan oleh IGM akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 dan Rapat Permusyawaratan Majelis akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

e. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 144/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/ PN Niaga.Jkt.Pst (continued)*

Based on the Deliberative Session of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on October 11, 2024, in essence it was stated as follows: (continued)

b) Based on the results of the Settlement Plan Discussion Meeting, the Management Team and Supervising Judges have provided recommendations to the Panel of Judges to determine the extension of the Permanent PKPU period for 30 days.

c) By considering the matters above, the Panel of Judges then granted an extension of the PKPU Debtor's Permanent PKPU period for 31 days.

d) Thus, the Panel of Judges postponed the trial and the next trial will be held on Friday, November 11, 2024, with the agenda of the Panel of Judges' Deliberation Session.

Based on Determination No. 144/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated November 11, 2024 the Supervisory Judge has determined that the Permanent PKPU period of PT Indofarma Global Medika (in PKPU) is extended for 60 days. Through this decision, the Supervisory Judge has determined that the Assembly Deliberation Meeting will be held on Friday, January 10, 2025.

At the Assembly Deliberation Meeting on January 10, 2025, the Supervisory Judge has determined that the Permanent PKPU period of IGM (in the PKPU) has been extended for 31 days. Through this Decision, the voting on the Settlement Plan/Proposal submitted by IGM will be held on February 3, 2025 and the Assembly Deliberation Meeting will be held on February 10, 2025.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

e. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2025, IGM mengajukan Rencana/Proposal Perdamaian.

Pada tanggal 3 Februari 2025, telah dilakukan pemungutan suara atas Rencana/Proposal Perdamaian yang diajukan oleh IGM dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:

a) 1 dari 13 total keseluruhan Kreditur Separatis yang mewakili 32,18% suara dari jumlah tagihan Kreditur Separatis menyetujui Proposal Perdamaian, sementara 12 Kreditur Separatis lainnya menyatakan menolak Proposal Perdamaian; dan
b) 29 dari 58 Kreditur Konkuren yang mewakili 77,89% suara dari jumlah tagihan Kreditur Konkuren menyetujui Proposal Perdamaian, 12 Kreditur Konkuren lainnya menyatakan menolak Proposal Perdamaian, sementara 17 Kreditur Konkuren tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam Rapat Kreditur.

Berdasarkan sidang/rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025, Majelis Hakim pemeriksa Perkara PKPU IGM di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan PKPU IGM selaku Termohon PKPU/Debitur telah berakhir.
2. Menyatakan IGM selaku Termohon PKPU/Debitur "Pailit" dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap Putusan Pailit tersebut, IGM telah melakukan langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

e. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 144/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/ PN Niaga.Jkt.Pst (continued)*

On January 31, 2025, IGM submitted a Settlement Plan/Proposal.

On February 3, 2025, a vote was taken on the Settlement Plan/Proposal submitted by IGM with the following voting results:

a) 1 out of a total of 13 Secured Creditors, representing 32.18% of the total claims of the Secured Creditors, approved the Composition Proposal, while the remaining 12 Secured Creditors rejected the Composition Proposal; and
b) 29 out of 58 Concurrent Creditors, representing 77.89% of the total claims of the Concurrent Creditors, approved the Composition Proposal, while 12 other Concurrent Creditors rejected the Composition Proposal, and 17 Concurrent Creditors were absent and did not cast votes at the Creditors' Meeting.

Based on the judges' deliberation session/meeting held on February 10, 2025, the Panel of Judges examining the IGM PKPU Case at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court decided in essence:

1. Declare that the PKPU of IGM as the PKPU Respondent/Debtor has ended.
2. Declare IGM as the Respondent of PKPU/Debtor is "Bankrupt" with all legal consequences.

Against the Bankruptcy Decision, IGM has undertaken legal measures and remedies in accordance with Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy and PKPU Law).

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

e. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst (lanjutan)

Pada tanggal 10 Februari 2025, IGM telah melakukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst, hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, IGM masih menunggu hasil akhir dari proses kasasi tersebut.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya

a. KAEF mengalami permasalahan hukum berdasarkan perkara No. 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai penggugat dengan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok perkara:
1. KAEF menyatakan IAI sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma No. 17, kelurahan Jatipulo, kecamatan Palmerah, Jakarta Barat seluas 995 m2 sesuai SHGB No. 619/Jatipulo dan gambar situasi tanggal 19 Maret 1984 No. 31/1386/1985 atas nama KAEF.
2. Menyatakan memberi izin kepada IAI, selaku Pembeli yang sah untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama SHGB No. 619/Jatipulo dari KAEF ke IAI.
3. Memerintahkan kepada BPN untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma No.17, kelurahan Jatipulo, kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat seluas 995 M2 sesuai SHGB No. 619/Jatipulo dan gambar situasi tanggal 19 Maret 1984 No. 31/1386/1985 atas nama Ikatan IAI.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

e. *Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) Case No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN Niaga.Jkt.Pst (continued)*

On February 10, 2025, IGM filed a cassation appeal against the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No.144/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst., until the date of issuance of this consolidated financial statement, IGM is still awaiting the final outcome of the cassation process.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries

a. *KAEF is involved in a legal dispute under case No. 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt at the Pengadilan Negeri Jakarta Barat, with the Indonesian Pharmacists Association (IAI) as the plaintiff. The main subject matter of the case is as follows:*

Main points of the case:
1. *KAEF declares IAI as the legal owner of the land and building located at Jl. Wijaya Kusuma No. 17, Jatipulo sub-district, Palmerah district, West Jakarta City, measuring 995 m2 according to SHGB No. 619/Jatipulo and the situation drawing dated March 19, 1984, No. 31/1386/1985 on behalf of KAEF.*
2. *States to grant permission to IAI, as the legal Buyer, to sign the letters related to the process of changing the name of SHGB No. 619/Jatipulo from KAEF to IAI.*
3. *Order the BPN to issue a decision letter granting land rights and issue a Land Certificate for Building Use Rights for land and buildings located at Jl. Wijaya Kusuma No. 17, Jatipulo Village, Palmerah District, West Jakarta City of 995 M2 by SHGB No. 619 / Jatipulo and the situation drawing dated March 19, 1984, No. 31 / 1386/1985 in the name of IAI.*

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

a. KAEF mengalami permasalahan hukum berdasarkan perkara No. 59/Pdt.G/ 2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai penggugat dengan pokok perkara sebagai berikut: (lanjutan)

Bahwa terhadap tuntutan dari IAI tersebut, KAEF telah menolak dan membantahnya karena tidak didukung dengan bukti yang kuat dan permintaan tersebut juga tidak beralasan menurut hukum karena KAEF sama sekali tidak pernah mengalihkan, membebankan dan/atau menjaminkan asetnya tersebut kepada pihak lain, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan akhirnya menolak gugatan Penggugat.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, KAEF telah mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas putusan No. 280/PDT/2024/PT.DKI tanggal 18 April 2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 59.Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 dalam perkara antara Pengurus Pusat IAI selaku Pemohon Kasasi, melawan KAEF sebagai Termohon Kasasi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Barat selaku Turut Termohon Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 21 Juli 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan atas Kasasi yang diajukan oleh IAI, Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan *judex factie* /Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tersebut harus ditolak.

Adapun putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tersebut;

2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (nilai penuh).

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

a. *KAEF is involved in a legal dispute under case No. 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt at the Pengadilan Negeri Jakarta Barat, with the Indonesian Pharmacists Association (IAI) as the plaintiff. The main subject matter of the case is as follows (continued)*

That regarding the demands from the IAI, KAEF has rejected and denied it because it is not supported by strong evidence and the request is also legally groundless because KAEF has never transferred, charged and/or pledged its assets to another party, so that Pengadilan Negeri Jakarta Barat in its final decision rejected the Plaintiff's lawsuit.

On August 19, 2024, KAEF filed Counter-Cassation of Memorandum against Decision No. 280/PDT/2024/PT.DKI dated April 18, 2024, Jo Decision of the West Jakarta District Court No. 59.Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt dated September 14, 2023 in the case between the IAI as the Cassation Applicant, against the Company as the Cassation Respondent and the Head of the National Land Agency of West Jakarta City as the Co-Respondent to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Central Jakarta District Court.

On July 21, 2025, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a decision on the cassation appeal filed by the Indonesian Pharmacists Association (IAI). The Panel of Judges stated that the Jakarta High Court's decision in this case did not conflict with the law and/or statutes. Therefore, the cassation appeal filed by the cassation applicant, the Central Executive Board of the Indonesian Pharmacists Association, must be rejected.

The Panel of Judges' decision is as follows:

1. *Rejecting the cassation appeal from the cassation applicant, the Central Executive Board of the Indonesian Pharmacists Association;*
2. *Ordering the cassation applicant to pay legal costs at this cassation level in the amount of Rp500,000 (full amount).*

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

a. KAEF mengalami permasalahan hukum berdasarkan perkara No. 59/Pdt.G/ 2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai penggugat dengan pokok perkara sebagai berikut: (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa tanah Tomang belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap pada tanggal pelaporan karena kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan fisik aset tersebut masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, aset tersebut untuk sementara dikategorikan sebagai aset di luar neraca.

Manajemen akan terus melakukan evaluasi secara berkala atas perkembangan proses hukum yang berlangsung sampai diperoleh kepastian hukum atas aset tersebut. Dalam hal penguasaan fisik atas aset telah diperoleh dan seluruh persyaratan pengakuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku telah terpenuhi, maka aset tersebut akan diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen juga berencana untuk melanjutkan proses administrasi terkait perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 619 yang telah berakhir pada tanggal 20 Mei 2004 setelah terdapat kepastian hukum atas penyelesaian perkara perdata terkait.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

a. *KAEF is involved in a legal dispute under case No. 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt at the Pengadilan Negeri Jakarta Barat, with the Indonesian Pharmacists Association (IAI) as the plaintiff. The main subject matter of the case is as follows (continued)*

Based on the legal and accounting evaluation, management believes that the Tomang land does not meet the recognition criteria as property, plant and equipment as of the reporting date since the legal certainty over the ownership and physical control of the asset is still under resolution. Accordingly, the asset is currently classified as an off-balance sheet item.

Management will continue to periodically evaluate the development of the ongoing legal process until legal certainty over the asset is obtained. Once physical control of the asset has been secured and all recognition criteria in accordance with the applicable accounting standards have been fulfilled, the asset will be recognized as property, plant and equipment in the financial statements.

In relation to this matter, management also plans to proceed with the administrative process for the extension of Building Use Right Certificate (SHGB) No. 619, which expired on May 20, 2004, once legal certainty regarding the settlement of the related civil case has been obtained.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

b. Pada tanggal 24 Juni 2024, PT Akar Investasi Indonesia (”AKAR”) dan CIZJ Limited (”CIZJ”) mengirimkan surat yang ditujukan kepada Perusahaan dan PT Kimia Farma Apotek selaku pemegang saham PT Kimia Farma Apotek. AKAR dan CIZJ pada suratnya menyatakan adanya pelanggaran terhadap *Conditional Share Subscription and Purchase Agreement* (”CSSPA”) tertanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh Perusahaan, *Indonesia Investment Authority* (”INA”), CIZJ, Silk Road Fund Co., Ltd. dan PT Kimia Farma Apotek terkait ketidaktepatan informasi yang diberikan kepada AKAR dan CIZJ salah satunya adalah informasi keuangan PT Kimia Farma Apotek yang digunakan untuk menuntaskan proses penambahan modal oleh AKAR dan CIZJ.

Pada 23 Oktober 2024, AKAR dan CIZJ menyampaikan surat pemberitahuan lanjutan, Di mana PT Bio Farma (Persero) turut menjadi pihak yang melakukan dugaan pelanggaran, bersama dengan Perusahaan dan KFA, dalam hubungan kontraktual dengan AKAR dan CIZJ.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum dapat dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan hasil akhir atas klaim dari AKAR dan CIZJ ini untuk mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi mengingat proses klaim dan penyelesaian kasus hukum masih berlangsung.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

b. *On June 24, 2024, PT Akar Investasi Indonesia (“AKAR”) and CIZJ Limited (“CIZJ”) sent a letter addressed to the Company and PT Kimia Farma Apotek as shareholders of PT Kimia Farma Apotek. AKAR and CIZJ in their letter stated that there was a violation of the Conditional Share Subscription and Purchase Agreement (“CSSPA”) dated November 13, 2022 signed by the Company, Indonesia Investment Authority (“INA”), CIZJ, Silk Road Fund Co., Ltd. and PT Kimia Farma Apotek related to the inaccuracy of information provided to AKAR and CIZJ, one of which was the financial information of PT Kimia Farma Apotek which was used to complete the capital increase process by AKAR and CIZJs.*

On October 23, 2024, AKAR and CIZJ submitted further notification letters, in which PT Bio Farma (Persero) became a party to the alleged violation, along with the Company and KFA, in their contractual relationship with AKAR and CIZJ.

As of the date of completion of this consolidated financial report, an evaluation of the potential final outcome of this claim from AKAR and CIZJ cannot yet be conducted to estimate the potential losses that may occur considering that the claim and discussion the legal case settlement process is still ongoing.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

c. Berdasarkan Putusan Perkara No. 14/KPPUK/ 2023 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tentang dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan bagi hasil di sektor pelayanan kesehatan antara PT Kimia Farma Diagnostik (KFD), entitas anak dari PT Kimia Farma Apotek (KFA) dengan Mitra Dokter Umum/Gigi yang dilakukan oleh KFD dengan dugaan pelanggaran pada pokok sebagai berikut:

Bahwa objek dalam pemeriksaan perkara No. 14/KPPU-K/2023 ini adalah pelaksanaan kemitraan yang dilakukan antara KFD sebagai Pihak Terlapor dan Mitra Dokter Umum/Gigi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara KFD dan Dokter Gigi tentang Praktik Dokter Gigi, Perjanjian Kerja Sama Dokter Gigi tentang Praktik Dokter Gigi dengan Penggunaan Alat dan Bahan Habis Pakai, dan Perjanjian Kerja Sama antara KFD dan Dokter Umum tentang Praktik Dokter Umum 2023 ("Perjanjian Kerja Sama").

Tim Pemantau KPPU kemudian mengeluarkan Peringatan Tertulis II tertanggal 25 Juni 2024 kepada Terlapor. Peringatan Tertulis II pada intinya menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan seluruh Peringatan Tertulis I pada masa Peringatan Tertulis I dan Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis II.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

c. *Based on Case Decision No. 14/KPPUK /2023 of the Republic of Indonesia Business Competition Supervisory Commission regarding alleged violations of Article 35 paragraph 1) of Law No. 20 of 2008 concerning the implementation of profit-sharing partnerships in the Health services sector between PT Kimia Farma Diagnostic (KFD), subsidiary of PT Kimia Farma Apotek (KFA) with General Practitioner /Dental Partners carried out by KFD, with alleged violations in principle as follows:*

That the object of the examination of case No. 14/KPPU-K/2023 concerns the implementation of partnerships between KFD, as the Reported Party, and General Practitioner/Dentist Partners based on the Cooperation Agreements between KFD and Dentists regarding Dental Practice, Cooperation Agreements with Dentists regarding Dental Practice with the Use of Equipment and Consumable Materials, and Cooperation Agreements between KFD and General Practitioners regarding General Medical Practice 2023 (the "Cooperation Agreements").

The KPPU Monitoring Team then issued Written Warning II dated June 25, 2024 to the Reported Party. Written Warning II essentially states that the Reported Party has not implemented all of Written Warning I during the Written Warning I period and the Reported Party required to make all improvement to the alleged violations of the implementation of the partnership no later than 30 working days after receiving Written Warning II.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Tim Pemantau KPPU kemudian mengeluarkan Peringatan Tertulis III tanggal 16 Agustus 2024 kepada Terlapor. Peringatan Tertulis III menyatakan bahwa Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis III dan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Direktur Pengawasan Kemitraan c.q. Tim Pemantau sebelum berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis III.

Investigator dalam Laporan Hasil Peringatan Tertulis dan Simpulan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terlapor telah menyerahkan *draft* perjanjian dan *draft* adendum perjanjian pada tanggal 4 Januari 2024. Tim Pemantau telah selesai mereviu dan menyetujui *draft* perjanjian serta *draft* adendum perjanjian terbaru di bulan Januari 2024 serta meminta Terlapor segera menerapkan *draft* tersebut.

Bahwa karena Terlapor memiliki pemahaman yang berbeda dan ingin mengajukan usulan penyesuaian perintah perbaikan maka penandatanganan perjanjian dan adendum perjanjian baru yang telah disesuaikan dengan perintah KPPU belum dilaksanakan.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Terlapor untuk selanjutnya berkoordinasi dan bersinergi dengan Organisasi Profesi yang menaungi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan persoalan perumusan Perjanjian Kerja Sama di kemudian hari.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

KPPU then issued Written Warning III Dated August 16, 2024 to the Reported Party. Written Warning III states that the Reported Party is required to make all improvements to the alleged violations of the implementation of the Partnership no later than 30 working days after receiving Written Warning III and is required to prepare and submit an implementation report to the Director of Partnership Supervision c.q. Monitoring Team before the end of the 30 working days after receiving Written Warning III.

The Investigator in the Written Warning Results Report and Conclusions stated in essence the following:

That the Reported Party has submitted a draft agreement and a draft addendum to the agreement on January 4, 2024. The Monitoring Team has completed reviewing and approving the draft agreement and a draft addendum to the agreement on January 4, 2024 and requested the Reported Party to immediately implement the draft.

That because the Reported Party has a different understanding and wishes to submit a proposal for adjustment to the improvement order, the signing of the agreement and the new agreement to the KPPU order has not been implemented.

That the Commission Assembly recommends to the Reported Party to further coordinate and synergize with the Professional Organization that oversees general practitioner, dentists, specialist doctors, nurses, and other health workers related to the issue of formulating a Cooperation Agreement in the future.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Bahwa kerja sama yang terjadi antara KFD dengan Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh investigator/ Tim Pemantau KPPU ditafsirkan sebagai Pelaksanaan Kemitraan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan tertanggal 10 November 2023 Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008, yang kemudian diterbitkan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III, yang kemudian hasil dari monitoring atas peringatan tertulis tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Peringatan Tertulis tertanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komos tanggal 18 Februari 2025.

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan tanggal 10 November 2023, Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008.

Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan tersebut, Tim Pemantau KPPU telah menyampaikan Peringatan Tertulis I tertanggal 18 Desember 2023, yang pada intinya Terlapor diwajibkan perbaikan atas melakukan seluruh dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan paling lambat 90 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis I.

Tim Pemantau KPPU kemudian mengeluarkan Peringatan Tertulis II tertanggal 25 Juni 2024 kepada Terlapor. Peringatan Tertulis II pada intinya menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan seluruh Peringatan Tertulis I pada masa Peringatan Tertulis I dan Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis II.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

The cooperation between KFD and General Practitioners and/or Dentists as set forth in the aforementioned Cooperation Agreements was interpreted by the investigators/Monitoring Team of KPPU as the implementation of a partnership as referred to under Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises, as stated in the Report on Alleged Partnership Violation dated 10 November 2023. The Reported Party was alleged to have violated the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law No. 20 of 2008, following which Written Warning I, Written Warning II, and Written Warning III were issued. The results of the monitoring of such written warnings were subsequently set out in the Report on the Results of Written Warnings dated January 31, 2025, which was presented at the Panel Hearing on February 18, 2025.

That stated in the Report of Alleged Partnership Violations dated November 10, 2023, the Reported Party is suspected of violating the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law No. 20 of 2008.

Based on the Report of alleged Partnership Violations, the KPPU Monitoring Team has issue Written Warning I dated December 18, 2023, which in essence requires the Reported Party to make all improvements to the alleged violations in the implementation of the partnership no later than 90 working days after receiving Written Warning I.

The KPPU Monitoring Team then issued Written Warning II dated June 25, 2024 to the Reported Party. Written Warning II essentially states that the Reported Party has not implemented all of Written Warning I during the Written Warning I period and the Reported Party required to make all improvement to the alleged violations of the implementation of the partnership no later than 30 working days after receiving Written Warning II.

48. KASUS HUKUM (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Entitas Anaknya (lanjutan)

Tim Pemantau KPPU kemudian mengeluarkan Peringatan Tertulis III tanggal 16 Agustus 2024 kepada Terlapor Peringatan Tertulis III menyatakan bahwa Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis III dan wajib menyusun.

Dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Direktur Pengawasan Kemitraan c.q. Tim Pemantau sebelum berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja setelah diterimanya Peringatan Tertulis III.

Investigator dalam Laporan Hasil Peringatan Tertulis dan Simpulan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terlapor telah menyerahkan *draft* perjanjian dan *draft* adendum perjanjian pada tanggal 4 Januari 2024. Tim Pemantau telah selesai mereviu dan menyetujui *draft* perjanjian serta *draft* adendum perjanjian terbaru di bulan Januari 2024 serta meminta Terlapor segera menerapkan *draft* tersebut.

Bahwa karena Terlapor memiliki pemahaman yang berbeda dan ingin mengajukan usulan penyesuaian perintah perbaikan maka penandatanganan perjanjian dan adendum perjanjian baru yang telah disesuaikan dengan perintah KPPU belum dilaksanakan.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Terlapor untuk selanjutnya berkoordinasi dan bersinergi dengan Organisasi Profesi yang menaungi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan persoalan perumusan Perjanjian kerja Sama di kemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta penilaian, analisis dan kesimpulan serta dengan mengingat Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008 Jo. Pasal 122 PP No. 7 Tahun 2021, Majelis Komisi pada 26 Mei 2025 memutuskan: Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

48. LEGAL ISSUES (continued)

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) and its subsidiaries (continued)

KPPU then issued Written Warning III Dated August 16, 2024 to the Reported Party. Written Warning III states that the Reported Party is required to make all improvements to the alleged violations of the implementation of the Partnership no later tan 30 working days after receiving Written Warning III and is required to prepare.

submit an implementation report to the Director of Partnership Supervision c.q. Monitoring Team before the end of the 30 working days after receiving Written Warning III.

The Investigator in the Written Warning Results Report and Conclusions stated in essence the following:

That the Reported Party has submitted a draft agreement and a draft addendum to the agreement on January 4, 2024. The Monitoring Team has completed reviewing and approving the draft agreement and a draft addendum to the agreement on January 4, 2024 and requested the Reported Party to immediately implement the draft.

That because the Reported Party has a different understanding and wishes to submit a proposal for adjustment to the improvement order, the signing of the agreement and the new agreement to the KPPU order has not been implemented.

That the Commission Assembly recommends to the Reported Party to further coordinate and synergize with the Professional Organization that oversees general practitioner, dentists, specialist doctors, nurses, and other health workers related to the issue of formulating a Cooperation Agreement in the future.

Considering that based on the facts, assessments, analysis and conclusions, and taking into account Article 39 Law No. 20 of 2008 in conjunction with Article 122 of PP No. 7 of 2021, the Commission Council on May 26, 2025 decide: Declaring that the Reported Party was not proven to have violated Article 35 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises.

49. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

49. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH OPERATING, INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

a. Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memengaruhi kas:

a. Non-cash investing and financing activities

	2025	2024	
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa dan beban bunga	65.892.660	(182.480.021)	*Addition of right of used assets from lease liabilities and interest expenses*
Pembayaran bunga melalui akrual bunga	7.112.436	8.425.579	*Interest expenses addition from interest accrue*
Pengurangan liabilitas keuangan melalui nilai wajar dan bunga	3.803.865	(111.455.614)	*Reduction of financial liabilities through fair value and interest amortization*
Penambahan aset tetap yang berasal dari utang	–	38.263.153	*Addition of fixed assets through payable*
Dampak dekonsolidasi	(48.663.108)	–	*Impact of deconsolidation*
Keuntungan dan amortisasi terkait restrukturisasi utang usaha	(125.021.596)	–	*Gains and amortization related to trade payable restructuring*
Keuntungan dan amortisasi terkait restrukturisasi utang bank	(245.710.439)	(215.150.517)	*Gains and amortization related to bank loans restructuring*
Jumlah	**(408.478.842)**	**(279.917.399)**	***Total***

b. Rekonsiliasi utang neto

b. Debt reconciliation, net

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Arus kas-neto/ *Cash flows-net***	**Perubahan lain/ *Other changes***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Utang bank jangka pendek	4.078.608.465	185.621.739	(2.116.778.789)	2.147.451.415	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	4.199.868.367	(233.891.674)	1.878.879.325	5.844.856.018	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	159.360.956	(103.727.610)	65.892.660	121.526.006	*Lease liabilities*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	257.294.090	(15.149.861)	3.803.865	245.948.094	*Financial liabilities at fair value through profit or loss*
Utang dana revitalisasi	24.625.424	–	–	24.625.424	*Revitalization fund payable*
Jumlah	**8.719.757.302**	**(167.147.406)**	**(168.202.939)**	**8.384.406.957**	***Total***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Arus kas-neto/ *Cash flows-net***	**Perubahan lain/ *Other changes***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Utang bank jangka pendek	5.825.360.911	152.712.719	(1.899.465.165)	4.078.608.465	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	2.462.897.738	44.230.401	1.692.740.228	4.199.868.367	*Long-term bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	46.969.586	(46.969.586)	–	-	*Consumer payables*
Liabilitas sewa	60.370.877	(83.489.942)	182.480.021	159.360.956	*Lease liabilities*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	376.647.158	(7.897.453)	(111.455.615)	257.294.090	*Financial liabilities at fair value through profit or loss*
Utang dana revitalisasi	24.625.424	–	–	24.625.424	*Revitalization fund payable*
Jumlah	**8.796.871.694**	**58.586.139**	**(135.700.531)**	**8.719.757.302**	***Total***

50. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

50. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2025 and 2024, Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2025		2024		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rp/ *Equivalent in Rp*	
Aset					***Asset***
Kas					*Cash on Hand*
Dolar Amerika Serikat	1.406,13	23.598	1.184,13	19.138	*United States Dollar*
Euro	22,50	444	157,50	2.654	*Euro*
Dolar Hong Kong	260,00	561	270,00	562	*Hong Kong Dollar*
Rupee India	44.148,19	8.256	118.785,19	22.569	*Indian Rupee*
Poundsterling	15,00	340	514,99	10.471	*Poundsterling*
Yuan China	10,59	25	5.983,05	13.246	*Chinese Yuan*
Bank					*Cash in bank*
Dolar Amerika Serikat	70.687.100,62	1.186.270.923	106.349.839,81	1.718.826.111	*United States Dollar*
Euro	447.537,14	8.840.318	589.271,00	9.929.806	*Euro*
Dolar Singapura	36.706,54	479.702	5.982,00	71.299	*Singapore Dollar*
Yuan Cina	292,30	702	--	--	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	--	--	270,00	562	*Hong Kong Dollar*
Rupee India	--	--	118.158,00	22.450	*Indian Rupee*
Poundsterling	--	--	515,00	10.471	*Poundsterling*
Piutang Usaha					*Trade receivables*
Dolar Amerika Serikat	19.935.278,38	334.553.842	10.747.699,21	173.704.315	*United States Dollar*
Euro	424.169,41	8.378.729	287.804,00	4.849.785	*Euro*
Piutang Lain-Lain					*Other receivables*
Dolar Amerika Serikat	--	--	107.870,00	1.743.395	*United States Dollar*
Jumlah aset		**1.538.557.440**		**1.909.226.834**	***Total asset***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang usaha					*Trade payables*
Dolar Amerika Serikat	26.618.352,18	446.709.186	30.605.704,47	494.649.396	*United States Dollar*
Euro	3.661.071,72	72.318.101	108.702,31	1.831.743	*Euro*
Dolar Australia	--	--	150.000,00	1.512.300	*Australian Dollar*
Poundsterling	167.622,62	3.799.297	1.714.438,00	34.859.668	*Poundsterling*
Dolar Singapura	--	--	148.720,00	1.772.594	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	132.598.728,57	14.266.403	18.000.045,00	1.836.005	*Japan Yen*
Yuan China	--	--	60,28	133	*Chinese Yuan*
Biaya yang masih harus dibayar					*Accrued expenses*
Dolar Amerika Serikat	--	--	51.256,00	828.399	*United States Dollar*
Yen Jepang	--	--	2.173.364,00	221.683	*Japan Yen*
Liabilitas lancar lainnya					*Other current liabilities*
Dolar Amerika Serikat	--	--	107.020,00	1.729.657	*United States Dollar*
Jumlah liabilitas		**537.092.987**		**539.241.578**	***Total liabilities***
Jumlah aset/(liabilitas) moneter - neto		**1.001.464.453**		**1.369.985.256**	***Total monetary assets/(liabilities) - net***

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko pasar terdiri atas:

  i. Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

  ii. Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar dan risiko suku arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup;

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Risk Management

In the course of its operating, investing and financing activities, Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- *Credit risk represents risk due to the possibility that a customer will not repay all or a portion of a receivable or will not repay in a timely manner and therefore will cause a loss to Group.*
- *Liquidity risk represents risk of Group's inability to repay all their liabilities at maturity date. At present Group does expect to pay all liabilities at their contractual maturity.*
- *Market risk consists of:*

  i. Currency risk represents the fluctuation risk in the value of financial instruments that caused the changes foreign exchange currency notes.

  ii. Interest rate risk consist of interest rate risk at fair value, which is the fluctuation risk of the financial instruments value that caused of the interest market rates and interest rate risk on cash flows, the cash flows risk in the future that will fluctuated because of interest market rate changes.

In order to effectively manage those risks, the Directors has approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with Group's objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that Group faces.

The major guidelines of this policy are the following:

- *minimize effect of changes in foreign exchange and market risk for all kind of transactions by providing adequate foreign currencies reserve;*

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

I. Risk Management (continued)

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara pendapatan dan biaya dan utang/pinjaman dan piutang dalam mata uang yang sama; dan
- semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

The major guidelines of this policy are the following: (continued)

- *maximize the use of favourable "natural hedge" as much as possible the natural off-setting of revenue and costs and payables and receivables denominated in the same currency; and*
- *all financial risk management activities carried out on a prudent, consistent basis, and following the best market practices.*

Risiko Kredit

Credit Risk

Grup mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Group manage credit risk exposed from its deposits in banks and time deposits by using banks with good reputation and ratings to mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Dewan Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan.

In respect of credit exposures given to customer, Group controls its exposure to credit risk by setting its policy in approval or rejection of new credit contract. Compliance to the policy is monitored by the Board of Directors as part of the process in approval or rejection, the customer reputation and track record is taking into consideration.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	2025	2024	
Bank dan deposito berjangka	3.438.099.687	4.059.597.274	*Cash in bank and time deposit*
Dana yang dibatasi penggunaannya	276.493.626	231.949.237	*Restricted funds deposit*
Piutang usaha	1.448.823.868	1.318.371.652	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	106.457.270	186.851.743	*Other receivables*
Aset kontrak	3.819.670	--	*Contract assets*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	19.418.181	19.418.181	*Financial asset at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**5.293.112.302**	**5.816.188.087**	***Total***

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

I. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan perusahaan global dan domestik.

Group manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for respective customers and being more selective in choosing global and domestic company.

	2025					
	Mengalami penurunan nilai individual/ *Individually impaired*	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Overdue but not impaired*			Belum jatuh tempo dan dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Not yet due and not impaired*	Jumlah/ *Total*
		1-30 hari/ *days*	31-90 hari/ *days*	> 90 hari/ *days*		
Aset Keuangan/ *Financial Assets*						
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at Fair value through profit or loss*						
Aset Keuangan Lainnya/ *Other Financial Assets*	--	--	--	--	20.999.392	20.999.392
Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Measured at Amortized Cost*						
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	(30.572)	3.446.100.441	--	--	--	3.446.069.869
Piutang Usaha/ *Trade Receivable*	(1.062.243.684)	567.819.390	378.709.366	1.149.613.694	414.925.102	1.448.823.868
Piutang Lain-lain/ *Other Accounts Receivable*	(103.093.321)	--	--	252.504	209.298.087	106.457.270
Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif (FVTOCI)/ *Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income*						
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non-Current Financial Assets*	--	--	--	19.418.181	--	19.418.181
Jumlah/*Total*	**(1.165.367.577)**	**4.013.919.831**	**378.709.366**	**1.169.284.379**	**645.222.581**	**5.041.768.580**

	2024					
	Mengalami penurunan nilai individual/ *Individually impaired*	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Overdue but not impaired*			Belum jatuh tempo dan dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Not yet due and not impaired*	Jumlah/ *Total*
		1-30 hari/ *days*	31-90 hari/ *days*	> 90 hari/ *days*		
Aset Keuangan/ *Financial Assets*						
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at Fair value through profit or loss*						
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ *Other Current Financial Assets*	--	--	--	--	9.975.769	9.975.769
Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Measured at Amortized Cost*						
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	--	4.068.223.523	--	--	--	4.068.223.523
Piutang Usaha/ *Trade Receivable*	611.638.881	708.738.250	163.088.817	227.820.485	218.724.100	1.930.010.533
Piutang Lain-lain/ *Other Accounts Receivable*	100.465.428	--	--	186.558.857	292.886	287.317.171
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ *Other Current Financial Assets*	--	--	--	--	1.450.045	1.450.045
Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif (FVTOCI)/ *Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income*						
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non-Current Financial Assets*	--	--	--	19.418.181	--	19.418.181
Jumlah/*Total*	**712.104.309**	**4.776.961.773**	**163.088.817**	**433.797.523**	**230.442.800**	**6.316.395.222**

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Grup memiliki jenis aset keuangan berikut yang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian:

- Piutang usaha untuk penjualan;
- Piutang lain-lain; dan
- Aset kontrak

Sementara kas dan setara kas serta piutang lain-lain dari karyawan juga sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 109, kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 109 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan aset kontrak telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Aset kontrak terkait dengan pekerjaan yang belum tertagih dan secara memiliki karakteristik risiko yang sama dengan piutang usaha untuk jenis kontrak yang sama. Oleh karena itu, Grup menyimpulkan bahwa tingkat kerugian ekspektasian untuk piutang usaha adalah perkiraan yang wajar dari tingkat kerugian untuk aset kontrak.

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management (continued)

Credit Quality of Financial Assets

The Group manages credit risk exposure from its deposits with banks and receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

The Group has following types of financial assets that are subject to the expected credit loss model:

- *Trade receivables for sales;*
- *Other receivables; and*
- *Contract assets*

While cash and cash equivalents and other receivables from employee are also subject to impairment requirements of PSAK 109, the identified impairment loss was immaterial.

The Group applies the PSAK 109 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contract assets.

To measure the expected credit losses, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The contract assets relate to unbilled work in progress and have substantially the same risk characteristics as the trade receivables for the same types of contracts. The Group has therefore concluded that the expected loss rates for trade receivables are a reasonable approximation of the loss rates for the contract assets.

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (lanjutan)

Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tingkat kerugian historis disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang. Grup tersebut telah mengidentifikasi *Consumer Price Index* (CPI), selisih nilai tukar mata uang asing, dan tingkat inflasi Indonesia tempat mereka menjual barang dan jasanya menjadi faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan perubahan ekspektasian dalam faktor-faktor ini.

Piutang usaha dan aset kontrak dihapuskan jika tidak ada ekspektasi pemulihan yang wajar. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang wajar mencakup, antara lain, kegagalan debitur untuk melaksanakan rencana pelunasan utang pada Grup, dan kegagalan melakukan pembayaran kontraktual untuk jangka waktu lebih dari 360 hari lewat jatuh tempo.

Kerugian penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak disajikan sebagai kerugian penurunan nilai bersih dalam laba operasi. Pemulihan selanjutnya dari jumlah yang dihapuskan sebelumnya dikreditkan ke item baris yang sama.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup.

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management (continued)

Credit Quality of Financial Assets (continued)

The expected loss rates are based on the collection profiles of sales for the year ended December 31, 2025 and 2024 respectively and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the Consumer Price Index (CPI), foreign exchange differences, and inflation of Indonesia in which it sells its goods to be the most relevant factors, and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in these factors.

Trade receivables and contract assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include, amongst others, the failure of a debtor to engage in a repayment plan with the Group, and a failure to make contractual payments for a period of greater than 360 days past due.

Impairment losses on trade receivables and contract assets are presented as net impairment losses within operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Liquidity Risk

Liquidity risk arises when the Group has difficulty to satisfy financial liabilities as financial liabilities are due. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents in order to fulfill the financial obligations of the Group.

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management (continued)

Liquidity Risk (continued)

Currently, the Group expects to be able to settle all liabilities as they fall due. To meet its cash commitments, the Group expects that its operating activities will generate sufficient cash inflows. The following table analyzes the details of financial liabilities by maturity:

	2025				
	Akan Jatuh Tempo dalam/ *Will Due In*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/	
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *1 - 5 Year*	Lebih dari 5 Tahun/ *More than 5 Years*	*Maturity Not Determined*	Jumlah/ *Total*
Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*					
Utang usaha/ *Trade payable*	2.416.058.628	155.158.344	--	--	2.571.216.972
Utang lain-lain/ *Other payable*	673.535.753				673.535.753
Beban akrual/ *Accrued expenses*	1.130.929.718	--	--	--	1.130.929.718
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/ *Short-term employment benefits liability*	207.722.497	--	--	--	207.722.497
Utang bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	2.147.451.415	--	--	--	2.147.451.415
Utang bank jangka panjang *Long-term bank loans*	2.234.865.288	3.609.990.730	--	--	5.844.856.018
Liabilitas sewa/ *Lease Liabilities*	62.253.964	59.272.042	--	--	121.526.006
Utang dana revitalisasi	--	24.625.424	--	--	24.625.424
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities at fair value through profit or loss*	--	245.948.094	--	--	245.948.094
Jumlah/*Total*	**8.872.817.263**	**4.094.994.634**	**--**	**--**	**12.967.811.897**

	2024				
	Akan Jatuh Tempo dalam/ *Will Due In*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/	
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *1 - 5 Year*	Lebih dari 5 Tahun/ *More than 5 Years*	*Maturity Not Determined*	Jumlah/ *Total*
Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Measured at Amortized Cost*					
Utang usaha/ *Trade payable*	2.854.105.023	--	--	--	2.854.105.023
Utang lain-lain/ *Other payable*	744.461.573				744.461.573
Beban akrual/ *Accrued expenses*	926.508.627	--	--	--	926.508.627
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/ *Short-term employment benefits liability*	384.496.828	--	--	--	384.496.828
Utang bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	4.078.608.465	--	--	--	4.078.608.465
Other Current Financial Liabilities					
Utang bank jangka panjang	1.330.005.036	2.869.863.330	--	--	4.199.868.366
Long-term bank loans	66.632.593	92.728.362	--	--	159.360.955
Utang dana revitalisasi/ *Revitalization fund payable*	--	24.625.424	--	--	24.625.424
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities at fair value through profit or loss*	--	257.294.090	--	--	257.294.090
Jumlah/*Total*	**10.384.818.145**	**3.244.511.206**	**--**	**--**	**13.629.329.351**

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Selain itu, Grup memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan. Jumlah liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan dalam satu tahun sejak 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.872.817.264 sedangkan liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan lebih dari satu tahun sejak 31 Desember 2025 sebesar Rp4.094.994.634.

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang kepada bank dengan menggunakan tingkat bunga pasar pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas. Pada saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Grup akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Grup akan menegosiasikan kembali suku bunga tersebut dengan para pemberi pinjaman dan mengurangi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ke pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Risiko Mata Uang

Grup terekspos risiko mata uang asing karena sebagian aset, liabilitas dan transaksi operasional Grup didominasi oleh mata uang khususnya Rupiah yang terutama berasal dari transaksi pinjaman. Jumlah eksposur mata uang asing bersih pada tanggal laporan diungkapkan dalam Catatan 50. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai mata uang selama periode laporan keuangan konsolidasian.

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management (continued)

Liquidity Risk (continued)

In addition, the Group holds liquid financial assets and available to fulfill its liquidity requirement. The Group manages its liquidity risk by monitoring actual cashflow projections and supervises the maturity of its financial liabilities. Total financial liabilities that are expected to be paid within one year from December 31, 2025 amounted to Rp8,872,817,264 while payment for non current financial liabilities from December 31, 2025 is amounted to Rp4,094,994,634.

Interest Rate Risks

The Group exposures to interest rate risk mainly concerning financial liabilities. The Group holds short- term and long-term loans to banks which use market interest rate loans at variable rates expose cash flows risk. Currently, the Group has no certain policy or arrangement to manage its interest rate risk. Group will strictly monitor the market interest rate fluctuation and if the interest rates significantly increased, they will renegotiate the interest rate to the lenders and changing high interest rate loans to the lower interest rate loans. There are no interest rate hedge activities as December 31, 2025 and 2024.

Currency Risk

The Group is exposed to foreign currency risk due to certain assets, liabilities, and operational transactions of the Group are denominated by currencies particularly Rupiah that mainly resulted from loan activities. Total exposure of foreign currency at the reporting date is disclosed in Note 50. There is no currency hedging activities during the period of consolidated of financial statements.

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Manajemen Risiko (lanjutan)

I. Risk Management (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran mata uang asing terhadap Rupiah. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba konsolidasian sebelum beban pajak sebagai berikut:

The following table shows the sensitivity to possible changes in foreign exchange rates against the Rupiah. Assuming all other variables remain constant, the effect on consolidated profit before tax is as follows:

	2025	2024	
Dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan			*Impact to profit before income tax*
Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (1%)	(100.146.447)	(255.175.771)	*Change in exchange rate against Rupiah (1%)*
Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (-1%)	100.146.447	255.175.771	*Change in exchange rate against Rupiah (-1%)*

II. Pengukuran Nilai Wajar

II. Fair Value Measurement

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The fair value of financial assets and liabilities and their carrying amounts are as follows:

	2025		2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan setara kas	3.446.069.869	3.446.069.869	4.068.189.951	4.068.189.951	*Cash and cash equivalents*
Dana yang dibatasi penggunaannya	276.493.626	276.493.626	231.949.237	231.949.237	*Restricted funds deposit*
Piutang usaha	1.448.823.868	1.448.823.868	1.318.371.652	1.318.371.652	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	106.204.766	106.204.766	186.558.857	186.558.857	*Other receivables*
Aset kontrak	3.819.670	3.819.670	--	--	*Contract assets*
Aset tidak lancar					***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain	252.504	252.504	292.886	292.886	*Other receivables*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	19.418.181	19.418.181	19.418.181	19.418.181	*Financial asset at fair value through other comprehensive income*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	20.999.392	20.999.392	9.975.769	9.975.769	*Financial asset at fair value through profit and loss*
Jumlah	**5.322.081.876**	**5.322.081.876**	**5.834.756.533**	**5.834.756.533**	***Total***

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

II. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

II. Fair Value Measurement (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan: (lanjutan)

The fair value of financial assets and liabilities and their carrying amounts are as follows: (continued)

	2025		2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas Jangka Pendek					***Current Liabilities***
Utang bank jangka pendek	2.147.451.415	2.147.451.415	4.078.608.465	4.078.608.465	*Short-term bank loans*
Utang usaha	2.571.216.972	2.571.216.972	2.854.105.023	2.854.105.023	*Trade payables*
Utang lain-lain	673.535.753	673.535.753	744.461.573	744.461.573	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	1.130.929.718	1.130.929.718	926.508.627	926.508.627	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	207.722.497	207.722.497	384.496.828	384.496.828	*Short-term employee benefit liabilities*
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current portion of long-term liabilities:*
Utang bank jangka panjang	2.234.865.288	2.234.865.288	1.330.005.036	1.330.005.036	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	62.253.964	62.253.964	66.632.593	66.632.593	*Lease liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang					***Non-current Liabilities***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Long-term liabilities, net of current portion:*
Utang bank jangka panjang	3.609.990.730	3.609.990.730	2.869.863.330	2.869.863.330	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	59.272.042	59.272.042	92.728.362	92.728.362	*Lease liabilities*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	245.948.094	245.948.094	257.294.090	257.294.090	*Financial liabilities at fair value through profit or loss*
Jumlah	**12.943.186.473**	**12.943.186.473**	**13.604.703.927**	**13.604.703.927**	***Total***

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

The fair value of long-term borrowings is measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan disetor penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Grup dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

The primary objective of the Group capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements will be considered by the Group in their Annual General Shareholder's Meeting.

51. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

II. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Kebijakan Grup adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

III. Manajemen Permodalan

Rasio *Adjusted Leverage* adalah sebagai berikut:

51. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

II. Fair Value Measurement (continued)

Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, Group may issue new shares or raise debt financing.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

III. Capital Management

The Adjusted Leverage Ratio are as follows:

	2025	2024	
Utang bank jangka pendek	2.147.451.415	4.078.608.465	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	5.844.856.018	4.199.868.366	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	121.526.006	159.360.955	*Lease liabilities*
Total utang yang berbunga	8.113.833.439	8.437.837.786	*Total interest bearing*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	13.798.416.329	13.504.793.316	*Total equity attributable to the owners of the Parent Entity*
Rasio utang berbunga terhadap ekuitas	58,80%	62,48%	*Liability interest bearing to equity ratio*

52. INFORMASI SEGMEN

Pembuat keputusan dalam operasional adalah para Direksi. Para Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Grup untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan informasi ini.

52. SEGMENT INFORMATION

The chief operating decision makers are the Directors. The Directors review the Group's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segments based on this information.

	2025						
Segmen Operasi	Manufaktur/ *Manufactured*	Distribusi/ *Distribution*	Retail/ *Retail*	Layanan/ *Services*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	*Operation Segmental*
Penjualan	6.516.401.891	4.329.153.170	3.360.667.166	804.025.570	(336.513.809)	14.673.733.988	*Sales*
Aset	38.917.942.459	2.170.023.140	1.836.681.078	404.307.201	(13.537.717.214)	29.791.236.664	*Asset*
Aset tetap	14.758.768.066	404.678.281	822.450.213	162.933.585	--	16.148.830.145	*Fixed Assets*
Penyusutan dan amortisasi	616.847.697	22.091.278	147.156.426	98.900.277	(440.000)	884.555.678	*Depreciation and amortization*
Liabilitas	11.930.940.531	1.464.832.792	2.731.189.854	576.115.253	(985.861.983)	15.717.216.447	*Liabilities*
Utang bank	6.760.956.778	--	1.231.350.655	--	--	7.992.307.433	*Bank loans*
Laba rugi komprehensif	(96.457.737)	619.464	(355.590.348)	--	139.845.040	(311.583.581)	*Comprehensive income*

	2024						
Segmen Operasi	Manufaktur/ *Manufactured*	Distribusi/ *Distribution*	Retail/ *Retail*	Layanan/ *Services*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	*Operation Segmental*
Penjualan	8.228.690.294	5.002.551.586	3.847.392.023	802.240.591	(2.787.770.146)	15.093.104.348	*Sales*
Aset	41.960.618.854	2.343.038.280	2.458.534.081	447.180.635	(17.016.647.611)	30.192.724.239	*Asset*
Aset tetap	15.220.870.154	432.747.700	781.471.871	131.376.202	198.805.740	16.765.271.667	*Fixed Assets*
Penyusutan dan amortisasi	757.697.141	19.281.202	27.544.659	6.416.669	10.183.085	821.122.756	*Depreciation and amortization*
Liabilitas	13.275.158.585	2.498.785.426	2.951.423.203	564.734.815	(3.100.123.099)	16.189.978.930	*Liabilities*
Utang bank	6.996.685.303	48.663.108	1.233.128.420	--	--	8.278.476.831	*Bank loans*
Laba rugi komprehensif	(983.195.619)	(167.782.848)	(552.915.966)	(38.749.914)	971.178.813	(771.465.534)	*Comprehensive income*

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perusahaan melakukan kerja sama dalam memasarkan produk-produknya, baik dengan mitra distributor di dalam negeri, maupun dengan mitra internasional dalam hal registrasi, pemasaran, dan penjualan produk untuk memenuhi pasar ekspor. Perusahaan juga melakukan kerja sama penjualan vaksin dan alat kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan digunakan untuk Program Imunisasi, penanganan penyebaran wabah COVID-19, dan juga untuk Program vaksinasi COVID-19 serta Program Vaksin Gotong Royong yang menggunakan vaksin dari Sinopharm. Selain itu juga, Perusahaan melakukan kerja sama penjualan, promosi dan distribusi produk-produk lain dengan metode *Partnership*. Selain itu juga pada 30 September 2021, Perusahaan ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan kegiatan promosi, penjualan dan pemasaran produk vaksin untuk mencegah infeksi virus HPV (*human papillomavirus*).

b. Perusahaan masih mengadakan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain dengan badan penelitian dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Perusahaan melanjutkan kerja sama vaksin nOPV2 dan nOPV 1&3 untuk tahapan pengembangan selanjutnya dengan beberapa institusi penelitian luar negeri. Perusahaan masih mengadakan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di dalam negeri secara konsorsium.

c. Perusahaan bekerja sama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT Anugerah Pharmindo Lestari, PT Merapi Utama Pharma, PT Sagi Capri, PT Enseval Putera Megatrading, PT Perusahaan Dagang Tempo Disingkat PT Tempo, PT Dos Ni Roha serta melibatkan juga anggota holding BUMN Farmasi yaitu PT Indofarma Global Medika dan PT Kimia Farma Trading & Distribution, sehubungan dengan pelaksanaan distribusi Vaksin COVID-19.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. The Company cooperates in marketing its products, both with domestic distributor partners, as well as with international partners in terms of registration, marketing, and sales of products to meet the export market. The Company also cooperates in the sale of vaccines and medical devices with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia which will be used for the Immunization Program, handling the spread of the COVID-19 outbreak, as well as the COVID-19 Vaccination Program and the Mutual Cooperation Vaccination Program utilizing vaccines from Sinopharm. In addition, the Company cooperates in sales, promotion and distribution of other products using the Partnership method. Then on September 30, 2021, the Company was appointed by the principal to conduct promotional, sales, and marketing activities for vaccine products intended to prevent HPV (human papillomavirus) infection.

b. The Company continues to engage in research and development collaborations, among others, with research institutions and educational institutions both domestically and internationally. The Company continues the cooperation of nOPV2 and nOPV 1&3 vaccines for the next stage of development with several overseas research institutions. The Company is still holding research and development cooperation with research institutes and universities in the country on a consortium basis.

c. The Company cooperates with pharmaceutical wholesalers (Pedagang Besar Farmasi/PBF), namely PT Anugerah Pharmindo Lestari, PT Merapi Utama Pharma, PT Sagi Capri, PT Enseval Putera Megatrading, PT Perusahaan Dagang Tempo (PT Tempo), PT Dos Ni Roha, and also involves members of the State-Owned Pharmaceutical Holding, namely PT Indofarma Global Medika and PT Kimia Farma Trading & Distribution, in connection with the distribution of COVID-19 vaccines.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

d. Perusahaan menjajaki rencana kerja sama untuk penelitian dan pengembangan vaksin di Indonesia dengan institusi kesehatan di dalam dan luar negeri. Perusahaan mengadakan kerja sama dengan institusi penelitian dan universitas yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin BUMN. Selain itu juga, Perusahaan menjadi anggota konsorsium polio yang fokus pada penelitian mutasi pada vaksin polio. Perusahaan juga melakukan kerja sama dengan BPPT/BRIN untuk pengembangan skala pilot produk kit diferensiasi kondrosit dan osteosit.

e. Perusahaan menjajaki komersialisasi dari produk Gargle Saliva Test Kit (BioSaliva) yang dikembangkan bersama dengan PT Riset Nusantara Genetika dan komersialisasi dari produk Alat Pendingin Aktif Portabel (Portabel) yang dikembangkan bersama dengan Universitas Islam Indonesia serta Perusahaan juga masih mengadakan kerja sama untuk pembiayaan modal kerja, kerja sama layanan vaksinasi dan pemeriksaan laboratorium serta pelayanan kesehatan karyawan dan keluarganya.

f. INAF melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Quantum Laboratoris Internasional tanggal 26 Mei 2023 untuk pelaksanaan kegiatan Toll Manufacturing di INAF dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun atau sampai dengan 26 Mei 2027.

g. INAF melakukan perjanjian kerja sama distribusi dengan PT Bintang Kencana Artha tanggal 17 Mei 2023 untuk pelaksanaan kegiatan distribusi produk INAF dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun atau sampai dengan 16 April 2027.

h. INAF melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Hikmat Hanifi tanggal 19 September 2022 untuk pelaksanaan kegiatan jual beli produk dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun atau sampai dengan 18 September 2026.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

d. The Company is exploring cooperation plans for vaccine research and development in Indonesia with health institutions at home and abroad. The Company collaborates with research institutions and universities, namely the Center for Research and Development of Health Resources and Services of the Health Research and Development Agency and the Faculty of Medicine, University of Indonesia, in the context of research and development of BUMN Vaccines. In addition, the Company is a member of a polio consortium that focuses on mutation research related to polio vaccines. The Company also collaborates with BPPT/BRIN for the development of pilot-scale chondrocyte and osteocyte differentiation kit products.

e. The Company is exploring the commercialization of the Gargle Saliva Test Kit (BioSaliva) product which was jointly developed with PT Riset Nusantara Genetika and the commercialization of the Portable Active Cooling Device (Portable) product which was developed together with the Islamic University of Indonesia and the Company is also still in cooperation for working capital financing, cooperation in vaccination services and laboratory examinations as well as health services for employees and their families.

f. INAF has a agreement with PT Quantum Laboratoris Internasional on May 26, 2023 for the implementation of Toll Manufacturing activities at INAF with an agreement period of 4 years or until May 26, 2027.

g. INAF entered into a distribution cooperation agreement with PT Bintang Kencana Artha on May 17, 2023 for the distribution of INAF products, with an agreement term of 4 years or until April 16, 2027

h. INAF entered into a cooperation agreement with PT Hikmat Hanifi on September 19, 2022 for the implementation of product trading activities, with an agreement term of 4 years or until September 18, 2026.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

i. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES /4824/2021 tanggal 2 Juli 2021, Tentang Penugasan PT Indofarma Tbk untuk dan atas nama Pemerintah melaksanakan pengadaan, transfer teknologi, dan produksi alat *robotic telesurgery* di Indonesia dalam rangka Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran.

Penugasan kepada INAF untuk:

- Melaksanakan pengadaan alat *robotic surgery* untuk pembangunan Pusat Bedah Robotik jarak jauh di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- Melaksanakan distribusi alat *Robotic telesurgery* sampai di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- Melaksanakan transfer teknologi untuk memproduksi alat *robotic telesurgery* di dalam negeri berdasarkan pilot proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran.

j. Pada tanggal 1 Mei 2023, INAF mengadakan perjanjian distribusi dan penjualan Produk OTC (*Over the Counter*) dan Produk Obat Generik Berlogo (OGB) reguler dengan PT Mensa Bina Sukses, perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2026.

k. Berdasarkan surat No: B.94-vcd/09/2022 tanggal 2 September 2022, Grup memperoleh fasilitas *Supply Chain Financing Account Receivables* (SCF-AR) *Partnership* kepada *supplier* yang bersifat Non Plafon (*cash loan*), dengan tujuan membiayai tagihan *supplier* sesuai dengan kontrak kerja. Jangka waktu fasilitas adalah 1 tahun sampai dengan 2 September 2023. Sampai dengan tanggal rilisnya laporan keuangan konsolidasian, tidak ada perpanjangan atas surat tersebut.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

i. Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4824/2021 on July 2, 2021 concerning the Assignment of PT Indofarma Tbk for and on behalf of the Government to carry out the procurement, transfer of technology, and production of telesurgery robotic equipment in Indonesia in the context of cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Iran.

Assignment to INAF to:

- *To procure robotic surgery equipment for the establishment of remote Robotic Surgery Centers at RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung and RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.*
- *Carry out the distribution of Robotic telesurgery tools to Dr. Hospital. Hasan Sadikin Bandung and RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.*
- *Carry out technology transfer to produce telesurgery robotic equipment domestically based on a pilot project of cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Iran.*

j. On May 1, 2023, INAF entered into a regular distribution and sales agreement for OTC (Over the Counter) Products and regular branded generic pharmaceutical products (OGB) with PT Mensa Bina Sukses, this agreement is valid for 3 years from May 1, 2023, to April 30, 2026.

k. Based on letter No: B.94-vcd/09/2022 dated September 2, 2022, the Group obtained a Supply Chain Financing Account Receivables (SCF-AR) Partnership facility for suppliers on a non-plafond (cash loan) basis, intended to finance suppliers' receivables in accordance with the relevant work contracts. The facility had a term of 1 (one) year until September 2, 2023. As of the issuance date of the consolidated financial statements, no extension of the facility has been made.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

l. Pada tanggal 7 Oktober 2021 IGM melakukan Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang kerja sama operasional pelayanan Hemodialisa dengan perjanjian No. 445/040/4/RSUD-SF/PKS/X/2021 dan 618/PKS/ DIR-1/IV/2022.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 60 bulan atau apabila sudah tercapainya tindakan sebanyak 57.600 tindakan dan terhitung sejak mulai beroperasinya alat (*Grand Launching)* yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dimana masa waktu berlaku perjanjian dapat diperpanjang atau diperpendek.

Ruang lingkup:

1. PT Indofarma Global Medika menyediakan perangkat Mesin Hemodialisa f*ullset* dan *water treatment* serta Renovasi ruang Hemodialisa yang memenuhi standar serta penyediaan *Liaison Officer* untuk membantu Pelayanan Hemodialisa, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peningkatan jumlah tindakan (pasien).

2. PT Indofarma Global Medika menyediakan bahan medis habis pakai *(Dializer, AV Vistula, Blood Line, Bicarbonate, Concentrad Acid).*

m. Perjanjian Kerja Sama Operasional No. 445/010/9.9/RSUD-SF/PKS/I/2022 dan 128/PKS/DIR1/I/2022 dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang kerja sama operasional penyediaan alat Laboratorium beserta Reagennya dan Sistem Informasi Laboratorium.

Jangka waktu perjanjian selama 60 bulan terhitung sejak operasional alat yang akan digunakan ke dalam Berita Acara dimulainya operasional alat (*Grand Launching).*

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

l. On October 7, 2021, IGM entered into an Operational Cooperation Agreement with Siti Fatimah Hospital of South Sumatra Province regarding operational cooperation for Hemodialysis services with agreement No. 445/040/4/RSUD-SF/PKS/X/2021 and 618/PKS/DIR-1/IV /2022.

The term of this agreement shall be valid for 60 months or until a total of 57,600 procedures has been achieved, commencing from the operational start date of the equipment (Grand Launching), which shall be stipulated in a Minutes of Meeting forming an integral and inseparable part of this agreement, whereby the term of the agreement may be extended or shortened.

Scope:

1. PT Indofarma Global Medika shall provide a full set of hemodialysis machines and water treatment equipment, as well as renovation of the Hemodialysis room in compliance with applicable standards, including the provision of a Liaison Officer to support Hemodialysis services, to be implemented gradually in line with the increase in the number of procedures (patients).
2. PT Indofarma Global Medika provides consumables (Dializer, AV Vistula, Blood Line, Bicarbonate, Concentrad Acid).

m. Operational Cooperation Agreement No. 445/010/9.9/RSUD-SF/PKS/I/2022 and No. 128/PKS/DIR1/I/2022 with RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan regarding operational cooperation for the provision of laboratory equipment, including reagents and a Laboratory Information System.

The term of the agreement is 60 months starting from the operation of the equipment to be used in the Minutes of the commencement of the operation of the equipment (Grand Launching).

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Ruang lingkup:

1. PT Indofarma Global Medika menyediakan alat-alat laboratorium beserta reagennya yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Penyediaan Sistem Informasi Laboratorium beserta jaringan dan perangkatnya.
3. Renovasi terbatas untuk Ruangan Pengambilan Sampel Laboratorium.

n. Perjanjian Kerja sama Operasional No. 445/029/4.2/RSUD-F/PKS/IV/2022 dan 618/PKS /DIR-1/IV/2022 dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang kerja sama operasional Jasa Pelayanan *Laundry.*

Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 7 tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani para pihak yaitu 8 April 2022 sampai dengan 7 April 2028.

Ruang lingkup:

1. PT Indofarma Global Medika akan memberikan pelayanan *laundry* menggunakan alat/mesin *laundry* milik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan PT Indofarma Global Medika termasuk perawatan dan perbaikan alat/mesin *laundry* selama jangka waktu perjanjian kerja sama.
2. PT Indofarma Global Medika akan memberikan pelayanan *laundry* untuk seluruh linen menggunakan alat/mesin *laundry* milik PT Indofarma Global Medika.

o. PT Phapros Tbk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memproduksi obat PT Phapros Tbk (*toll-out)* dan obat Pihak Ketiga *(toll-in).* Biaya terkait aktivitas *toll-out* dan imbalan jasa terkait aktivitas *toll-in,* termasuk produk yang diproduksi diatur secara spesifik dalam perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki jangka waktu bervariasi antara 1 sampai dengan 2 tahun serta memiliki klausul pembaharuan secara otomatis pada sebagian besar perjanjian.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Scope:

1. *PT Indofarma Global Medika provides laboratory equipment and reagents that have a license from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.*
2. *Provision of Laboratory Information Systems and their networks and devices.*
3. *Limited renovation of Laboratory Sampling Room.*

n. Operational Cooperation Agreement No. 445/029/4.2/RSUD-F/PKS/IV/2022 and 618/PKS /DIR-1/IV/2022 with Siti Fatimah Hospital in South Sumatra Province regarding operational collaboration for Laundry Services.

This agreement is valid for a period of 7 years since this Agreement was signed by the Parties, namely April 8, 2022 to April 7, 2028.

Scope:

1. *PT Indofarma Global Medika will provide laundry services using laundry equipment/machines belonging to the Siti Fatimah Regional Hospital of South Sumatra Province and PT Indofarma Global Medika including maintenance and repair of laundry equipment/machines during the period of the cooperation agreement.*
2. *PT Indofarma Global Medika will provide laundry services for all linen using PT Indofarma Global Medika's laundry equipment/machine.*

o. PT Phapros Tbk entered into agreements with third parties for the manufacturing of PT Phapros Tbk's pharmaceutical products (toll-out) and third-party pharmaceutical products (toll-in). Costs related to toll-out activities and service fees related to toll-in activities, including the products manufactured, are specifically stipulated in the respective agreements. These agreements have terms ranging from 1 to 2 years, and most of them contain automatic renewal clauses.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Berikut ini pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Phapros Tbk:

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The following are third parties that have cooperation agreements with PT Phapros Tbk:

Pihak Ketiga/*Third Parties*	**Jenis Perjanjian/*Type of Agreements***
PT Ethica Industri Farmasi	*Toll-in, Toll-out*
PT Meprofam	*Toll-in, Toll-out*
PT Dipa Pharmalab Intersains	*Toll-in*
PT Erlimpex	*Toll-in*
PT Guardian Pharmatama	*Toll-in*
PT Hexpharm Jaya Laboratories	*Toll-in*
PT Ikapharmindo	*Toll-in*
PT Interbat	*Toll-in*
PT Mahakam Beta Farma	*Toll-in*
PT Metiska Farma	*Toll-in, Toll-out*
PT Nufarindo	*Toll-in*
PT Oryza Farma Indonesia	*Toll-in*
PT Otto Pharmaceutical	*Toll-in*
PT Pertiwi Agung	*Toll-in*
PT Soho Global Health	*Toll-in*
PT Bernofarm	*Toll-in*
PT Coronet Crown Pharmaceutical Industries	*Toll-out*
PT Dankos Farma	*Toll out.*
PT Darya Varia	*Toll-in, toll out.*
PT Promedraharjo	*Toll-out*
PT Infion	*Toll-in*
PT Sejahtera Lestari Farma	*Toll-out*

Pihak Berelasi/Related *Parties*	**Jenis Perjanjian/*Type of Agreements***
PT Kimia Farma Tbk	*Toll-in, Toll-out*
PT Indofarma Tbk	*Toll-in*
PT Lucas Djaja	*Toll-in, Toll-out*
PT Marin Liza Farmasi	*Toll-out*

p. PT Phapros Tbk melakukan perjanjian kerja sama distribusi dengan PT Rajawali Nusindo (RNI), pihak berelasi, di mana PEHA menunjuk RNI pada awalnya sebagai distributor utama.

Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan Adendum XIII Perjanjian Distribusi No. 201/S.Pj/LE/XII/23 dan No. 1304/S.Pj/ NUS.01.00/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang memperpanjang masa berlaku kerja sama untuk produk-produk e-katalog hingga 31 Desember 2024.

p. PT Phapros Tbk entered into a distribution agreement with PT Rajawali Nusindo (RNI), related party (Distributor), of which the PEHA initially appointed RNI as the sole distributor.

This agreement was extended several times, the latest was extended with Addendum XIII Distribution Agreement No. 201/S.Pj/LE/XII/23 and No. 1304/S.Pj/NUS.01.00/XII/2023 dated December 18, 2023, which extended the term of the cooperation for e-catalog products until December 31, 2024.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

q. Pada tanggal 14 Mei 2019, PT Phapros Tbk dan PT Kimia Farma Trading & Distribusi ("KFTD") telah mengadakan perjanjian distribusi dengan Perjanjian No. 018/S.Pj/LE/V/19 dengan jangka waktu dimulai per 1 Juni 2019 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan, dan terakhir tercantum pada Perjanjian Distribusi No. : 170/S.Pj/LE/IX/23 dan No. : 039/00/PERJ KFTD/DIR/09/2023 tertanggal 29 September 2023 untuk jangka waktu 2 tahun sampai dengan 31 Desember 2025.

r. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT Phapros Tbk telah mengadakan perjanjian distribusi dengan PT Anugrah Argon Medica dengan perjanjian No. 104/S.Pj/LE/VIII/22 dengan jangka waktu dimulai per 1 Agustus 2022 yang telah dilakukan perubahan.

Perjanjian Distribusi terakhir diperpanjang dengan Adendum Perjanjian Distribusi No. 200/S.Pj/LE/XII/23 tertanggal 5 Desember 2023 untuk jangka waktu sampai selama 2 tahun sampai dengan 31 Desember 2025.

s. Pada tanggal 15 Desember 2016, PT Phapros Tbk ("PEHA") mengadakan kerja sama pemegang izin edar dengan PT B. Braun Medical Indonesia berdasarkan Perjanjian No. 29/PTBB/LGU/XI/2016, anak perusahaan dari B. Braun Melsungen A.G (bersama-sama disebut B. Braun).

PEHA mendapatkan hak eksklusif sebagai pemegang No. Izin Edar dengan mendaftarkan produk-produk farmasi B. Braun atas nama PEHA. Atas kerja sama ini, PEHA mendapatkan kompensasi sebesar 5% dari harga *Cost Insurance Freight (CIF)* produk, pengadaan, pendistribusian dan pemasaran dilakukan oleh B. Braun.

Perubahan terakhir tercantum pada Akta Adendum Perubahan V Perjanjian Kerja Sama Pemegang Izin Edar No. 4 tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

q. On May 14, 2019, PT Phapros Tbk and PT Kimia Farma Trading & Distribution ("KFTD") entered into a distribution agreement under Agreement No. 018/S.Pj/LE/V/19 with a term commencing on June 1, 2019. The agreement has been amended several times, most recently under Distribution Agreement No. 170/S Pj/LE/IX/23 and No. 039/00/PERJ KFTD/DIR/09/2023 dated September 29, 2023, extending the agreement term for 2 years until December 31, 2025.

r. On August 1, 2022 PT Phapros Tbk has entered into a distribution agreement with PT Anugrah Argon Medica under agreement No. 104/S.Pj/LE/VIII/22 with a period starting from August 1, 2022 which have been amended.

The latest Distribution Agreement was extended with Addendum Distribution Agreement No. 200/S.Pj/LE/XII/23 dated December 5, 2023 for a period of 2 years until December 31, 2025.

s. On December 15, 2016, PT Phapros Tbk ("PEHA") entered into a license-holder cooperation agreement with PT B. Braun Medical Indonesia under Agreement No. 29/PTBB/LGU/XI/2016, a subsidiary of B. Braun Melsungen AG (collectively referred to as B. Braun).

PT Phapros Tbk (PEHA) obtained the exclusive right as the Marketing Authorization Holder by registering B. Braun pharmaceutical products under PEHA's name. In connection with this cooperation, PEHA receives compensation amounting to 5% of the Cost, Insurance and Freight (CIF) price of the products, while procurement, distribution, and marketing activities are carried out by B. Braun.

The latest amendment is stated in the Deed of Addendum to Amendment V of the Cooperation Agreement for Distribution License Holders No. 4 dated January 6, 2025 made before Miki Tanumiharja, S.H., Notary in South Jakarta for a period of up to December 31, 2025.

53. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

t. Pada tanggal 12 Januari 2015, PT Phapros Tbk mengadakan kerja sama pemegang izin edar dengan PT Usaha Sarana Medika (Usamed) berdasarkan Perjanjian No.001/S.Pj/LE/I/15 yang telah dilakukan perubahan, dan terakhir diubah dan diperpanjang dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Pemegang Izin Edar No. 1 tanggal 3 April 2024 yang dibuat di hadapan Rinto Anggoro, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan untuk jangka waktu sampai dengan 3 Januari 2027 dimana PT Phapros Tbk mendapatkan *fee* sebesar 2,5% sebagai kompensasi penunjukan selaku Registrator.

53. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

t. On January 12, 2015 PT Phapros Tbk entered into a distribution license holder cooperation with PT Usaha Sarana Medika (Usamed) based on Agreement No.001/S.Pj/LE/I/15 which has been amended, and last amended and extended by Deed of Cooperation Agreement for Edar License Holders No. 1 dated April 3, 2024 made before Rinto Anggoro, S.H., M.Kn. Notary in South Jakarta for a period of up to January 3, 2027 where PT Phapros Tbk received a fee of 2.5% as compensation for the appointment as Registrator.

54. KOMITMEN DAN KONTINGENSI

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

PT Indofarma Tbk (INAF)

PT Indofarma Tbk (INAF)

1. Hasil Pemeriksaan Pajak

1. Tax Audit Result

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. S-187/KPP.1903/2026 dan No. S-188/KPP.1903/2026 masing-masing tertanggal 26 Februari 2026 atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tahun buku 2022, INAF memiliki total pokok kurang bayar dan sanksi administratif sebesar Rp128.914.626 yang jatuh tempo pada 25 Maret 2026.

Based on the Underpayment Tax Assessment Letters (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar or "SKPKB") No. S-187/KPP.1903/2026 and No. S-188/KPP.1903/2026, both dated February 26, 2026, relating to income tax and value added tax for the fiscal year 2022, INAF has total outstanding tax underpayments and administrative sanctions amounting to Rp128,914,626, which were due on March 25, 2026.

Selain itu, berdasarkan Surat No. S-1885/KPP.1903/2025 tertanggal 5 November 2025 tentang Panggilan Sehubungan dengan Pemeriksaan Perpajakan untuk Masa Januari 2022 hingga Desember 2022 serta Surat No. S-201/KPP.1903/2026 tertanggal 4 Maret 2026 tentang Panggilan Sehubungan dengan Pemeriksaan Perpajakan untuk Masa Januari 2023 hingga Desember 2023, manajemen menilai terdapat kemungkinan timbulnya liabilitas pajak tambahan dan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan perpajakan tersebut. Oleh karena itu, per 31 Desember 2025, INAF membentuk provisi atas denda pajak sebesar Rp31.282.932.

In addition, based on Letter No. S-1885/KPP.1903/2025 dated November 5, 2025 regarding the Summons in Relation to Tax Audit for the period from January 2022 to December 2022, as well as Letter No. S-201/KPP.1903/2026 dated March 4, 2026 regarding the Summons in Relation to Tax Audit for the period from January 2023 to December 2023, management assessed that there is a possibility of additional tax liabilities and administrative sanctions arising from the results of such tax audits. Accordingly, as of December 31, 2025, INAF recognized a provision for tax penalties amounting to Rp31,282,932.

54. KOMITMEN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

1. Kasus Kerja Sama dengan PT Dinamika Sain Solusindo

Bahwa terdapat tenggang waktu mengajukan kasasi di mana permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, tidak ada permohonan kasasi diterima dan diterbitkan atas putusan tersebut. Maka putusan banding No. 765/Pdt/2017 PT DKI berkekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengakui pendapatan yang masih harus diterima dari DSS yang diakui pada pos pendapatan lain-lain.

Berdasarkan surat dari Kuasa Hukum INUKI, yaitu Elza Syarief *Law Office,* melalui Surat No. 59/ESL/II/2022 tanggal 4 Februari 2022, upaya hukum yang akan dilakukan adalah permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa Hukum mengalami kendala terkait syarat sebagai Pemohon Eksekusi, yaitu adanya ketidaksesuaian tanggal pada *Relaas* Pemberitahuan dengan tanggal Putusan.

Untuk pelaksanaan eksekusi tersebut, INUKI perlu melakukan pembayaran atas jasa Kuasa Hukum serta biaya eksekusi yang timbul dari Kantor Pengadilan Negeri.

Pada tahun 2022, INUKI mengalami permasalahan dengan BRIN sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di lingkungan Kawasan Nuklir Serpong. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap bisnis INUKI dan menyebabkan ketidakmampuan INUKI dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

1. Case of Corporation with PT Dinamika Sain Solusindo

Whereas there is a grace period for filing cassation in which the request for cassation must have been submitted within 14 days after the decision or court order in question is notified to the applicant (article 46 paragraph (1) of Law No. 14/1985 on the Supreme Court), if not fulfilled, then the request for cassation cannot be accepted. Until this report is published, no cassation request has been received and issued on the decision. So the decision on appeal No. 765/Pdt/2017/PT.DKI has permanent legal force. Based on this decision, the Company has recognized the accrued income from DSS which was recognized in other income accounts.

Based on the letter from INUKI's legal counsel, Elza Syarief Law Office, through Letter No. 59/ESL/II/2022 dated February 4, 2022, the legal action to be taken is the filing of an execution request against the Decision of the Jakarta High Court to the South Jakarta District Court. The legal counsel encountered obstacles regarding the requirements as the Applicant for Execution.

In relation to the execution process, INUKI is required to settle the payment for legal counsel services and the execution costs charged by the District Court.

In 2022, INUKI faced issues with BRIN, resulting in the inability to conduct business activities within the Serpong Nuclear Area. This situation significantly impacted INUKI's business operations and resulted in the INUKI's inability to meet its payment obligations.

54. KOMITMEN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

54. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (continued)

2. Audit Investigasi BPKP

2. *BPKP Investigation Audit*

Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta I, No. S-1473/pw.09.5/2008 Tanggal 20 Februari 2008 perihal audit investigasi atas dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada INUKI tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan audit investigasi terhadap PT Batan Teknologi (Persero) dengan hasil laporan No. LAP-10349/PW.09/5/2008 tanggal 17 September 2008. Berdasarkan hasil audit investigasi tersebut diketahui adanya beberapa penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, dalam hal ini PT Batan Teknologi (Persero) sebesar Rp2.005.165 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the letter of the Head of the BPKP Representative of DKI Jakarta I, No. S-1473/pw.09.5/2008 dated February 20, 2008 regarding the investigative audit into alleged irregularities indicative of criminal acts of corruption at INUKI from 2002 to 2007, an investigative audit has been conducted on PT Batan Teknologi (Persero) with the report No. LAP-10349/PW.09/5/2008 dated September 17, 2008. Based on the results of the investigative audit, it was found that there were several irregularities that caused losses to the State Finance in this case PT Batan Teknologi (Persero) amounting to Rp2,005,165 with the following details:

Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan *Upgrading Access Road* dan penimbunan *Landing Area-Pad 3-Pad 8* dan Pad 4, Sembakung *Block dan Access Road* dan Weii *location* Tiram I Block Bengara Kalimantan Timur milik PT Medco E & P Indonesia:	Rp1.349.329	*Irregularities in the implementation of Upgrading Access Road work and landfilling of Landing Area- Pad 3-Pad 8 and Pad 4, Sembakung Block and Access Road and Weii location Tiram I Block Bengara, East Kalimantan owned by PT Medco E & P Indonesia:*
Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang diperoleh dari PT Riffi Brothers & Sons:	Rp464.973	*Irregularities in the execution of jobs obtained from PT Riffi Brothers & Sons:*
Penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan PT Batan Teknologi (Persero) tahun 2002 sampai dengan 2006:	Rp190.863	*Irregularities in the preparation of the financial statements of PT Batan Teknologi (Persero) for the years 2002 to 2006:*
Jumlah	**Rp2.005.165**	***Total***

Hingga tanggal laporan ini diterbitkan, kasus ini masih belum terselesaikan.

As of the date of this report, this case has not yet been resolved.

3. Kasus penggelapan dalam jabatan

3. *Embezzlement in office case*

Kasus penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Sdr. M. Rahmat dan Sdr. Alex Aziz atas penerimaan piutang dari RS Hasan Sadikin sebanyak 8 tagihan senilai Rp548.159. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan bukti lapor No. TBL/2124/VI/2010/PMJ/DitreskrimUM tanggal 23 Juni 2010. Hingga tanggal laporan ini diterbitkan, kasus ini masih belum terselesaikan.

The case of embezzlement in office was carried out by Mr. M. Rahmat and Mr. Alex Aziz for receiving receivables from Hasan Sadikin Hospital as much as 8 invoices worth Rp548,159. This case has been reported to the Polda Metro Jaya Police with report No. TBL/2124/VI/2010/PMJ/ DitreskrimUM dated June 23, 2010. As of the date of this report, this case has not yet been resolved.

54. KOMITMEN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (lanjutan)

4. Kerja sama dengan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - BATAN

Pada tahun 2017, INUKI mengadakan kerja sama dengan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif – Batan dalam hal berikut:

- Pengelolaan limbah radioaktif dan bahan nuklir hasil *downblend;*
- Pemanfaatan kanal bawah tanah untuk pemindahan target pascaradiasi;
- Bantuan teknis dalam hal pengelolaan awal dan sementara limbah radioaktif dan bahan nuklir hasil *downblend*; dan
- Bantuan dalam rangka "*Re-export Raw Fission Waste (RFW)"*.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perusahaan

a. Pada 28 Januari 2026, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan yang tertuang dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 28 Januari 2026. Akta tersebut dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH-01.03-0033064 tanggal 5 Februari 2026. Berdasarkan akta tersebut telah disetujui pengalihan saham seri B PT DAM sebesar 174.812 lembar saham perusahaan diubah menjadi saham seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan BP BUMN pada perusahaan menjadi 1%. Sehingga struktur saham milik perusahaan berubah menjadi saham seri A Dwiwarna 174.813 lembar saham dan saham seri B 17.306.466.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (*continued*)

4. Cooperation with Radioactive Waste Technology Center – BATAN

In 2017, INUKI entered into a collaboration with the Radioactive Waste Technology Center - Batan in the following matters:

- *Management of radioactive waste and downblend nuclear materials;*
- *Utilization of underground canals for post-radiation target removal;*
- *Technical assistance in the initial and temporary management of radioactive waste and downblended nuclear materials; and*
- *Assistance in the framework of "Re-export Raw Fission Waste (RFW)".*

55. EVENT AFTER REPORTING DATE

Perusahaan

a. On January 28, 2026, the Company's Articles of Association were amended as stipulated in Notarial Deed No. 48 dated January 28, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H.. The deed pertains to amendments to the Company's Articles of Association, which were received and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH-01.03-0033064 dated February 5, 2026. Based on the deed, the transfer of 174,812 Series B shares of PT DAM was approved to be converted into Series A Dwiwarna shares, resulting in the Ministry of State-Owned Enterprises holding 1% ownership in the Company. Accordingly, the Company's shareholding structure changed to 174,813 Series A Dwiwarna shares and 17,306,466 Series B shares.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b. Pada 2 Maret 2026, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan yang tertuang dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Maret 2026. Akta tersebut dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH-01.09-0163432 tanggal 27 Maret 2026. Berdasarkan akta tersebut telah disetujui perubahan struktur direksi perusahaan menjadi:

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

Perusahaan (continued)

b. On March 2, 2026, the Company's Articles of Association were amended as set forth in Notarial Deed No. 2 dated March 2, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., The deed relates to amendments to the Company's Articles of Association, which were received and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH-01.09-0163432 dated March 27, 2026. Based on the deed, changes to the composition of the Company's Board of Directors were approved as follows:

	2026	2025	
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Jeffri Susanto	I.G.N. Suharta Wijaya	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Operasi	Iin Susanti	-	*Director of Operation*
Direktur Human Capital	Dwiana Kusuma Wardhani	Iin Susanti	*Director of Human Capital*
Direktur Sales	Fitri Puspadewi	Kamelia Faisal	*Director of Sales*
Direktur Produksi dan Supply Chain	--	Sri Harsi Teteki	*Director of Production and Supply Chain*

c. Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat seiring dengan terjadinya aksi militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Kondisi ini telah meningkatkan ketidakpastian geopolitik serta volatilitas pada pasar keuangan dan energi global.

Perusahaan dan entitas anak menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi memengaruhi operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan melalui beberapa faktor, antara lain volatilitas harga komoditas dan energi global, gangguan pada rantai pasokan dan logistik, ketidakpastian makroekonomi yang berdampak pada permintaan pelanggan, serta fluktuasi pada pasar valuta asing dan pasar keuangan.

c. Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East have escalated following military actions in the region at the end of February 2026. This situation has led to increased geopolitical uncertainty and heightened volatility in global financial and energy markets.

The Company and its Subsidiaries assesses that these developments may have potential implications on its operations, financial position, and financial performance through several factors, including volatility in global commodity and energy prices, disruptions in supply chains and logistics, broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand, as well as fluctuations in foreign exchange and financial markets.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak saat ini tidak memiliki eksposur operasi langsung yang signifikan pada negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Namun demikian, dampak ekonomi yang lebih luas dari kondisi geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi kinerja Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi laporan keuangan ini, Perusahaan dan entitas anak belum dapat mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul dari potensi eskalasi lebih lanjut atas konflik tersebut.

PT Kimia Farma Tbk dan Entitas Anak (KAEF)

a. Pada tanggal 10 Maret 2026 PT Kimia Farma Apotek menerima surat pemberitahuan penawaran pinjaman pemegang saham (PPS) dan penyampaian lembar ketentuan indikatif dari PT Danantara Asset Management (DAM) yang disampaikan melalui PT Bio Farma (Persero). Limit pinjaman sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari dua fasilitas sebagai berikut:

   - Fasilitas kredit modal kerja bergulir (*revolving facility*) dengan jumlah maksimum komitmen sebesar Rp340.000.000.000 (nilai penuh), yang akan diteruspinjamkan oleh PTBF kepada KFA melalui KFHO (“Fasilitas PPS-1”).
   - Fasilitas pinjaman berjangka *(bullet loan facility)* dengan jumlah maksimum komitmen sebesar Rp160.000.000.000 (nilai penuh) yang akan diteruspinjamkan oleh PTBF kepada KFA melalui KFHO (“Fasilitas PPS-2”).

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

Perusahaan (continued)

The Company and its Subsidiaries does not currently have significant direct operational exposure in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic impact arising from the geopolitical situation may indirectly affect the Group’s operations and financial performance.

As at the date of authorization of these financial statements, the Companys and its Subsidiaries is unable to reliably estimate the financial impact that may arise from any further escalation of the conflict.

PT Kimia Farma Tbk and Its Subsidiaries (KAEF)

a. On March 10, 2026, PT Kimia Farma Apotek received a notification letter regarding a shareholder loan offer (PPS) and an indicative terms sheet from PT Danantara Asset Management (DAM) submitted through PT Bio Farma (Persero). The loan limit is Rp500,000,000 consisting of two facilities as follows:

   - *Revolving working capital credit facility with a maximum commitment amount of Rp340,000,000,000 (full amount), which will be continuously lent by PTBF to KFA through KFHO (“PPS-1 Facility”).*
   - *Bullet loan facility with a maximum commitment amount of Rp160,000,000,000 (full amount) which will be continued to be lent by PTBF to KFA through KFHO (“PPS-2 Facility”).*

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

PT Kimia Farma Tbk dan Entitas Anak (KAEF) (lanjutan)

b. Perubahan anggaran dasar pada KAEF yang terakhir dengan Akta No. 07 tanggal 8 Januari 2026 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA Notaris di Jakarta mengenai:

a). Perubahan hak-hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna.

b). Perubahan Anggaran Dasar KAEF dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan:

i. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);

ii. Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BPBUMN) No. S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar; dan

iii. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar ini antara lain mencakup perubahan nama KAEF untuk mengembalikan nomenklatur Perusahaan Perseroan.

Keputusan pemegang saham ini telah disetujui dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0006647.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 6 Februari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034397 tanggal 6 Februari 2026.

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

PT Kimia Farma Tbk and Its Subsidiaries (KAEF) (continued)

b. The latest amendment to KAEF's Articles of Association was made pursuant to Deed No. 07 dated January 8, 2026, drawn up before Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notary in Jakarta, concerning:

a). Changes to the special rights of Series A Dwiwarna shareholders.

b). Amendments to KAEF Articles of Association in order to align with the following regulations:

i. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as most recently amended by Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (the "UU BUMN");

ii. Letter of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP-BUMN) No. S-23/BPU/10/2025 dated October 28 2025 regarding Amendments to the Articles of Association; and

iii. Prevailing laws and regulations in the Capital Market sector. These amendments to the Articles of Association include, among others, changes to KAEF name to reinstate its nomenclature as a Persero Company.

These shareholders' resolutions have been approved and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced by Decree No. AHU-0006647.AH.01.02.TAHUN 2026 dated February 6, 2026 and the Acknowledgement of Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0034397 dated February 6, 2026.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

Proses pengalihan Aset ke BRIN

Sebagai tindak lanjut dari *Forum Company Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2024, yang dihadiri oleh BRIN, Jamdatun, BPK, DJKN Kementerian Keuangan, BAPETEN, Kementerian BUMN, Perusahaan, dan PT INUKI, disampaikan bahwa tidak terdapat kesepakatan dalam forum tersebut. BRIN diminta untuk mengajukan permohonan pendapat hukum kepada Jamdatun.

PT INUKI telah menyampaikan permohonan pendapat hukum kepada Jamdatun pada tanggal 7 Februari 2025.

Berdasarkan LO JAMDATUN untuk INUKI, pengalihan aset tidak menimbulkan risiko hukum baik dalam ranah hukum administrasi negara maupun hukum pidana.

Tanggal 26 Juni 2025, diadakan Rapat atas undangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan agenda Pembahasan mekanisme pengalihan hibah aset PT INUKI kepada BRIN.

Berdasarkan keputusan rapat tersebut BRIN berkirim surat kepada Jamdatun untuk memohon Pendapat Hukum dan *Legal Assistance* terkait Penerimaan Aset PT INUKI dan Mitigasi Risiko Hukum terkait Pelimbahan Dekontaminasi Limbah Radioaktif. BRIN memohon pendapat hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terkait Mitigasi Risiko Kerugian Negara dan Penyalahgunaan Wewenang serta Legitimasi ”Kedaruratan” dan Kewenangan BRIN. Meskipun LO JAMDATUN ke BRIN telah terbit pada bulan Oktober 2025 namun hingga tanggal 31 Desember 2025, belum terdapat informasi resmi dari BRIN ke INUKI atas tindak lanjut dari LO JAMDATUN ke BRIN tersebut dikarenakan terdapat proses koordinasi internal di BRIN terlebih dahulu.

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

Asset Transfer Process to BRIN

As a follow-up to the Focus Company Discussion (FGD) held on December 9, 2024, which was attended by BRIN, the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun), the Audit Board of Indonesia (BPK), the Directorate General of State Assets Management (DJKN) of the Ministry of Finance, BAPETEN, the Ministry of State-Owned Enterprises, the Company, and PT INUKI, it was concluded that no agreement was reached during the forum. BRIN was requested to submit a legal opinion request to Jamdatun.

PT INUKI submitted the request for a legal opinion to Jamdatun on February 7, 2025.

Based on the Legal Opinion (LO) from JAMDATUN (Deputy Attorney General for Civil and State Administrative Affairs) for INUKI, the transfer of assets does not pose any legal risks within the realms of either administrative law or criminal law.

On June 26, 2025, a meeting was held at the invitation of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to discuss the mechanism for the transfer of asset grants from PT INUKI to BRIN.

Based on the decision of the meeting, BRIN sent a letter to Jamdatun to request a Legal Opinion and Legal Assistance regarding the Acceptance of PT INUKI Assets and Legal Risk Mitigation related to Radioactive Waste Decontamination Waste. BRIN requested Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN)'s legal opinion regarding the Mitigation of State Loss Risks and Abuse of Authority as well as the Legitimacy of "Emergency" and BRIN's Authority. Although JAMDATUN's LO to BRIN was issued in October 2025, as of December 31, 2025, there has been no official information from BRIN to INUKI regarding the follow-up to JAMDATUN's LO to BRIN due to an internal coordination process at BRIN first.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (lanjutan)

Proses pengalihan Aset ke BRIN (lanjutan)

PT INUKI juga telah mengajukan persetujuan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Persediaan ke Pemegang Saham dan pada tanggal 3 Desember 2025, telah terbit Persetujuan dari Pemegang Saham untuk pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Persediaan PT INUKI kepada BRIN dengan No. 63 Tahun 2025 dan No. KEP-002.03/DIR/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 Tentang Persetujuan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Persediaan PT Industri Nuklir Indonesia.

PT INUKI terus melaksanakan diskusi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelanjutan proses pengalihan aset kepada BRIN.

PT INUKI sudah mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Mediasi ke Jamdatun pada tanggal 2 Februari 2026 dan sesuai hasil rapat dengan BPK tanggal 12 Februari 2026 PT Danantara Aset Management (Persero) diminta untuk melakukan pendanaan kegiatan pelimbahan dan dekontaminasi yang diperkirakan biayanya sebesar Rp70 miliar. Selanjutnya PT INUKI sudah mengirimkan surat Perihal: Permohonan Pendanaan PT Danantara Aset Management (Persero) ke Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) beserta kajiannya pada tanggal 19 Februari 2026.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Perubahan anggaran dasar pada INAF yang terakhir dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Februari 2026 dari Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn. notaris di Jakarta mengenai:

a). Perubahan hak-hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna.

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (continued)

Asset Transfer Process to BRIN (continued)

PT INUKI also submitted a request for the approval of the Write-off and/or Transfer of Fixed Assets and Inventories to the Shareholders. On December 3, 2025, the Shareholders' Approval for the transfer of PT INUKI's Fixed Assets and Inventories to BRIN was issued under No. 63 of 2025 and No. KEP-002.03/DIR/XII/2025, dated December 3, 2025, concerning the Approval for the Write-off and/or Transfer of Fixed Assets and Inventories of PT Industri Nuklir Indonesia.

PT INUKI continues to conduct discussions and coordinate with relevant stakeholders to support the continuation of the asset transfer process to BRIN.

PT INUKI has submitted a Mediation Facility Request Letter to Jamdatun on February 2, 2026 and according to the results of the meeting with the BPK on February 12, 2026: PT Danantara Aset Management (Persero) was asked to fund waste and decontamination activities which are estimated to cost Rp70 billion. Furthermore, PT INUKI has sent a letter Subject: Request for Funding from PT Danantara Aset Management (Persero) to the President Director of PT Bio Farma (Persero) along with its study on February 19, 2026.

PT Indofarma Tbk (INAF)

The latest amendment to INAF Articles of Association was made pursuant to Notarial Deed No. 13 dated February 20, 2026, of Notary Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn. notary in Jakarta, concerning:

a). Changes to the special rights of Series A Dwiwarna shareholders.

55. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar pada INAF yang terakhir dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Februari 2026 dari Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn. notaris di Jakarta mengenai: (lanjutan)

b). Perubahan Anggaran Dasar INAF dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan:

i. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);

ii. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar ini antara lain mencakup perubahan nama INAF Perseroan.

Keputusan pemegang saham ini telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016668.AH.01.02 tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026.

55. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

The latest amendment to INAF Articles of Association was made pursuant to Notarial Deed No. 13 dated February 20, 2026, of Notary Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn. notary in Jakarta, concerning: (continued)

b). Amendments to INAF Articles of Association in order to align with the following regulations:

i. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as most recently amended by Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (the "UU BUMN");

ii. Laws and regulations in the Capital Market sector. These amendments to the Articles of Association also include, among others, changes to the INAF's corporate name.

These shareholders' resolutions have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0016668.AH.01.02 dated March 11, 2026.

56. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) INAF

Proses PKPU INAF dimulai pada tanggal 28 Maret 2024 dan berakhir dengan keputusan Homologasi tertanggal 25 Maret 2025, keputusan tersebut tertuang dalam Rencana Perdamaian yang mencakup 3 skema penyelesaian dengan para kreditur, sebagai berikut:

a. *Cash Flow Available for Debt Service* (CFADS);

b. Hasil penjualan Aset Jaminan Produksi dan/atau Nonproduksi; dan

c. Hasil penjualan Aset Nonjaminan.

Urutan prioritas pembayaran kepada masing-masing tipe kreditur bersifat *waterfall*, dimana Kreditur Tipe B mendapatkan prioritas pertama dari sisa kas operasi, diikuti Tipe C, D, E, A, dan Kreditur Tidak Terdaftar.

56. SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) INAF

The INAF's PKPU process started on March 28, 2024 and was ended with a Homologation decision on March 25, 2025, which set out in the Composition Plan, covering the 3 settlement schemes with creditors, are as follows:

a. Cash Flow Available for Debt Service (CFADS);
b. Proceeds from the sale of Production and/or Non-Production Collateral Assets; and
c. Proceeds from the sale of Non-Collateral Assets.

The order of payment priority for each type of creditor follows a waterfall mechanism, under which Type B Creditors receive first priority from the remaining operating cash, followed by Type C, D, E, A, and Unregistered Creditors.

56. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) INAF (lanjutan)

Rincian skema penyelesaian untuk masing-masing jenis kewajiban atau kelompok kreditur adalah sebagai berikut:

Tipe Kreditur	Skema Penyelesaian
A	Merupakan kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan atas Aset Jaminan Produksi dan/atau Nonproduksi. Penyelesaian pembayaran sampai terjualnya Aset Jaminan Produksi dan/atau Nonproduksi.
B	Merupakan kreditur konkuren dengan nilai tagihan kurang dari Rp200.000. Penyelesaian pembayaran 6 bulan *(bullet payment*) dari kas debitur dan/atau sisa kas kegiatan operasi terbatas.
C	Merupakan kreditur konkuren dengan nilai tagihan Rp200.000 sampai dengan Rp1.000.000. Penyelesaian pembayaran 1 tahun 6 bulan sejak tanggal efektif atau setelah Tipe B lunas (mana lebih cepat) dari penjualan Aset Nonjaminan dan sisa kas operasi terbatas.
D	Kreditur konkuren dengan nilai tagihan Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Penyelesaian pembayaran 10 tahun sejak tanggal efektif atau setelah Tipe C lunas (mana lebih cepat) dari sisa kas kegiatan operasi terbatas dengan prioritas ke-3.
E	Kreditur konkuren dengan nilai tagihan lebih dari Rp5.000.000. Penyelesaian pembayaran 15 tahun sejak tanggal efektif atau setelah Tipe D lunas (mana lebih cepat) dari sisa kas kegiatan operasi terbatas dengan prioritas ke-4.

56. SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) INAF (continued)

The details of the settlement scheme for each type of obligation or group of creditors are as follows:

Type of Creditors	*Settlement Scheme*
A	*Represents secured creditors holding in rem security rights over Production and/or Non-Production Collateral Assets. Settlement of payment until the sale of the Production and/or Non-Production Collateral Assets.*
B	*Represents concurrent creditors with claims of less than Rp200,000.* *Payment settlement within 6 months through a bullet payment from the Debtor's cash and/or remaining cash from limited operating activities.*
C	*Represents concurrent creditors with claims ranging from Rp200,000 to Rp1,000,000.* *Payment settlement within 1 year and 6 months from the effective date, or after Type B Creditors have been fully repaid, whichever occurs earlier, from the sale of Non-Collateral Assets and remaining cash from limited operating activities.*
D	*Concurrent creditors with claims ranging from Rp1,000,000 to Rp5,000,000.* *Payment settlement within 10 years from the effective date, or after Type C Creditors have been fully repaid, whichever occurs earlier, from the remaining cash from limited operating activities, with third priority.*
E	*Concurrent creditors with claims exceeding Rp5,000,000.* *Payment settlement within 15 years from the effective date, or after Type D Creditors have been fully repaid, whichever occurs earlier, from the remaining cash from limited operating activities, with fourth priority.*

56. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) INAF (lanjutan)

Rincian skema penyelesaian untuk masing-masing jenis kewajiban atau kelompok kreditur adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tipe Kreditur	Skema Penyelesaian
Tidak Terdaftar	Kreditur yang tidak terdaftar sebagai kreditur dari debitur dan daftar piutang tetap tanggal 3 Juni 2024.

56. SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) INAF (continued)

The details of the settlement scheme for each type of obligation or group of creditors are as follows: (continued)

Type of Creditors	*Settlement Scheme*
Unregistered	*Creditors who are not registered as creditors of the Debtor in the final list of claims dated June 3, 2024.*

Tipe	Nilai tercatat sebelum Restrukturisasi/ *Carrying amount before Restructuring*	Keuntungan (kerugian) modifikasi utang/ *Gain (loss) on debt modification*: Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Keuntungan (kerugian) modifikasi utang/ *Gain (loss) on debt modification*	Amortisasi/ *Amortization*: Beban Keuangan/ *Finance Costs*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Beban Keuangan/ *Finance Costs*	Nilai tercatat setelah restrukturisasi/ *Carrying amount after restructuring*	*Type*
Kreditur A	596.348.299.336	150.289.712.888	33.321.770.147	12.302.390.882	19.756.561.605	4.413.610.898	449.209.379.686	*Creditors A*
Kreditur D	37.810.697.650	-	11.161.517.553	-	-	1.254.447.784	27.903.627.881	*Creditors D*
Kreditur E	54.394.763.329	3.152.479.761	29.224.068.789	3.132.596.857	113.069.601	1.586.534.841	26.428.479.363	*Creditors E*

Pada tanggal 31 Desember 2025, INAF tidak mengakui keuntungan dari perhitungan dampak restrukturisasi untuk Kreditur B dan Kreditur C dikarenakan jatuh tempo untuk kedua kreditur tersebut kurang dari satu tahun. Seluruh kewajiban kepada Kreditur B telah dilunasi pada tanggal 25 September 2025 sebesar Rp3.448.558.

Pada tanggal 25 Maret 2026, INAF telah melakukan pembayaran kepada Kreditur C sebesar Rp400.000.000 (nilai penuh) dari total kewajiban sebesar Rp7.130.821.

As of December 31, 2025, INAF did not recognize any gain from the calculation of restructuring impact for Creditor B and Creditor C, as the maturity of both creditors is less than one year. All obligations to Creditor B were fully settled on September 25, 2025 amounting to Rp3,448,558.

On March 25, 2026, INAF made a payment to Creditor C amounting to Rp400,000,000 (full amount) out of the total outstanding obligations of Rp7,130,821.

57. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi tertentu telah dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

57. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain reclassifications have been made to the statements as of December 31, 2024 and for the year then ended consolidated financial statements to enhance comparability with the statements as of December 31, 2025 and for the year ended consolidated financial statements.

	2024			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Pajak dibayar di muka	992.832.481	(95.401.070)	897.431.411	*Prepaid taxes*
Aset pengembalian dana	38.894.545	(38.894.545)	--	*Right-of-return assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Taksiran tagihan pajak	45.325.735	95.401.070	140.726.805	*Estimated claims for tax refund*
Aset tetap	16.765.271.667	(240.000)	16.765.031.667	*Fixed assets*
Properti investasi	1.118.651.820	240.000	1.118.891.820	*Investment properties*
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain - pihak ketiga	595.178.615	149.282.958	744.461.573	*Other payables - third parties*
Beban yang masih harus dibayar	872.894.423	53.614.204	926.508.627	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	587.393.991	(202.897.163)	384.496.828	*Short-term employee benefit liabilities*
Kewajiban kontrak	42.968.205	19.172.524	62.140.729	*Contract liabilities*
Liabilitas pengembalian dana	58.067.068	(58.067.068)	--	*Refund liabilities*

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK

PT Indofarma Tbk (INAF)

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa INAF akan melanjutkan kegiatan usahanya *(going concern)*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, INAF mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp77.989.297 (INAF saja) dan Rp334.492.187 (konsolidasian), mengakibatkan defisiensi ekuitas masing-masing sebesar Rp706.942.612 (INAF saja) dan Rp1.144.041.809 (konsolidasian). Liabilitas jangka pendek telah melampaui total aset lancar sebesar Rp513.421.631 (INAF saja) dan Rp1.373.066.079 (konsolidasian).

Pada akhir periode pelaporan, INAF mengalami kerugian pada laporan arus kas pada aktivitas operasi sebesar Rp209.981.137. Kondisi ini, antara lain, menimbulkan keraguan terhadap kemampuan INAF untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, INAF sudah mengajukan Rencana Restrukturisasi INAF kepada Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) dengan Surat No. 1636/DIR/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025, sebagai dasar pertimbangan utama sehubungan dengan permohonan dukungan finansial kepada PT Danantara Asset Management (Persero) dimana PT Indofarma Tbk sudah mengajukan kebutuhan pendanaan sebesar Rp390,5 miliar dengan peruntukan untuk Modal Kerja Rp170,3 miliar dan Penyelesaian Kewajiban kepada Karyawan Rp220,2 miliar.

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES

PT Indofarma Tbk (INAF)

The financial statements have been prepared on the assumption that INAF will continue as a going concern. For the years ended December 31, 2025 and 2024, INAF incurred losses of Rp77,989,297 (INAF only) and Rp334,492,187 (consolidated), respectively, resulting in equity deficiencies of Rp706,942,612 (INAF only) and Rp1,144,041,809 (consolidated), respectively. Current liabilities exceeded total current assets by Rp513,421,631 (INAF only) and Rp1,373,066,079 (consolidated), respectively.

At the end of the reporting period, INAF recorded a negative cash flow from operating activities amounting to Rp209,981,137. These conditions, among others, raise substantial doubt about INAF's ability to continue as a going concern.

In relation to the above matter, INAF has submitted a Corporate Restructuring Plan to the President Director of PT Bio Farma (Persero) through Letter No. 1636/DIR/XII/2025 dated December 5, 2025, as the primary basis for consideration in connection with the request for financial support from PT Danantara Asset Management (Persero), whereby PT Indofarma Tbk has proposed funding requirements amounting to Rp390.5 billion, allocated for Working Capital of Rp170.3 billion and Settlement of Employee Obligations of Rp220.2 billion.

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Rencana restrukturisasi keuangan INAF telah mulai dilakukan pada tanggal 15 September 2025 dengan melaksanakan program *rightsizing* karyawan untuk mengurangi beban operasional INAF. Program *rightsizing* karyawan yang dilakukan berdampak signifikan terhadap pengurangan beban karyawan sebesar kurang lebih 80%. Hal ini sejalan dengan rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan INAF yang nantinya akan dijalankan dalam 10 tahun ke depan dengan target untuk memperbaiki profitabilitas INAF yang ditandai dengan pencapaian EBITDA senilai Rp150,1 miliar, dan *net profit* senilai Rp97,5 miliar.

Strategi restrukturisasi yang dijalankan diharapkan dapat membawa INAF keluar dari kondisi *distress* menuju kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan mampu kembali memberikan nilai tambah bagi pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya.

Strategi restrukturisasi INAF

Arah strategis INAF dalam mencapai tujuan bisnisnya melalui penetapan sasaran, strategi usaha, kebijakan, serta program kegiatan yang terencana. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh inisiatif INAF selaras dengan visi dan misi, sekaligus adaptif terhadap dinamika pasar dan tantangan industri dengan strategi sebagai berikut:

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

INAF financial restructuring plan commenced on September 15, 2025 through the implementation of an employee rightsizing program aimed at reducing INAF operational expenses. The employee rightsizing program has had a significant impact on reducing employee expenses by approximately 80%. This initiative is in line with the strategic plan set out in INAF Recovery Plan, which is intended to be implemented over the next 10 years with the objective of improving INAF profitability, as reflected by targeted EBITDA of Rp150.1 billion and net profit of Rp97.5 billion.

The restructuring strategy being implemented is expected to enable INAF to recover from its distressed condition and achieve healthy and sustainable performance, while restoring its ability to generate added value for shareholders and other stakeholders.

INAF restructuring strategy

INAF strategic direction in achieving its business objectives through the establishment of targets, business strategies, policies, and planned activity programs. Its primary focus is to ensure that all INAF initiatives are aligned with its vision and mission, while remaining adaptive to market dynamics and industry challenges through the following strategies:

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Strategi restrukturisasi INAF (lanjutan)

Arah strategis INAF dalam mencapai tujuan bisnisnya melalui penetapan sasaran, strategi usaha, kebijakan, serta program kegiatan yang terencana. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh inisiatif INAF selaras dengan visi dan misi, sekaligus adaptif terhadap dinamika pasar dan tantangan industri dengan strategi sebagai berikut: (lanjutan)

a. Penataan ulang portofolio bisnis

Strategi ini didasari dari penurunan kinerja bisnis sebagai konsekuensi dari strategi INAF yang melakukan pergeseran fokus dari produk farmasi (Farma) ke segmen herbal dan alat kesehatan (Alkes). Perubahan arah ini dilakukan dengan tujuan diversifikasi portofolio dan memanfaatkan tren pasar yang meningkat terhadap produk alami dan kesehatan preventif. Namun, proses transisi tersebut belum diiringi dengan riset pasar yang matang dan pemetaan kebutuhan konsumen yang komprehensif. Akibatnya, momentum penjualan produk farmasi yang sebelumnya sudah berjalan mengalami penurunan, sementara produk baru di kategori herbal dan Alkes belum mampu memberikan kontribusi penjualan yang setara.

Selain itu, pasar herbal dan Alkes memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar farmasi, baik dari sisi regulasi, pola distribusi, maupun tingkat kepercayaan pelanggan. Tanpa adanya kepastian pasar yang berkelanjutan serta strategi pemasaran yang adaptif, upaya *switching* ini justru menciptakan ketidakstabilan dalam kinerja keuangan dan operasional INAF. Untuk mengembalikan pertumbuhan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah strategi produk, termasuk validasi potensi pasar, penguatan *channel* distribusi, dan konsistensi komunikasi merek agar transisi menuju segmen baru dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

INAF restructuring strategy (continued)

INAF strategic direction in achieving its business objectives through the establishment of targets, business strategies, policies, and planned activity programs. Its primary focus is to ensure that all INAF initiatives are aligned with its vision and mission, while remaining adaptive to market dynamics and industry challenges through the following strategies: (continued)

a. Rebalancing business portfolio

This strategy was driven by the decline in business performance as consequence of INAF strategic shift in focus from pharmaceutical products (Pharma) to the herbal and medical devices (MedTech) segments. This change in direction was intended to diversify the Company's portfolio and capitalize on the growing market trend toward natural and preventive healthcare products. However, the transition process was not supported by adequate market research and comprehensive consumer needs mapping. As a result, the sales momentum of the pharmaceutical products that had previously been established declined, while the new products in the herbal and MedTech categories were not yet able to generate equivalent sales contributions.

In addition, the herbal and medical devices (MedTech) markets have different characteristics from the pharmaceutical market, particularly in terms of regulations, distribution patterns, and customer trust levels. Without sustainable market certainty and an adaptive marketing strategy, this switching effort instead created instability in INAF financial and operational performance. To restore growth, a comprehensive evaluation of the product strategy direction is required, including validation of market potential, strengthening of distribution channels, and consistency in brand communication, so that the transition toward the new segments can be carried out more effectively and sustainably.

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Strategi restrukturisasi INAF (lanjutan)

a. Penataan ulang portofolio bisnis (lanjutan)

Strategi utama:

- Optimalisasi sektor pemerintah sebagai kontributor pendapatan terbesar INAF;
- Pengembangan produk kompetitif pada segmen reguler, dengan fokus kelas terapi yang memiliki pertumbuhan tinggi;
- *Strategic partnership* dengan *marketing company* (Yafefa), vendor, dan distributor nasional (KFTD, PT Kebayoran Pharma, PT Mensa Bina Sukses, dan PT Bintang Kencana Arta);
- Akuisisi *Key Account Management* (KAM) andal untuk segmen Pemerintah, Rumah Sakit, Nonpemerintah, Institusi, dan Reguler; dan
- Peningkatan ekspor ke klien eksisting di negara Singapura dan Afghanistan, serta inisiatif *cross-selling* dengan INAF untuk klien di negara-negara Afrika.

b. Lean manufacturing

Penerapan strategi *lean manufacturing* menjadi prioritas untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Langkah ini penting mengingat rasio *cost to revenue* INAF yang melebihi 100%, sebagai dampak dari penurunan kinerja bisnis yang tidak diimbangi dengan optimalisasi biaya, terutama pada aspek sumber daya manusia dan aktivitas operasional rutin. Pendekatan *lean* diharapkan dapat mempercepat alur produksi, serta memperbaiki profitabilitas INAF secara berkelanjutan.

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

INAF restructuring strategy (continued)

a. Rebalancing business portfolio (continued)

Main strategies:

- *Optimization of the government sector as the largest revenue contributor of INAF;*
- *Development of competitive products in the regular segment, with a focus on highgrowth therapeutic classes;*
- *Strategic partnerships with marketing companies (Yafefa), vendors, and national distributors, including KFTD, PT Kebayoran Pharma, PT Mensa Bina Sukses, and PT Bintang Kencana Arta;*
- *Recruitment of highly capable Key Account Management (KAM) personnel for the Government, Hospital, Non-Government, Institutional, and Regular segments; and*
- *Expansion of exports to existing clients in Singapore and Afghanistan, as well as cross-selling initiatives with INAF for clients in African countries.*

b. Lean manufacturing

The implementation of a lean manufacturing strategy has become a priority to reduce operational costs and improve production process efficiency. This measure is essential considering the INAF's cost-to-revenue ratio has exceeded 100%, as a result of declining business performance that has not been accompanied by cost optimization, particularly in relation to human resources and routine operational activities. The lean approach is expected to accelerate production flows and improve INAF profitability on a sustainable basis.

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Strategi restrukturisasi INAF (lanjutan)

b. *Lean manufacturing* (lanjutan)

Strategi utama:

- Program Kewajiban Hukum pasca Homologasi (*rightsizing* karyawan) pada tahun 2025 untuk efisiensi beban tenaga kerja, INAF mendapatkan pinjaman guna mendukung efisiensi biaya operasi sebagaimana dimuat dalam Putusan Homologasi PT Indofarma Tbk, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 jo. No. 74/PDT.SUSPKPU/2024/ PN.NIAGA.JKT/PS T dan berlaku efektif sejak 25 Maret 2025 ("Putusan Homologasi"). INAF harus memprioritaskan dan oleh karenanya memiliki kewajiban untuk segera melaksanakan efisiensi biaya operasi. Efisiensi biaya operasi ini meliputi efisiensi pada seluruh komponen biaya operasi yang tidak efisien dan produktif, guna mengurangi biaya dan menambah profitabilitas, serta penyesuaian jumlah tenaga kerja dengan model bisnis terbatas yang akan dijalankan sesuai Putusan Homologasi, sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung secara lebih efisien. Dengan pelaksanaan program ini, INAF diharapkan dapat menata beban usaha secara lebih proporsional sekaligus menjaga kelangsungan usaha di masa mendatang. Pada tanggal 15 September 2025 INAF telah melaksanakan *rightsizing* terhadap karyawan dengan jumlah 413 orang, sehingga praktis per tanggal 15 September 2025 jumlah karyawan adalah 3 orang. Periode Oktober 2025 dilakukan rekrutmen karyawan PKWT sehingga per 31 Desember 2025 total jumlah karyawan menjadi 44 orang. Pelaksanaan *rightsizing* tersebut merupakan *key initiatif* restrukturisasi keuangan untuk efisiensi beban operasional dan juga sebagai wujud dari *rebalancing business* portofolio;

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

INAF restructuring strategy (continued)

b. Lean manufacturing (continued)

Main strategies:

- *Legal Obligation Program following the Homologation (employee rightsizing) in 2025 aimed at improving labor cost efficiency. INAF obtained financing to support operational cost efficiency as stipulated in the Homologation Decision of PT Indofarma Tbk, which has obtained permanent legal force through Decision No. 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 in conjunction with No. 74/PDT.SUSPKPU/2024//PN.NIAGA.JKT/PST and became effective on March 25, 2025 ("Homologation Decision"). INAF is required to prioritize and therefore has an obligation to immediately implement operational cost efficiency measures. Such operational cost efficiency includes optimization across all inefficient and unproductive operating cost components in order to reduce costs and improve profitability, as well as adjustments to the workforce size in line with the limited business model to be implemented pursuant to the Homologation Decision, thereby enabling operational activities to be carried out more efficiently. Through the implementation of this program, INAF is expected to manage operating expenses more proportionately while maintaining business continuity in the future. On September 15, 2025, INAF carried out rightsizing involving 413 employees, resulting in a workforce of only 3 employees as of September 15, 2025. During October 2025, INAF recruited fixed-term contract employees (PKWT), bringing the total number of employees to 44 as of December 31, 2025. The implementation of the rightsizing initiative constituted a key financial restructuring initiative aimed at improving operational cost efficiency and also represented a form of business portfolio rebalancing;*

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Indofarma Tbk (INAF) (lanjutan)

Strategi restrukturisasi INAF (lanjutan)

b. *Lean manufacturing* (lanjutan)

Strategi utama: (lanjutan)

- *Streamlining business process* untuk meningkatkan efisiensi operasional, didukung oleh efisiensi jumlah divisi dari 20 menjadi 6 divisi; dan
- Investasi teknologi untuk pemenuhan *compliance*, efisiensi biaya pabrikasi hingga 15%, serta menjaga operasional tetap berjalan dua *shift*.

c. Divestasi aset nonjaminan dan jaminan nonproduktif

Pada tanggal 8 Agustus 2024, telah ditandatangani Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) INAF dengan para krediturnya, dimana salah satu metode pelunasan kewajiban akan dilakukan melalui divestasi aset.

Berkaitan dengan hal di atas maka INAF berencana untuk melakukan pemindahtanganan aset melalui penjualan untuk aset-aset INAF nonjaminan yang berlokasi di Bekasi, Tangerang, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Medan, Batam, Pontianak, dan Makassar, serta aset jaminan nonproduktif yang berlokasi di Jl. Tambak No. 2 Jakarta.

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Indofarma Tbk (INAF) (continued)

INAF restructuring strategy (continued)

b. Lean manufacturing (continued)

Main strategies: (continued)

- *Streamlining business processes to improve operational efficiency, supported by the reduction in the number of divisions from 20 divisions to 6 divisions; and*
- *Technology investment to support compliance requirements, achieve manufacturing cost efficiencies of up to 15%, and maintain operational activities on a two-shift basis.*

c. Divestment of non-collateral assets and non-productive collateral assets

On August 8, 2024, the Court Decision approving the Composition Agreement (Homologation) between INAF and its creditors was signed, whereby one of the methods for settling the INAF's obligations will be carried out through asset divestment.

In relation to the above matter, INAF plans to transfer assets through the sale of INAF non-collateral assets located in Bekasi, Tangerang, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Medan, Batam, Pontianak, and Makassar, as well as non-productive collateral assets located at Jl. Tambak No. 2, Jakarta.

58. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

INUKI telah mengalami kerugian komprehensif sebesar Rp9.652.989 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan liabilitasnya melebihi jumlah asetnya sehingga menimbulkan defisiensi modal sebesar Rp89.925.615 pada tanggal 31 Desember 2025. Rugi neto sebagian besar disebabkan oleh kerugian operasional. Laporan keuangan INUKI tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari hasil ketidakpastian ini.

Untuk mengatasi kondisi ini, manajemen INUKI mengambil tindakan dan rencana berikut:

a. Rencana restrukturisasi

- Penghapusbukuan dan/ atau pemindahtanganan aset INUKI
  INUKI bermaksud untuk melakukan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan aset kepada BRIN dan pihak selain BRIN.

- Restrukturisasi keuangan
  Program restrukturisasi keuangan dalam rangka pemberesan dan penyelesaian kewajiban-kewajiban INUKI seperti, penyelesaian kewajiban kepada Direksi dan Komisaris, serta vendor.

b. Rencana *end-state* INUKI

Berdasarkan Rencana Penyehatan INUKI yang telah dipetakan dalam 4 opsi sementara adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha baru di bidang produk *Cyclotron*, yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan medis;
- Menjalankan usaha baru sebagai Pusat Pelatihan (*Training Center)* yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi nuklir dan bidang terkait lainnya;
- Penggabungan ke entitas lain di Grup Bio Farma; atau
- Skema lainnya.

58. GOING CONCERN ISSUES OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

INUKI incurred a comprehensive loss of Rp9,652,989 for the year ended December 31, 2025, and its liabilities exceeded its assets, resulting in a capital deficiency of Rp89,925,615 as of December 31, 2025. The net loss was mainly driven by operating losses. The financial statements of INUKI do not include any adjustments that may arise from the outcome of this uncertainty.

To address this condition, INUKI's management has taken the following actions and plans:

a. The restructuring plan

- *Write-off and/or transfer of the INUKI's assets*
  INUKI intends to write-off and/or transfer assets to BRIN and parties other than BRIN.

- *Financial restructuring*
  Financial restructuring program in order to settle and resolve INUKI's obligations, including settlement of liabilities to Directors and Commissioners, as well as vendors.

b. INUKI's end-state plan

Based on INUKI Recovery Plan, which has been outlined into 4 preliminary options, as follows:

- *Develop a new line of business focused on Cyclotron products, which utilize nuclear technology for medical purposes;*
- *Develop a new line of business by establishing a Training Center, aimed at enhancing human resource capabilities in nuclear technology and related fields;*
- *Merger into another entity in the Bio Farma Group; or*
- *Other schemes.*

59. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Grup menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, informasi keuangan tambahan PT Bio Farma (Persero) (Entitas Induk) ini, di mana investasi pada entitas anak dicatat dengan metode biaya, disajikan untuk menganalisis hasil usaha entitas induk. Informasi keuangan tambahan PT Bio Farma (Persero) (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I - Lampiran IV) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya.

59. ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION

The Group issues consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT Bio Farma (Persero) (the Parent Entity), in which investments in subsidiaries are accounted for using the cost method, is presented to analyze the results of operations of the parent entity. The following supplementary financial information of PT Bio Farma (Persero) (the Parent Entity) (Appendix I - Appendix IV) should be read in conjunction with the Company's consolidated financial statements and those of its subsidiaries.

60. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi pada tanggal 12 Juni 2026.

60. THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on June 12, 2026.

LAMPIRAN I
PT BIO FARMA (PERSERO)
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT I
PT BIO FARMA (PERSERO)
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	3.059.218.542	3.616.751.421	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	414.866.748	189.500.402	*Trade receivables - net*
Bagian lancar piutang lain-lain - neto	756.531.918	702.436.077	*Current portion of Other receivables - net*
Persediaan - neto	3.008.168.244	2.476.852.120	*Inventories - net*
Uang muka pembelian	144.760.263	132.028.522	*Advances for purchases*
Pajak dibayar di muka	458.250.715	663.894.392	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	4.470.005	8.512.754	*Prepaid expenses*
Aset kontrak	90.118.837	39.722.855	*Contract assets*
Aset lancar lainnya	--	986.236	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**7.936.385.272**	**7.830.684.779**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Bagian tidak lancar piutang lain-lain - neto	91.022.928	162.547.304	*Non-current portion of other receivables*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	20.999.392	9.975.769	*Financial assets at fair value through profit or loss*
Penyertaan jangka panjang	12.503.666.020	12.503.666.020	*Long-term investment*
Aset pajak tangguhan - neto	361.798.990	335.414.572	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap - neto	7.413.441.064	7.138.333.612	*Fixed assets - net*
Aset tidak berwujud - neto	224.549.740	88.262.135	*Intangible assets - net*
Aset hak guna	45.585.889	66.933.112	*Right-of-use assets*
Aset agrikultur dan pengembangan	4.145.015	2.147.407	*Agricultural and development assets*
Aset tidak lancar lainnya - neto	4.080.353	4.106.591	*Other non-current assets - net*
Jumlah aset tidak lancar	**20.669.289.391**	**20.311.386.522**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET	**28.605.674.663**	**28.142.071.301**	***TOTAL ASSETS***

LAMPIRAN I
PT BIO FARMA (PERSERO)
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT I
PT BIO FARMA (PERSERO)
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	905.528.451	723.818.611	*Trade payables*
Beban yang masih harus dibayar	76.746.363	93.736.271	*Accrued expenses*
Utang pajak	36.513.187	47.375.509	*Taxes payables*
Utang bank jangka pendek	1.041.286.940	862.000.000	*Short-term bank loans*
Liabilitas kontrak	16.296.960	20.384.757	*Contract liabilities*
Bagian liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current portion of long-term liabilities:*
Utang bank jangka panjang	226.486.564	201.559.917	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	21.125.599	40.204.104	*Lease liabilities*
Liabilitas lancar lainnya	188.353.996	252.258.770	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**2.512.338.061**	**2.241.337.939**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	536.345.124	487.213.201	*Long-term employee benefit liabilities*
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term liabilities, net of current portion:*
Utang bank jangka panjang	175.518.931	402.005.495	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	11.160.419	24.958.492	*Lease liabilities*
Titipan hibah ditangguhkan	683.217.724	630.173.875	*Deferred grant deposit*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**1.406.242.198**	**1.544.351.063**	***Total non-current liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**3.918.580.259**	**3.785.689.002**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Modal dasar - 61.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.481.279 lembar saham	17.481.279.000	17.481.279.000	*Authorized capital - 61,000,000 shares with par value at Rp1,000,000 (full amount), per share respectively; Issue and fully paid up - 17,481,279 shares*
Komponen ekuitas lainnya	1.993.174.475	2.007.930.686	*Other equity component*
Saldo laba			*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	4.867.172.612	4.449.563.989	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	345.468.316	417.608.623	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**24.687.094.403**	**24.356.382.299**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**28.605.674.663**	**28.142.071.301**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAMPIRAN II
PT BIO FARMA (PERSERO)
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT II
PT BIO FARMA (PERSERO)
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENDAPATAN NETO	5.635.369.200	5.234.477.050	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.488.911.114)	(3.040.555.593)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR	**2.146.458.086**	**2.193.921.457**	***GROSS PROFIT***
Penghasilan lain-lain	452.937.614	565.447.205	*Other income*
Beban penjualan	(238.597.923)	(451.639.289)	*Selling expense*
Beban administrasi dan umum	(1.054.976.990)	(1.072.569.610)	*General and administrative expense*
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans	(666.475.539)	(595.225.719)	*Research, development and surveillance expense*
Beban keuangan	(112.654.305)	(82.845.292)	*Finance expense*
Beban lain-lain	(84.062.712)	(31.134.516)	*Other expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**442.628.231**	**525.954.236**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Pajak kini	(119.382.324)	(159.050.624)	*Current tax*
Pajak tangguhan	22.222.409	50.705.011	*Deferred tax*
Total beban pajak penghasilan - neto	**(97.159.915)**	**(108.345.613)**	***Total income tax expense, net***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**345.468.316**	**417.608.623**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Selisih revaluasi	--	217.148.368	*Revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(18.918.219)	(3.368.641)	*Remeasurement of defined benefit program*
Pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	58.394.031	*Fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	4.162.008	(17.534.295)	*Related income tax*
Total (rugi) penghasilan komprehensif lain	**(14.756.211)**	**254.639.463**	***Total other comprehensive (loss) income***
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**330.712.105**	**672.248.086**	***COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

LAMPIRAN III
PT BIO FARMA (PERSERO)
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

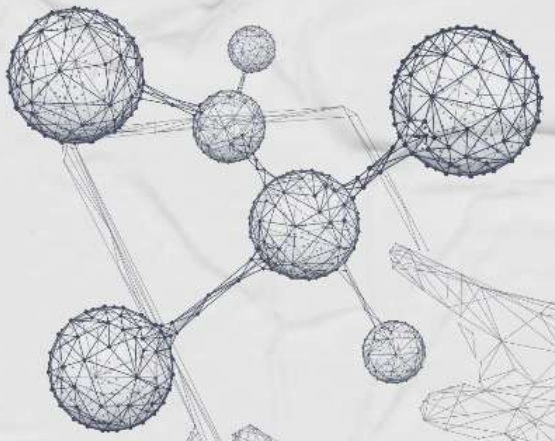
ATTACHMENT III
PT BIO FARMA (PERSERO)
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo laba/ Retained earnings				
	Modal saham/ *Share capital*	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Komponen ekuitas lain/ *Other equity component*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**17.481.279.000**	**4.227.983.136**	**221.580.853**	**1.753.291.223**	**23.684.134.212**	***Balance as of December 31, 2023***
Laba tahun berjalan	--	--	417.608.623	--	417.608.623	*Profit for the year*
Pembagian laba:						*Profit sharing:*
Cadangan	--	221.580.853	(221.580.853)	--	--	*Appropriated retained earnings*
Penghasilan komprehensif lain:						*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja karyawan	--	--	--	(3.368.641)	(3.368.641)	*Remeasurement of employee benefit program*
Surplus revaluasi aset tetap	--	--	--	217.148.368	217.148.368	*Revaluation surplus*
Aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	--	58.394.031	58.394.031	*Financial assets through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	--	--	--	(17.534.295)	(17.534.295)	*Related income tax items that will be not reclassified to profit or loss*
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**17.481.279.000**	**4.449.563.989**	**417.608.623**	**2.007.930.686**	**24.356.382.299**	***Balance as of December 31, 2024***
Laba tahun berjalan	--	--	345.468.316	--	345.468.316	*Profit for the year*
Pembagian laba:						*Profit sharing:*
Cadangan	--	417.608.623	(417.608.623)	--	--	*Appropriated retained earnings*
Penghasilan komprehensif lain:						*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja karyawan	--	--	--	(18.918.219)	(18.918.219)	*Remeasurement of employee benefit program*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	--	--	--	4.162.008	4.162.008	*Related income tax items that will be not reclassified to profit or loss*
Saldo tanggal 31 Desember 2025	**17.481.279.000**	**4.867.172.612**	**345.468.316**	**1.993.174.475**	**24.687.094.403**	***Balance as of December 31, 2025***

LAMPIRAN IV
PT BIO FARMA (PERSERO)
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
PT BIO FARMA (PERSERO)
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	5.414.926.608	5.462.486.871	*Receipts from customers*
Pengeluaran kepada pemasok	(4.119.092.313)	(3.625.464.028)	*Payments to suppliers*
Pengeluaran kepada karyawan	(896.248.405)	(878.022.539)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak	(651.201.610)	(901.893.360)	*Payment of tax*
Penerimaan restitusi pajak	480.568.391	300.774.976	*Receipts from tax restitution*
Klaim asuransi	7.190	5.423	*Insurance claims*
Penerimaan lainnya	11.951.028	26.798.326	*Other receipts*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**240.910.890**	**384.685.669**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(489.061.032)	(1.222.709.068)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud	(146.867.194)	--	*Acquisition of intangible assets*
Penambahan investasi	(10.000.000)	--	*Acquisition of investment*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(645.928.226)**	**(1.222.709.068)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penarikan pinjaman	1.783.332.624	1.945.904.182	*Proceeds from loan*
Pembayaran pinjaman	(1.805.605.601)	(1.376.417.960)	*Payments of loan*
Pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(397.491.209)	(1.208.881.682)	*Payments of loan to related parties*
Penerimaan pinjaman dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	235.212.068	871.663.736	*Receipts of loan from related parties*
Penyertaan Modal Negara	--	244.025.343	*State investment*
Penerimaan bunga	82.510.822	120.713.371	*Receipts from interest*
Pembayaran bunga	(111.042.922)	(53.315.233)	*Payment of interest*
Realisasi hibah	(14.322.011)	54.275.901	*Grant realization*
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(227.406.229)**	**597.967.659**	***Net cash (used in) provided by financing activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(632.423.565)**	**(240.055.741)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas	74.890.686	152.445.399	*Effect of exchange rate differences in cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**3.616.751.421**	**3.704.361.763**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**3.059.218.542**	**3.616.751.421**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***



Biofarma
GROUP

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161
Jawa Barat, Indonesia
Tel : (62)22 203 3755 | Fax : (62)22 204 1306

www.biofarma.co.id
mail@biofarma.co.id